SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimanaa telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kebupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program presiden.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:

a. penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045; dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan meliputi:

a. penyusunan renstra perangkat Daerah, RKPD, renja perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran Daerah;
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Daerah.

Pasal 4

(1) RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
(2) RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN;
    b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
    c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, DAN
    e. BAB V : PENUTUP.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.

b. Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. penyusunan RKPD tahun 2025 masih tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026; dan
b. penyusunan RKPD tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU: 4.71.A./2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuanbagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Rokan Hulu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 48

Daftar Isi

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel..... **iii**
Daftar Gambar ..... **xix**
Daftar Istilah..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN..... **I-1**
1.1 Latar Belakang.....I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya I-6
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.....I-7
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2040 .....I-7
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah I-8
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....I-8
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)....I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....I-9
1.5 Sistematika Penulisan.....I-9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....II-41
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-72
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....II-98
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....II-270
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu II-270
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....II-283
2.2.3 Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2025 - 2030.....II-290
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis.....II-303
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-304
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-319

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi..... III-1
3.1.2 Misi III-4

3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 ..... III-7
3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-12
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029..... III-12
3.2.2 Arah Pembangunan Wilayah III-37
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMN Tahun 2025-2029..... III-37
3.2.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029..... III-48
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pendekatan Spasial..... III-52
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029..... III-57

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah;..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah..... IV-57

BAB V PENUTUP..... V-5
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-5
5.2 Kaidah Pembiayaan V-6
5.3 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah..... V-7
5.4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah..... V-8
5.5 Kesimpulan..... V-9

Daftar Tabel

Tabel II 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-2
Tabel II 2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-5
Tabel II 3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-7
Tabel II 4 Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha) II-8
Tabel II 5 Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-9
Tabel II 6 Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-10
Tabel II 7 Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (ha) II-11
Tabel II 8 Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-14
Tabel II 9 Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-20
Tabel II 10 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-23
Tabel II 11 Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-24
Tabel II 12 Status daya dukung pangan di Kabupaten Rokan Hulu II-25
Tabel II 13 Status daya dukung air di Kabupaten Rokan Hulu II-26
Tabel II 14 Kebutuhan dan Ketersediaan Daya Dukung di Rokan Hulu II-26
Tabel II 15 Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-27
Tabel II 16 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-27
Tabel II 17 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap Air Minum Layak Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-28
Tabel II 18 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-28
Tabel II 19 Surplus/ Minus Produksi dan Kebutuhan Beras II-28
Tabel II 20 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-29
Tabel II 21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-31
Tabel II 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak II-31
Tabel II 23 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Rokan Hulu II-32
Tabel II 24 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-32

Tabel II 25 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kacar (GRK) Provinsi Riau II-33
Tabel II 26 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-33
Tabel II 27 Indeks Resiko Bencana Per Ancaman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-34
Tabel II 28 Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha) II-34
Tabel II 29 Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Kabupaten Rokan Hulu II-35
Tabel II 30 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-36
Tabel II 31 Kepadatan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-39
Tabel II 32 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020 dan 2024 ..... II-40
Tabel II 33 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu II-41
Tabel II 34 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-43
Tabel II 35 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-46
Tabel II 36 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi Perempuan Menikah Usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-54
Tabel II 37 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-55
Tabel II 38 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-55
Tabel II 39 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 s.d 2024 ..... II-57
Tabel II 40 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-58
Tabel II 41 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-59
Tabel II 42 Data Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-59
Tabel II 43 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-63
Tabel II 44 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-64
Tabel II 45 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-65
Tabel II 46 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-65
Tabel II 47 Persentase Penanganan Konflik Sara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-65
Tabel II 48 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu II-67
Tabel II 49 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Rokan Hulu II-67

Tabel II 50 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-68
Tabel II 51 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-68
Tabel II 52 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-69
Tabel II 53 Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 .....II-69
Tabel II 54 Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.....II-70
Tabel II 55 Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-70
Tabel II 56 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-71
Tabel II 57 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2024 .....II-72
Tabel II 58 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten di Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-72
Tabel II 59 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-73
Tabel II 60 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp. Milyar) II-74
Tabel II 61 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp. Milyar) II-75
Tabel II 62 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-77
Tabel II 63 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Rokan hulu II-79
Tabel II 64 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-81
Tabel II 65 Rasio Lulusan S1/S2/ Kabupaten Rokan Hulu S3 Tahun 2020 s.d 2024 .....II-82
Tabel II 66 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024 .....II-83
Tabel II 67 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-83
Tabel II 68 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-84
Tabel II 69 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-84
Tabel II 70 Rencana Kawasan Industri di Kabupaten Rokan Hulu II-85
Tabel II 71 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-86
Tabel II 72 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-86
Tabel II 73 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Rokan Hulu.....II-87

Tabel II 74 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu II-87
Tabel II 75 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-88
Tabel II 76 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-88
Tabel II 77 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-89
Tabel II 78 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-89
Tabel II 79 Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-90
Tabel II 80 Data Backlog Perumahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023 ..... II-90
Tabel II 81 Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) II-91
Tabel II 82 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2020 s.d 2024 ..... II-95
Tabel II 83 Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-97
Tabel II 84 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-98
Tabel II 85 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-98
Tabel II 86 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-99
Tabel II 87 Indeks Inovasi Derah (IID) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-99
Tabel II 88 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d 2024 ..... II-101
Tabel II 89 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Survei Penilaian Integritas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-102
Tabel II 90 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-102
Tabel II 91 Pencapaian Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) II-103
Tabel II 92 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 ..... II-103
Tabel II 93 Jumlah Paud, Siswa dan Guru Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-104
Tabel II 94 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-105
Tabel II 95 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-106
Tabel II 96 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-107
Tabel II 97 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-107
Tabel II 98 Angka Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-108
Tabel II 99 Angka Kelulusan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-108

Tabel II 100 Jumlah Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-109
Tabel II 101 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-109
Tabel II 102 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-110
Tabel II 103 Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B Dan C Dari Dapodikmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2022/2023.....II-110
Tabel II 104 Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-111
Tabel II 105 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-112
Tabel II 106 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-113
Tabel II 107 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-113
Tabel II 108 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-114
Tabel II 109 Rasio Posyandu Persatuan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-114
Tabel II 110 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-115
Tabel II 111 Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-116
Tabel II 112 Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-116
Tabel II 113 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-117
Tabel II 114 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-117
Tabel II 115 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-118
Tabel II 116 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-118
Tabel II 117 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-118
Tabel II 118 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-119
Tabel II 119 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-119
Tabel II 120 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-120
Tabel II 121 Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-121
Tabel II 122 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-121

Tabel II 123 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-122
Tabel II 124 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-122
Tabel II 125 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-122
Tabel II 126 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-123
Tabel II 127 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-123
Tabel II 128 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-124
Tabel II 129 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-125
Tabel II 130 Non Polio AFP Rate Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-126
Tabel II 131 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-126
Tabel II 132 Cakupan Balita Pneumonia ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-127
Tabel II 133 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-127
Tabel II 134 Persentase Penderita diare yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-129
Tabel II 135 Penderita Diare yang Ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-129
Tabel II 136 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi II-130
Tabel II 137 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-131
Tabel II 138 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-131
Tabel II 139 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-133
Tabel II 140 Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-133
Tabel II 141 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-134
Tabel II 142 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-135
Tabel II 143 Cakupan Pelayanan Anak balita per Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-135
Tabel II 144 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-136
Tabel II 145 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-137
Tabel II 146 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-137

Tabel II 147 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-138
Tabel II 148 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM).....II-138
Tabel II 149 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.....II-138
Tabel II 150 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-139
Tabel II 151 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024.....II-139
Tabel II 152 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-140
Tabel II 153 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-140
Tabel II 154 Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-140
Tabel II 155 Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-141
Tabel II 156 Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.....II-142
Tabel II 157 Data persentase rumah tangga perkotaan yang mempunyai akses air minum aman II-143
Tabel II 158 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu.....II-143
Tabel II 159 Persentase Rumah Tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu.....II-144
Tabel II 160 Persentase Rumah Tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu.....II-144
Tabel II 161 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ...II-146
Tabel II 162 Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-146
Tabel II 163 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-153
Tabel II 164 Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.....II-154
Tabel II 165 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-155
Tabel II 166 Cakupan petugas Linmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-156
Tabel II 167 Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024.....II-156
Tabel II 168 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2020 s.d 2024 .....II-157
Tabel II 169 Jumlah PPNS Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-157
Tabel II 170 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-157

Tabel II 171 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-158
Tabel II 172 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-158
Tabel II 173 Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%).....II-159
Tabel II 174 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 s.d 2024 .....II-160
Tabel II 175 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-161
Tabel II 176 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-161
Tabel II 177 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-162
Tabel II 178 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-164
Tabel II 179 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ...II-165
Tabel II 180 Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-166
Tabel II 181 Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-166
Tabel II 182 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-167
Tabel II 183 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-167
Tabel II 184 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-168
Tabel II 185 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-169
Tabel II 186 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-169
Tabel II 187 Rasio KDRT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ...II-169
Tabel II 188 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-170
Tabel II 189 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-170
Tabel II 190 Ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-171
Tabel II 191 Ketersediaan energi dan Protein perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-171

Tabel II 192 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-172
Tabel II 193 Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-173
Tabel II 194 Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 .....II-174
Tabel II 195 Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2020 s.d 2024.....II-175
Tabel II 196 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2020 s.d 2024 .....II-175
Tabel II 197 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-176
Tabel II 198 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2020 s.d 2024 .....II-176
Tabel II 199 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-176
Tabel II 200 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-177
Tabel II 201 Persentase cakupan area pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-177
Tabel II 202 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Rokan Hulu.....II-178
Tabel II 203 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....II-178
Tabel II 204 Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-179
Tabel II 205 Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-179
Tabel II 206 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu.....II-180
Tabel II 207 Cakupan penerbitan akta kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-180
Tabel II 208 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten, Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-181
Tabel II 209 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-181
Tabel II 210 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-182
Tabel II 211 Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Rokan Hulu.....II-182
Tabel II 212 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-183
Tabel II 213 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-183
Tabel II 214 Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024 .....II-184

Tabel II 215 BUMDES dan Unit Usaha BUMDES Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-185
Tabel II 216 Persentase PKK aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-196
Tabel II 217 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-196
Tabel II 218 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ....II-196
Tabel II 219 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-196
Tabel II 220 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Rokan Hulu II-197
Tabel II 221 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Rokan Hulu II-198
Tabel II 222 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2020 s.d 2024 .....II-198
Tabel II 223 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-198
Tabel II 224 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Rokan Hulu II-199
Tabel II 225 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-199
Tabel II 226 Jumlah Rasio Akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-199
Tabel II 227 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang Istrinya dibawah 20 tahun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-200
Tabel II 228 Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-200
Tabel II 229 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-200
Tabel II 230 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-200
Tabel II 231 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-201
Tabel II 232 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-201
Tabel II 233 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-202
Tabel II 234 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-202
Tabel II 235 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di

bidang pengendalian penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-203
Tabel II 236 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-203
Tabel II 237 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-204
Tabel II 238 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-204
Tabel II 239 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-204
Tabel II 240 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-205
Tabel II 241 Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-205
Tabel II 242 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Rokan Hulu.....II-206
Tabel II 243 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-206
Tabel II 244 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-207
Tabel II 245 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum II-207
Tabel II 246 Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-208
Tabel II 247 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-208
Tabel II 248 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-209
Tabel II 249 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-209
Tabel II 250 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-210
Tabel II 251 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per tahun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-210
Tabel II 252 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-211
Tabel II 253 Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) Tahun 2020 s.d 2024 .....II-211
Tabel II 254 Jaringan Komunikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-212
Tabel II 255 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-212
Tabel II 256 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-214

Tabel II 257 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-214
Tabel II 258 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-214
Tabel II 259 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-215
Tabel II 260 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-215
Tabel II 261 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 .....II-215
Tabel II 262 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-217
Tabel II 263 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-217
Tabel II 264 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-218
Tabel II 265 Jumlah Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-219
Tabel II 266 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-219
Tabel II 267 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN II-220
Tabel II 268 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Rokan Hulu.....II-220
Tabel II 269 Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-220
Tabel II 270 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-221
Tabel II 271 Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-221
Tabel II 272 Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-221
Tabel II 273 Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-222
Tabel II 274 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-222
Tabel II 275 Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-222
Tabel II 276 Bidang Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-223
Tabel II 277 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-224
Tabel II 278 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu.....II-224
Tabel II 279 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-225
Tabel II 280 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-225

Tabel II 281 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-225
Tabel II 282 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-226
Tabel II 283 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....II-226
Tabel II 284 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Kabupaten Rokan Hulu.....II-227
Tabel II 285 Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-227
Tabel II 286 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024.....II-228
Tabel II 287 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-229
Tabel II 288 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-229
Tabel II 289 Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindak lanjuti Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 .....II-229
Tabel II 290 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-230
Tabel II 291 Lama kunjungan Wisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-231
Tabel II 292 PAD sektor pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-231
Tabel II 293 Desa Wisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024...II-231
Tabel II 294 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-232
Tabel II 295 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-233
Tabel II 296 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-233
Tabel II 297 Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-234
Tabel II 298 Luas Areal Tanam dan panen Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-234
Tabel II 299 Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-235
Tabel II 300 Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-236
Tabel II 301 Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-238
Tabel II 302 Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-239
Tabel II 303 Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-240
Tabel II 304 Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan Masyarakat dan Peningkatan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-242

Tabel II 305 Cakupan Bina kelompok nelayan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-242
Tabel II 306 Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-243
Tabel II 307 Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-244
Tabel II 308 Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-245
Tabel II 309 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-246
Tabel II 310 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu.....II-246
Tabel II 311 Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-247
Tabel II 312 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-249
Tabel II 313 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-249
Tabel II 314 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-250
Tabel II 315 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-250
Tabel II 316 Diklat Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-250
Tabel II 317 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-251
Tabel II 318 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024.....II-251
Tabel II 319 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 .....II-251
Tabel II 320 Jumlah PPPK menurut Tingkat Pendidikan II-252
Tabel II 321 Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-252
Tabel II 322 Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024 .....II-253
Tabel II 323 Jumlah Jabatan Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 .....II-254
Tabel II 324 Persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Rokan Hulu.....II-255
Tabel II 325 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kabupaten Rokan Hulu.....II-256
Tabel II 326 Persentase perangkat daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah.....II-256
Tabel II 327 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-257
Tabel II 328 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05 .....II-258
Tabel II 329 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 .....II-261

Tabel II 330 Jumlah temuan BPK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-262
Tabel II 331 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-262
Tabel II 332 Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024 ..... II-263
Tabel II 333 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d 2024 ..... II-264
Tabel II 334 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-264
Tabel II 335 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-264
Tabel II 336 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-265
Tabel II 337 Capaian Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2026 ..... II-266
Tabel II 338 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024..... II-272
Tabel II 339 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024..... II-275
Tabel II 340 Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 ..... II-277
Tabel II 341 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 ..... II-278
Tabel II 342 Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2020 s.d 2024 ..... II-280
Tabel II 343 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu II-282
Tabel II 344 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu II-284
Tabel II 345 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-285
Tabel II 346 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-287
Tabel II 347 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 ..... II-289
Tabel II 348 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu (%) II-290
Tabel II 349 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 s.d 2030..... II-295
Tabel II 350 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah..... II-300
Tabel II 351 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah..... II-302

Tabel II 352 Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2029 yang Terdapat Dalam Dokumen RTRW Kab. Rokan Hulu II-326
Tabel II 353 Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu II-330
Tabel II 354 Kesimpulan Isu Strategis Daerah II-342
Tabel III 1 Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025 s.d 2029 ..... III-3
Tabel III 2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025 s.d 2029 ..... III-8
Tabel III 3 Penjabaran Pentahapan Pembangunan Tahun 2025 s.d 2029 Berdasarkan Misi III-16
Tabel III 4 Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029 ..... III-22
Tabel III 5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029 ..... III-25
Tabel III 6 Penyelarasan Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Rokan Hulu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau III-39
Tabel III 7 Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau III-48
Tabel III 8 Penyelarasan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai Provinsi Riau III-49
Tabel III 9 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029 ..... III-58
Tabel III 10 Integrasi Janji Politis Dengan Nomenklatur Program III-83
Tabel III 11 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Rokan Hulu III-87
Tabel IV 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Periode 2025 s.d 2030 . IV-2
Tabel IV 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029 ..... IV-58
Tabel IV 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029 ..... IV-61

Daftar Gambar

Gambar I 1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektor Lainnya I-6
Gambar I 2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
Gambar II 1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu II-1
Gambar II 2 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu II-3
Gambar II 3 Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu II-6
Gambar II 4 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-7
Gambar II 5 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu II-9
Gambar II 6 Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu II-11
Gambar II 7 Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan II-12
Gambar II 8 Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu II-14
Gambar II 9 Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu II-18
Gambar II 10 Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu II-21
Gambar II 11 Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu II-24
Gambar II 12 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Rokan Hulu II-25
Gambar II 13 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Rokan Hulu II-26
Gambar II 14 Capain Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-30
Gambar II 15 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu II-36
Gambar II 16 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-37
Gambar II 17 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-38
Gambar II 18 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2020 dan 2024 ..... II-40

Gambar II 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB Harga ADHK 2010 Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-42
Gambar II 20 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-44
Gambar II 21 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-45
Gambar II 22 Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ..... II-48
Gambar II 23 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%) II-48
Gambar II 24 Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024... II-49
Gambar II 25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-50
Gambar II 26 Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ..... II-51
Gambar II 27 Perkembanan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-51
Gambar II 28 Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/ Kapita/Bulan) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024..... II-52
Gambar II 29 Perkembangan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-53
Gambar II 30 Posisi Capaian Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024..... II-53
Gambar II 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-60
Gambar II 32 Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024..... II-61
Gambar II 33 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-62
Gambar II 34 Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024... II-62
Gambar II 35 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-66
Gambar II 36 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Konstant (Dalam Triliun) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-73
Gambar II 37 Struktur Perekonomian (ADHB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-77

Gambar II 38 PDRB Kabupaten Rokan Hulu Munurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 dan 2024 (Rp. Milyar) II-78
Gambar II 39 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Rokan Hulu II-79
Gambar II 40 Tren Rasio Kewirausahaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 ..... II-80
Gambar II 41 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%) II-81
Gambar II 42 Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024 ... II-82
Gambar II 43 Jumlah Investasi dan Investor PMDN dan PMA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 ..... II-96
Gambar II 44 Tren Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024 ..... II-100
Gambar II 45 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024..... II-112
Gambar III 1 Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 s.d 2030 ..... III-12
Gambar III 2 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau pada RPJMN 2025 s.d 2029 ..... III-37
Gambar III 3 Sasaran Pembangunan Provinsi Riau pada RPJMN 2025 s.d 2029 ..... III-38
Gambar III 4 Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau III-48
Gambar III 5 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu III-53
Gambar III 6 Peta Rencana Struktur Ruang..... III-55
Gambar III 7 Peta Rencana Pola Ruang..... III-56
Gambar III 8 Peta Rencana Kawasan Strategis..... III-57

Daftar Istilah

AFP : Acute Flaccid Paralysis
ADB : Bank Pembangunan Asia
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome
AKB : Angka Kematian Balita/Bayi
APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK : Angka Partisipasi Kasar
APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APM : Angka Partisipasi Murni
APT : Angka Pendidikan yang Ditamatkan
APS : Angka Partisipasi Sekolah
ASI : Air Susu Ibu
ASN : Aparatur Sipil Negara
ASFR : Angka Kelahiran Menurut Umur
ATR : Agraria dan Tata Ruang
BAB : Buang Air Besar
Balita : Bawah Lima Tahun
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKR : Bina Keluarga Remaja
BKL : Bina Keluarga Lansia
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
BUEK : Badan Usaha Milik Kelurahan
BUMDESMA : Badan Usaha Milik Desa Bersama
BTA : Basil Tahan Asam/ Bakteri Tahan Asam
CFR : Case Fatality Rate
CPO : Crude Palm Oil
DAS : Daerah Aliran Sungai
DBD : Demam Berdarah Dengue
DOTS : Directly Observe Treatment Shortcourse
DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DUDI : Dunia Usaha dan Dunia Industri
E-Bangkit : Aplikasi Pembangunan Berbasis Elektronik
E-Fopi : Forum OPD Berbasis Elektronik
E-Government : Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
E-Kinerja : Aplikasi Kinerja Berbasis Elektronik
E-Sakip : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik
E-Sembako : Sistem Sembako Berbasis Elektronik
EDC : Electronic Data Capture
Faskes : Fasilitas Kesehatan
FCU : Family Care Unit
GNI : Gross National Income
GRK : Gas Rumah Kaca
HAM : Hak Asasi Manusia
HAKI : Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI : Human Development Index
HIV : Human Immunodeficiency Virus
HLS : Harapan Lama Sekolah
HKSKBM : Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat

HPT : Hutan Produksi Terbatas
IBangga : Indeks Pembangunan Keluarga
IDG : Indeks Pemberdayaan Gender
IDM : Indeks Desa Membangun
IDSD : Indeks Daya Saing Daerah
IEPK : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
IID : Indeks Inovasi Daerah
IKA : Indeks Kualitas Air
IKD : Indikator Kinerja Daerah
IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
IKG : Indeks Ketimpangan Gender
IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM : Industri Kecil dan Menengah
IKP : Indeks Ketahanan Pangan
IKS : Indeks Ketahanan Sosial
IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU : Indikator Kinerja Utama
IMB : Izin Mendirikan Bangunan
IMDI : Indeks Masyarakat Digital Indonesia
IPA : Indeks Perlindungan Anak
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPG : Indeks Pembangunan Gender
IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPKA : Indeks Perlindungan Khusus Anak
IPK : Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPKM : Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat
IPLM : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
IPP : Indeks Pembangunan Pemuda
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IRB : Indeks Risiko Bencana
IRBI : Indeks Risiko Bencana Indonesia
IRH : Indeks Reformasi Hukum
Jampersal : Jaminan Persalinan
JICA : Badan Kerjasama Internasional Jepang
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
JPKMM : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
K3 : Ketertiban, Ketentraman, Keindahan
K4 : Kunjungan Antenatal ke-4
KAT : Komunitas Adat Terpencil
KB : Keluarga Berencana
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi
KLB : Kejadian Luar Biasa
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA : Kawasan Pelestarian Alam
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
KRT : Kepala Rumah Tangga
KT : Karang Taruna
KTP : Kartu Tanda Penduduk
KUBE : Kelompok Usaha Bersama
KUD : Koperasi Unit Desa
Kopwan : Koperasi Wanita
LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial
LK3 : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LKPM : Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LP2B : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK : Mandi Cuci Kakus

mCPR : Modern Contraceptive Prevalence Rate
MHPK20 : Melahirkan Hidup Pertama Berusia Kurang dari 20 Tahun
MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MPP : Mall Pelayanan Publik
NTP : Nilai Tukar Petani
OKP : Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Ormas : Organisasi Kemasyarakatan
PB : Perjanjian Bersama
P5HAM : Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PDRD : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peksos : Pekerja Sosial
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH : Program Keluarga Harapan
PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKSA : Program/Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
PIK R/M : Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA : Penanaman Modal Asing
PMT : Pemberian Makanan Tambahan
PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PPH : Pola Pangan Harapan
PPKD : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
PPKS : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPLHD : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah
PPP : Purchasing Power Parities
PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PSKS : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
PSM : Pekerja Sosial Masyarakat
PSU : Prasarana Sarana Utilitas Umum
P2P : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PUU LH : Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu : Puskesmas Pembantu
PUS : Pasangan Usia Subur
PUSKESOS : Pusat Kesejahteraan Sosial
RANHAM : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKT : Rencana Kerja Tahunan
RPB : Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah
RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
RTH : Ruang Terbuka Hijau

RUPM : Rencana Umum Penanaman Modal
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
SDM : Sumber Daya Manusia
SFP : Suspicious of Poliomyelitis
SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIKIM : Sentra Industri Kecil Menengah
SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
SKPB : Sistem Kearsipan Pola Baru
SLRT : Sistem Layanan Rujukan Terpadu
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SOP : Standar Operasional Prosedur
SPALD-T : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
SPAM IKK : Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan
SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPI : Survei Penilaian Integritas
SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SSGBI : Studi Status Gizi Balita Indonesia
SSGI : Studi Status Gizi Indonesia
SSC : Solid Separation Chamber
Tagana : Taruna Siaga Bencana
Tahura : Taman Hutan Raya
TBC : Tuberkulosis
TBS : Tandan Buah Segar
TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TPA : Tempat Pemrosesan Akhir
TPS : Tempat Pembuangan Sementara
TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS 3R : Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle
UCI : Universal Child Immunization
UHH : Umur Harapan Hidup saat Lahir
UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
UPT PPA : Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
USAID : Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat
UTTP : Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
WBTB : Warisan Budaya Tak Benda
WMK : Wilayah Manajemen Kebakaran
WNPG : Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi
WPKS : Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini Audit BPK)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rokan Hulu diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M dan Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 "***Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang religius melalui pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera dan berkelanjutan***". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 5 (lima) misi, yaitu : 1) Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah; 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana; 3) Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya; 4) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial; 5) Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum.

Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1) Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 dengan menekankan pada penggunaan data, analisis ilmiah, dan rasionalitas kebijakan dengan tujuan untuk merumuskan arah pembangunan yang efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
2) Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan, mulai dari tahap awal hingga penetapan akhir dokumen untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
3) Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 adalah pendekatan yang mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dan merupakan penjabaran dari kontrak politik kepala daerah kepada rakyat, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dengan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.
4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 digunakan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan bersifat komprehensif, terintegrasi, dan responsif, dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional maupun aspirasi nyata dari masyarakat diakar rumput.
5) Pendekatan holistik-tematik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 merupakan pendekatan yang memandang pembangunan daerah secara menyeluruh (holistik) dan berdasarkan tema-tema strategis (tematik). Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah secara terpadu lintas sektor, tidak sektoral dan parsial, sehingga hasil pembangunan lebih terarah, berdampak, dan berkelanjutan.

6) Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 dengan menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar pelaku pembangunan, dan antar level pemerintahan dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

7) Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak berjalan secara sektoral atau terpisah-pisah, tetapi saling terhubung dan mendukung satu sama lain, guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

8) Pendekatan spasial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan dimensi wilayah atau keruangan dengan menekankan bahwa pembangunan harus memperhitungkan karakteristik geografis, potensi wilayah, distribusi penduduk, keterjangkauan pelayanan, dan konektivitas antarwilayah agar pembangunan lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu ini sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga disusun memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS merupakan tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029 memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4880);

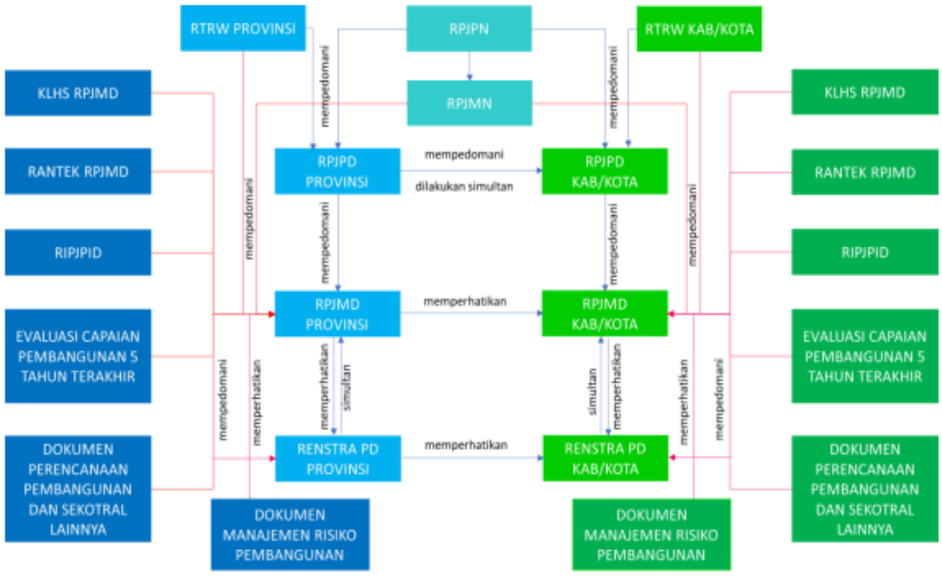
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6)

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 mempedomani RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Selain mempedomani dokumen RPJMN, memperhatikan RPJMD Provinsi Riau dan juga mempedomani RTRW, Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan dan mempedomani KLHS RPJMD, Rancangan teknokratik RPJMD, RPJPD, Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun Terakhir (2020-2024) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 disusun secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada Gambar I-I dibawah ini.



Sumber: Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Gambar I-1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektor Lainnya

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa, RPJMD disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Secara umum RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 akan mendukung pencapaian 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2040

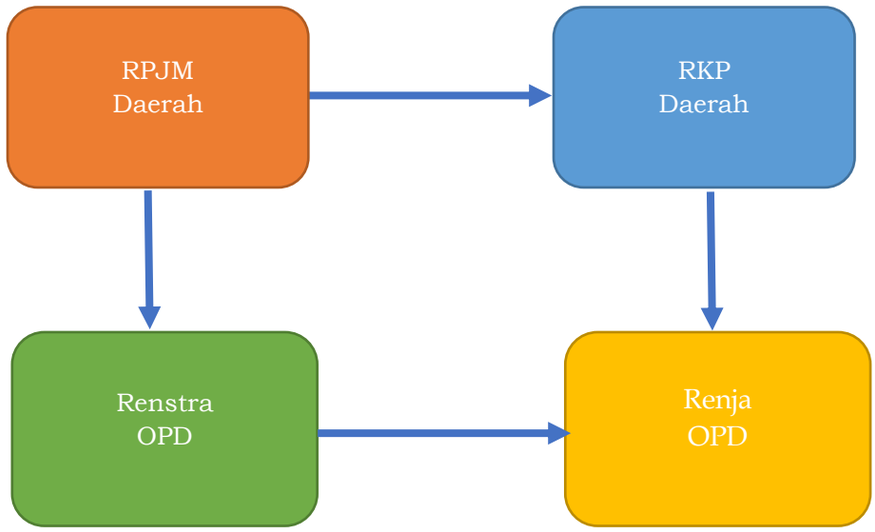
Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dijelaskan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya kedalam dokumen rencana pembangunan. Hal ini menekankan bahwa Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana Tata Ruang adalah hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 menjadi krusial karena RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 bersifat implementatif dan mengakomodir visi dan misi kepala daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 disusun dengan mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Rokan Hulu, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen RPJMD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang dijabarkan ke dalam perencanaan kerja tahunan PD (Renja PD) untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan RKPD termuat dalam Rencana Kerja (Renja) PD.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun rencana kerja (Renja PD) tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar I-2
Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS sebagai instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah

daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program. RPJMD sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) juga wajib dilakukan KLHS. Oleh karenanya, Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 didasarkan pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Rokan Hulu untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan perencanaan yang disusun harus berbasis bukti dengan berlandaskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Baik yang dihasilkan oleh seluruh unsur kelembagaan iptek, sumber daya iptek dan jejaring iptek yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam lingkup daerah, antar-daerah dan nasional, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran IPTEK serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah. Peta Jalan Pelaksanaan Program Riset Dan Inovasi dalam dokumen RIPJPID akan diintegrasikan untuk memperkuat Strategi, Arah Kebijakan Tahunan dan Program Prioritas RPJMD, sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah berdasarkan capaian pembangunan terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RPJMD yaitu:

1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2) Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan.
3) Menelaah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 tahap Pertama.
4) Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan tahun anggaran lima tahun mendatang, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah serta strategi, arah kabijakan dan program prioritas pembangunan daerah lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan program perangkat daerah lima tahun mendatang dalam mencapai kinerja pembangunan serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lima tahun mendatang.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, kaidah pembiayaan, manajemen resiko pembangunan daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan dimasa yang akan datang di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

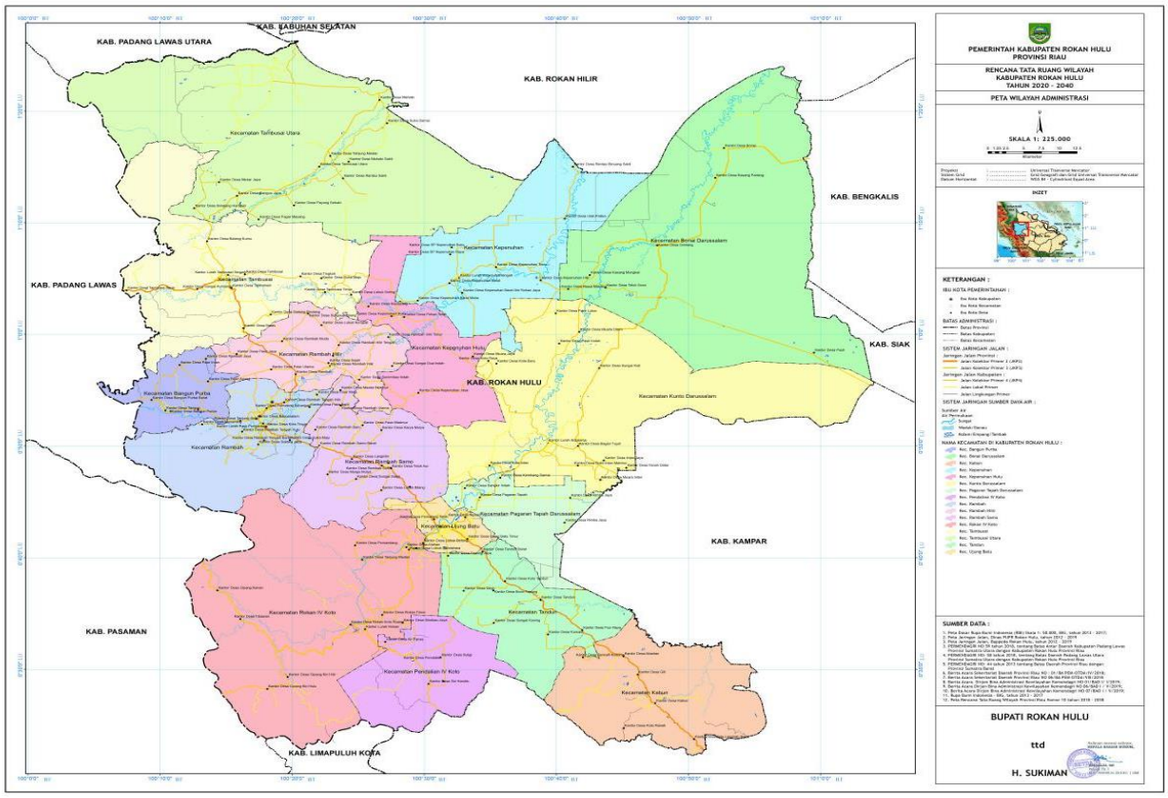
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-1
Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km2 (14,75 persen) dari luas wilayah

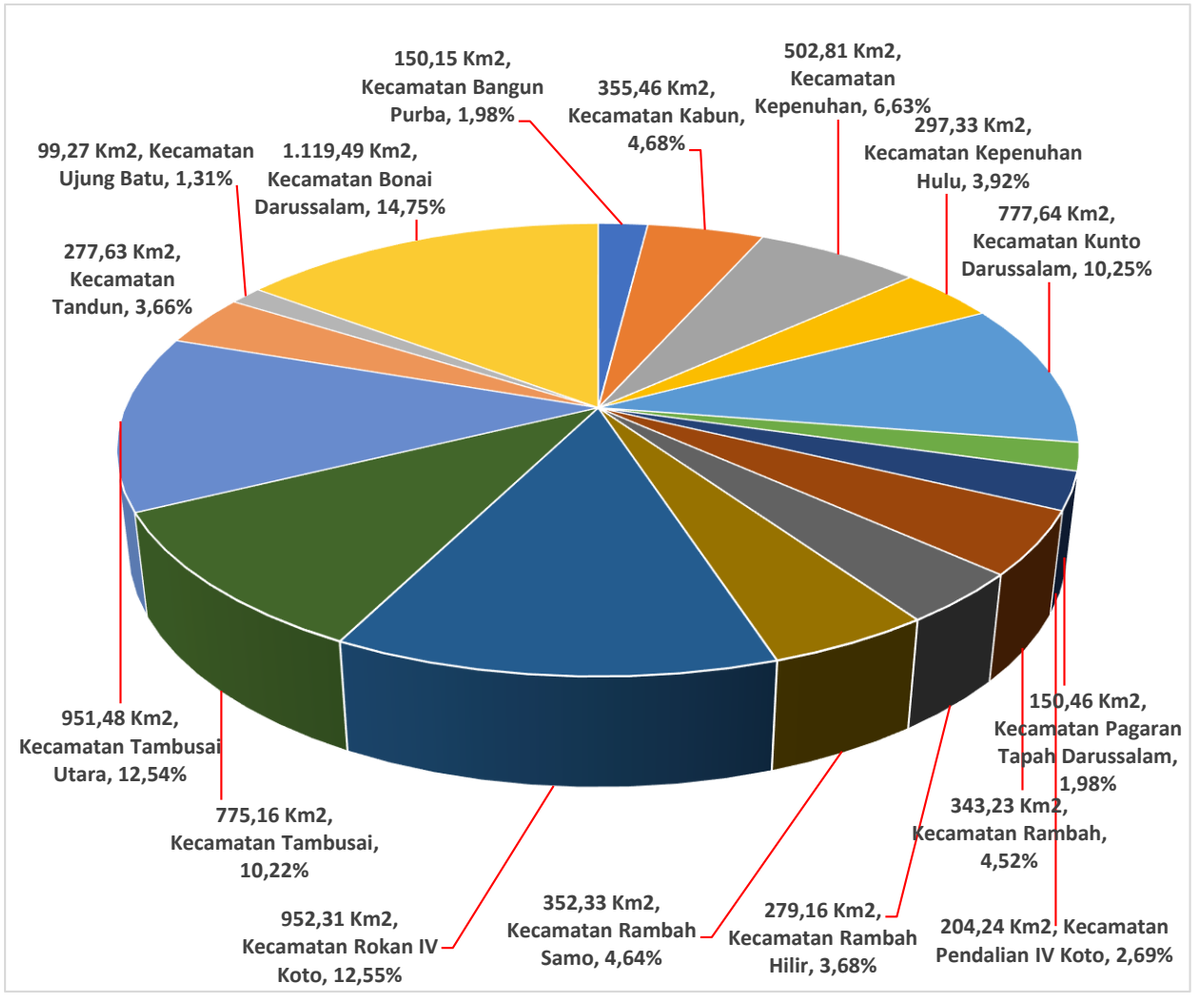
Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Tabel II-1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km²/Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64
11	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	952,31	12,55
12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
Rokan Hulu		**Pasir Pengaraian**	**7.588,13**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-2
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0° 25' 20" dan 1° 25' 41" Lintang Utara serta 100° 02' 56" dan 100° 56' 59" Bujur Timur dan Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian dari Provinsi Riau berdasarkan letak geografisnya, berada pada posisi strategis dan mempunyai arti penting

dalam geopolitik dan perekonomian, baik secara regional, nasional maupun internasional. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada posisi geografis yang strategis, yaitu berada di tengah beberapa daerah yang memiliki berbagai potensi unggulan, seperti:

1. Berada dekat dengan Kota Dumai, yang merupakan kawasan industri dan perdagangan serta pelabuhan internasional sementara Kabupaten Rokan Hulu merupakan penghasil *Crude Palm Oil* (CPO), minyak mentah (bagian dari blok Rokan) dan hasil pertambangan galian c;
2. Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis yang merupakan penghasil minyak bumi, pelabuhan penumpang internasional, perikanan laut, objek Wisata Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat dan merupakan jalur perdagangan ekonomi menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Kota Dumai. Sedangkan Kabupaten Rokan Hulu penghasil *Crude Palm Oil* (CPO), minyak mentah (bagian dari blok Rokan) dan hasil pertambangan galian c;
3. Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan penghasil padi terbesar di Provinsi Riau, minyak bumi, *Crude Palm Oil* (CPO), dan perikanan, serta merupakan jalur perdagangan ekonomi baik dari Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Dumai yang melintasi Kabupaten Rokan Hulu maupun bagian dari jalur perdagangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu menuju Kota Dumai terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan hasil pertambangan galian c;
4. Berbatasan dengan Kabupaten Siak sebagai penghasil bubur kertas dan turunannya melalui Perusahaan Pulp and Paper Indah Kiat, objek Wisata Budaya Istana Siak Sri Indrapura, rumpun budaya Melayu, penghasil minyak bumi dan *Crude Palm Oil* (CPO). Sementara itu Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian budaya serumpun Melayu;
5. Kabupaten Pelalawan sebagai penghasil bubur kertas dan turunannya melalui Perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), sementara Kabupaten Rokan Hulu sebagai penghasil bahan bakunya melalui Hutan Tanaman Industri (HTI);
6. Berbatasan dengan Kabupaten Kampar, yang merupakan penghasil perikanan air tawar, objek Wisata Candi Muara Takus dan sumber energi Listrik PLTA Koto Panjang serta merupakan jalur wisata alam dan perdagangan ke Provinsi Sumatera Barat dan jalur perdagangan ekonomi Kota Pekanbaru. Sementara Kabupaten Rokan Hulu bagian dari jalur perdagangan ekonominya dan jalur pintas perdagangannya ke Provinsi Sumatera Utara;
7. Berada dekat dengan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Pemerintah Provinsi Riau, pusat wisata belanja, pusat pendidikan serta pusat pelayanan Kesehatan. Sementara Kabupaten Rokan Hulu bagian dari jalur perdagangan ekonomi antara Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Provinsi Riau;
8. Berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan penghasil *Crude Palm Oil* (CPO), jalur pintas objek Wisata

Nasional Danau Toba, sementara Kabupaten Rokan Hulu bagian dari jalur perdagangan ekonominya termasuk jalur pintas perdagangannya ke Kota Dumai dan Kota Pekanbaru;

9. Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Timur Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan penghasil pertanian dan perikanan, sementara Kabupaten Rokan Hulu bagian dari jalur perdagangan ekonominya termasuk jalur pintas perdagangannya ke Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Pendalian IV Koto, Rokan IV Koto, Tandun, dan Kecamatan Bangun Purba. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 mdpl).

Tabel II-2
Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

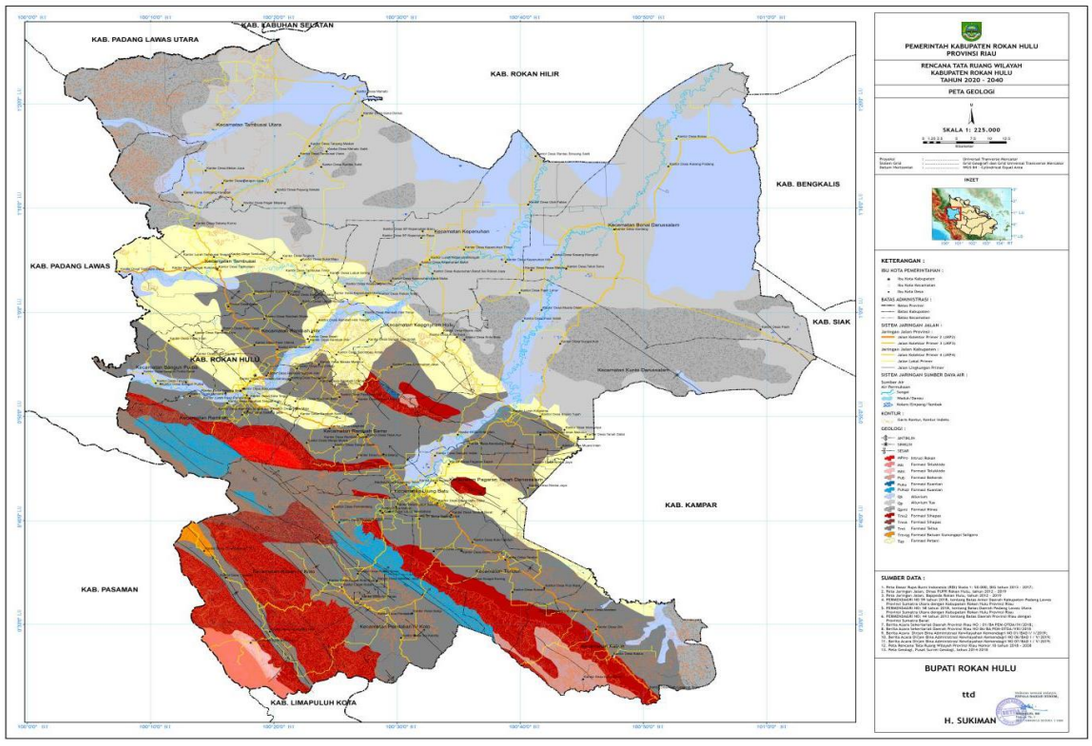
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Rokan IV Koto	97	57
2	Pendalian IV Koto	111	73
3	Tandun	70	55
4	Kabun	63	74
5	Ujung Batu	66	35
6	Rambah Samo	69	12
7	Rambah	67	-
8	Rambah Hilir	55	15
9	Bangun Purba	77	14
10	Tambusai	64	34
11	Tambusai Utara	49	64
12	Kepenuhan	29	45
13	Kepenuhan Hulu	49	32
14	Kunto Darussalam	41	55
15	Pagaran tapah Darussalam	52	40
16	Bonai Darussalam	21	111
		72	

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten

Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga (Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-3

Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu

meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (*recharge area*) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

2.1.1.1.6 Klimatologi

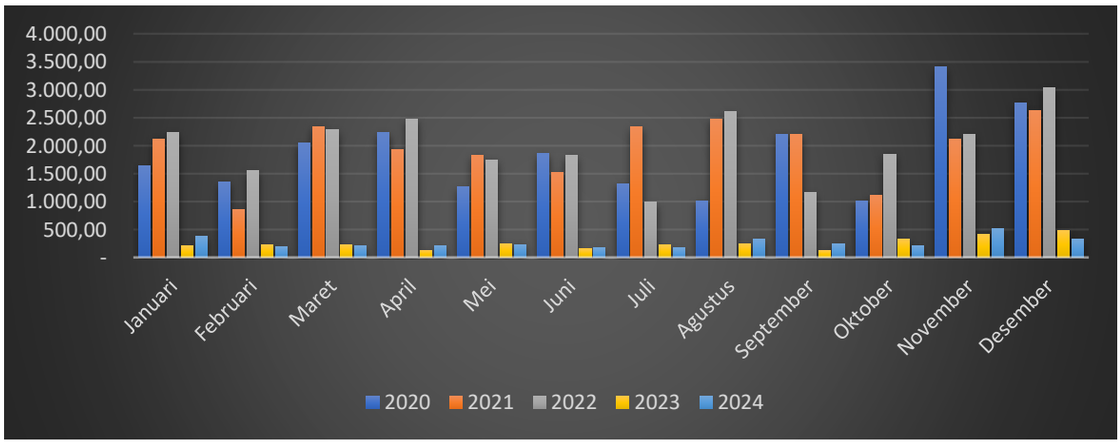
Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data curah hudan dan hari hujan.

Tabel II-3
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1643	2122,70	2234,50	207,72	378,28	126	130	124	16	21
Februari	1355	864,00	1553,20	234,09	190,10	116	66	117	15	14
Maret	2050	2343,00	2290,30	232,33	206,78	117	112	128	16	14
April	2231	1920,50	2475,00	132,33	209,28	120	112	254	13	14
Mei	1266	1824,50	1751,50	252,72	231,33	95	127	102	14	11
Juni	1853	1523,50	1827,00	152,72	170,78	86	79	108	11	10
Juli	1323	2334,50	989,50	221,56	170,94	103	72	75	12	8
Agustus	1018	2479,00	2603,50	246,44	333,67	76	127	133	16	16
September	2206	2203,00	1158,00	135,44	246,06	138	128	110	9	14
Oktober	1012	1108,00	1847,50	329,00	208,61	82	85	145	16	11
November	3411	2107,00	2208,50	415,50	517,50	179	119	131	19	20
Desember	2763	2631,50	3041,50	486,94	326,00	134	158	166	23	15

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2024 jumlah hari hujan tertinggi di bulan Januari yaitu 378,28 mm3, dan terendah di bulan Juni yaitu 170,78 mm3. Sementara jumlah hari hujan tertinggi pada bulan januari yaitu 21 hari dan hari hujan yang paling rendah terdapat di bulan juli yaitu 8 hari.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-4
Jumlah Curah Hujan menurut Bulan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya

banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-4
Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	279,60	0,03
2	Empang/Kolam	1.409,64	0,17
3	Hutan Rimba	25.965,39	3,16
4	Kebun Campuran	34.068,33	4,14
5	Perkebunan/Kebun	670.098,57	81,43
6	Permukiman	18.198,28	2.21
7	Pertambangan	119,18	0,01
8	Rawa	983,42	0,12
9	Sawah	1.854,60	0,23
10	Semak Belukar	48.100,09	5,85
11	Semak Belukar Rawa	8.137,83	0,99
12	Sungai	4.438,24	0,54
13	Tanah Terbuka	4.619,38	0,56
14	Tegalan/Ladang	4.570,73	0,56
15	Waduk	39,31	0,00
	Total	**822.882,59**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2040 terdapat kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung yang menjadi bagian dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sumber daya alam daerah. Adapun kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung tersebut antara lain adalah :

1. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya kabupaten adalah kawasan diwilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

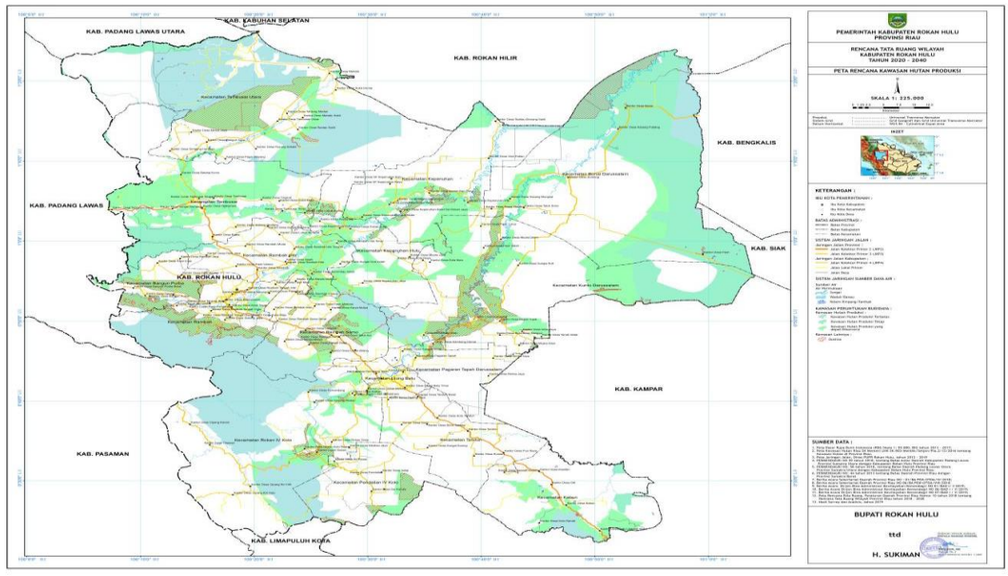
Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang secara

ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di Kabupaten Rokan Hulu adalah 349.595,4 ha yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel II-5
Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Budidaya				
		Kawasan Hutan Produksi				
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	121	764	5.287	6.172	1,77
2	Kecamatan Kabun	2.432	1.468	7.578	11.478	3,28
3	Kecamatan Kepenuhan	891	712	12.619	14.222	4,07
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	636		9.333	9.969	2,85
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.009	10.562	29.801	43.372	12,41
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	69		860	930	0,27
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	2.869		3.837	6.706	1,92
8	Kecamatan Rambah	14.620		7.092	21.712	6,21
9	Kecamatan Rambah Hilir	72	483	7.421	7.976	2,28
10	Kecamatan Rambah Samo	8.831		8.066	16.897	4,83
11	Kecamatan Rokan IV Koto	35.198		8.351	43.549	12,46
12	Kecamatan Tambusai	1.694	7.589	22.708	31.991	9,15
13	Kecamatan Tambusai Utara	41.616	3.055	15.873	60.544	17,32
14	Kecamatan Tandun			331	331	0,09
15	Kecamatan Ujung Batu			339	339	0,10
16	Kecamatan Bonai Darussalam	6.468	55.556	11.385	73.409	21,00
	Rokan Hulu	**118.525,6**	**80.189,1**	**150.880,7**	**349.595,4**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040

Gambar II-5
Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu

Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat:

- Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
- Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan;
- Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor;
- Mendorong perkembangan usaha danperan masyarakat sekitar hutan.

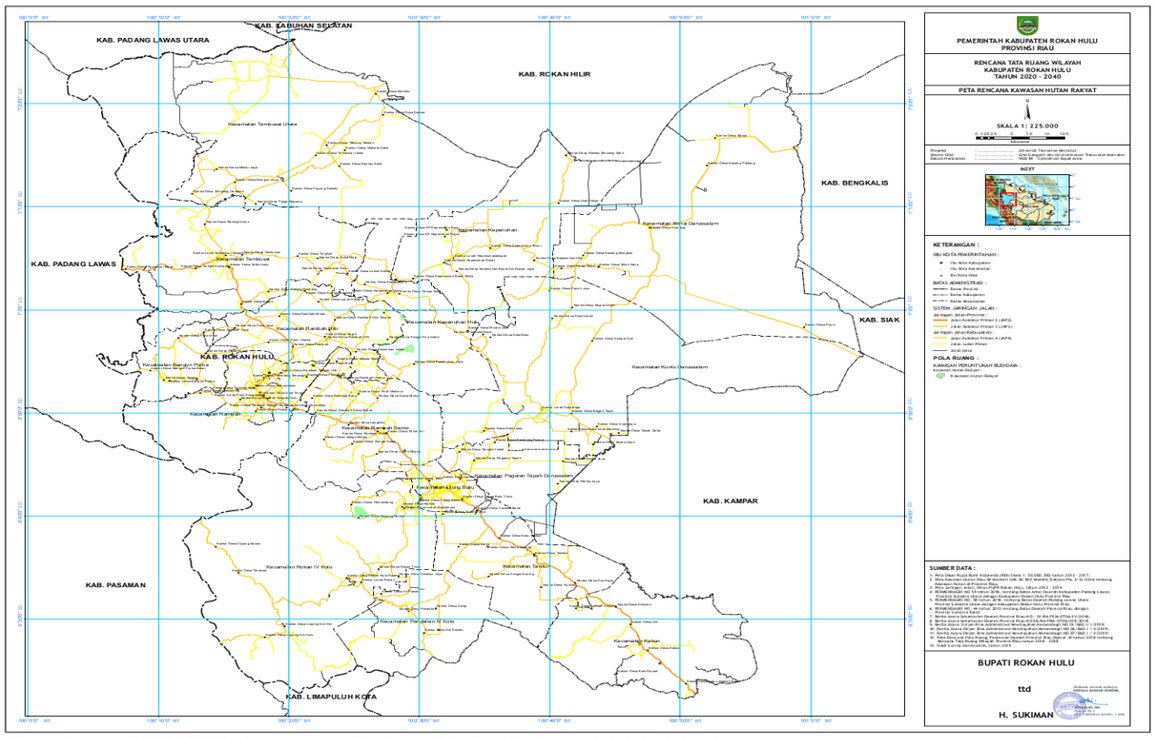
B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan dikawsan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada peruntukan lahan kawasan perkebunan, dan atau kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian holtikultura.Luas kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 658 ha yang tersebar dikecamatan Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir dan Rokan IV Koto.

Tabel II-6
Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Budidaya	
		Kawasan Hutan Rakyat (Ha)	Persentase(%)
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	319	48,4
2	Kecamatan Rambah Hilir	80	12,1
3	Kecamatan Rokan IV Koto	260	39,5
Total Kabupaten		**658**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-6
Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

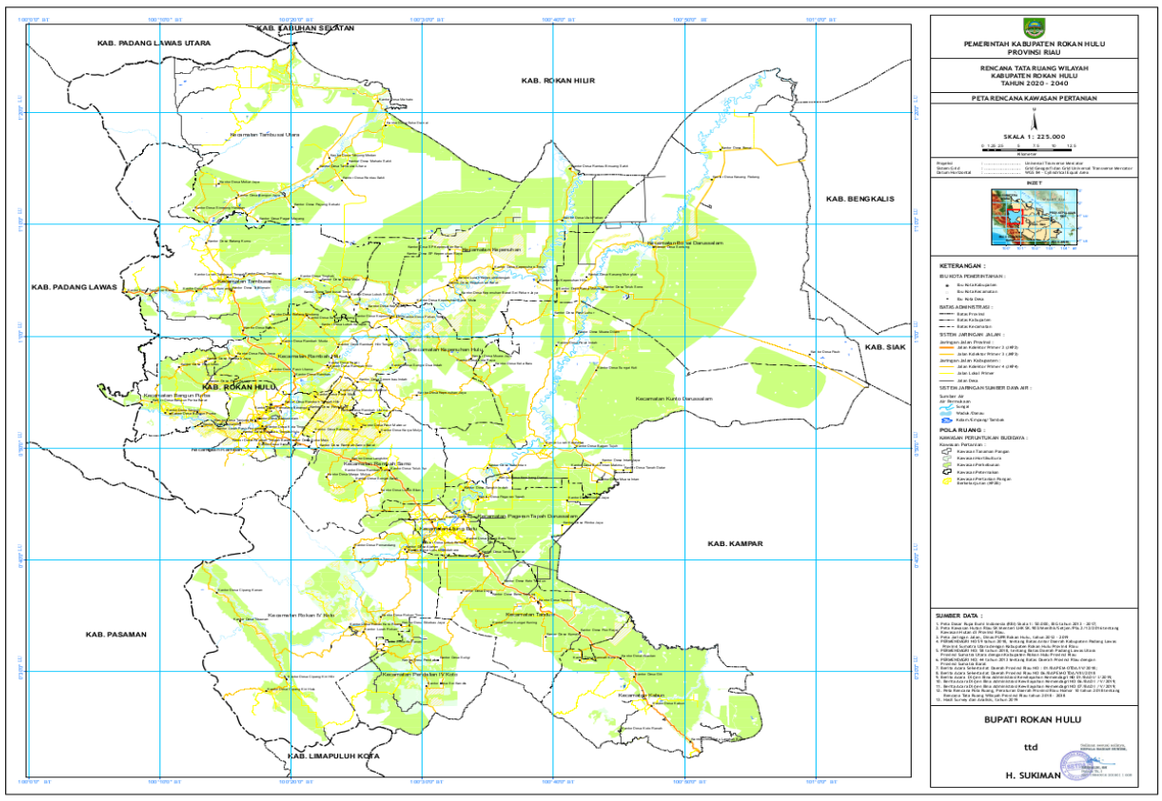
C. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel II-7
Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2040 (ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Budidaya Kawasan Pertanian					
		Kawasan Hortikultura (Ha)	Kawasan Perkebunan (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	Total	(%)
1	Kecamatan Bangun Purba	337	5.472	130	907	6.845	2,1
2	Kecamatan Kabun	139	17.762		671	18.572	5,8
3	Kecamatan Kepenuhan	384	23.108	48	3.900	27.440	8,5
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	524	15.514		1.844	17.881	5,6
5	Kecamatan Kunto Darussalam	321	43.482		803	44.607	13,9
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	64	15.471		61	15.595	4,9
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	3.948	10.370		639	14.957	4,7
8	Kecamatan Rambah	579	2.692	12	2.868	6.151	1,9
9	Kecamatan Rambah Hilir	491	13.586		1.513	15.590	4,9
10	Kecamatan Rambah Samo	258	9.181		5.148	14.587	4,5
11	Kecamatan Rokan IV Koto	3.426	17.922		1.782	23.130	7,2
12	Kecamatan Tambusai	232	18.576		216	19.025	5,9
13	Kecamatan Tambusai Utara	725	33.338	299	263	34.626	10,8
14	Kecamatan Tandun	381	21.132		271	21.784	6,8
15	Kecamatan Ujung Batu	147	1.922		189	2.259	0,7
16	Kecematan Bonai Darussalam	331	36.630		1.395	38.355	11,9
Rokan Hulu		**12.288**	**286.137**	**489**	**22.470**	**321.404**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-7
Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu
Kawasan Tanaman Pangan

Pada dasarnya kawasan peruntukan pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan;
- Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan daerah;
- Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana lebih kurang 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar.

Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Rambah Samo lebih kurang 5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) hektar, Kecamatan Kepenuhan lebih kurang 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar, diikuti oleh Kecamatan Rambah lebih kurang 2.868 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektar, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu lebih kurang 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) hektar.

1) Kawasan Holtikultura
   Untuk pengembangan kawasan holtikultura, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 12.288 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar. Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan holtikultura terbesar, yaitu kurang lebih masing-masing 3.948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan)hektar dan 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar.

2) Kawasan Perkebunan
   Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri dan kawasan permukiman. Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkanpada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan lebih kurang mencapai 286.157(dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) hektar. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas lebih kurang 43.482 (empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar, dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas lebih kurang 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh)hektar.

3) Kawasan Peternakan
   Kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada. Kawasan peternakan diarahkan di Kecamatan Tambusai utara, Bangun Purba, Kepenuhan dan Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang489 (empat ratus delapan puluh sembilan) hektar.

D. Kawasan Perikanan

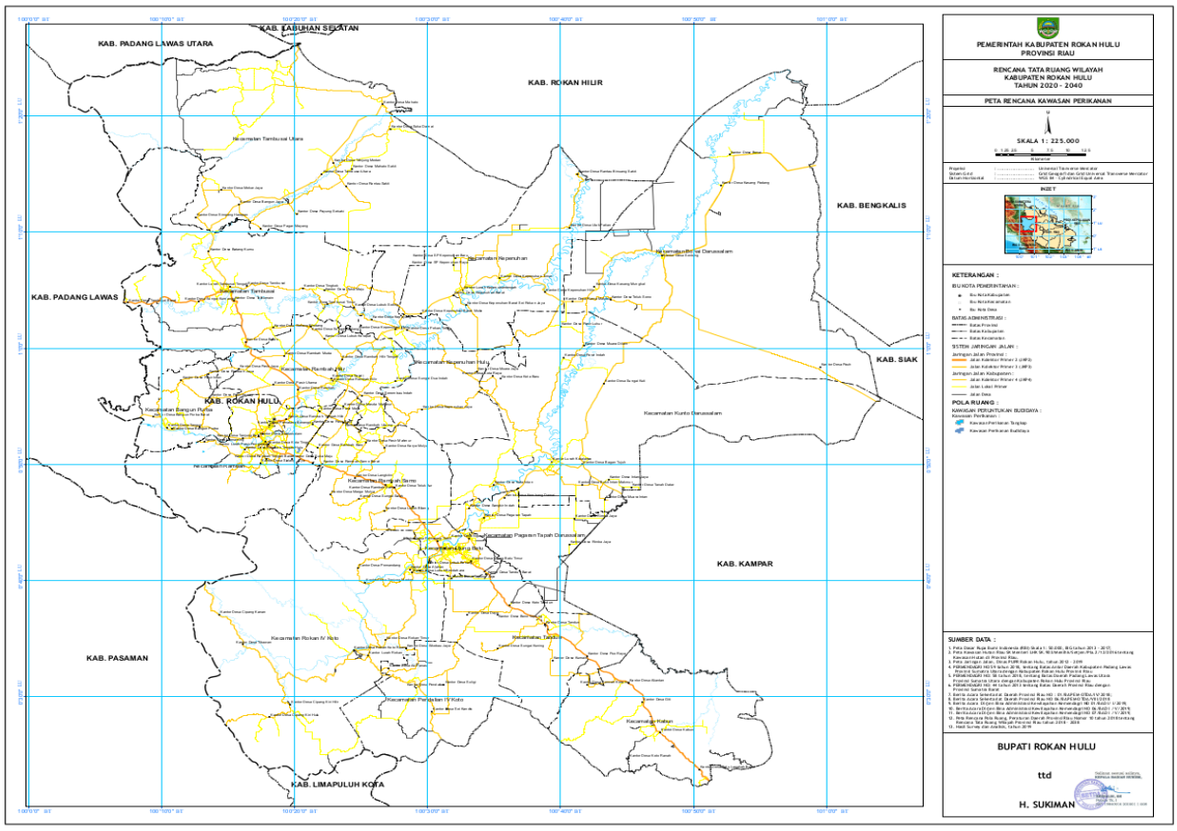
Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, danau,telaga, kolam dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan patin, lele, mas, nila, gurami,bawal, baung, dan sebagainya, sedangkan untuk perikanan tangkap jenis ikan yang biasa di dapat adalah ikan baung, selais, tapah, gabus, toman, patin dan lain-lain. Kawasan perikanan tangkap berada

di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan kawasan perikanan budidaya berada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Rencana luas kawasan perikanan darat adalah 33 ha yang tersebar di Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang 24 ha, Kecamatan Rokan IV Koto dengan luas lebih kurang 6 ha dan Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan luas lebih kurang 3 ha.

Tabel II-8
Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Budidaya	
		Kawasan Perikanan	
		Kawasan Perikanan Budidaya (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	3	9,9
2	Kecamatan Rambah	24	71,8
3	Kecamatan Rokan IV Koto	6	18,3
Rokan Hulu		**33**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-8
Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha terletak menyebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertambangan meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral Kawasan pertambangan mineral baik logam maupun non logam diarahkan di diarahkan di seluruh kecamatan.
2) Kawasan pertambangan batubara Kawasan pertambangan batubara diarahkan di:
   - Kecamatan Rokan IV Koto;
   - Kecamatan Rambah Samo;
   - Kecamatan Ujung Batu;
   - Kecamatan Bangun Purba;
   - Kecamatan Kunto Darussalam;
   - Kecamatan Rambah Hilir;
   - Kecamatan Tambusai Utara;
   - Kecamatan Kabun;
   - Kecamatan Rambah.
3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
4) Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.

F. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona alam yang membentang di daerah bukit barisan serta tempat-tempat bersejarah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu.

Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Kawasan pariwisata alam

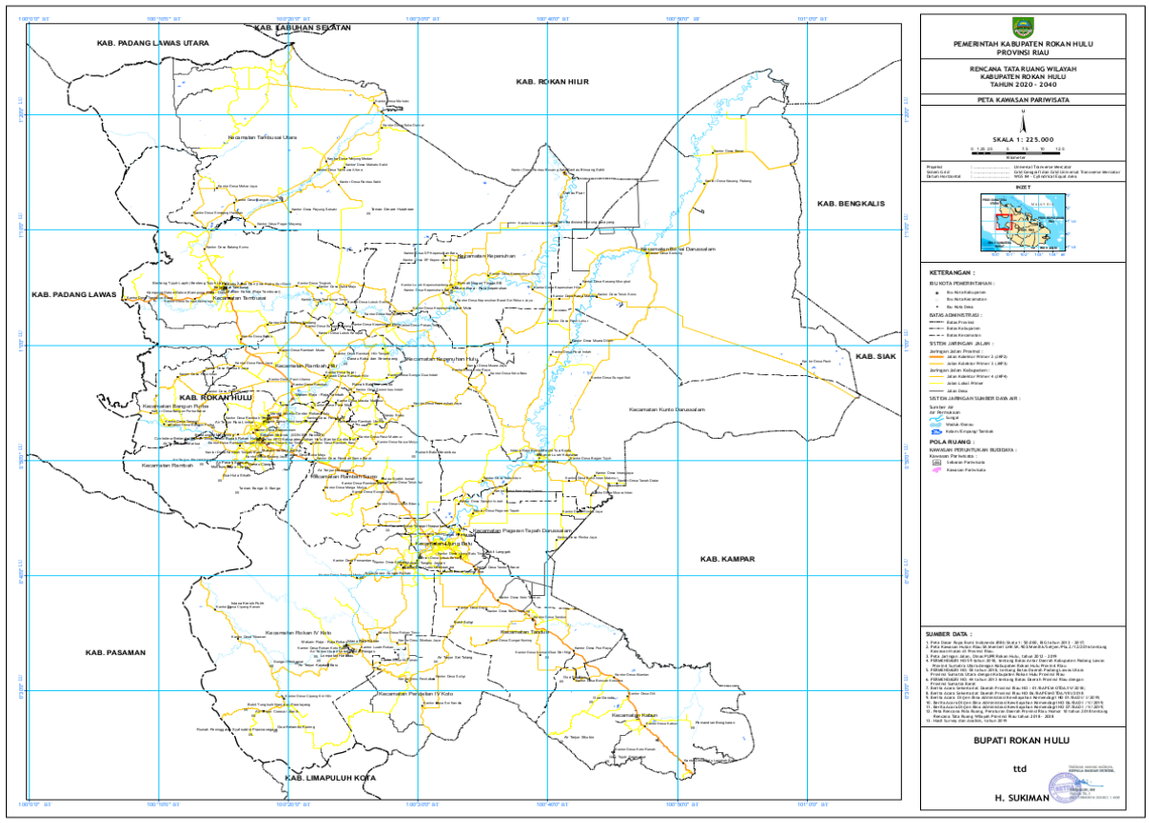
   Kabupaten Rokan Hulu yang beriklim tropis mempunyai objek wisata alam yang indah dan menarik bagi wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis kegiatan wisatayang tepat adalah wisata alam (ecotourism) sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Rokan Hulu tanpa merusak lingkungan. Wisata alam yang indah dan memiliki potensi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara lain Air Panas Hapanasan, Danau Cipogas, Air Terjun Aek Mertua, Air Terjun Tolang, Gua Tujuh Serangkai, dan lain-lain. Secara rinci objek tersebut dijelaskan sebagai berikut:
   - Air Panas Hapanasan berada di Desa Kaiti-Pawan Kecamatan Rambah;
   - Goa Mata Dewa berada di Desa Pawan;
   - Air Panas Suaman berada di Desa Pawan;
   - Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya;
   - Air Terjun Aek Martua berada di Tangun;

- Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba;
- Danau Kembang berada di Pagaran Tapah Darussalam;
- Danau Kobu berada di Muara Musu;
- Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur;
- Danau Puar berada di Desa Bunga Tanjung;
- Air Terjun Berseri berada di Cipang Hulu;
- Air Terjun Sungai Tolang berada di Rokan IV Koto;
- Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam;
- Danau Ombak berada di Kota Lama;
- Gua Tujuh Serangkai berada di Tandun;
- Bukit Suligi Hill di Aliantan;
- Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu;
- Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Desa Pawan;
- Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo;
- Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan;
- Air Panas Rokan berada di Rokan IV Koto;
- Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Geopark Sungai Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
- Gua Sei Nigi berada di Desa Kabun;
- Gua Sei Puo berada di Desa Kabun.

2) Kawasan wisata buatan di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
   - Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai;
   - Arena Terbang Layang berada di Rokan IV Koto;
   - Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah;
   - Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati;
   - Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian;
   - Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu;
   - Pawan Resort berada di Pawan;
   - Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulak Patian berada di Ulak Patian;
   - Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya;
   - Taman Bungo berada di Sungai Bungo.
3) Pengembangan kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Rokan Hulu menurut lokasi kecamatan, diantaranya meliputi:
   - Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;

- Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung;
- Surau Suluk Naqsambandiyah berada di Surau Gading;
- Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai;
- Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai;
- Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogor Kecamatan Rambah;
- Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;
- Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara;
- Nogori Tingga berada di kecamatan Kota Tengah;
- Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- Komplek Surau Suluh Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah;
- Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan;
- Luhak Kuntodarussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kuntodarussalam berada di Kecamatan Tambusai;
- Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto;
- Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah;
- Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam;
- Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
- Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
- Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;
- Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Napitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;

- Tugu Janji Raja berada di Janjiraja Kecamatan Bangun Purba;
- Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan
- Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-9
Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu

2. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air serta kawasan lindung gambut.

1) Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, definisi dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap

kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan. Pada aspek pengendalian kawasan lindung, terdapat ketentuan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Dalam menentukan alokasi ruang untuk peruntukan rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu, mempertimbangkan acuan penetapan luas dan sebaran kawasan hutan lindung dalam RTRWN dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MenLHK/Setjen/ pla:/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Penilaian ulang terhadap hutan lindung didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

- Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175;
- Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng ≥ 40%; dan/atau
- Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut.
- Kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 86.666 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) hektar.

2) Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan.

3) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Beberapa tempat di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kemampuan untuk menyerap air tanah dengan baik, dimana lokasi tersebut sebagai hulu dari sungai-sungai.

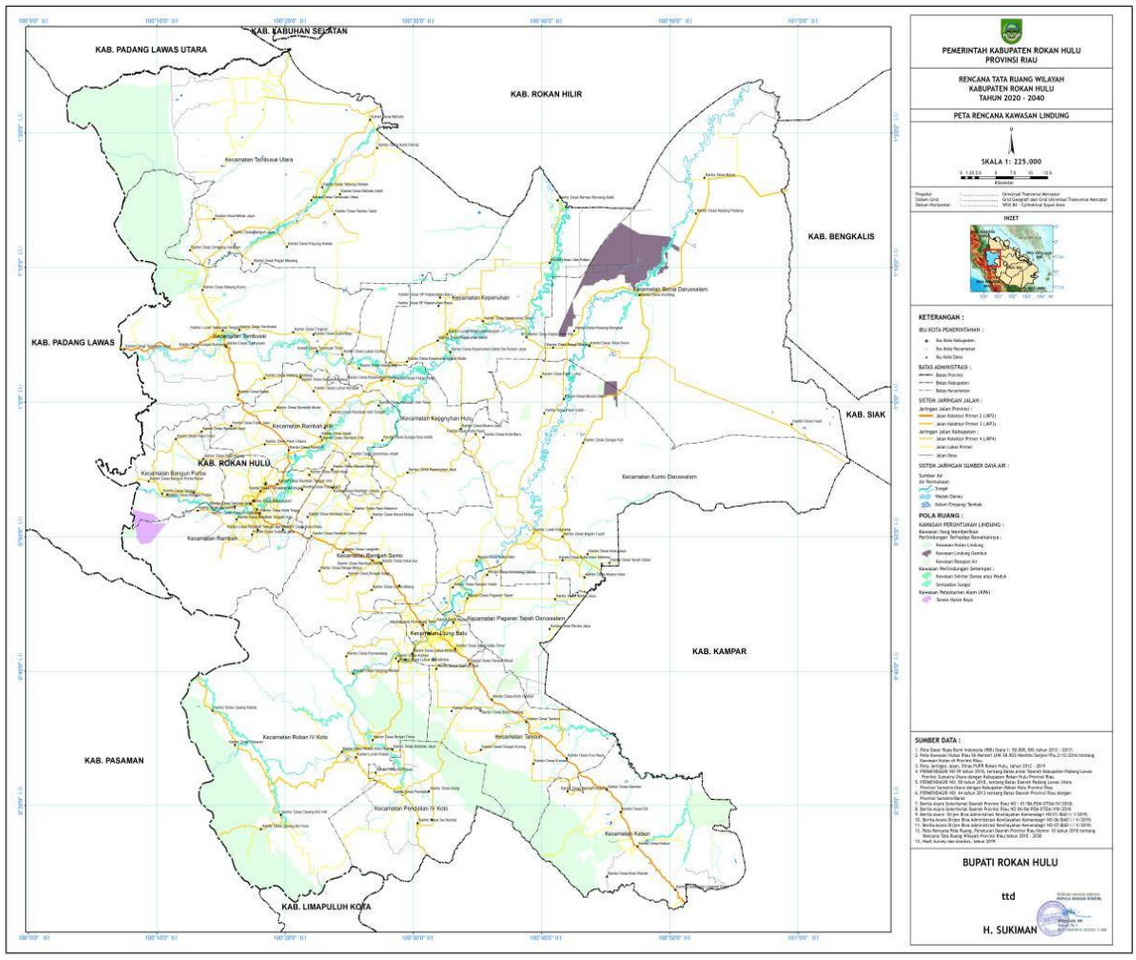
Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya). Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat sehingga terjadi pengolahan-pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai-sungai.

Dari pengamatan lapangan kawasan resapan air tanah umumnya berada pada daerah hutan lindung, hal ini sangat baik karena alih fungsi lahan di wilayah tersebut akan sangat sulit sehingga kelestariannya akan mudah terjaga. Litologi atau batuan penyusun kawasan ini dominannya berupa batuan gunung api tua dan muda, sedimen dan metamorfik, retakan, tanah pelapukan dari kelompok batuan tersebut akan mampu menjadi resapan air tanah dan mata air yang berada di bawahnya. Berdasarkan kondisi ini maka kawasan resapan air tanah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 6.081 (Enam ribu delapan puluh satu) hektar.

Tabel II-9
Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Lindung				
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya				
		Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Lindung Gambut (Ha)	Kawasan Resapan Air (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	100			100	0 ,12
2	Kecamatan Kabun	8.132		2.581	10714	12 ,36
3	Kecamatan Kepenuhan		26	486	512	0 ,59
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu			13	13	0 ,02
5	Kecamatan Kunto Darussalam	612	329	400	1342	1 ,55
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	61		789	850	0 ,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	5.514		0	5514	6 ,36
8	Kecamatan Rambah	355			355	0 ,41
9	Kecamatan Rambah Hilir			68	68	0 ,08
10	Kecamatan Rambah Samo			0	0	0 ,00
11	Kecamatan Rokan IV Koto	23.422		146	23.568	27 ,19
12	Kecamatan Tambusai	12.258		0	12.258	14 ,14
13	Kecamatan Tambusai Utara	15.306		21	15.328	17 ,69
14	Kecamatan Tandun	7.179		1.516	8.695	10 ,03
15	Kecamatan Ujung Batu			16	16	0 ,02
16	Kecamatan Bonai Darussalam		7.289	45	7.334	8 ,46
Rokan Hulu		**72.941**	**7.644**	**6.081**	**86.666**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-10
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu

B. Kawasan Perlindungan Setempat

Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kawasan perlindungan setempat diarahkan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.

1) Kawasan Sempadan Sungai

Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai sebagai sumberdaya alam maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

1. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
2. Untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;

3. Daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggul lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi.
4. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 11.498 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
5. Kecamatan Pendalian IV Koto berupa Sungai Siasam yang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
6. Kecamatan Rokan IV Koto meliputi:
   - Sungai Mentawai merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   - Sei Pakis merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   - Sei Pusu merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   - Sei Piang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
7. Kecamatan Bonai Darussalam meliputi:
   - Sungai Kuti merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   - Sungai Rangau merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
8. Kecamatan Rambah berupa Sungai Kaiti yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
9. Kecamatan Rambah Samo berupa Sungai Dua yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
10. Kecamatan Tambusai meliputi:
    - Sungai Kumu merupakan anak sungai Rokan Kanan;
    - Sungai Batang Sosah merupakan anak sungai Rokan Kanan;
11. Kecamatan Tambusai Utara berupa Sungai Mahato yang merupakan anak sungai Rokan Kanan.

2) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau atau waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau atau waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman. Danau yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar merupakan Danau *Oxbow* yang terbentuk karena proses alami. Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau atau waduk adalah :

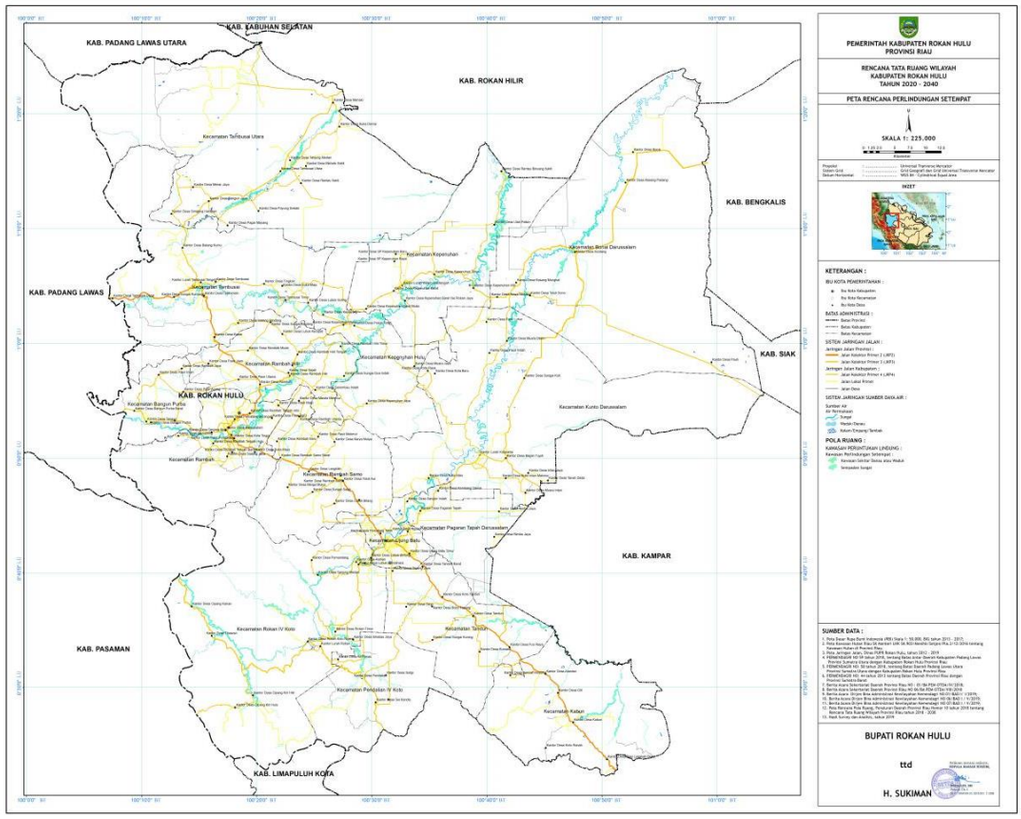
1. Daratan dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau atau waduk; atau

2. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau atau waduk.

Tabel II-10
Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Lindung			
		Kawasan Perlindungan Setempat			
		Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba		284	284	2
2	Kecamatan Kabun		732	732	6
3	Kecamatan Kepenuhan	452	1,064	1,516	12
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	123	896	1,019	8
5	Kecamatan Kunto Darussalam	23	775	798	6
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		479	479	4
7	Kecamatan Pendalian IV Koto		423	423	3
8	Kecamatan Rambah	166	569	736	6
9	Kecamatan Rambah Hilir	70	728	799	6
10	Kecamatan Rambah Samo	1	154	156	1
11	Kecamatan Rokan IV Koto	2	1,854	1,856	15
12	Kecamatan Tambusai	54	915	969	8
13	Kecamatan Tambusai Utara	32	991	1,023	8
14	Kecamatan Tandun	3	655	658	5
15	Kecamatan Ujung Batu		102	102	1
16	Kecematan Bonai Darussalam	33	878	911	7
Rokan Hulu		**961**	**11,498**	**12,459**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-11
Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu

C. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi hanya meliputi kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Kawasan Taman Hutan Raya memiliki luas kurang lebih 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah.

Tabel II-11
Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No.	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Lindung	
		Kawasan Pelestarian Alam	
		Taman Hutan Raya (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	425	32
2	Kecamatan Rambah	922	68
Rokan Hulu		**1,347**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

D. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan sempadan mata air dan bentang alam gua. Untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta menjaga keunikan alam yang ada sebanyak 3 (tiga) mata air dengan luas kurang lebih 12,92 hektar meliputi Mata air Hapanasan dan Mata air panas Pawan berada di Kecamatan Rambah serta Mata air panas berada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

E. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan Konservasi Arwana untuk mempertahankan dan menjaga habitat serta fauna arwana di Kawasan Hutan Produksi Mahato Kanan dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar dan 145 ha sebagai kawasan penyangga berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

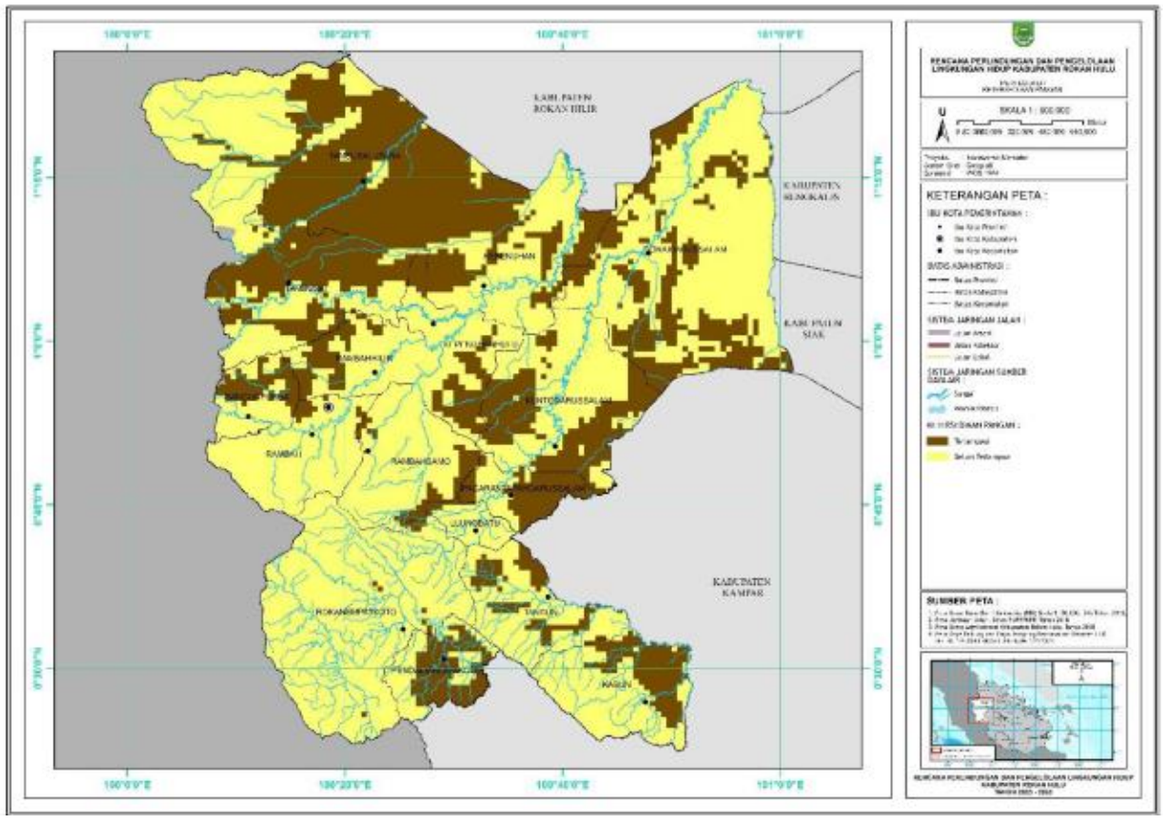
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pangan dan Air mengacu pada peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, merujuk pada Surat Keputusan Nomor SK.146.MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. sedangkan peta DDDT Pangan merupakan data yang diolah. Berdasarkan hal tersebut, adapun dari total luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa 500.948 ha memiliki status belum terlampaui, selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah:

Tabel II-12
Status daya dukung pangan di Kabupaten Rokan Hulu

Status	Luas (ha)	Persentase (%)
Belum Terlampaui	500.948	66,02
Terlampaui	257.865	33,98
Total	**758.813**	**100**

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

Adapun peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Gambar berikut ini.



Sumber : SK.146.MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Gambar II-12
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Rokan Hulu

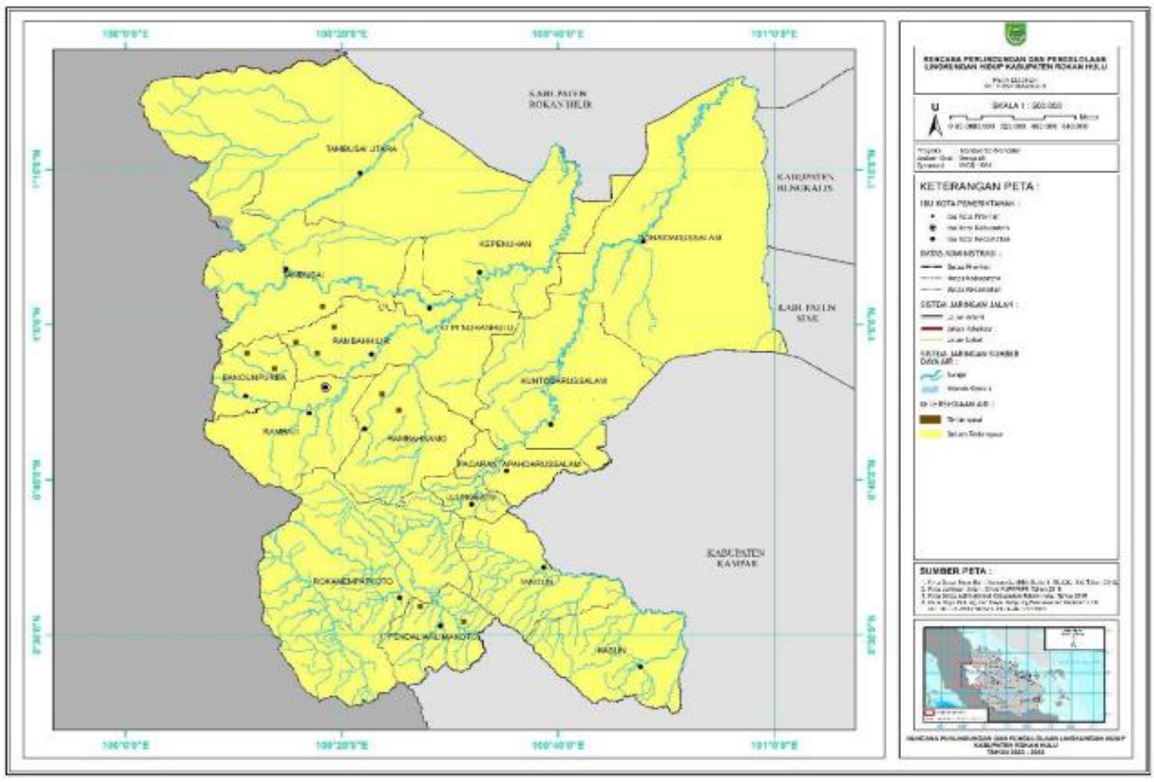
Selain itu, juga terdapat Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Air adapun dari total luasan Daya Dukung dan Daya Tampung air di Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa 758.354 ha memiliki status belum terlampaui, selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah:

Tabel II-13
Status daya dukung air di Kabupaten Rokan Hulu

Status	Luas (ha)	Persentase (%)
Belum Terlampaui	758.354	99,94
Terlampaui	459	0,06
Total	**758.813**	**100**

Sumber : SK.146.MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Adapun peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Air di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Gambar berikut ini:



Sumber : SK.146.MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Gambar II-13
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Rokan Hulu

Tabel II-14
Kebutuhan dan Ketersediaan Daya Dukung di Rokan Hulu

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih	Ambang Batas
Bangun Purba	799.527.448.785	74.260.107.750	725.267.341.035	6824
Kabun	1.405.165.836.775	121.640.958.500	1.283.524.878.275	12493
Kepenuhan	2.473.682.371.690	177.497.109.250	2.296.185.262.440	20470
Kepenuhan Hulu	1.542.240.265.824	134.174.200.750	1.408.066.065.074	12985
Kunto Darussalam	3.932.160.085.181	279.989.383.000	3.652.170.702.181	32870
Pagaran Tapah Darussalam	765.764.461.845	86.435.504.00	679.328.957.845	6558
Pendalian IV Koto	692.918.806.829	31.013.320.000	661.905.486.829	6204
Rambah	1.499.550.313.199	147.013.495.500	1.352.536.817.699	13069
Rambah Hilir	1.050.864.852.451	152.178.720.000	898.686.132.451	9089
Rambah Samo	957.743.345.146	121.264.278.500	836.479.066.646	8667
Rokan IV Koto	3.783.016.043.956	461.573.470.250	3.321.442.573.706	33998
Tambusai	3.654.314.819.159	156.006.730.500	3.498.308.088.659	30714
Tambusai Utara	3.073.144.360.226	102.595.860.750	2.970.548.499.476	25296
Tandun	918.821.155.137	83.214.105.250	835.607.049.887	8298

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih	Ambang Batas
Ujung Batu	603.500.317.527	86.042.344.250	835.607.049.887	5237
Bonai Darussalam	4.397.751.590.932	235.102.467.750	4.162.649.123.182	38021
Total	**31.550.166.074.662**	**2.450.002.056.000**	**29.100.164.018.662**	**270793**

Sumber : SK.146.MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Distribusi dan Konsumsi Listrik Rumah Tangga

Tabel II-15
Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Tahun	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2020	111.678.596	1.725.434	1.624.924
2021	137.543.830	1.579.260	25.816.752
2022	148.738.657	1.600.908	30.876.926
2023	160.506.463	1.680.433	27.884.698
2024	320.222.492	5.121.322	47.664.630

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, listrik terjual sebesar 320.222.492 KWh, dipakai sendiri sebesar 5.121.322 KWh dan susut/hilang sebesar 47.664.630 KWh. Berdasarkan sumber penerangan utama, pada tahun 2024 jumlah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu yang telah meggunakan listrik PLN yakni sebesar 87.450 rumah tangga. Sedangkan jumlah pelanggan yang menggunakan listrik PLN di tahun 2024 sebesar 202.478 pelanggan.

Rasio elektrifikasi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-16
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Elektrifikasi	88,14	88,27	88,34	91,41	91,93

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025

Rasio Elektrifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cendrung mengalami peningkatan. Rasio elektrifikasi pada pada tahun 2020 sebesar 88,14 persen dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 91,93 persen.

b. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Dalam empat tahun terakhir, semakin bertambah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan Sumber Air Minum Bersih. Sumber Air Minum Bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter. Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menggunakan Sumber Air Minum Bersih sebesar 96,38 persen dan Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap Air Minum Layak sebesar 93,45 persen. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Tingkat kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola hidup sehat melalui sumber air minum yang bersih dan layak.

Tabel II-17
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap Air Minum Layak Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum Bersih (air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter)	74,81	77,84	80,30	84,30	96,38
2	Air Minum Layak	85,32	92,17	91,12	90,75	93,45

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2020-2024

c. Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan pangan sendiri diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Pangan yang dimaksud harus cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Adapun skor IKP dikategorikan sebagai berikut:

- Rentan pangan tinggi jika skor IKP < 37,61
- Rentan pangan sedang jika 37,61 < IKP < 48,27
- Rentan pangan rendah jika 48,27 < IKP < 57,11
- Tahan pangan rendah jika 57,11 < IKP < 65,96
- Tahan pangan sedang jika 65,96 < IKP < 74,40

Tabel II-18
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Rokan Hulu	53,24	54,92	54,91	56,76	58,88
2	Provinsi Riau	64,12	66,84	67,59	68,68	70,42
3	Nasional	61,40	72,43	60,20	68,68	

Sumber : Badan Pangan Nasional, Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori tahan pangan rendah masih berada dibawah Provinsi Riau yang sudah berada pada kategori tahan pangan sedang.

Sementara itu perkembangan produksi dan kebutuhan pangan utama (beras) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-19
Surplus/ Minus Produksi dan Kebutuhan Beras
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Beras (Ton)	27.224,14	19.418,27	12.817,61	7.947,82	10.415,89
2	Kebutuhan Beras (Ton)	79.625,88	73.821,35	66.658,48	59.342,75	60.108,19
3	Surplus/ Minus (Ton)	-52.401,74	-54.403,08	-53.840,87	-51.394,93	-49.692,30
4	Ketersediaan (Ton)	102.954,14	87.381,50	78.662,84	78.992,38	80.006,45
5	Surplus/ Minus (Ton)	23.328,26	13.560,15	12.004,36	19.649,63	19.898.26

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi beras di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 10.415,89 ton atau 17,33 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 7.947,82 ton atau 13,39 persen. Produksi dan kebutuhan beras mampu mencukupi kebutuhan di daerah, kekurangannya tercukupi dari ketersediaan yang ada berupa beras yang masuk dari luar daerah dan cadangan pangan daerah.

Adapun untuk prevalensi ketidakcukupan pangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-20
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota
se-Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024

Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	10,87	9,02	15,8	13,75	11,47
Indragiri Hulu	9,11	10,8	15,22	12,31	11,22
Indragiri Hilir	13,91	14,1	22,03	17,06	13,23
Pelalawan	7,14	9,08	14,42	10,96	10,38
Siak	7,02	8,75	13,07	10,33	10,75
Kampar	9,34	10,52	14,69	12,01	10,75
Rokan Hulu	9,64	9,78	14,58	9,32	9,27
Bengkalis	9,45	12	15,75	12,77	9,92
Rokan Hilir	8,24	10,19	15,93	12,62	10,47
Kepulauan Meranti	10,41	14,51	18,81	15,95	12,72
Kota Pekanbaru	7,51	10,11	11,81	11,75	10,08
Kota Dumai	8,35	9,59	12,58	12,42	11,31

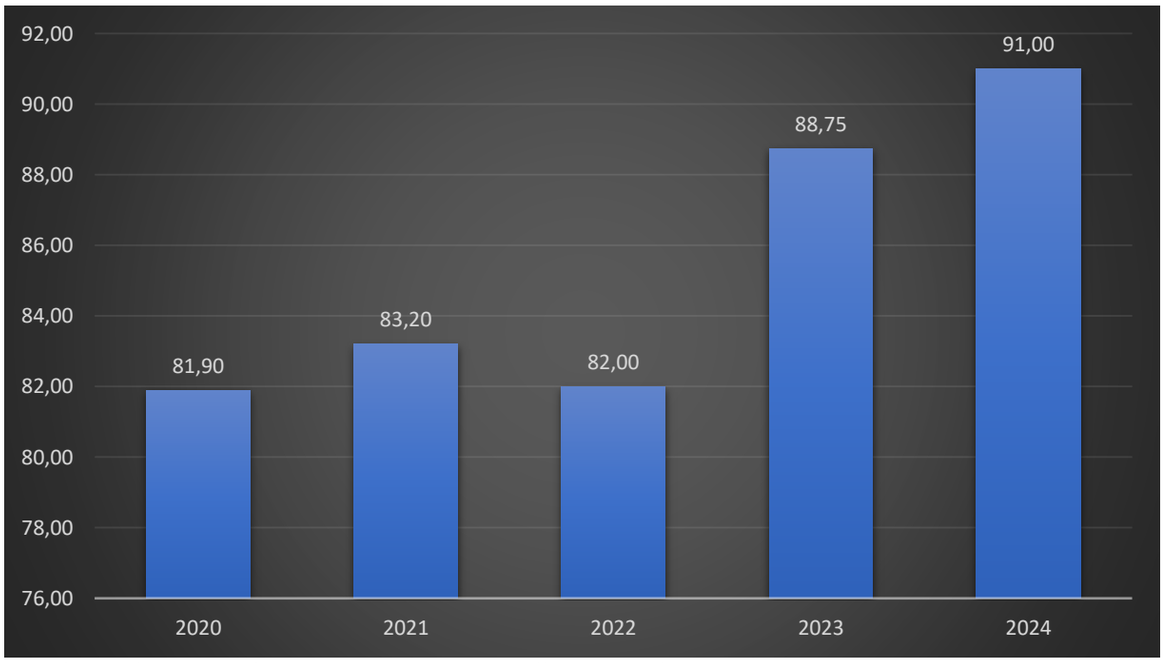
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik berada paling rendah dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Riau yaitu sebesar 9,27 persen pada tahun 2024 sementara sebelumnya berada pada 9,32 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan ada sebesar 9,27 persen penduduk di Rokan Hulu tahun 2024 yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/*PoU*) juga merupakan estimasi proporsi konsumsi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 9,64 persen. Pada tahun 2021 dan 2022 naik secara terus menerus menjadi 9,78 persen dan 14,58 persen. Selanjutnya tahun 2023 dan 2024 turun menjadi sebesar 9,32 persen dan 9,27 persen. Ini artinya, penduduk di Kabupaten Rokan Hulu yang mengkonsumsi makanan, tetapi kebutuhan energinya kurang, hanya 9,32 persen dan 9,27 persen dari total penduduk.

Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Kabupaten Rokan Hulu, semakin beragam konsumsi

penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 sebesar 81,90, meningkat pada tahun 2021 menjadi 83,20, namun turun pada tahun 2022 menjadi 82,00 dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 91,00. Secara keseluruhan terjadi peningkatan skor PPH selama periode 2020-2024 di Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2025

Gambar II-14
Capain Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

Beberapa hal yang mendukung peningkatan keragaman konsumsi pangan secara umum adalah:

- Penyediaan pangan di tingkat pasar dan rumah tangga sudah lebih merata sehingga tersedia untuk di konsumsi;
- Semakin tingginya kesadaran konsumsi rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan beragam seimbang dan aman;
- Semakin beragam ketersediaan pangan di tengah masyarakat karena sebagian pangan sudah tersedia di halaman rumah;
- Semakin meningkatnya pendapatan penduduk untuk mejangkau komoditas pangan

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat,

Fecal Coliform, dan Nitrat (NO3-N); Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Rekapitulasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Rokan Hulu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**68,30**	**63,99**	**67,27**	**62,82**	**65,31**
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	53,33	62	50	52,73
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	91,33	90,67	91,05	93,11
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31,18	31,72	33,03	32,64	35,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sebesar 65,31 poin meningkat dari tahun 2021 yang berada pada 63,99 poin. Parameter yang mengalami peningkatan adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) yang tercatat sebesar 91,33 pada tahun 2021, menjadi 93,11 pada tahun 2024. Diikuti oleh peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari 31,72 pada tahun 2021, menjadi 35,49 pada tahun 2024. Sementara itu Indeks Kualitas Air (IKA) sedikit turun dari 53,33 pada tahun 2021, menjadi 50 pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 52,73.

Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya kualitas udara adalah berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi menurunnya kualitas air dan tutupan lahan terjadinya alih fungsi lahan dan adanya buangan limbah masyarakat maupun industri ke aliran Sungai. Terkait hal ini perlu adanya peningkatan pengelolaan/ peningkatan luas maupun kualitas tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta intervensi kebijakan alih fungsi lahan terhadap tutupan lahan yang ada.

b. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Aman

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,44 persen, naik pada tahun 2021 menjadi 88,85 persen, selanjutnya pada akhir tahun 2024 meningkat menjadi 90,64 persen.

Tabel II-22
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Aman (%) Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Aman (%)					
Kabupaten Rokan Hulu	1	1	1	1	1,39
Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)					
Kabupaten Rokan Hulu	81,44	88,85	90,1	89,49	90,64
Provinsi Riau	83,99	83,64	84,06	84,58	86,32
Nasional	79,53	80,29	80,92	82,36	83,50

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Salah satu indikator pembangunan untuk pengolahan limbah domestik adalah persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi aman. Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank, dan disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Rokan Hulu sudah dibangun 1 unit dengan lokasi di Kecamatan Rambah berkapasitas 10 M3/hari dengan target KK terlayani sebanyak 60.376 KK, berteknologi *Solid Separation Chamber* (SSC). Namun sampai saat ini IPLT Kabupaten Rokan Hulu masih belum berfungsi karena belum terbentuknhya kelembagaan dan regulasi terkait pengelolaan IPLT tersebut.

c. Penanganan Persampahan

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 18,83 persen, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 18,43 persen dan tahun 2022 turun menjadi sebesar 16,32 persen. Kemudian tahun 2023 turun menjadi sebesar 15,85 persen dan terakhir pada tahun 2024 meningkat menjadi 23,32 persen. Penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu 6,37 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-23
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang ditangani	24.039,69	23.533,80	21,642.97	21.833,27	24.061,61
2	Jumlah volume produksi sampah	127.685,10	127.685,10	132,613.80	137.732,69	103.202,06
3	Persentase	18,83	18,43	16,32	15,85	23,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-24
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Rasio
1	Rambah	7.251,09	11.768,4	0,62
2	Tandun	295,96	5.957	0,05
3	Kabun	295,96	5.007	0,06
4	Ujungbatu	10.623,69	17.732,5	0,60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah volume produksi sampah terbanyak adalah di TPA Ujungbatu. Pada daerah ini jumlah volume sampah

sebanyak 17.732,5 m3 sementara kapasitas daya tampung adalah 10.623,69 m3 sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan untuk menampung sampah yang ada serta pengembangan sarana dan prasarananya.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau

Tabel II-25
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kacar (GRK) Provinsi Riau
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Intensitas GRK	54,02	55,39	58,44	63,37	66,90

Sumber: Bappeda Provinsi Riau Tahun 2025

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Rokan Hulu dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. IRBI merupakan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Informasi indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Perkembangan IRB Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten Rokan Hulu beribukota di Pasir pengaraian yang mempunyai kondisi geologi berada pada wilayah daratan Bukit Barisan yang merupakan zona lipatan (*folded zone*). Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi bencana alam yang dominan berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan terjadinya kabut asap, sedangkan bencana banjir yang terjadi berakibat pada kerusakan maupun kematian pada wilayah sekitar tepian Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh dan Sungai Batang Sosa serta Sungai Tapung. Bencana tanah longsor cenderung terjadi pada wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada sekitaran Bukit Barisan. Disamping itu erosi atau tanah longsor pada sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) juga terjadi pada tepian Sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perumahan dan lainnya. Terkait dampak dari berbagai macam resiko bencana yang terjadi maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Bersama masyarakat dan seluruh pihak yang terkait perlu melakukan mitigasi bencana yang intens dan terkoordinasi untuk mengurangi dampak resiko yang kemungkinan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Adapun data indeks resiko bencana Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-26
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Nilai Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko
2020	155,20	Tinggi
2021	155,20	Tinggi

Tahun	Nilai Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko
2022	155,20	Tinggi
2023	155,20	Tinggi
2024	155,20	Tinggi

Sumber: IRBI BNPB Tahun 2025, inaRISK Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IRB Kabupaten Rokan Hulu tidak mengalami perubahan dari tahun 2020-2024. Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Dengan demikian KabupatenRokan Hulu perlu melakukan upaya yang signifikan.

Tabel II-27
Indeks Resiko Bencana Per Ancaman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian Resiko Bencana Per Ancaman	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Resiko Bencana Banjir	36	36	36	36
2	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi	21,6	21,6	21,6	21,6
3	Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	36	36	36	36
4	Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor	24	24	24	24
5	Indeks Resiko Bencana Kekeringan	24	24	24	24
6	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim	13,6	13,6	13,6	13,6
Nilai Total		**155,2**	**155,2**	**155,2**	**155,2**

Sumber: IRBI BNPB Tahun 2025, inaRISK Tahun 2025

c. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Hampir setiap tahun sungai Rokan, mengalami banjir, bahkan dalam beberapa tahun terakhir frekuensi dan volume banjir cenderung meningkat, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik, antara lain keresahan penduduk meningkat, rusaknya bangunan infrastruktur serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan.

Tabel II-28
Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Rokan IV Koto	4.320,83	17.432,85	21.753,68	23,59
2	Tandun	829,22	1.444,67	2.273,89	2,47
3	Kabun	443,33	1.453,27	1.896,6	2,06
4	Ujung Batu	1.922,80		1.922,8	2,09
5	Rambah Samo		742,83	742,83	0,81
6	Rambah	2.326,03	7.014,88	9.340,91	10,13
7	Rambah Hilir	2.553,99	17,96	2.571,95	2,79
8	Bangun Purba	1.236,22	38,15	1.274,37	1,38
9	Tambusai	5.644,01		5.644,01	6,12
10	Tambusai Utara	8.201,53		8.201,53	8,89
11	Kepenuhan	11.245,09	0,25	11.245,34	12,20

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
12	Kunto Darussalam	7.657,47		7.657,47	8,30
13	PagaranTapah Darussalam	3.771,50	12,25	3.783,75	4,10
14	Bonai Darussalam	10.202,30		10.202,3	11,06
15	Kepenuhan Hulu	2.576,16	96,1	2.672,26	2,90
16	Pendalian IV Koto		1.024,35	1.024,35	1,11
Kab. Rokan Hulu (Ha)		**62.930,48**	**29.277,56**	**92.208,04**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

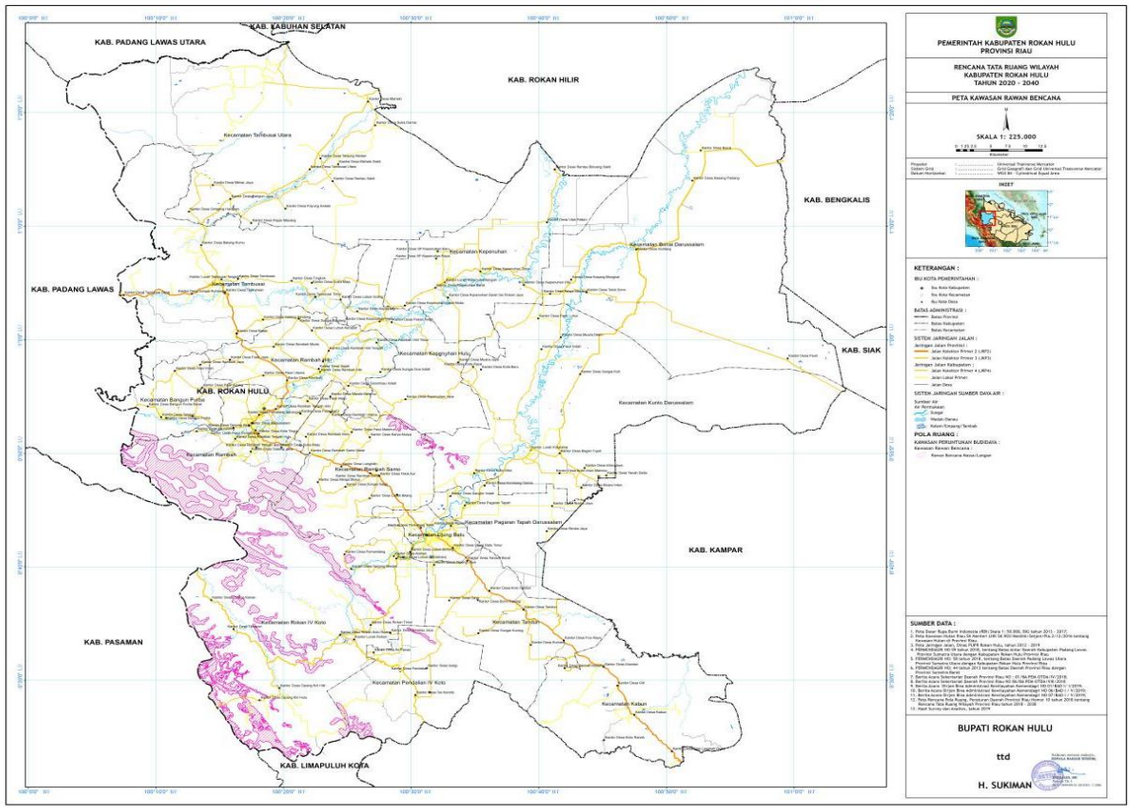
Berdasarkan data potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Kepenuhan adalah wilayah kawasan rawan banjir terbesar dengan luas 11.245,09 ha dan Kecamatan Rokan IV Koto menjadi wilayah terbesar berpotensi rawan longsor dengan luas 17.432,85 ha. Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara offline, bahwa kejadian banjir cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 23 kejadian banjir dan turun kembali menjadi 19 kejadian banjir pada tahun 2024. Selain faktor curah hujan cukup tinggi dan perubahan iklim, angka kejadian banjir dapat dikarenakan penebangan hutan-hutan secara liar didaerah aliran sungai.

Selanjutnya potensi bencana yang besar di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana kebakaran dari 29 kejadian kebakaran pada tahun 2020, menjadi 47 kejadian kebakaran pada tahun 2024. Diikuti oleh bencana kebakaran rumah dari 9 kejadian pada tahun 2020, menjadi 24 kejadian kebakaran rumah pada tahun 2024. Berikut adalah data rekapitulasi peristiwa bencana (kejadian) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II-29
Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebakaran	29	28	40	30	47
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	-	19	24	5
3	Kebakaran Rumah	9	20	16	23	24
4	Kebakaran Pabrik	1	2	1		1
5	Kebakaran Bangunan	11	5	3	5	
6	Kebakaran Gedung Kantor	7	5	3		4
7	Kebakaran Rumah Toko	5	3	3	3	2
8	Kebakaran Kios Pasar	-	-	-	1	4
9	Kebakaran Rumah Makan	-	-	-		1
10	Angin Puting Beliung	2	8	3	4	12
11	Banjir	27	22	17	23	19
12	Tanah Longsor	-	-	-	-	
13	Orang Tenggelam	3	4	3	1	3
Jumlah		**74**	**97**	**108**	**114**	**122**

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II-15
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu

2.1.1.7 Demografi

2.1.1.7.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat sebesar 561,39 jiwa, meningkat menjadi menjadi 582,68 ribu jiwa pada tahun 2022, sempat turun menjadi 573,52 ribu jiwa pada tahun 2023, namun kembali naik pada tahun 2024 menjadi 586,99 ribu jiwa. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II-30
Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d 2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Penduduk
Rokan IV Koto	23,01	23,27	23,61	24,09	24,96	4,25%
Pendalian IV Koto	12,77	12,98	13,24	12,48	12,63	2,15%
Tandun	30,77	31,27	31,89	32,37	33,10	5,64%
Kabun	26,28	26,69	27,20	27,55	28,21	4,81%
Ujung Batu	49,25	50,10	51,14	50,24	51,77	8,82%
Rambah Samo	33,94	34,64	35,47	33,97	34,75	5,92%
Rambah	51,05	52,04	53,24	52,75	54,33	9,26%
Rambah Hilir	40,44	41,04	41,79	41,02	41,71	7,11%
Bangun Purba	18,89	19,22	19,62	19,64	20,25	3,45%
Tambusai	62,02	62,89	64,00	60,88	61,15	10,42%
Tambusai Utara	85,47	86,59	88,02	86,78	87,92	14,98%
Kepenuhan	26,62	27,27	28,04	27,76	29,12	4,96%
Kepenuhan Hulu	18,12	18,36	18,67	18,48	19,08	3,25%
Kunto Darussalam	44,88	45,82	46,94	45,49	46,50	7,92%
Pagaran Tapah Darussalam	11,81	11,97	12,18	12,26	12,30	2,09%

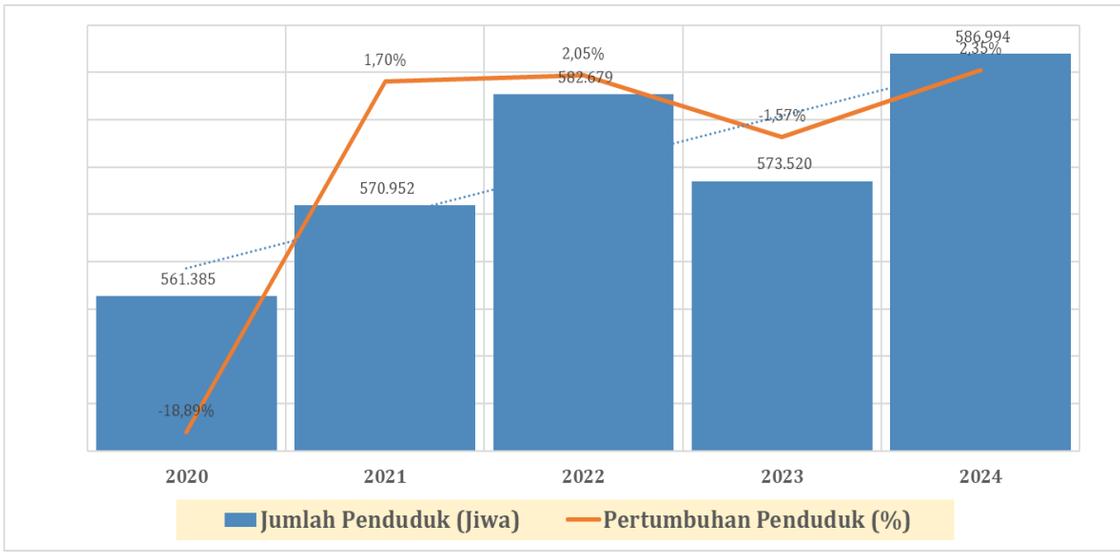
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Penduduk
Bonai Darussalam	26,07	26,80	27,63	27,75	29,21	4,98%
Rokan Hulu	**561,39**	**570,95**	**582,68**	**573,52**	**586,99**	**100,00%**

Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut Kecamatan didominasi oleh jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu sebesar 87,92 ribu jiwa atau setara 14,98% dari jumlah penduduk Rokan Hulu. Diikuti oleh Kecamatan Tambusai yaitu sebesar 61,15 ribu jiwa atau setara 10,42% dari total penduduk Rokan Hulu. Sementara itu jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 12,30 ribu jiwa (2,09%) dan Kecamatan Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar 12,63 ribu jiwa (2,15%).

2.1.1.7.2 Pertumbuhan Penduduk

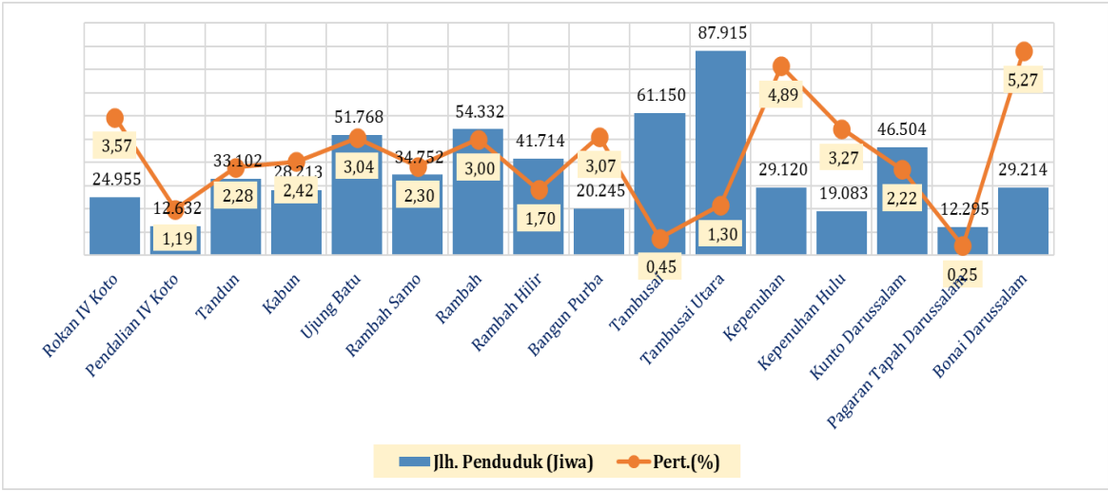
Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat sebesar -18,89%, meningkat menjadi 2,05% pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023 menjadi -1,57% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,35%. Sebagai daerah perkebunan, pertumbuhan penduduk Rokan Hulu disebabkan oleh tingkat kelahiran dan juga migrasi masuk baik antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi perkebunan dan industri menjadikan mobilitas orang ke Rokan Hulu menjadi sangat mudah.



Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-16
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-17
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 tertinggi berada Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 5,27%, Kecamatan Kepenuhan sebesar 4,89%, Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 3,57% dan Kepenuhan sebesar 3,27%. Sedangkan Kecamatan Tambusai Utara dengan penduduk terbanyak hanya tumbuh sebesar 1,30% dan Kecamatan Tambusai hanya tumbuh sebesar 0,45%.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipa dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.1.1.7.3 Kepadatan Penduduk

Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 586.994 jiwa dengan kepadatan 77,36 jiwa per Km2 pada tahun 2024. Kabupaten Rokan Hulu temasuk kategori penduduk jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

Tabel II-31
Kepadatan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Rokan IV Koto	24.955	952,31	26,2
2	Pendalian IV Koto	12.632	204,24	61,85
3	Tandun	33.102	277,63	119,23
4	Kabun	28.213	355,46	79,37
5	Ujung Batu	51.768	99,27	521,49
6	Rambah Samo	34.752	352,33	98,63
7	Rambah	54.332	343,23	158,3
8	Rambah Hilir	41.714	279,16	149,43
9	Bangun Purba	20.245	150,15	134,83
10	Tambusai	61.150	775,16	78,89
11	Tambusai Utara	87.915	951,48	92,4
12	Kepenuhan	29.120	502,81	57,91
13	Kepenuhan Hulu	19.083	297,33	64,18
14	Kunto Darussalam	46.504	777,64	59,8
15	Pagaran Tapah Darussalam	12.295	150,46	81,72
16	Bonai Darussalam	29.214	1.119,49	26,1
	Rokan Hulu	**586.994**	**7.588**	**77,36**

Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2025

Jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Ujung Batu yaitu sebanyak 521,49 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

2.1.1.7.4 Komposisi Penduduk

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,01 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 31,99%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (*dependency ratio*) sebesar 47,03%, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun), terdapat sekitar 47 orang yang berada di luar usia produktif, yaitu penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II-32
Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020 dan 2024

Kelompok Umur	2020			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	22.394	21.819	44.213	20.823	19.491	40.314
5-9	28.676	27.887	56.563	30.033	28.399	58.432
10-14	29.285	27.498	56.783	32.815	30.889	63.704
15-19	29.237	27.774	57.011	26.475	25.223	51.698
20-24	26.728	25.258	51.986	27.641	26.744	54.385
25-29	23.834	23.989	47.823	24.386	23.317	47.703
30-34	24.089	24.255	48.344	21.584	21.956	43.540
35-39	22.906	22.001	44.907	22.366	23.630	45.996
40-44	20.743	19.635	40.378	23.231	22.976	46.207
45-49	17.142	15.796	32.938	20.089	19.049	39.138
50-54	13.424	12.412	25.836	15.802	14.578	30.380
55-59	10.834	9.904	20.738	11.881	11.443	23.324
60-64	7.638	6.947	14.585	8.525	8.339	16.864
65-69	5.096	4.580	9.676	5.696	5.544	11.240
70-74	2.327	2.270	4.597	3.632	3.356	6.988
75+	2.575	2.432	5.007	3.499	3.582	7.081
Jumlah	**286.928**	**274.457**	**561.385**	**298.478**	**288.516**	**586.994**
Sex Ratio	**105**			**103**		

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 105, turun menjadi 103 pada tahun 2024 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,85% dan perempuan sebesar 49,15%.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (*expansive*). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-18
Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2020 dan 2024

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka 68,01% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.

2.1.1.7.5 Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Rokan Hulu pada tahun 2023 sebanyak 585.183 jiwa, sehingga proyeksi penduduk pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 601.632 jiwa, begitu juga pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk meningkat menjadi 641.046 jiwa. Tahun 2035 jumlah penduduk diproyeksikan menjadi 677.452 jiwa, tahun 2040 diproyeksikan menjadi 709.022 jiwa dan pada tahun 2045 jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak 734.281 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-33
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Rokan IV Koto	23.574	24.237	25.825	27.291	28.563	29.581
Pendalian IV Koto	13.291	13.664	14.560	15.386	16.103	16.677
Tandun	31.997	32.896	35.051	37.042	38.768	40.149
Kabun	27.272	28.038	29.875	31.572	33.043	34.220
Ujung Batu	51.375	52.820	56.280	59.476	62.248	64.465
Rambah Samo	35.742	36.746	39.154	41.377	43.306	44.848
Rambah	53.596	55.103	58.713	62.047	64.939	67.252
Rambah Hilir	41.874	43.051	45.871	48.476	50.735	52.543
Bangun Purba	19.716	20.270	21.598	22.825	23.889	24.740
Tambusai	64.084	65.886	70.202	74.189	77.646	80.412
Tambusai Utara	88.057	90.533	96.463	101.942	106.692	110.493
Kepenuhan	28.360	29.158	31.068	32.832	34.362	35.586
Kepenuhan Hulu	18.678	19.203	20.461	21.623	22.630	23.436
Kunto Darussalam	47.321	48.651	51.838	54.782	57.335	59.377
Pagaran Tapah Darussalam	12.201	12.544	13.366	14.125	14.783	15.310
Bonai Darussalam	28.044	28.833	30.722	32.466	33.979	35.190
Rokan Hulu	**585.183**	**601.632**	**641.046**	**677.452**	**709.022**	**734.281**

Sumber : RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat ditelaah dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga. Capaian

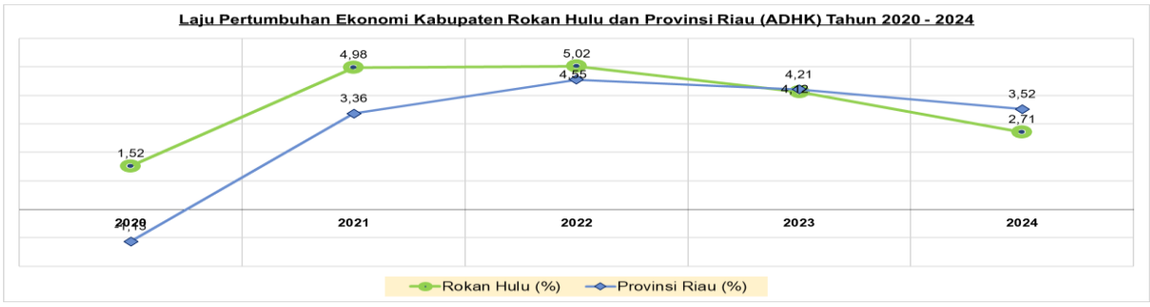
pembangunan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dapat disajikan lebih rinci pada bahagian ini.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Capaian pembangunan yang ditinjau dari keberhasilan peningkatan keejahteraan masyarakat digambarkan dengan menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama 5 tahun terakhir. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah adalah perkembangan produksi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor dalam perekonomian daerah, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang diukur dari capaian indeks gini (gini rasio) dan tingkat kemiskinan. Capaian indikator-indikator tersebut mengindikasikan perkembangan perekonomian daerah untuk meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020-2022 menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Riau, namun pada tahun 2023-2024 berada dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah sebagai nilai produksi seluruh barang dan jasa diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan tahun 2010. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu merupakan keseluruhan nilai dari produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagai ukuran nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan capaian pertumbuhan selama 2020-2022 berada di atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu
berdasarkan PDRB Harga ADHK 2010 Tahun 2020 s.d 2024

Pada masa Pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 1,52%, namun masih tetap tumbuh positif diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pasca pendemi Covid-19, sejak tahun 2021 telah terjadi pemulihan ekonomi hingga mengalami pertumbuhan 5,02% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 sedikit turun

menjadi 4,12% dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,71%. Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu di bentuk oleh dua sektor utama yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Penurun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu utamanya disebabkan oleh turunnya pertumbuhan dua sektor utama yang menjadi mesin perekonomian daerah yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh dari 5,03% pada tahun 2022, menjadi 1,68% pada tahun 2024, diikuti oleh turunnya pertumbuhan sektor industri dari 4,35% pada tahun 2022, menjadi 2,22% pada tahun 2024.

Selanjutnya beberapa sektor yang masih tumbuh meningkat pada tahun 2024 adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 7,44%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,85%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,19%, sektor penyediaan akomodasi makanan sebesar 10,14%, sektor real estate sebesar 3,9%, sektor jasa perusahaan sebesar 7,79%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,96%, dan jasa pendidikan sebesar 4,18%.

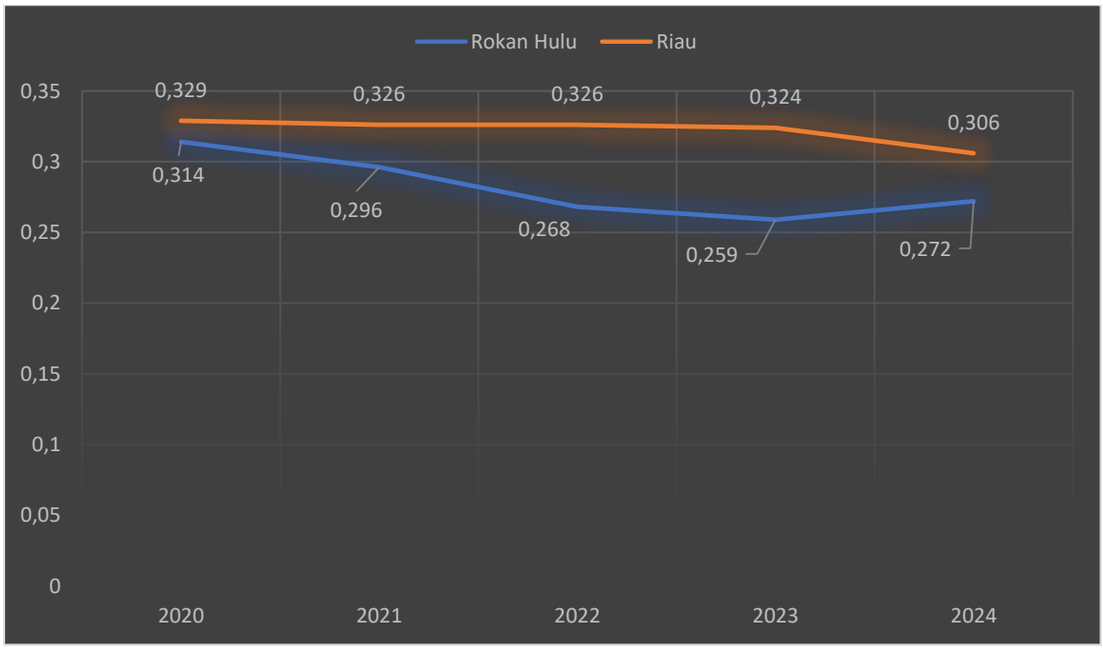
Tabel II-34
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,71	5,6	5,03	3,77	1,68
2	Pertambangan dan penggalian	-5,09	-1,07	1,84	1,57	2,46
3	Industri pengolahan	2,27	4,41	4,35	3,29	2,22
4	Pengadaan listrik dan gas	6,94	6,17	5,24	6,96	7,44
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	0,65	3,08	3,53	4,93	3,15
6	Konstruksi	-3,23	3,57	6,96	7,98	5,63
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-12,75	9,57	12,7	11,36	5
8	Transportasi dan pergudangan	-7,87	2,05	16,14	6,09	7,85
9	Penyediaan akomodasi dan makan	-17,7	13,1	10,24	3,89	10,14
10	Informasi dan komunikasi	8,68	6,34	3,84	5,65	7,19
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,88	3,17	3,26	3,68	3,46
12	Real estate acivity	1,93	2,51	4,56	3,13	3,9
13	Jasa perusahaan	-21,93	1,01	12,78	6,35	7,79
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-3,36	1,86	-0,67	4,14	15,96
15	Jasa pendidikan	2,11	2,14	3,91	3,57	4,18
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,48	10,11	3,12	9,51	5,45
17	Jasa lainnya	-20,71	4,11	10,51	6,18	6,17
	PDRB	**1,52**	**4,98**	**5,02**	**4,12**	**2,71**

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.1.2 Indeks Gini

Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih merata dibandingkan dengan ketimpanga pendapatan antar penduduk Provinsi Riau. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian.



Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-20
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

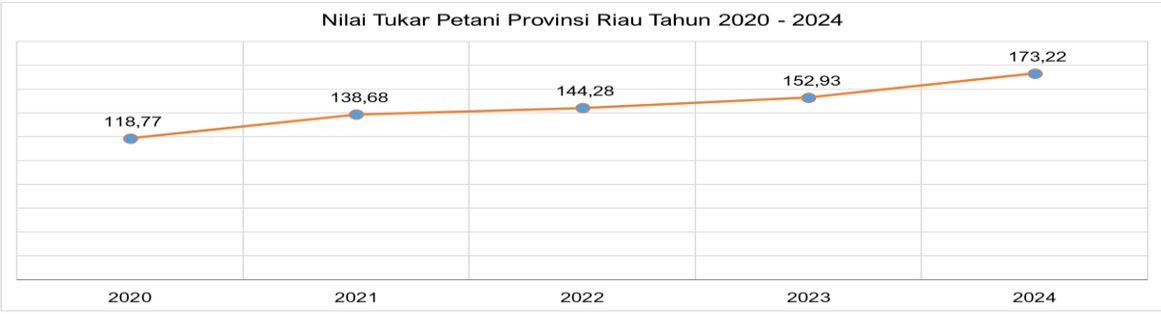
Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari nilai gini ratio Kabupaten Rokan Hulu jauh lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Rokan Hulu mencapai 0,259, atau termasuk kategori ketimpangan rendah. Sedangkan gini rasio Provinsi Riau termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,324. Gini rasio yang rendah mengindikasikan hasil-hasil pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk. Aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian *transfer of payment* dalam bentuk subsidi dan bantual sosial (*social security*) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.2.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) merupakan indikator penting dalam pembangunan, karena menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau bayar, baik untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk pemenuhan input produksi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan demikian, nilai tukar petani yang semakin tinggi menggambarkan daya beli petani produk konsumsi dan input produksi pertanian semakin baik. Nilai tukar petani yang semakin tinggi mengindikasikan kesejahteraan petani yang lebih sejahtera secara relatif.

Nilai tukar pada tingkat 100 mengindikasikan bahwa nilai produksi yang dihasilkan baru mencukupi untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan membeli kebutuhan produksi yang diperlukan petani dalam berusahatani. Perkembangan nilai tukar petani Kabupaten Rokan Hulu diukur dari nilai tukar petani Provinsi Riau, hal ini disebabkan ketersediaan data nilai tukar petani pada tingkat kabupaten tidak di publikasikan oleh BPS Kabupaten. Secara umum, nilai tukar petani di Provinsi Riau menunjukkan trend yang meningkat, mulai dari 118,77 pada tahun 2020 menjadi 173,22 pada tahun 2024.

Karakteristik ekonomi Provinsi Riau dan juga Kabupaten Rokan Hulu yang dominan pada perkebunan dan industri kelapa sawit akan berpengaruh terhadap perubahan harga CPO dunia akan mengakibatkan terjadinya perubahan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi dari perkebunan kelapa sawit petani. Kondisi ini telah memicu perubahan pendapatan petani, karena mayoritas petani Riau dan Rokan Hulu adalah petani kelapa sawit. Pada sisi lain, kebutuhan konsumsi dan input-input pertanian tidak mengalami penurunan, atau dikatakan dalam keadaan tetap.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-21
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024

2.1.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, dan juga di Kabupaten Rokan Hulu. Upaya penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk msikinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung meningkat secara absolut, sehingga menyumbang 15,42% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebesar 9,62%, turun dari tahun 2020 sebesar 10,31%.

Tabel II-35
Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024

Kondisi Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Kebupaten Rokan Hulu					
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	73,35	74,73	73,81	74,38	75,89
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,31	10,4	9,95	9,72	9,62
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	532.643	551.351	585.225	647.599	699.018
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,04	1,51	1,51	1,54	0,96
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,57	0,36	0,34	0,38	0,18
Provinsi Riau					
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	483,39	500,81	485,03	485,66	492,25
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,82	7,12	6,78	6,68	6,67
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	544.057	565.937	605.912	658.611	697.296
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,14	1,06	1,10	1,00	0,97
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,24	0,27	0,24	0,23

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2025

Selama periode 2020–2024, terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, yang mencerminkan meningkatnya biaya minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp532.643 kapita/bulan, kemudian meningkat menjadi Rp 699.018 kapita/bulan pada tahun 2024.

Selama periode 2020-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Riau. Namun, pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu berada diatas capaian garis kemiskinan provinsi. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh inflasi, kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok.

Meskipun demikian, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,96, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau yang mencapai 0,97. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Rokan Hulu masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat provinsi. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,18, yang juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau sebesar 0,23.

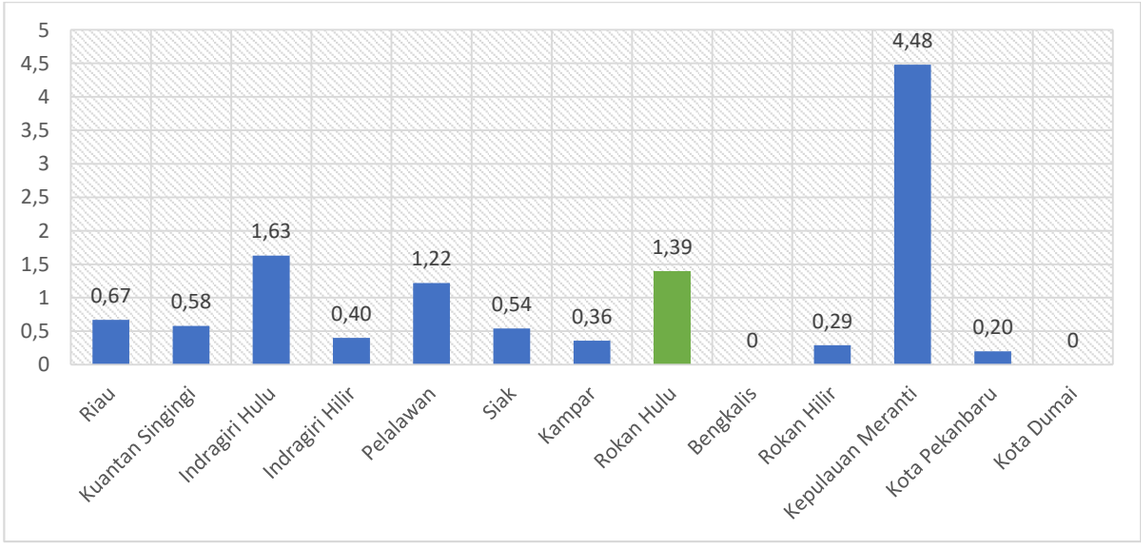
Secara keseluruhan, meskipun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya masih relatif lebih baik dari Provinsi Riau. Namun, peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu tetap menjadi priotitas daerah. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga masih menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Langkah ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. Ada 3 (tiga) hal penyebab kemiskinan ekstrim yaitu (1) Kondisi sosial budaya; (2) Keterbatasan sumber daya; (3) Keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Tingkat Kemiskinan Ekstrim mengukur 2 hal, yakni persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional dan persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan).

Pada tahun 2022 Kab. Rokan Hulu dikategorikan sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem nomor 4 di Provinsi Riau setelah Kab. Kep Meranti, Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2023 estimasi tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebesar 1,39 persen, nomor 3 terbesar setelah Kabupaten Indragiri Hulu. Secara jumlah ke miskinan ekstrem di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 10.65 (ribu jiwa) nomor 1 terbesar di Provinsi Riau.

Untuk menindaklanjuti dalam bentuk intervensi terhadap masyarakat miskin ekstrem maka Kabupaten Rokan Hulu telah menganggarkan sebesar Rp.17.829.248.560 dengan rincian sesuai dengan strategi yang dialokasikan pada 15 (lima belas) OPD, yaitu untuk Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perpustakaan dan Arsip, sedangkan untuk Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



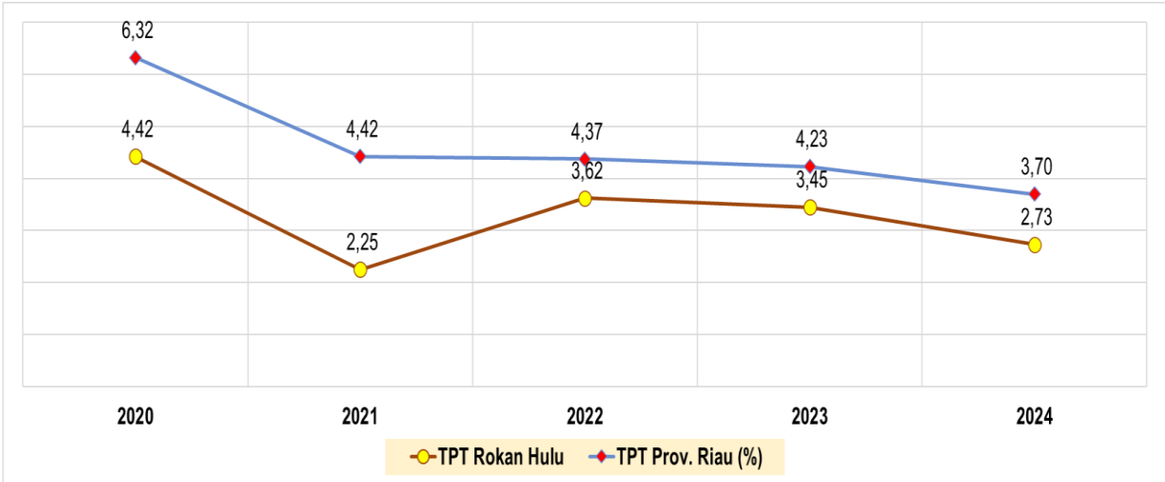
Sumber: Bappeda Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar II-22
Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 10.65 (ribu jiwa) atau setara dengan 1,39 persen sedangkan Provinsi Riau sebanyak 48.73 (ribu jiwa) atau setara 0,67 persen. Secara peringkat Kabupaten Rokan Hulu menduduki peringkat ke 3 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

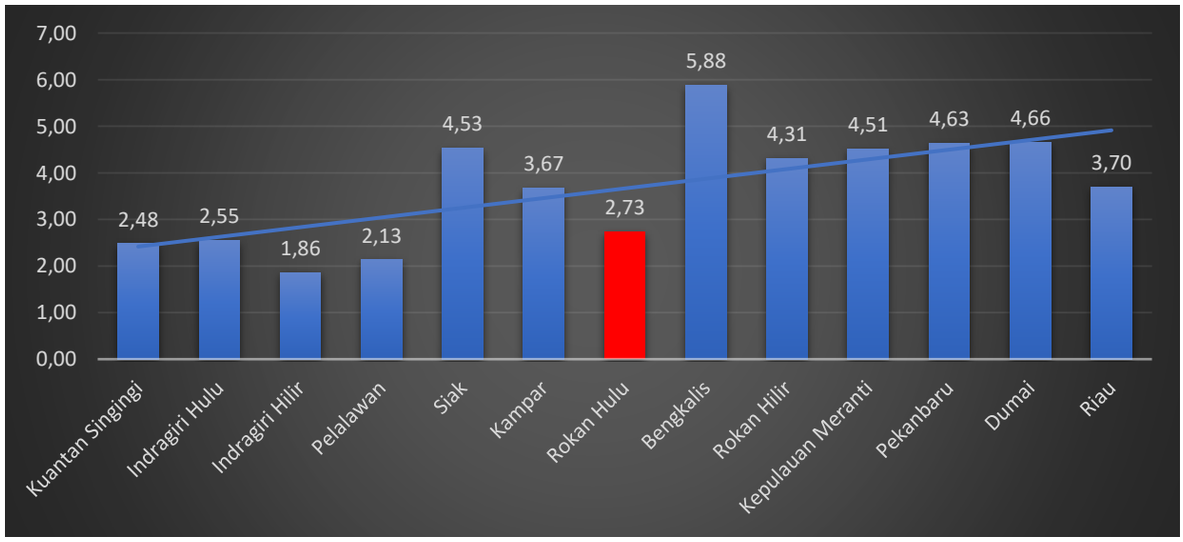
Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-23
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 4,42%, kemudian mengalami menurun mencapai 2,25% pada tahun 2021, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,62% dan turun kembali hingga tahun 2024 menjadi 2,73%. Tingkat pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu menempati urutan ke tiga terendah setelah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

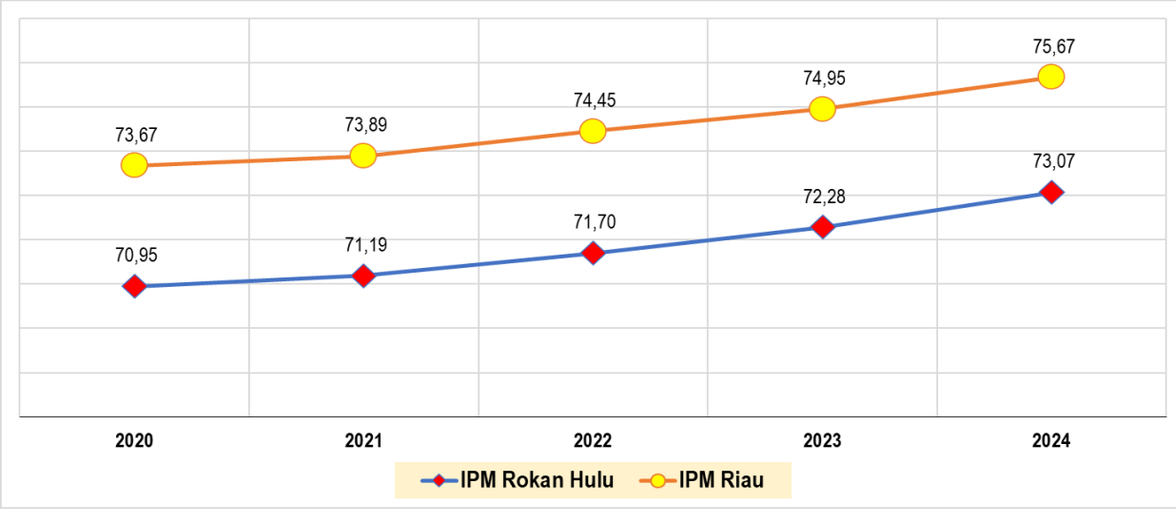
Gambar II-24
Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu tergolong rendah dan berada di bawah capaian Provinsi Riau. Namun, kondisi ini belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, yang justru berada di atas rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak penduduk yang bekerja, pendapatan yang diperoleh belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup secara optimal. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah masih terbatasnya daya saing tenaga kerja di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja serta pengembangan keterampilannya agar masyarakat dapat mengakses pekerjaan dengan upah yang lebih layak, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

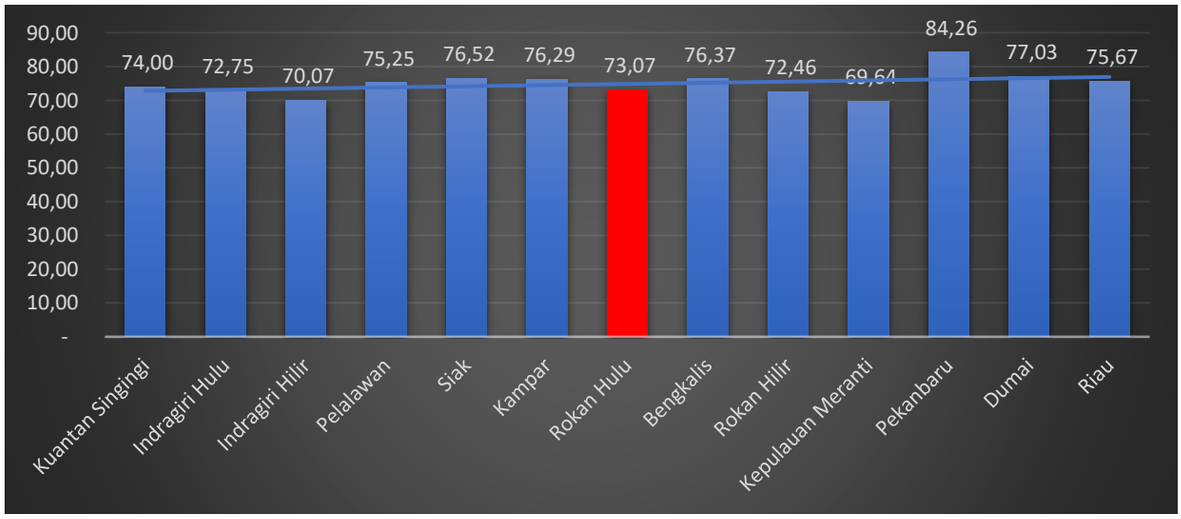
Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rokan Hulu mengalami kenaikan selama periode 2020-2024 dibawah IPM Provinsi Riau dan menempati urutan 8 di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuatan Singingi.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-25
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 70,95 poin dan meningkat menjadi 73,07 poin pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 2,12 poin dalam lima tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Namun, peningkatannya masih tergolong lambat dibandingkan dengan tujuh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, meskipun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Secara keseluruhan, kualitas hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami perbaikan, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mempercepat peningkatan IPM di masa mendatang.

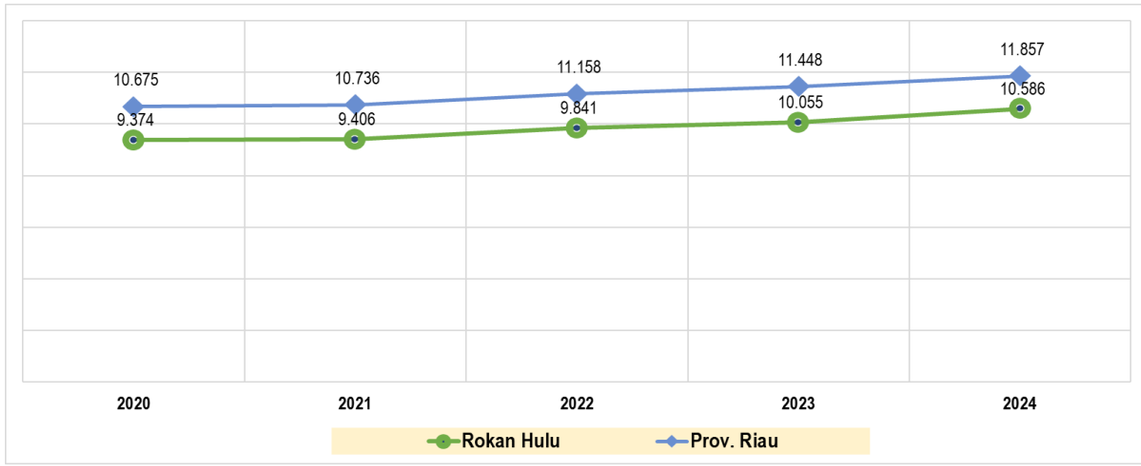


Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-26
Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

❖ **Pengeluaran Riil per Kapita**

Salah satu komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan penduduk adalah standar hidup layak yang dinilai dari kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pengeluaran riil penduduk dalam perhitungan IPM merupakan ukuran tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran riil per kapita penduduk dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

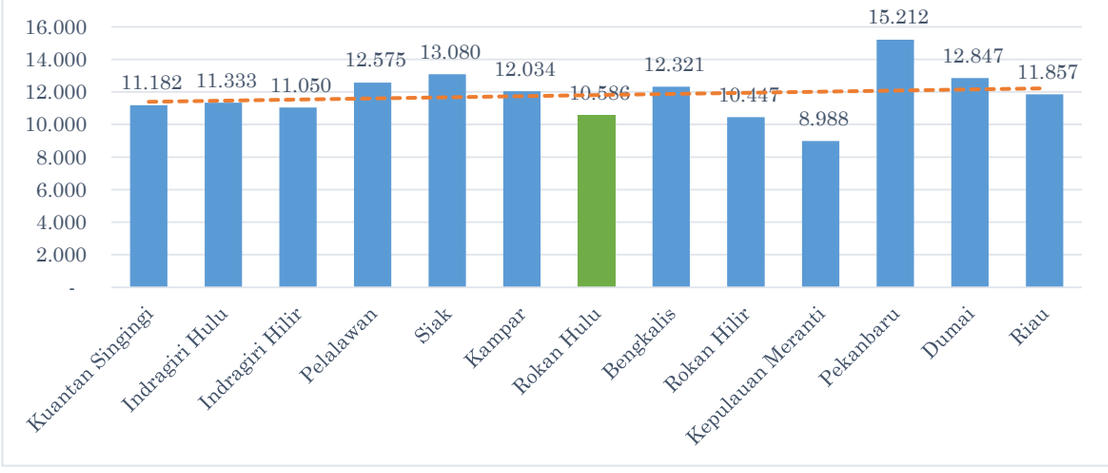


Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-27
Perkembanan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Selama periode 2020-2024, pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami kenaikan yang positif namun lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Riau. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.212 ribu dari Rp. 9.374 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp. 10.586 ribu pada tahun 2024. Namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 15.986 ribu untuk mencapai pengeluaran riil per kapita penduduk

ideal dalam perhitungan IPM yaitu Rp. 26.572 ribu. Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil diukur untuk menghitung total pengeluaran ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk dengan memperhitungkan inflasi. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-28
Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan)
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu berada pada peringkat ke sepulu di Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Rokan Hulu memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk di 9 kabupaten/kota lainnya.

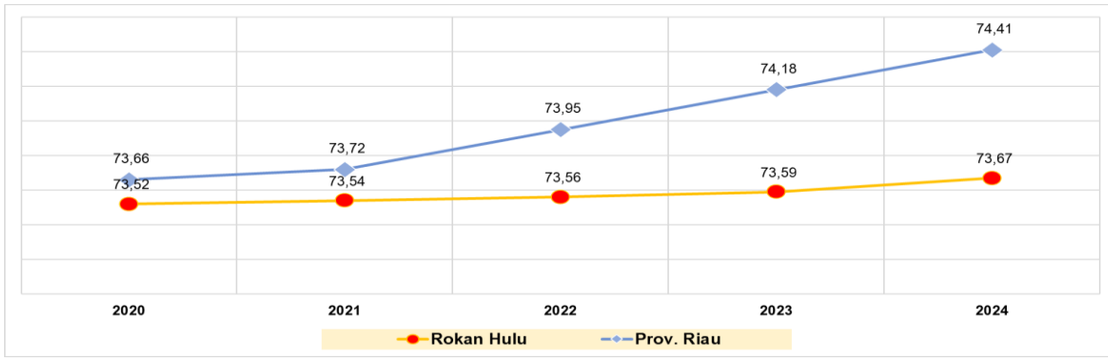
Memperhatikan komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu terlihat bahwa indeks ekonomi merupakan komponen ketiga setelah indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengidikasikan bahwa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup layak bagi seluruh penduduk di Kabupaten Rokan Hulu masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan kebijakan pembangunan bidang ekonomi untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang ideal sesuai dengan harapan dalam pembangunan manusia sesuai dengan perhitungan IPM.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dalam IPM menggambarkan kualitas pembangunan kesehatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. penduduk merupakan jumlah rata-rata usia penduduk yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa mendatang. Umur harapan hidup

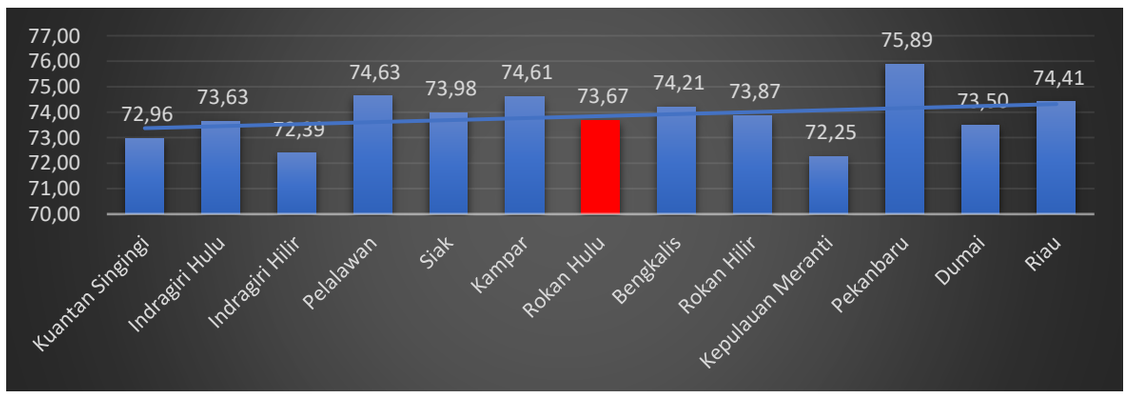
penduduk menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.



Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Gambar II-29
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan 0,15 tahun selama periode 2020-2024, yaitu dari usia harapan hidup 73,52 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,67 tahun pada tahun 2024. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau yaitu sebesar 74,41 tahun pada tahun 2024.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-30
Posisi Capaian Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu
di Provinsi Riau Tahun 2024

Secara umum pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu pada aspek kesehatan mengalami perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu semakin membaik, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Umur harapan hidup Kabupaten Rokan Hulu berada pada peringkat ketujuh di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pembangunan kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi sangat penting untuk meningkatkan menurunkan permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemerintah, lembaga

kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mempromosikan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta untuk mengedukasi individu tentang pentingnya perawatan kesehatan pencegahan dan promosi kesehatan. Melalui upaya ini, pembangunan kesehatan dapat menjadi pilar utama dalam pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.1.2.2.2 Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) atau Prevalensi Kontrasepsi Modern di Kabupaten Rokan Hulu memiliki trend yang berfluktuatif menurun dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 persen dan terakhir pada tahun 2024 sebesar 62,63 persen. Modern *Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) atau Prevalensi Kontrasepsi Modern ini adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS yang ada. Terhadap kondisi capaian Kabupaten Rokan Hulu ini tentunya kedepan Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai strategi dalam upaya-upaya meningkatkan capaian mCPR yang telah dicapai saat ini. Adapun angka pemakaian prevalensi kontrasepsi modern Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-36
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi Perempuan Menikah Usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif	52,298	55.280	21.323	43.575	54.047
2	Jumlah pasangan usia subur	70,359	73.828	41.853	75.179	86.292
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	74.33	74.87	50.95	57,96	62,63

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.2.3 Unmet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)

Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami *unmet need* beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya (*mistimed*) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted*). Baik kejadian *unmet need* maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi para pengelola program.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi cendrung berfluktuatif. pada tahun 2024 adalah sebesar 11,50 persen mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020 yaitu sebesar 21,92 persen. Diperlukan upaya

yang lebih intensif agar indikator ini menjadi lebih baik kedepannya. Adapun Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-37
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	15.420	10.936	9.326	16.140	9.920
2	Jumlah pasangan usia subur	70.359	73.828	41.853	75.179	86.292
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	21,92	14,81	22,28	21,46	11,50

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.2.4 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan usia di bawah 20 tahun.

Tabel II-38
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1,675	1,662	406	250	276
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	27,100	26,970	27.782	28.850	23.628
3	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	61,80	61,62	14,61	44,20	11,68

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa angka *Age Spesifik Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun di Kabupaten Rokan Hulu kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuati menurun. Pada tahun 2019 angka ASFR usia 15-19 tahun adalah sebesar 1.675 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka ini kemudian turun menjadi 276 kelahiran per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2024. Menurunnya angka ASFR 15-19 tahun pada tahun 2022-2024 diakibatkan banyaknya perempuan yang melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya komoditas dan harga kelapa sawit yang berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita keluarga.

2.1.2.2.5 Indeks Keluarga Sehat

Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang biasa disebut rumah tangga atau keluarga inti. Sejalan dengan itu maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari suatu keluarga menentukan derajat kesehatan keluarga. Disisi lain, peningkatan dan pengembangan peran desa dan kelurahan dalam pembudayaan PHBS adalah pemberdayaan keluarga dalam mempraktikkan PHBS secara satuan keluarga dan secara luas dalam berkehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat pada wilayah tersebut dapat meningkat dan terwujud.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS- PK) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sehat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan melakukan kunjungan keluarga dan melakukan intervensi sesuai permasalahan kesehatan yang dihadapi keluarga dan masyarakat, yang diukur melalui indikator keluarga sehat.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) dihitung berdasarkan dua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarannya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dimana kategorinya terbagi dalam 3 kelompok, antara lain keluarga sehat bila nilai IKS > 0,8, keluarga pra sehat bila nilai IKS 0,5 <0,8 dan keluarga tidak sehat bila nilai IKS <0,5.

Adapun kedua belas indikator pembentuk Indeks Keluarga Sehat adalah:

1. Keluarga mengikuti program KB, dimana tidak sekedar membatasi jumlah anak tapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terkait ASI, kecukupan pemenuhan gizi yang berkualitas, maupun pola asuh.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten sehingga ibu dan bayi bisa mendapatkan penanganan segera jika terjadi komplikasi. Selain itu, bayi juga akan mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) yang baik untuk pertumbuhannya.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti polio, difteri, hepatitis B, hingga meningitis.
4. Bayi mendapat ASI ekslusif, diberikan hingga anak berusia dua tahun. Pemberian ASI menunjang tumbuh kembang yang optimal. Bayi yang diberi ASI pun tidak mudah sakit. Sebab, ASI merupakan sumber makanan terbaik untuk bayi. Proses pemberian ASI juga baik untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan anak.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, sehingga dapat dipantau perkembangannya, dan jika tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan dapat segera dilakukan perbaikan.
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, apabila tidak segera mendapat pengobatan, pasien bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya, jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala TBC, segera dilakukan pemerikaan ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, hipertensi atau tekanan darah rendah adalah penyakit berbahaya yang sering disepelekan karena tidak bergejala. Padahal, dampaknya bisa fatal. Pencegahan hipertensi bisa dilakukan dengan metode CERDIK: cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stress.

8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan. Gangguan jiwa dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda- tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat guna mendapatkan penanganan yang tepat.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Dalam satu barang rokok, terdapat sekitar 4.000 zat kimia beracun. Dampaknya bahkan tidak hanya merugikan orang yang merokok (perokok aktif), tapi juga orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Untuk itu, sebaiknya kebiasaan merokok dikurangi atau dihentikan.
10. Keluarga mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh anggota keluarga mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, dengan sumber air harus selalu dijaga kebersihannya dan dilengkapi saluran pembuangan air, dimana tempat penyimpanan air juga harus bebas kotoran dan lumut. Letak sumber air harus berjauhan dengan jamban dan pembuangan sampah (minimal 10 meter).
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih, dengan buang air kecil dan besar di jamban, sumber air dan tanah pun tidak tercemar. Ini akan menghindarkan keluarga dari penyakit diare, kolera, disentri, tifus, hingga infeksi saluran pencernaan.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 maupun Tahun 2024 masih tetap sama sebesar 0.192 poin, dan pada Tahun 2024 berada dibawah Provinsi Riau sebesar 0,001 poin, dimana berdasarkan kategori masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Untuk lebih jelasnya capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-39
Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 s.d 2024

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2023	2024
1	Kampar	0.354	0.358
2	Indragiri Hulu	0.172	0.174
3	Bengkalis	0.125	0.127
4	Indragiri Hilir	0.072	0.073
5	Pelalawan	0.206	0.206
6	**Rokan Hulu**	**0.192**	**0.192**
7	Rokan Hilir	0.090	0.090
8	Siak	0.135	0.136
9	Kuantan Singingi	0.105	0.105
10	Kepulauan Meranti	0.107	0.108
11	Pekanbaru	0.298	0.298
12	Dumai	0.194	0.194
	Riau	**0.192**	**0.193**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan nilai IKS diatas maka intervensi perlu dilakukan berdasarkan capaian atas nilai-nilai dari 12 indikator IKS, seperti apakah penderita TB Paru yang berobat sesuai standar telah dilaksanakan di daerah, apakah penderita Hipertensi sudah berobat secara teratur, apakah seluruh keluarga sudah mengikuti program KB di daerah dan lainnya sebagaimana 12 indikator IKS yang ada. Hal ini tentunya berujung pada kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

2.1.2.2.6 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-40
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk (orang)	30	6	68	36	53
2	Jumlah balita (orang)	42.071	36.935	40.836	47.103	50.617
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,07	0,02	0,2	0,07	0,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024, prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 53 orang atau sebesar 0,10 persen dari total 50.617 balita yang ditimbang, berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana kasus gizi buruk tercatat sebanyak 36 orang atau 0,07 persen dari 47.103 balita. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus, namun capaian ini masih berada di bawah ambang batas target nasional, yaitu kurang dari 2 persen, sehingga secara umum Kabupaten Rokan Hulu masih berada dalam kategori aman dalam hal prevalensi gizi buruk balita.

2.1.2.2.7 *Prevalensi Stunting*

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2018 prevalensi stunting balita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 27,3 persen. Sedangkan *prevalensi stunting* Rokan Hulu berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tingkat prevalensi stunting sebesar 24,37 jika dibanding data sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar 2,93 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) *prevalensi stunting* Kabupaten Rokan Hulu naik sebesar 1,43 menjadi 25,8 persen (Akibat pandemi covid-19) dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) turun 3,8 persen menjadi 22 persen, Sementara itu, berdasarkan hasil dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2025, *prevalensi stunting* diKabupaten Rokan Hulu tahun 2024 tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 20,1 persen.

Tabel II-41
Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi stunting Balita	24,37	25,80	22	15,9	21,4

Sumber: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2025

Sejalan dengan hal tersebut, penilaian kinerja konvergensi stunting, yang didasarkan pada implementasi 8 aksi konvergensi oleh Pemerintah Kabupaten dan dinilai oleh Tim Provinsi Riau, memperlihatkan fluktuasi dalam pencapaian:

- Tahun 2019 (untuk aksi tahun 2018), Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai C.
- Tahun 2020 (aksi tahun 2019), nilai meningkat menjadi 70, dari dua kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2021 (aksi tahun 2020), memperoleh nilai 76, dan berada di peringkat ketiga dari lima kabupaten.
- Tahun 2022 (aksi tahun 2021), peringkat ketujuh dari 12 kabupaten/kota.
- Tahun 2023 (aksi tahun 2022), kinerja meningkat signifikan dengan nilai 94 dan peringkat keempat dari 12 kabupaten/kota.
- Namun, tahun 2024 (aksi tahun 2023), peringkat menurun menjadi peringkat ke-12 dari 12 kabupaten/kota.

Meskipun terdapat penurunan dalam peringkat kinerja pada tahun 2024, capaian *prevalensi stunting* yang terus menurun menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan masih cukup efektif.

Anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 berjumlah 273 anak, dengan rincian per kecamatan lokus stunting sebagai berikut :

Tabel II-42
Data Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak
1	Kecamatan Rambah	Desa Tanjung Belit	12
2	Kecamatan Rambah Hilir	Desa Muara Musu	16
3	Kecamatan Bangun Purba	Desa Bangun Purba Desa Bangun Purba Barat Desa Bangun Purba Timur Jaya	21 29 39
4	Kecamatan Tambusai	Desa Tambusai Timur	30
5	Kecamatan Rokan IV Koto	Desa Cipang Kiri Hulu Desa Cipang Kanan	62 8
6	Kecamatan Kunto Darussalam	Desa Pasir Indah	10
7	Kecamatan Bonai darussalam	Desa Bonai	16
8	Kecamatan Pendalian IV koto	Desa Suligi	12
9	Kecamatan Kabun	Desa Bencah Kesuma	18
Jumlah			**273**

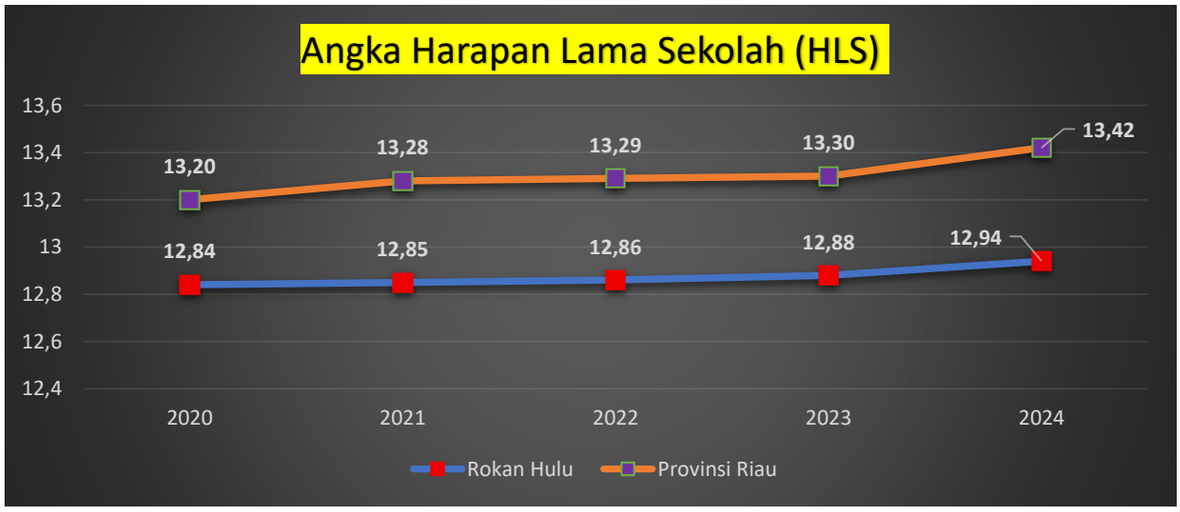
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah lama sekolah formal (diukur dalam tahun) yang diharapkan penduduk akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (ditetapkan pada usia 7 tahun) pada masa yang akan datang. Harapan lama sekolah disebut angka harapan sekolah yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak dari kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang

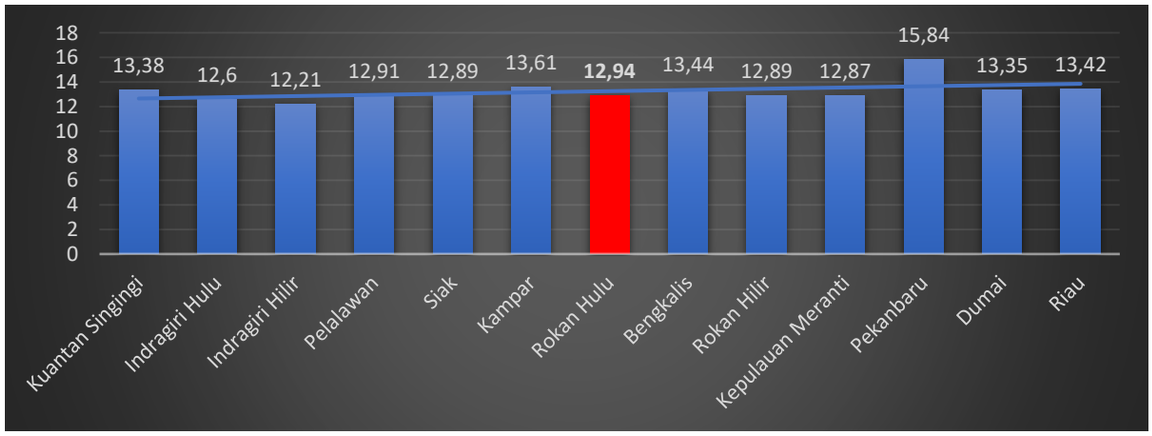
yang dibangun. Harapan lama sekolah akan berkaitan dengan pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan oleh daerah untuk menjamin anak-anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan secara maksimal. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-31
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah 12,84 tahun dan meningkat menjadi 12,94 tahun pada tahun 2024 atau setara semester dua perguruan tinggi. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 13,20 tahun dan meningkat menjadi 13,42 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Selanjutnya harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu berada di peringkat keenam pada tahun 2024 setelah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

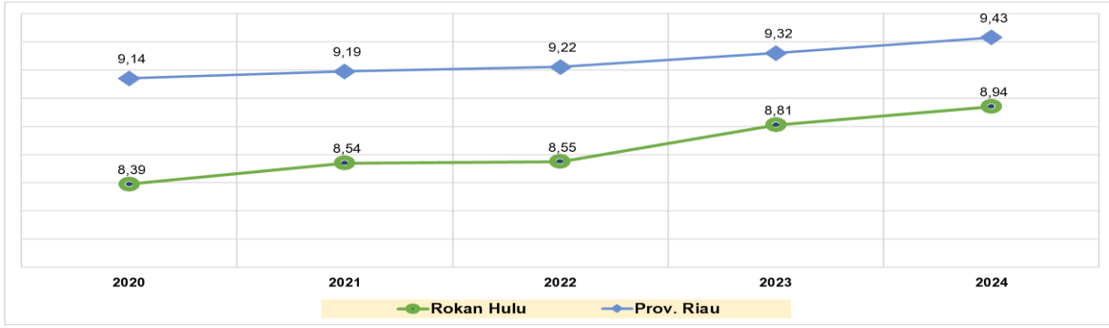
Gambar II-32
Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024

Memperhatikan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau pada bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan harapan sekolah penduduk sebagai komposit pembentukan IPM masih berada di bawah capaian IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah penduduk masih diperlukan investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi akses ke pendidikan, seperti masalah keuangan, kelalaian gender, dan masalah transportasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini demi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan pendidikan masih perlu terus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Untuk mencapai harapan lama sekolah sampai pada tingkat ideal 18 tahun masih diperlukan peningkatan secara gradual hingga 5,06 tahun lagi. Kebijakan pembangunan pendidikan terutama pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi bagi penduduk Rokan Hulu dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Rokan Hulu yang ingin melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dan memperluas cakupan Pendidikan Tinggi bagi penduduk Rokan Hulu menjadi pilihan kebijakan pembangunan pendidikan.

2.1.2.3.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata yang ditempuh oleh individu dalam suatu populasi. Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang digunakan oleh penduduk berusia diatas 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Rata-rata lama sekolah ideal dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Trend capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu terus meningkat hingga mencapai 8,94 tahun pada tahun 2024 atau berada di kelas tiga SMP.

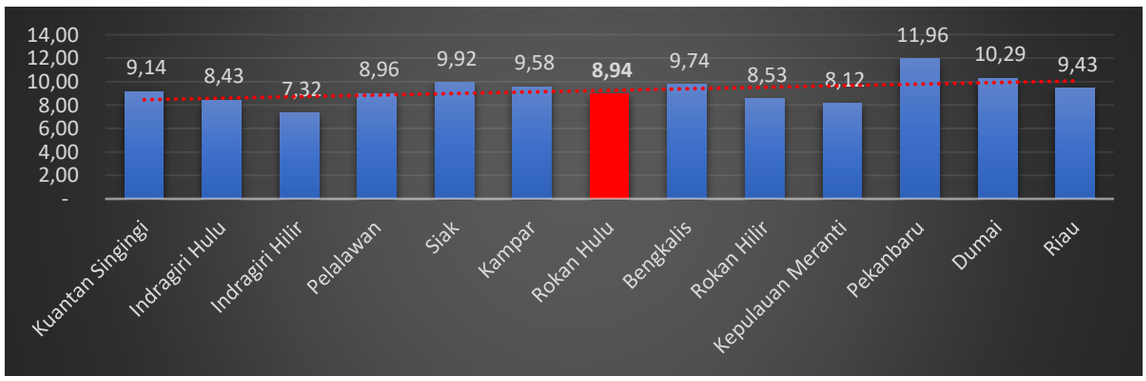
Peningkatan rata-rata sekolah yang cukup baik dapat mengindikasikan beberapa hal yang positif dalam konteks pendidikan dan pembangunan manusia, yang merupakan modal penting dalam pembangan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Riau, maka capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu masih berada dibawah capaian Provinsi, yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang lebih rendah selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-33
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 8,39 pada tahun 2020, Angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,54 pada tahun 2021, dan sedikit naik menjadi 8,55 pada tahun 2022 Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan RLS mencapai 8,81 tahun, dan terus meningkat menjadi 8,94 tahun pada tahun 2024. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hulu berada pada peringkat ke delapan pada tahun 2024 setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. Masih diperlukan percepatan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga mencapai rata-rata lama sekolah ideal (15 tahun).



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-34
Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu
di Provinsi Riau Tahun 2024

Selama periode 2020-2024 rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hulu meningkat sebesar 0,55 poin. Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk

mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualis sumberdaya manusia daerah. Kebijakan pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 6,06 tahun lagi untuk mencapai rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hingga 15 tahun atau setingkat pendidikan Diploma III.

2.1.2.3.3 Literasi dan Numerasi

a. Literasi Membaca dan Numerasi Tingkat SD dan SMP

Literasi membaca adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan bahasa tertulis yang dibutuhkan masyarakat atau dihargai oleh individu. Literasi membaca juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan informasi dan mentransformasikannya dari bacaan atau tulisan.

Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif yang ada di sekitar kita. Numerasi berbeda dengan matematika, meskipun keduanya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Perbedaannya terletak pada pengaplikasiannya. Numerasi mencakup keterampilan menerapkan konsep dan kaidah matematika dalam situasi nyata, sedangkan matematika hanya memecahkan masalah matematis.

Terkait literasi membaca dan numerasi saat ini sudah menjadi standar kompetensi yang dituangkan dalam assesment pendidikan secara nasional. Adapun persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional di Kabupaten Rokan Hulu dan Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-43
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

Uraian		2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional				
A	Literasi membaca SD	54,03	57,1	63,96
	Numerasi SD	29,33	40,67	52,46
B	Literasi membaca SMP	49,64	63,42	63,1
	Numerasi SMP	33,43	38,85	58,92
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum				
C	Literasi membaca SD	51,39	54,23	54,93
	Numerasi SD	27,68	39,21	46,2
D	Literasi membaca SMP	46,03	56,49	48,83
	Numerasi SMP	31,31	31,96	34,28

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dan 2025

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Secara etimologi dan terminologi Indeks pambangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis dan memahami infromasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

IPLM mencakup berbagai aspek literasi seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup Upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat beberapa kategori penilaan dalam skor IPLM yaitu sangat rendah berada pada rentang 0 - 29,9, rendah pada rentang 30 - 49,9, sedang berada rentang 50 - 79,9, tinggi berada pada rentang 80 - 89,9 dan sangat tinggi berada pada rentang 90 -100.

IPLM Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sebesar 66,07 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 70,98. Selanjutnya pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,69 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 66,88. Lebih lanjut pada tahun 2024 IPLM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 32,99, turun signifikan, kedalam kategori rendah dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 69,24. Penurunan ini disebabkan oleh hampir semua dimensi pembentuk IPLM Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-44
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	Skor IPLM
1	**Kabupaten Rokan Hulu**								
	IPLM Tahun 2022	0,0013	1,8569	0,0011	0,4040	1,4672	0,2672	0,6271	66,07
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2022	0,0017	1,6199	0,0029	0,4520	1,8885	0,3232	0,6804	70,98
2	**Kabupaten Rokan Hulu**								
	IPLM Tahun 2023	0,2608	0,2457	0,1416	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	52,69
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2023	0,3518	0,2753	1,0000	0,0543	1,0000	1,0000	1,0000	66,88
3	**Kabupaten Rokan Hulu**								
	IPLM Tahun 2024	0,2016	0,159	0,2521	0,0449	1,0000	0,2281	0,3631	32,99
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2024	0,3503	0,4176	1,0000	0,0787	1,0000	1,0000	1,0000	69,24

Sumber: Perpustakaan Nasional Tahun 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Dasar hukum untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Undang-undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pada tahun 2020 kepesertaan jaminan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 338.539 jiwa dengan cakupan sebesar 60,30 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian UHC sebesar 536.530 jiwa dengan cakupan kepesertaan sebesar 97,21 persen. Adapun cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel II-45
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian UHC	338.539	351.032	436.405	489.552	536.530
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	561.385	570.952	582.679	573.520	579.685
3	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan	60,30	61,48	74,90	85,36	97,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Semesta *Coverage* Kepesertaan adalah jumlah masyarakat pekerja Kabupaten Rokan Hulu (NIK Kabupaten Rokan Hulu) yang *eligible* untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Total *Coverage* Kepesertaan adalah jumlah masyarakat pekerja Kabupaten Rokan Hulu (NIK Kabupaten Rokan Hulu) yang terdaftar baik peserta aktif maupun non aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara Nasional. *Coverage* Kepesertaan Aktif adalah jumlah masyarakat pekerja Kabupaten Rokan Hulu (NIK Kabupaten Rokan Hulu) terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara Nasional, sementara Persentase *Coverage* Kepesertaan Aktif adalah persentase jumlah *Coverage* kepesertaan aktif dibanding jumlah semesta *Coverage* kepesertaan.

Tabel II-46
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Semesta *coverage* kepesertaan	201.320	235.687	242.131
2	Total *coverage* kepesertaan	88.242	96.652	108.823
3	*Coverage* kepesertaan aktif	56.995	61.677	72.551
4	Persentase *coverage* kepesertaan aktif	28,31	26,17	29,96

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Persentase Penanganan Konflik SARA

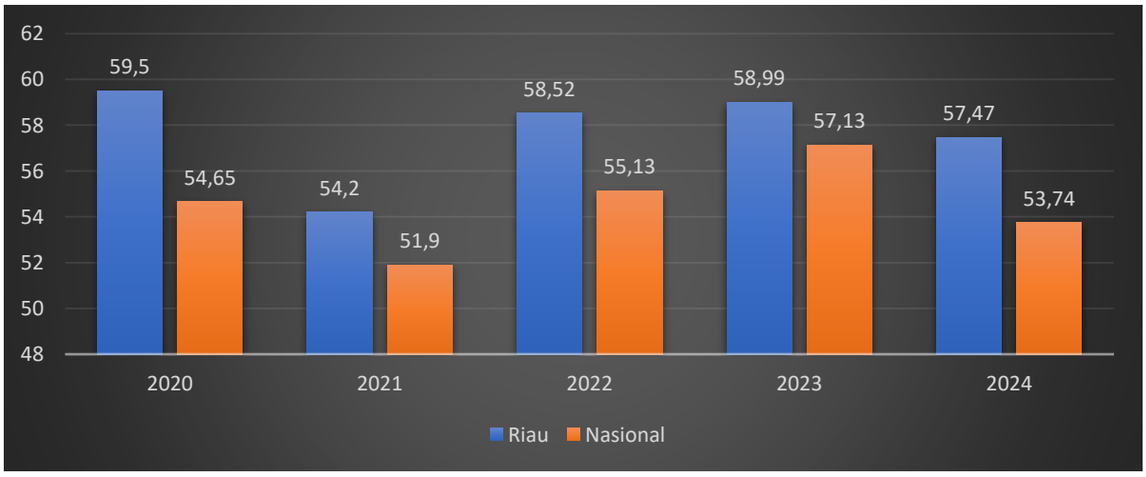
Tabel II-47
Persentase Penanganan Konflik Sara
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan Konflik Sara	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sampai saat ini pemerintah pusat/ kementerian terkait belum menyajikan sampai pada level kabupaten/kota. Untuk data IPK Provinsi Riau sebagai induk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Kemdikbud Tahun 2025

Gambar II-35
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2020 s.d 2024

a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kebudayaan menjadi penting untuk dikelola sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Pemajuan Kebudayaan bukan hanya peningkatan intensitas dan frekuensi kegiatan promosi kesenian, upacara adat dan sebagainya, tetapi merupakan revitalisasi kehidupan berbudaya yang merupakan revitalisasi penerapan nilai-nilai, norma dan etika budaya ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan Kabupaten berpedoman pada Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten. Dokumen PPKD Kabupaten telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor Kpts. 431/DISPARBUD/743/2018 dan diperbarui dengan Keputusan Bupati terbaru dengan Nomor Kpts. 100.3.3.2/DISPARBUD/328/2025. 10 (Sepuluh) objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat

istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, ritus dan 1 (satu) objek cagar budaya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-48
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah berdasarkan SK Bupati No. Kpts.431/DISPARBUD/743/2018	Jumlah berdasarkan SK Bupati No. Kpts.100.3.3.2/DISPARBUD/328/2025
1	Tradisi Lisan	80	117
2	Manuskrip	5	8
3	Adat Istiadat	15	24
4	Ritus	46	57
5	Pengetahuan Tradisional	148	200
6	Teknologi Tradisional	36	59
7	Seni	31	33
8	Bahasa	11	11
9	Permainan Rakyat	25	25
10	Olahraga Tradisional	14	14
11	Cagar Budaya	350	350
	Total	**761**	**898**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu

b. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)dalam upaya pelindungan status Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai bagian dari Kebudayaan Melayu Rokan Hulu. Adapun Penetapan Warisan Budaya Tak benda disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-49
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	1 (Upah-upah)	-	1 (Gondang Berogong)	-	1 (Bo'onou Rokan Hulu)

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Rokan Hulu

Pelestarian bermakna pada upaya untuk memanfaatkan, melindungi dan mengembangkan. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk memanfaatkan cagar budaya, melindungi dari kemusnahan dan mengembangkannya. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurun waktu 2020-2024, situs dan kawasan cagar budaya yang tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 381 cagar budaya. Sedangkan Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 20 cagar budaya (5,25%) dari 381 unit benda cagar budaya yang tercatat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelestarian cagar budaya di Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-50
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	20	20	20	20
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	381	381	381	381	381
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu, terihat dalam kurun waktu tahun 2020-2024, jumlah grup kesenian cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 348 grup kesenian meningkat menjadi 450 grup kesenian di tahun 2024. Meskipun aktivitas seni dan budaya trendnya meningkat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya menggali potensi seni dan budaya serta mendukung dan mengembangkan kelompok-kelompok seni dan budaya tersebut agar tetap lestari.

Tabel II-51
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	348	347	434	445	450
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Adapun jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2024 terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel II-52
Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Rambah	102	10
2	Rambah Hilir	107	
3	Rambah Samo	23	
4	Kepenuhan	35	
5	Kepenuhan Hulu	29	
6	Tambusai	32	1
7	Tambusai Utara	15	
8	Rokan IV Koto	18	
9	Pendalian IV Koto	9	
10	Bonai Darussalam	9	
11	Kunto Darussalam	14	
13	Tandun	8	
14	Kabun	2	
15	Bangun Purba	14	
16	Ujungbatu	33	1
Jumlah		**450**	**12**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008) Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0- 100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70; c) baik (berkualitas di atas 70).

Tabel II-53
Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,67	56,63	63,37	63,27

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025

2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator dalam mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah,

baik pusat maupun daerah. Adapun capian indikator tersebut di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-54
Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Daerah	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatof	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Kab. Rokan Hulu	49,62	91,05	77,7	27,64	75,35	65,50	62,63	77,74
Prov.Riau	46,20	82,40	77,32	29,26	78,81	63,89	59,60	80,09

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

Tabel II-55
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Kabupaten Rokan Hulu	81,88	82,12	82,44	82,72	83,05
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Provinsi Riau	88,14	88,38	88,71	88,98	89,32
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu	52,08	51,71	52,4	52,15	55,00
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau	68,7	70,59	71,16	72,29	64,72
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62

Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Provinsi Riau dan BPS Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang positif dalam hal Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 81,88 dan mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 83,05 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun demikian, IPG Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau maupun angka nasional. Sementara itu, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada tahun 2020, IDG berada di angka 52,08, sempat mengalami sedikit fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, dan akhirnya mengalami lonjakan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 55,00. Kenaikan ini mengindikasikan

adanya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, meskipun angka IDG tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

2.1.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren penurunan, yang menandakan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Rokan Hulu. Nilai IKG pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,603, yang mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Pada tahun 2021, IKG menurun menjadi 0,554, lalu sempat meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 0,590. Namun, tren positif kembali terlihat pada tahun 2023 dengan penurunan IKG menjadi 0,556, dan pada tahun 2024, nilai IKG berhasil ditekan hingga mencapai 0,498. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait mulai berhasil mengurangi ketimpangan gender, melalui program-program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan Perempuan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau (0,471) dan nasional (0,421) pada tahun 2024, IKG Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender perlu terus diperkuat, baik melalui perluasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi dalam dunia kerja dan politik.

Tabel II-56
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu	0,603	0,554	0,59	0,556	0,498
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov, Riau dan BPS Tahun 2025

2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kemajuan pembangunan kepemudaan pada berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi. Secara nasional, IPP menunjukkan tren meningkat dari 52,67 pada 2019 menjadi 57,67 pada 2024, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi.

Provinsi Riau memperlihatkan fluktuasi dalam periode yang sama. Nilai IPP Riau tercatat 52,67 pada 2019, turun menjadi 50,67 pada 2020, kemudian meningkat tajam menjadi 56,17 pada 2021, melampaui capaian nasional. Namun, pada 2022 IPP Riau menurun menjadi 52,17, lalu kembali naik dan stabil di 55,17 pada 2023–2024. Secara keseluruhan, capaian IPP Riau menunjukkan kemajuan yang positif namun belum stabil, serta masih sedikit di bawah rata-rata nasional pada dua tahun terakhir maka diperlukan penguatan program pembangunan kepemudaan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan IPP di masa mendatang.

Tabel II-57
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2024

Tahun	Nasional	Provinsi Riau
2019	52,67	52,67
2020	51,00	50,67
2021	53,33	56,17
2022	55,33	52,17
2023	56,33	55,17
2024	57,67	55,17

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Keberadaan wirausaha muda di Kabupaten Rokan Hulu juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat persentase wirausaha muda sebesar 16,6 persen di tahun 2020 hingga 2024 bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wira usaha. Terkait hal tersebut Kabupaten Rokan Hulu perlu menyediakan prasarana pendukung sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Tabel II-58
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten di Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha muda	80	80	80	80	80
2	Jumlah seluruh wirausaha	480	480	480	480	480
3	Persentase wirausaha muda	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk < 15 tahun atau 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk > 64 tahun atau penduduk 65 tahun ke atas dimana keduanya disebut bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun yang merupakan angkatan kerja. Berdasarkan data tahun 2024, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 47,03 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar lebih kurang 47 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 27,67, dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 4.31 pers. Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) ini termasuk kategori sedang terutama penduduk muda. Namun hal ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang.

Tabel II-59
Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	157.559	158.548	160.181	162.392	162.450
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	19.280	20.974	22.846	23.227	25.309
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif ((1) dan (2)	176.839	179.522	183.027	185.619	187.759
4	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	384.546	391.430	399.652	387.901	399.235
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	45,99	45,86	45,80	47,85	47,03

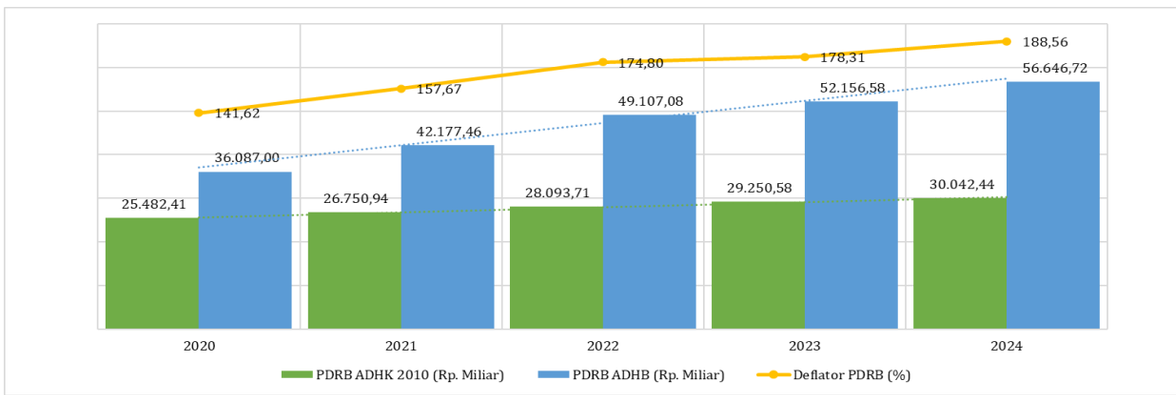
Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2024 masih mengandalkan usaha ekonomi yang bergerak di sektor primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. *Purchasing Power Parity* (PPP) didefinisikan sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Kemampuan daya beli tersebut merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup secara layak.

2.1.3.2.1 Perkembangan PDRB

Secara absolut, nilai produksi agregat seluruh aktivitas perekonomian daerah di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan selama 2020-2024. PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024 ADHK tahun 2010 cenderung meningkat dari Rp. 25.482,41 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 30.042,44 milyar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB harga konstan mengindikasikan terjadinya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada perekonomian secara agregat. Perkembangan PDRB ADHB dari Rp. 36.087,00 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 56.646,72 milyar pada tahun 2024. Perkembangan PDRB harga berlaku dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga produk dan jasa. Kenaikan harga dalam PDRB harga berlaku terlihat dari deflator PDRB yang cenderung meningkat dari 141,62 persen pada tahun 2020 menjadi 188,56 persen pada tahun 2024. Berikut adalah perkembangan PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024, yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-36
Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Konstant
(Dalam Triliun) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Kabupaten Rokan Hulu memberikan kontribusi sebesar 5,20 persen terhadap PDRB Provinsi Riau ADHB pada tahun 2020, meningkat menjadi 5,26

persen pada tahun 2024, dan menjadi penyumbang kesepuluh terbesar terhadap keseluruhan perekonomian Provinsi Riau.

Tabel II-60
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp. Milyar)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.566,35	23.454,97	26.629,58	28.315,49	30.985,12
2	Pertambangan dan Penggalian	1.543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45	2.519,75
3	Industri Pengolahan	9.113,03	10.568,20	12.974,19	13.545,54	14.560,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	35,36	37,47	40,84	45,64	49,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,22	2,32	2,51	2,65
6	Kontruksi	1.280,26	1.381,52	1.587,32	1.841,53	1.962,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83	3.085,23
8	Transportasi dan Pergudangan	198,79	208,11	257,59	292,07	325,96
9	PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum	97,56	112,16	127,15	135,70	154,53
10	Informasi dan Komunikasi	357,00	381,11	408,53	438,60	472,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	338,76	367,75	412,43	438,82	457,28
12	Real Estate	239,72	248,37	265,38	282,39	298,32
13	Jasa Perusahaan	1,51	1,52	1,74	1,94	2,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973,31	999,65	1.008,24	1.062,11	1.233,72
15	Jasa Pendidikan	166,65	171,41	180,44	189,84	200,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,41	92,78	97,56	109,94	118,79
17	Jasa lainnya	160,34	168,18	187,92	203,16	218,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**36.087,00**	**42.177,46**	**49.107,08**	**52.156,58**	**56.646,72**

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku ditopang oleh lima sektor utama selama lima tahun terakhir yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor kontruksi.

Perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Rokan Hulu dari Rp 19.566,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 30.985,12 miliar pada tahun 2024. Pada sektor ini, sub sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor perkebunan dengan komoditi sawit yang banyak diusakan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi kedua tertinggi, dari Rp 9.113,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 14.560,94 miliar pada tahun 2024. Peningkatan sektor ini menunjukkan adanya peningkatan

produksi, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Sektor ini merupakan bagian dari backward linkage dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sebagian besar industri di Kabupaten Rokan Hulu adalah industri minyak kelapa sawit.

Adapun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar Rp 1.929,02 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 3.085,23 miliar pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar Rp 1.543,78 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.519,75 miliar pada tahun 2024. Selain itu, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 1.280,26 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.962,39 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan terjadinya perkembangan infrastruktur dan proyek pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya, perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan perkembangan yang sama dengan PDRB ADHB pada kurun waktu 2020 - 2024 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II-61
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (Rp. Milyar)

No	Lapangan Usaha PDRB	Tahun 2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.652,02	14.416,17	15.141,34	15.712,23	15.975,77
2	Pertambangan dan Penggalian	952,75	942,53	959,88	974,96	998,95
3	Industri Pengolahan	7.151,20	7.466,45	7.791,43	8.047,50	8.225,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,39	20,59	21,67	23,18	24,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	1,77	1,83	1,92	1,99
6	Kontruksi	749,89	776,66	830,72	896,97	947,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.106,29	1.212,16	1.366,08	1.521,25	1.597,33
8	Transportasi dan Pergudangan	120,90	123,38	143,29	152,01	163,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,46	61,60	67,91	70,55	77,70
10	Informasi dan Komunikasi	308,90	328,49	341,10	360,39	386,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	229,56	236,84	244,56	253,56	262,33
12	Real Estate	164,17	168,29	175,96	181,48	188,55
13	Jasa Perusahaan	0,96	0,97	1,09	1,16	1,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719,30	732,68	727,77	757,89	878,81
15	Jasa Pendidikan	98,70	100,81	104,75	108,49	113,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,68	56,91	58,68	64,26	67,77
17	Jasa lainnya	100,50	104,63	115,63	122,78	130,36
Produk Domestik Regional Bruto (DPRB)		**25.482,41**	**26.750,94**	**28.093,71**	**29.250,58**	**30.042,44**

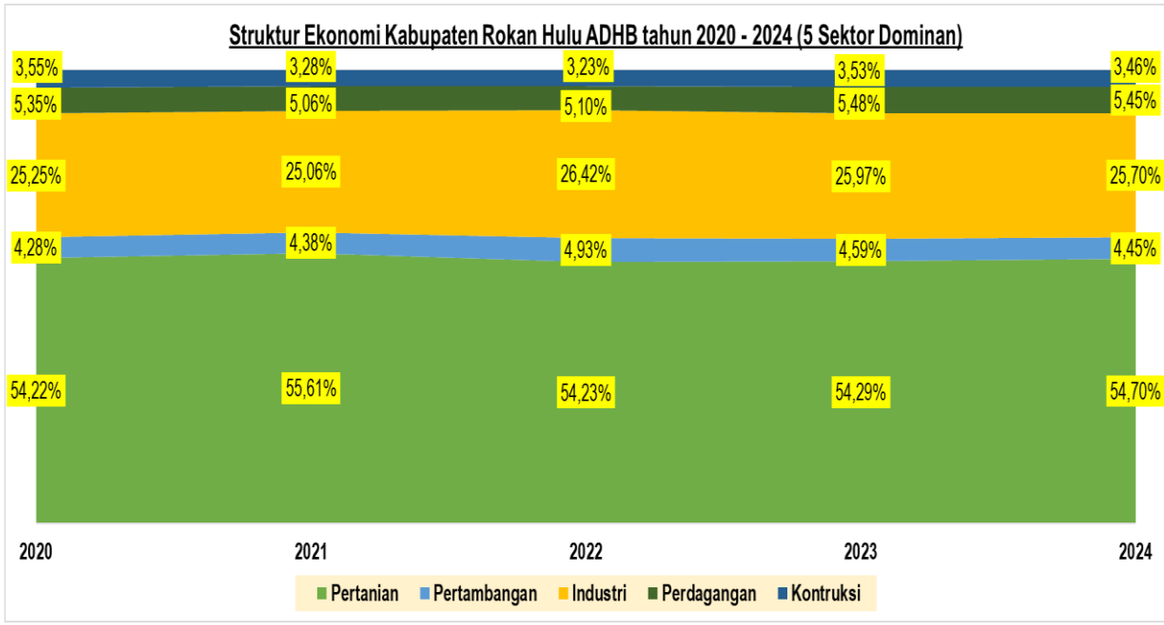
Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Selanjutnya PDRB ADHK juga ditopang oleh lima sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dari Rp 13.652,02 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 15.975,77 miliar pada tahun 2024. Selain itu sektor industri pengolahan memberikan kontribusi kedua tertinggi, dari Rp 7.151,20 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 8.225,97 miliar pada tahun 2024. Adapun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebanyak Rp 1.106,29 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.597,33 miliar pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar Rp 952,75 miliar pada tahun 2020 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai Rp 998,95 miliar pada tahun 2024. Selain itu, sektor konstruksi berkontribusi sebesar Rp 749,89 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 947,50 miliar pada tahun 2024.

2.1.3.2.2 Struktur Perekonomian Daerah

Selama lima tahun terakhir struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan (2) industri pengolahan (3)perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (4) pertambangan dan penggalian dan (5) konstruksi.

Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara agregat tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2020 - 2024. Dominasi sektor pertanian menjadi sangat terlihat dalam struktur perekonomian Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat sebesar 54,22 persen menjadi 54,70 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini diikuti oleh kontribusi sektor industri dari 25,25 persen pada tahun 2020, menjadi 25,70 persen pada tahun 2024. Sementara kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar 5,35 persen , menjadi 5,45 persen pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2020 sebesar 4,28 persen menjadi 4,45 persen pada tahun 2024. Selanjutnya kontribusi sektor kontruksi pada tahun 2020 sebesar 3,55 persen turun menjadi 3,46 persen pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:



Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-37
Struktur Perekonomian (ADHB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Dominasi sektor pertanian ditandai dengan perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit yang banyak diusahakan oleh masyarakat menjadi raw material bagi perkembangan industri minyak kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Maka perkembangan sektor perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu akan mendorong perkembangan sektor industri. Sehingga dapat dikatakan sebanyak 70% lebih perekonomian Kabupaten Rokan Hulu bergantung kepada sawit dan industri sawit.

Namun demikian, perkembangan industri sawit di Kabupaten Rokan Hulu masih terbatas pada produksi bahan baku setengah jadi, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO). Untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah, diperlukan upaya integrasi dan peningkatan keterkaitan ekonomi antara sektor hulu (input) dan sektor hilir (output). Diversifikasi pada industri turunan sawit perlu ditingkatkan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini akan mendorong daya saing ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

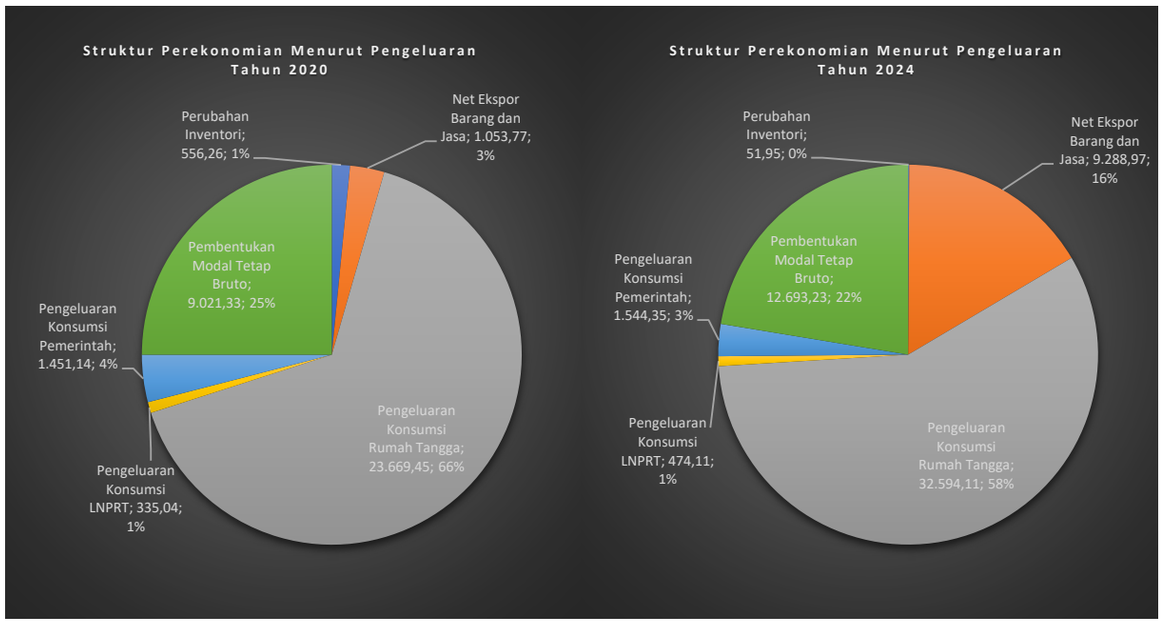
Tabel II-62
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	54,22	55,61	54,23	54,29	54,7
2	Pertambangan dan penggalian	4,28	4,38	4,93	4,59	4,45
3	Industri pengolahan	25,25	25,06	26,42	25,97	25,7
4	Pengadaan listrik dan gas	0,1	0,09	0,08	0,09	0,09
5	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,01	0,01	0	0	0
6	Konstruksi	3,55	3,28	3,23	3,53	3,46
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	5,35	5,06	5,1	5,48	5,45
8	Transportasi dan pergudangan	0,55	0,49	0,52	0,56	0,58

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27
10	Informasi dan komunikasi	0,99	0,9	0,83	0,84	0,83
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,94	0,87	0,84	0,84	0,81
12	Real estate	0,66	0,59	0,54	0,54	0,53
13	Jasa perusahaan	0	0	0	0	0
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,7	2,37	2,05	2,04	2,18
15	Jasa pendidikan	0,46	0,41	0,37	0,36	0,35
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,23	0,22	0,2	0,21	0,21
17	Jasa lainnya	0,44	0,4	0,38	0,39	0,39
PDRB		100,00	100	100	100	100

Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2025

Kemudian, pada sisi pengeluaran penopang utama perekonomian Kabupaten Rokan Hulu adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk mempertahankan struktur ekonomi yang kuat. Maka diperlukan kebijakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat agar masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang dalam perekonomian yang terdistribusi sampai pada sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Rokan Hulu di masa mendatang. Jaminan pekerjaan dan kesempatan berusaha perlu terus ditingkatkan agar masyakat tidak kehilangan pendapatan.



Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-38
PDRB Kabupaten Rokan Hulu Munurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 dan 2024 (Rp. Milyar)

Selanjutnya perkembangan sektor pertanian dan sektor industri di Kabupaten Rokan Hulu kemudian menjadi pendorong aktivitas ekonomi pada perdagangan luar negeri. Keterkaitan aktivitas-aktivitas tersebut dalam sektor pertanian dan industri mendorong pembentukan modal atau investasi di Kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu 2020-2024.

2.1.3.2.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

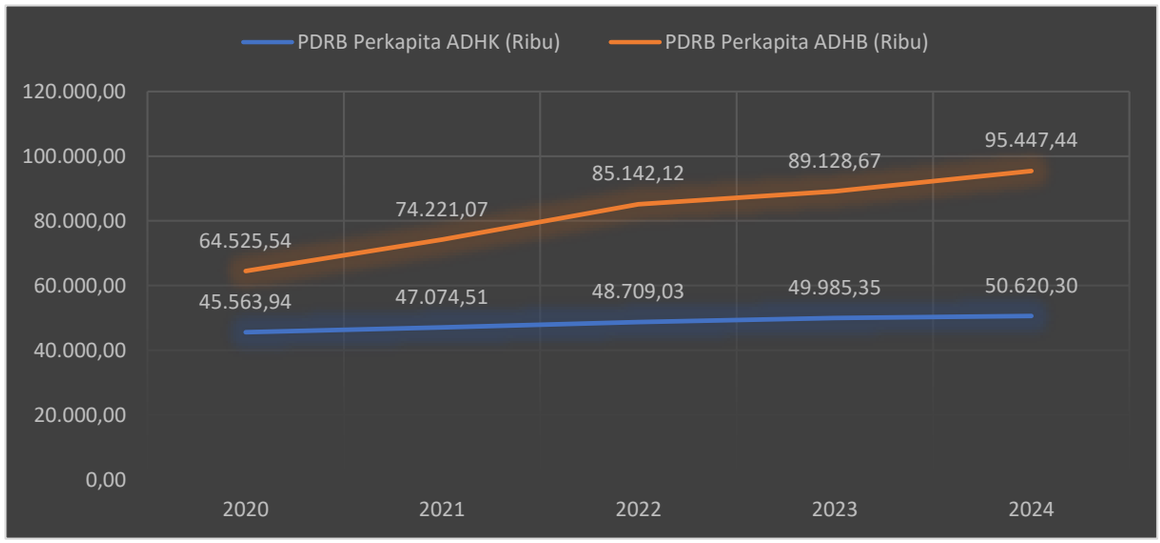
Tabel II-63
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan MinumKabupaten Rokan hulu
Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB atas harga berlaku	Rasio akomodasi makan dan minum
2020	97.559,44	36.087.003,01	0,27
2021	112.163,34	42.177.460,42	0,27
2022	127.148,59	49.107.077,95	0,26
2023	135.699,90	52.156.580,21	0,26
2024	154.529,09	56.646.717,88	0,27

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.3.2.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di daerah tersebut. Berikut adalah perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024:



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-39
PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024 (Rp. Ribu/Kapita)

Perkembangan PDRB perkapita ADHK pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 45.563,94 ribu/kapita, sedikit meningkat menjadi Rp. 50.620,30 ribu/kapita. Berbeda dengan perkembangan PDRB perkapita ADHB yang meningkat signifikan yaitu pada tahun 2020 dari Rp. 64.525,54 ribu/kapita, meningkat menjadi Rp. 95.447,44 ribu/kapita.

Lambatnya perkembangan PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh perhitungan nilai PDRB ADHK berdasarkan harga tetap tahun dasar 2010, sehingga memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi.

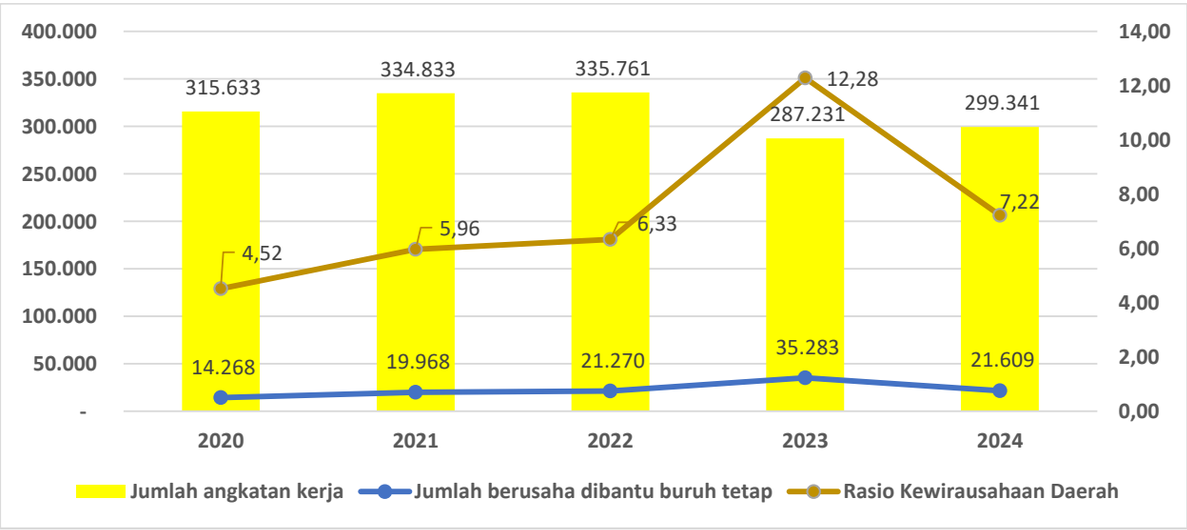
Artinya, perlambatan PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh peningkatan produksi secara agregat dalam perekonomian yang tidak cukup signifikan untuk melampaui efek inflasi. Jika dicermati, perkembangan inflasi selama kurun waktu 2020 - 2024 mengalami fluktuasi. Hal ini berdampak pada perkembangan PDRB per kapita ADHK, karena inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan nilai riil dari output ekonomi. Meskipun ada peningkatan dalam produksi dan aktivitas ekonomi, inflasi yang tinggi, dapat mengoreksi output riil dalam perekonomian.

Sebaliknya, PDRB ADHB dihitung berdasarkan harga berlaku, yang mencerminkan nilai nominal dari output ekonomi tanpa memperhitungkan inflasi. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita ADHB mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang mendorong nilai nominal PDRB tanpa memperhitungkan inflasi. Dengan demikian, perbedaan laju pertumbuhan antara PDRB per kapita ADHK dan ADHB di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa inflasi memainkan peran penting dalam perekonomian daerah.

Dengan memahami perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih realistis tentang perekonomian riil, sedangkan PDRB ADHB memberikan gambaran optimis dengan peningkatan nilai nominal yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi demi memastikan perkembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Rokan Hulu.

2.1.3.2.5 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Dengan adanya rasio kewirausahaan daerah ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat melihat perkembangan usaha yang ada di daerah sehingga dapat merancang kebijakan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan daerah lebih baik lagi kedepannya. Adapun perkembangan rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 (data diolah)

Gambar II-40

Tren Rasio Kewirausahaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

2.1.3.2.6 Indeks Kapabilitas Inovasi

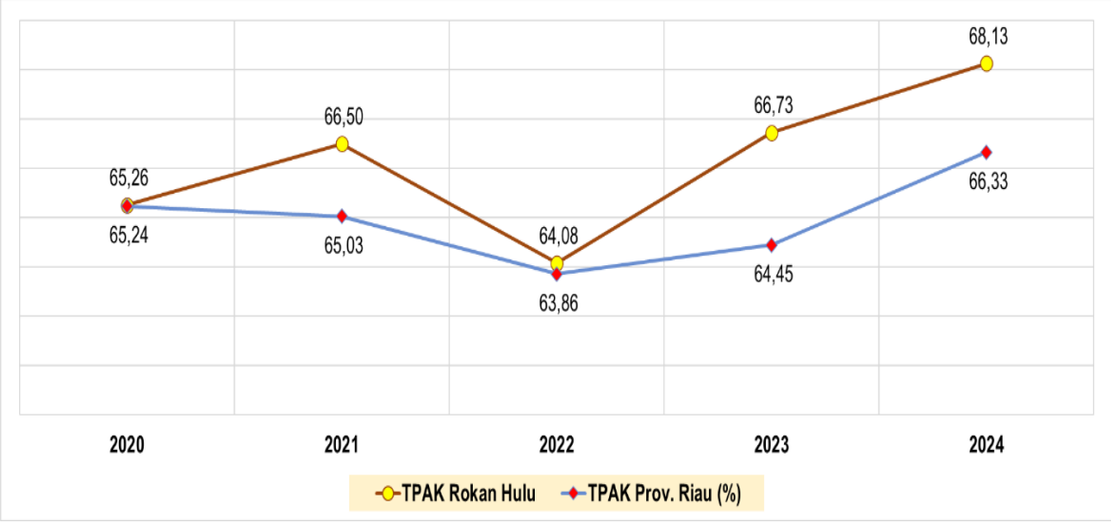
Tabel II-64
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kapabilitas Inovasi	1,03	1,55	1,79

Sumber:BRIN Tahun 2024

2.1.3.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sangat penting dalam analisis kesejahteraan sosial. TPAK menjadi ukuran ketenagakerjaan untuk meggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dari penduduk usia kerja. TPAK diukur di daerah untuk mengetahui persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting dalam kegiatan perekonomian karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024 dan cenderung sedikit lebih tinggi dari tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Riau.

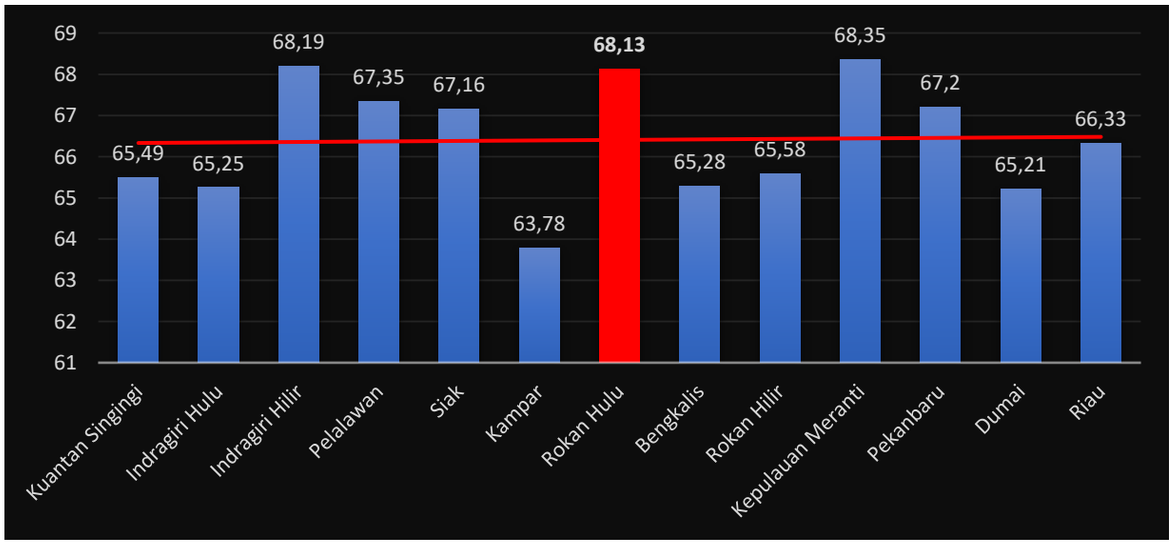


Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-41
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%)

Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 68,13 persen menduduki peringkat ketiga dalam tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau, setelah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, hal ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kabupaten Rokan Hulu tetap memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, bahkan berada di peringkat kedua tertinggi di Provinsi Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja tidak serta merta berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Rendahnya daya saing tenaga kerja

di Kabupaten Rokan Hulu berimbas pada rendahnya tingkat upah yang diterima, sehingga meskipun banyak penduduk yang bekerja, mereka tetap tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan. Ini mencerminkan perlunya peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Gambar II-42
Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau Tahun 2024

2.1.3.2.8 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Rokan Hulu (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio lulusan per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,20, kemudian meningkat menjadi 0,36 pada 2021. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 (0,34) dan 2023 (0,27), rasio kembali melonjak pada tahun 2024 menjadi 0,40. Peningkatan di tahun 2024 mencerminkan adanya perkembangan positif dalam sektor pendidikan tinggi di kabupaten Rokan Hulu, dengan lebih banyak penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.

Tabel II-65
Rasio Lulusan S1/S2/ Kabupaten Rokan Hulu S3 Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	147	207	201	154	237
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	2,05	3,63	3,45	2,69	0,40

Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Tabel II-66
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Ekonomi Hijau	50,03	51,77	59,61	59,72	58,04

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau tahun 2020-2024 berfluktuatif, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1,68 persen dari tahun 2023. Skor pilar ekonomi dan pilar sosial menjadi kontributor terbesar indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2024. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (skor 100) diantaranya adalah tingkat pengangguran terbuka, produktivitas perikanan budidaya dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Selanjutnya, parameter yang berada pada kategori (0-50) antara lain: produktivitas kelapa sawit, PDRB per kapita, penurunan emisi GRK kumulatif dari baseline, luas tutupan hutan dari luas daratan dan kualitas air permukaan parameter BOD.

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital adalah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. IMDI mengukur kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam berbagai hal, seperti Infrastruktur digital, sumber daya frekuensi, SDM digital, ekonomi digital, pemerintah digital, komunikasi publik, dprioritas dan sertifikasi, alat perangkat, penyelenggara sistem elektronik, data layanan publik. Tujuan utama pengukuran IMDI adalah untuk menyediakan acuan dalam merencanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Adapun Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-67
Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

Tahun	Pilar 1 Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar 2 Keterampilan Digital	Pilar 3 Pemberdayaan	Pilar 4 Pekerjaan	Angka IMDI
2022	43,99	30,96	25,02	38,34	34,01
2023	57,78	67,49	29,39	26,01	46,38
2024	54,1	58,18	27,5	34,12	43,61

Sumber: BPSDM Kominfo Tahun 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 PMTB dan Ekspor Barang dan Jasa

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 36.087,00 miliar pada tahun 2020, meningkat menjadi 56.646,72 miliar pada tahun 2024. Dari sisi demand, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, net ekspor, konsumsi pemerintah,konsumsi LNPRT dan

perubahan inventori. Sedangkan komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar pada periode 2020-2024 yaitu komponen net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar dunia tahun 2022 meskipun sempat terhambat di triwulan II dikarenakan adanya larangan eksport CPO dan turunannya namun kembali meningkat setelah larangan eksport CPO dicabut dan adanya pembebasan tarif pungutan eksport CPO. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II-68
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	23.669,45	25.084,64	27.905,73	30.319,68	32.594,11
2	Konsumsi LNPRT	335,04	329,92	369,84	409,45	474,11
3	Konsumsi Pemerintah	1.451,14	1.328,12	1.362,78	1.423,97	1.544,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.021,33	10.029,21	11.418,61	12.057,57	12.693,23
5	Perubahan Inventori	556,26	77,79	65,41	86,77	51,95
6	Net Ekspor	1.053,77	5.327,79	8.492,00	7.859,15	9.288,97
	PDRB	36.087,00	42.177,46	49.614,38	52.156,58	56.646,72

Sumber: BPS Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II-69
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	13.918,37	14.387,01	15.104,39	15.814,02	16.515,53
2	Konsumsi LNPRT	200,24	193,82	202,33	214,25	242,25
3	Konsumsi Pemerintah	877,85	830,27	839,24	838,89	885,08
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.819,31	5.090,93	5.436,01	5.690,61	5.870,67
5	Perubahan Inventori	219,55	46,8	38,65	47,9	26,23
6	Net Ekspor	5.447,09	6.202,11	6.473,08	6.644,89	6.502,67
	PDRB	**25.482,41**	**26.750,94**	**28.093,71**	**29.250,58**	**30.042,44**

Sumber: BPS Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020-2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel diatas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat

seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi industri perdagangan. Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah di tiadakan.

2.1.3.5.2 Rencana Lokasi Industri Kabupaten Rokan Hulu

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pemegang otoritas kawasan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud di atas meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air limbah terpadu, perumahan, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya yang digunakan oleh pabrik-pabrik yang ada dalam kawasan industri tersebut. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri ini merupakan hilirisasi berbagai potensi daerah yang bertujuan untuk penyediaan dan pembangunan industri, meningkatkan daya saing investasi daerah serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 rencana pembangunan lokasi kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-70
Rencana Kawasan Industri di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Industri	Total (Ha)	Persentase
1	Kepenuhan	2.124,25	2.124,25	77,19
2	Tandun	95,69	95,69	3,48
3	Ujung Batu	532,06	532,06	19,33
Kab. Rokan Hulu (Ha)		**2.752,00**	**2.752,00**	**100,00**

Sumber: Hasil Rencana RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri dan industri kecil dan menengah. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri dan industri kecil dan menengah. Kawasan industri sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan Ujung Batu, Tandun dan Kepenuhan. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh Kecamatan.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur

ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, meliputi: jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer. Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 adalah 1.875,41 km. Adapun jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 949,568 km, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya permukaan aspal sepanjang 467,785 km km yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 413,02 km, meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel II-71
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	395,94	433,76	427,75	439,08	467,785
2	Kerikil	1.687,77	975,08	1.167,26	1.054,12	949,568
3	Tanah	65,65	370,2	179,52	280,89	413,024
Panjang jalan (km)		2.140,36	1.818,28	1.818,28	1.818,28	1.875,41
1	Kayu	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit
2	Beton	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit
3	Besi	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit
4	Semi Permanen	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Jumlah Jembatan (unit)		**267**	**267**	**267**	**267**	**267**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Adapun kondisi jalan mayoritas berada pada kondisi rusak berat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik dari 357,53 km pada tahun 2020, menjadi 334 pada tahun 2024. Hal ini diikuti juga dengan pertambahan panjang jalan yang berada pada kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi. Rendahnya persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya logistik yang tinggi.

Tabel II-72
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kondisi baik	357,53	368,94	355,43	347,23	334
2	Panjang jalan seluruhnya	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	1.875,41
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,15	0,16	0,15	0,15	0,17

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Indikator kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40km/jam, berdasarkan SK Bupati Nomor : Kpts. 600/BMP/134/2012 Tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Rokan Hulu dengan total panjang jalan kabupaten 2140,356 Km. sedangkan pada tahun 2020 terbit kembali SK Bupati Nomor Kpts. 600/PUPR/1154/2020 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kab. Rokan Hulu dengan total panjang jalan kabupaten 1.875,410 Km. Pada tahun 2024 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap adalah sebesar 75,98 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 52,66 persen. Peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu masih tinggi. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan. Pada tahun 2024 terbit kembali Surat Keputusan Bupati Nomor:Kpts.100.3.3.2/PUPR/170/2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu dengan total panjang jalan kabupaten 1.875,410 Km.

Tabel II-73
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	1.015,38	989,404	707,694	717,394	450,473
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap (km)	1.124,99	828,880	1.110,590	1.100,890	1.424,937
3	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.140,37	1.818,28	1.818,28	1.818,28	1.875,41
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	47,44	54,414	38,921	39,454	24,02
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap	52,56	45,59	61,08	60,55	75,98

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-74
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panjang jalan	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	1.875,41
2	Jumlah penduduk	718.321	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1 : 309	1 : 245	1 : 250	1 : 247	1 : 313

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 adalah 1.875,41 km, Sementara Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 mencapai 1 : 313 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat dilalui oleh 313 penduduk.

b. Kondisi Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rasio rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan, sehingga didapatkan rasio rumah layak huni sebesar 0,09 persen tahun 2020. Terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 0,22 persen. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebanyak 125.568 unit yang berasal dari Dana APBD Provinsi Riau danAPBD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-75
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni	61.828	64.179	98.336	124.066	125.568
2	Jumlah penduduk	718.321	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio Rumah Layak Huni	0,09	0,11	0,16	0,22	0,22

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-76
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau (Persen)	63,33	77,76	75,92	74,40	81.89

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupeten Rokan Hulu (<10 Ha)

- Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, pada tahun 2020 persentase lingkungan pemukiman kumuh hanya sebesar 2,88 persen. Tahun 2021-2022 luas lingkungan permukiman kumuh 262,87 dengan persentase lingkungan pemukiman kumuh meningkat menjadi 3,52 persen. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai. Pada tahun 2023 persentase lingkungan pemukiman kumuh mengalami penurunan menjadi 3,28 persen. Terkahir pada

tahun 2024 persentase lingkungan pemukiman kumuh mengalami penurunan kembali menjadi 2,13 persen.

Tabel II-77
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	214,66	262,87	262,87	244,78	159,09
2	Luas wilayah	7.462,18	7.462,18	7.462,18	7.462,18	7.462,18
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,88	3,52	3,52	3,28	2,13

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 cenderung meningkat mencapai 263,25 persen, kemudian pada tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menurun secara drastis menjadi 1,60 persen. Pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan meningkat kembali menjadi 4,35 persen. Terakhir pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan drastis menjadi 0,01 persen. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan melalui sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tabel II-78
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	53	692	4,2	10,66	0,012
2	Luas pemukiman kumuh	214,66	262,87	262,87	244,78	159,09
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,69	263,25	1,60	4,35	0,01

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 050/Bappeda/878/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rokan Hulu, namun dengan adanya penambahan perubahan luas beberapa kawasan kumuh serta verifikasi identifikasi lokasi dan penilaian yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau maka pada tahun 2024 Keputusan Bupati tersebut telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 100.3.3.2/BAPPEDA/650/2024, tanggal 17 Juli 2024. Berikut ini disampaikan data luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-79
Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Dusun	Luas kawasan (Ha)	Tingkat kekumuhan
1	Bangun Purba	Tangun	Dusun I Tangun	10,13	Kumuh Ringan
		Bangun purba	Dusun I Bangun Purba	3,72	Kumuh Ringan
2	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	Danau Dipo Boncah Balong	35,56	Kumuh Ringan
3	Rambah	Babussalam	Babussalam	2,24	Kumuh Ringan
		Koto Tinggi	Koto Tinggi	11,99	Kumuh Ringan
		Pasir Pengaraian	Pasar Bawah	1,43	Kumuh Ringan
			Tanjung Harapan	5,52	Kumuh Ringan
			Pasir Pengaraian	2,83	Kumuh Ringan
			Tanjung Belanti	7,22	Kumuh Ringan
		Pematang Berangan	Tulang Gajah	10,05	Kumuh Ringan
			Pasir Putih	1,04	Kumuh Ringan
			Pematang Baih	4,99	Kumuh Ringan
		Rambah Tengah Utara	Kampung Padang	3,37	Kumuh Ringan
4	Rambah Hilir	Rambah Hilir	Tanjung Pura Indah	6,36	Kumuh Ringan
5	Tambusai	Tambusai Tengah	Kuro-Kuro Sei Taulan	26,76	Kumuh Ringan
6	Ujung Batu	Suka Damai	Petakur Bawah	11,69	Kumuh Ringan
		Ujung Batu	Kampung Baru Barat	12,15	Kumuh Ringan
Jumlah Luas kawasan				**159,09**	

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel II-80
Data Backlog Perumahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	Unit	72.606	98.336	124.066
2	Jumlah RTLH	Unit	8.427	8.427	8.427
3	Jumlah RTLH dalam Kawasan Kumuh	Unit	936	936	936
4	Backlog Kepemilikan	Unit	12.524	23.521	34.518
5	Backlog Penghunian	Unit	103.609	60.789	17.969

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2.1.3.6.2 Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”.

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Rokan Hulu menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan status yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS),

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi dengan ambang batas sebagai berikut yaitu: (1) Desa sangat tertinggal : IDM< 0,4907 (2) Desa tertinggal: 0,4907< IDM< 0,5989 (3) Desa berkembang : 0,5989< IDM < 0,7072 (4) Desa maju: 0,7072 < IDM < 0,8155 dan (5) Desa mandiri :IDM>0,8155.

Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2024 pada aplikasi http//: idm.kemendesa.go.id, menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 (lima) desa status IDM mandiri. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 56 desa mandiri, 65 desa maju, 18 desa berkembang, 0 desa tertinggal, dan 0 desa sangat tertinggal. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-81
Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	UJUNG BATU	SUKA DAMAI	'0.9486	'0.8667	'0.7333	'0.8495	MANDIRI
		NGASO	'0.9200	'0.9167	'0.8000	'0.8789	MANDIRI
		UJUNG BATU TIMUR	'0.9886	'0.9333	'0.7333	'0.8851	MANDIRI
		PEMATANG TEBIH	'0.8514	'0.8000	'0.8000	'0.8171	MANDIRI
2	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	'0.7200	'0.7000	'0.8667	'0.7622	MAJU
		CIPANG KIRI HULU	'0.7314	'0.6167	'0.8000	'0.7160	MAJU
		CIPANG KIRI HILIR	'0.8229	'0.5333	'0.6000	'0.6521	BERKEMBANG
		TANJUNG MEDAN	'0.7486	'0.6500	'0.8000	'0.7329	MAJU
		LUBUK BENDAHARA TIMUR	'0.9314	'0.8833	'0.9333	'0.9160	MANDIRI
		LUBUK BENDAHARA	'0.8857	'0.8667	'0.8000	'0.8508	MANDIRI
		SIKEBAU JAYA	'0.8286	'0.6667	'0.9333	'0.8095	MAJU
		ROKAN KOTO RUANG	'0.8857	'0.7833	'0.9333	'0.8675	MANDIRI
		ROKAN TIMUR	'0.8171	'0.7167	'0.8667	'0.8002	MAJU
		LUBUK BETUNG	'0.8229	'0.7667	'0.8667	'0.8187	MANDIRI

NO	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
		PEMANDANG	'0.6743	'0.6000	'0.9333	'0.7359	MAJU
		ALAHAN	'0.8743	'0.8667	'0.8667	'0.8692	MANDIRI
		TIBAWAN	'0.8114	'0.6333	'1.0000	'0.8149	MAJU
3	RAMBAH	RAMBAH TENGAH UTARA	'0.9029	'0.9333	'0.8000	'0.8787	MANDIRI
		RAMBAH TENGAH HILIR	'0.9657	'0.8000	'0.9333	'0.8997	MANDIRI
		RAMBAH TENGAH HULU	'0.7886	'0.8333	'0.8000	'0.8073	MAJU
		RAMBAH TENGAH BARAT	'0.8800	'0.8333	'0.8667	'0.8600	MANDIRI
		MENAMING	'0.8686	'0.8167	'0.6000	'0.7617	MAJU
		PASIR BARU	'0.8400	'0.8167	'1.0000	'0.8856	MANDIRI
		SIALANG JAYA	'0.7657	'0.8667	'0.9333	'0.8552	MANDIRI
		TANJUNG BELIT	'0.7943	'0.7333	'0.9333	'0.8203	MANDIRI
		KOTO TINGGI	'0.9086	'0.8833	'0.9333	'0.9084	MANDIRI
		SUKA MAJU	'0.8343	'0.8667	'1.0000	'0.9003	MANDIRI
		PEMALANG BERANGAN	'0.9200	'0.9000	'0.8667	'0.8956	MANDIRI
		BABUSSALAM	'0.9029	'0.8333	'0.7333	'0.8232	MANDIRI
		PASIR MAJU	'0.8171	'0.8167	'1.0000	'0.8779	MANDIRI
4	TAMBUSAI	TAMBUSAI BARAT	'0.8114	'0.6167	'0.4667	'0.6316	BERKEMBANG
		TAMBUSAI TIMUR	'0.7543	'0.6667	'0.6667	'0.6959	BERKEMBANG
		BATAS	'0.9200	'0.9000	'0.9333	'0.9178	MANDIRI
		TALIKUMAIN	'0.9086	'0.8833	'1.0000	'0.9306	MANDIRI
		RANTAU PANJANG	'0.7771	'0.6167	'0.6667	'0.6868	BERKEMBANG
		SUNGAI KUMANGO	'0.8971	'0.7667	'0.8667	'0.8435	MANDIRI
		BATANG KUMU	'0.8286	'0.7667	'0.9333	'0.8429	MANDIRI
		SIALANG RINDANG	'0.8857	'0.8833	'1.0000	'0.9230	MANDIRI
		SUKA MAJU	'0.9429	'0.9000	'1.0000	'0.9476	MANDIRI
		LUBUK SOTING	'0.8171	'0.5333	'0.9333	'0.7613	MAJU
		TINGKOK	'0.8457	'0.6500	'0.6000	'0.6986	BERKEMBANG
5	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT	'0.7714	'0.7000	'0.7333	'0.7349	MAJU
		KEPENUHAN HILIR	'0.7600	'0.7500	'0.7333	'0.7478	MAJU
		KEPENUHAN TIMUR	'0.8686	'0.6833	'0.8667	'0.8062	MAJU
		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	'0.7543	'0.7000	'0.7333	'0.7292	MAJU
		KEPENUHAN RAYA	'0.8514	'0.7500	'0.7333	'0.7783	MAJU
		KEPENUHAN BARU	'0.9200	'0.8167	'1.0000	'0.9122	MANDIRI
		KEPENUHAN BARAT MULYA	'0.7714	'0.8167	'0.8667	'0.8183	MANDIRI
		ULAK PATIAN	'0.7714	'0.6500	'0.6667	'0.6960	BERKEMBANG

NO	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
		RANTAU BINUANG SAKTI	'0.6914	'0.5833	'0.8000	'0.6916	BERKEMBANG
6	KUNTO DARUSSALAM	KOTA INTAN	'0.8000	'0.7333	'0.8000	'0.7778	MAJU
		MUARA DILAM	'0.7943	'0.6333	'1.0000	'0.8092	MAJU
		KOTA RAYA	'0.8971	'0.8333	'1.0000	'0.9102	MANDIRI
		KOTA BARU	'0.8914	'0.6167	'0.9333	'0.8138	MAJU
		SUNGAI KUTI	'0.8286	'0.6500	'0.8667	'0.7817	MAJU
		PASIR INDAH	'0.8000	'0.5500	'0.9333	'0.7611	MAJU
		PASIR LUHUR	'0.7886	'0.5667	'1.0000	'0.7851	MAJU
		BUKIT INTAN MAKMUR	'0.8343	'0.7333	'1.0000	'0.8559	MANDIRI
		BAGAN TUJUH	'0.7829	'0.6333	'1.0000	'0.8054	MAJU
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	'0.9657	'0.9167	'0.9333	'0.9386	MANDIRI
		RAMBAH SAMO BARAT	'0.9029	'0.8833	'1.0000	'0.9287	MANDIRI
		RAMBAH BARU	'0.8514	'0.6000	'0.8667	'0.7727	MAJU
		RAMBAH UTAMA	'0.8800	'0.7167	'0.9333	'0.8433	MANDIRI
		PASIR MAKMUR	'0.8229	'0.5833	'0.9333	'0.7798	MAJU
		KARYA MULYA	'0.8914	'0.8333	'1.0000	'0.9083	MANDIRI
		MARGA MULYA	'0.8800	'0.8667	'1.0000	'0.9156	MANDIRI
		LANGKITIN	'0.8286	'0.8667	'0.9333	'0.8762	MANDIRI
		MASDA MAKMUR	'0.8343	'0.7167	'0.8667	'0.8059	MAJU
		LUBUK NAPAL	'0.8629	'0.8333	'0.7333	'0.8098	MAJU
		TELUK AUR	'0.8400	'0.9000	'0.8667	'0.8689	MANDIRI
		SEI SALAK	'0.7314	'0.7667	'0.6667	'0.7216	MAJU
		SEI KUNING	'0.8971	'0.8333	'0.9333	'0.8879	MANDIRI
		LUBUK BILANG	'0.8229	'0.6833	'0.9333	'0.8132	MAJU
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	'0.8114	'0.8667	'0.6667	'0.7816	MAJU
		RAMBAH HILIR TENGAH	'0.7143	'0.7333	'0.7333	'0.7270	MAJU
		RAMBAH HILIR TIMUR	'0.7543	'0.5667	'0.8000	'0.7070	BERKEMBANG
		PASIR UTAMA	'0.8000	'0.7167	'0.6667	'0.7278	MAJU
		PASIR JAYA	'0.8171	'0.7500	'0.6667	'0.7446	MAJU
		RAMBAH MUDA	'0.8514	'0.7833	'0.6000	'0.7449	MAJU
		SUNGAI SITOLANG	'0.8114	'0.6667	'0.9333	'0.8038	MAJU
		LUBUK KERAPAT	'0.8514	'0.7167	'0.6000	'0.7227	MAJU
		RAMBAH	'0.8914	'0.9667	'0.9333	'0.9305	MANDIRI
		SEROMBOU INDAH	'0.7371	'0.5333	'0.8000	'0.6902	BERKEMBANG
		SUNGAI DUA INDAH	'0.7657	'0.6833	'0.4000	'0.6163	BERKEMBANG
		MUARA MUSU	'0.7657	'0.7000	'0.7333	'0.7330	MAJU
		SEJATI	'0.7029	'0.7333	'0.8000	'0.7454	MAJU

NO	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	'0.8857	'0.7167	'0.8667	'0.8230	MANDIRI
		MAHATO	'0.8286	'0.7167	'0.6667	'0.7373	MAJU
		BANGUN JAYA	'0.8571	'0.9667	'0.6667	'0.8302	MANDIRI
		SIMPANG HARAPAN	'0.8114	'0.6167	'0.6000	'0.6760	BERKEMBANG
		PAGAR MAYANG	'0.8343	'0.5167	'1.0000	'0.7837	MAJU
		PAYUNG SEKAKI	'0.8286	'0.4667	'0.6000	'0.6317	BERKEMBANG
		MEKAR JAYA	'0.7829	'0.6833	'0.6667	'0.7110	MAJU
		TANJUNG MEDAN	'0.9371	'1.0000	'0.8000	'0.9124	MANDIRI
		SUKA DAMAI	'0.7200	'0.6167	'0.6667	'0.6678	BERKEMBANG
		RANTAU SAKTI	'0.8400	'0.8667	'0.8667	'0.8578	MANDIRI
		MAHATO SAKTI	'0.8514	'0.7833	'0.8667	'0.8338	MANDIRI
10	BANGUN PURBA	PASIR AGUNG	'0.9029	'0.6667	'0.8667	'0.8121	MAJU
		PASIR INTAN	'0.8400	'0.6333	'0.8667	'0.7800	MAJU
		RAMBAH JAYA	'0.8343	'0.6833	'0.8667	'0.7948	MAJU
		BANGUN PURBA	'0.7943	'0.7667	'0.8000	'0.7870	MAJU
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	'0.8114	'0.8167	'0.6667	'0.7649	MAJU
		BANGUN PURBA BARAT	'0.8057	'0.6667	'0.5333	'0.6686	BERKEMBANG
		TANGUN	'0.8629	'0.6500	'0.6000	'0.7043	BERKEMBANG
11	TANDUN	TANDUN	'0.9029	'0.8500	'0.8000	'0.8510	MANDIRI
		KUMAIN	'0.8229	'0.9167	'1.0000	'0.9132	MANDIRI
		BONO TAPUNG	'0.8000	'0.8667	'0.9333	'0.8667	MANDIRI
		DAYO	'0.9486	'0.7167	'0.9333	'0.8662	MANDIRI
		TAPUNG JAYA	'0.8629	'0.8000	'0.8667	'0.8432	MANDIRI
		PUO RAYA	'0.7600	'0.9000	'1.0000	'0.8867	MANDIRI
		SEI KUNING	'0.8000	'0.6833	'1.0000	'0.8278	MANDIRI
		KOTO TANDUN	'0.9086	'0.7833	'0.7333	'0.8084	MAJU
		TANDUN BARAT	'0.8000	'0.8167	'1.0000	'0.8722	MANDIRI
12	KABUN	KABUN	'0.9429	'0.8500	'0.8667	'0.8865	MANDIRI
		ALIANTAN	'0.8571	'0.7500	'0.8667	'0.8246	MANDIRI
		KOTO RANAH	'0.8057	'0.6000	'0.7333	'0.7130	MAJU
		BONCAH KESUMA	'0.8000	'0.7833	'0.9333	'0.8389	MANDIRI
		BATU LANGKAH BESAR	'0.7886	'0.6667	'0.8000	'0.7517	MAJU
		GITI	'0.8743	'0.7833	'0.7333	'0.7970	MAJU
13	BONAI DARUSSALAM	TELUK SONO	'0.7886	'0.6667	'0.7333	'0.7295	MAJU
		SONTANG	'0.8800	'0.8833	'0.8000	'0.8544	MANDIRI
		BONAI	'0.8286	'0.7000	'0.8000	'0.7762	MAJU
		RAWA MAKMUR	'0.8400	'0.6500	'0.6667	'0.7189	MAJU
		PAUH	'0.7829	'0.8333	'0.8000	'0.8054	MAJU
		KASANG PADANG	'0.7143	'0.7667	'0.6000	'0.6937	BERKEMBANG

NO	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
		KASANG MUNGAL	'0.8171	'0.5833	'0.8000	'0.7335	MAJU
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH	'0.8400	'0.7167	'0.8667	'0.8078	MAJU
		KEMBANG DAMAI	'0.8514	'0.7500	'0.8000	'0.8005	MAJU
		SANGKIR INDAH	'0.8343	'0.6333	'0.9333	'0.8003	MAJU
15	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	'0.8171	'0.7167	'0.8000	'0.7779	MAJU
		PEKAN TEBIH	'0.8800	'0.7167	'0.8000	'0.7989	MAJU
		KEPAYANG	'0.7943	'0.5167	'0.8000	'0.7037	BERKEMBANG
		MUARA JAYA	'0.8400	'0.6667	'0.6667	'0.7244	MAJU
		KEPENUHAN JAYA	'0.7257	'0.5167	'0.8667	'0.7030	BERKEMBANG
16	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN	'0.9371	'0.6833	'0.6667	'0.7624	MAJU
		BENGKOLAN SALAK	'0.7314	'0.5667	'0.8667	'0.7216	MAJU
		SULIGI	'0.8286	'0.6500	'0.8667	'0.7817	MAJU
		AIR PANAS	'0.8514	'0.6333	'0.6667	'0.7171	MAJU
		SEI KANDIS	'0.8114	'0.6500	'0.6667	'0.7094	MAJU

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, kareana berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebuthan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandekan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupuan dorongan dari produksi. Untuk memahami gejolak kenaikan harga di Provinsi Riau, inflasi diukur di tiga kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, sejak tahun 2024, Kampar juga masuk dalam perhitungan inflasi di provinsi tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian besar kabupaten/kota di Riau umumnya dipengaruhi oleh inflasi di Kota Pekanbaru, yang berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau.

Tabel II-82
Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2020 s.d 2024

Laju Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	2,50
Tembilahan	3,30	1,09	4,82	1,53	2,45
Pekanbaru	2,24	1,55	7,04	2,50	1,89
Dumai	2,88	1,66	6,46	2,78	2,68
Kampar					3,25

Sumber: BPS Riau Tahun 2025

Selain itu, Kampar merupakan wilayah pengukuran inflasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tingkat inflasi Kampar, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kampar lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hulu juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Untuk itu, pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hulu agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat.

2.1.3.7.2 Iklim Investasi

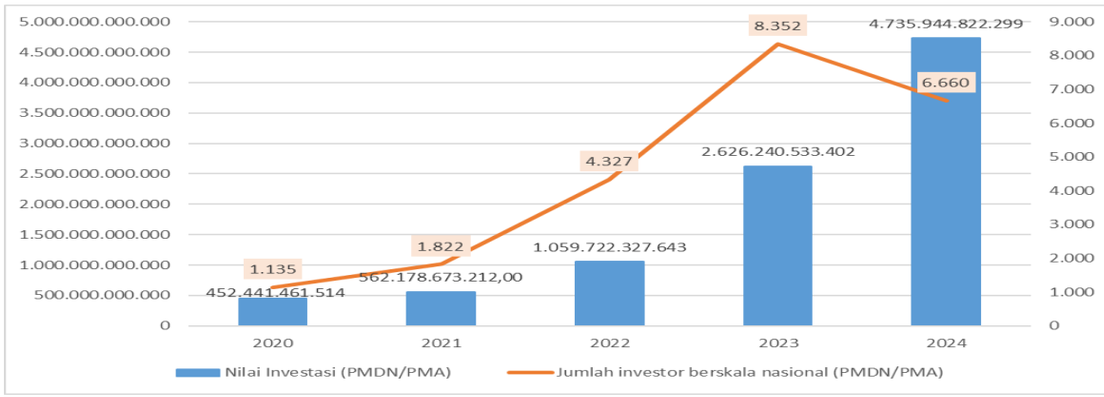
Iklim investasi erat kaitannya dengan angka kriminalitas yang terjadi, sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi dan penanaman modal yang ada di daerah. Adapun perkembangan nilai investasi maupun angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

a. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dari dalam dan luar negeri meningkat. Jumlah PMDN/PMA pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 452.441.461.514, meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp. 4.735.944.822.299.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1,0 ke versi 1,1 sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan tidak berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan pada tahun 2020, selain dari pada itu kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia. Pada Tahun 2022 dengan lahirnya Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP nomor 5 tahun 2021 dan PP nomor 6 Tahun 2021 sebagai turunannya dan berakhirnya pandemi covid-19 juga membuat iklim usaha semakin membaik di tahun 2022 hingga tahun 2024.

Dengan semakin cepat, mudah dan penyederhanaan syarat dalam proses perizinan berusaha diharapkan iklim investasi akan semakin membaik di tahun-tahun berikutnya, kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus izin dan melaporkan investasinya juga sangat berpengaruh dalam menghimpun nilai investasi melampaui target yang di canangkan.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-43
Jumlah Investasi dan Investor PMDN dan PMA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024

Selanjutnya jumlah investor berskala nasional pada pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor, meningkat menjadi 8.352 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar usahanya dan pelaku usaha yang migrasi Perizinan usahanya, yang mana sistem OSS 1.1 telah migrasi ke OSS RBA sebagai yang diamanatkan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2023 terdapat banyak pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang mendominasi pendaftaran Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten Rokan Hulu, Akan tetapi walaupun pelaku usaha banyak mendaftar usahanya di tahun 2023 yang dibuktikan dengan data NIB 8.352, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2023, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut. Sementara itu jumlah investor berskala nasional pada tahun 2024 turun menjadi 6.660, namun nilai investasi meningkat dari periode sebelumnya.

b. Angka Kriminalitas

Kriminalitas salah satu masalah sosial yang paling penting, yang umumnya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan upah yang tidak memadai. Penanganan kriminalitas di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun terus diupayakan meskipun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Angka kriminalitas yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 77,69 persen meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 75,76 persen. Untuk menekan angka kriminalitas upaya yang dilakukan adalah terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga hukum lainnya dengan cara meningkatkan fungsi pengamanan dan pelayanan serta imbauan langsung kepada masyarakat dan program siskamling untuk memotivasi masyarakat yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Tabel II-83
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	718.321	570.952	476.032	573.520	586.994
2	Jumlah kejahatan dilaporkan	725	709	956	945	1.058
3	Jumlah kejahatan yang diselesaikan	502	469	669	716	822
4	Rasio	76,03	66,14	70	75,76	77,69

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Dapat dilihat angka kriminalitas yang ditangani bersifat fliktuatif. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi tentu seharusnya mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan guna menurunkan jumlah kejahatan dengan tingkat kriminalitas yang rendah, mencerminkan tingkat keamanan masyarakat yang tinggi.

Tabel II-84
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Kepolisian Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sat Reskrim Polres Rokan Hulu	96,42	65,08	67	73,59	62,44
2	Polsek Rambah	73,68	75			
3	Polsek Ujungbatu	50,7	65,38	66	84,93	89,47
4	Polsek Kunto Darussalam	65,85	65	82	74,4	92,38
5	Polsek Tambusai	93,61	61,11	58	65,21	87,58
6	Polsek Kepenuhan	54,41	73,52	90	101,6	82,72
7	Polsek Rokan IV Koto	80	59,09	74	81,81	57,14
8	Polsek Tandun	69,76	72,5	74	78,87	79,34
9	Polsek Kabun	52,38	50	67	97,5	85,71
10	Polsek Tambusai Utara	87,5	68,75	60	57,62	71,42
11	Polsek Rambah Samo	58,82	55,26	56	78,8	80,8
12	Polsek Rambah Hilir	63,15	77,77	78	68	92,85
13	Polsek Bonai Darussalam	58,33	73,68	80	65,62	71,42
Rokan Hulu		**69,33**	**66,14**	**70**	**75,76**	**77,69**

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan, serta mematuhi kerangka hukum.

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan. Indeks Reformasi Birokrasi mengukur aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II-85
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	IRB Kabupaten Rokan Hulu	CC	CC	BB
2	IRB Provinsi Riau	B	BB	

Sumber: Kementerian PAN-RB Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel diatas Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hulu masih berada dibawah Provinsi Riau.

2.1.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Adapun perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-86
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPP Kabupaten Rokan Hulu	B- (3,30)	B- (3,16)	B- (3,25)	-	A-(4,18)
2	IPP Provinsi Riau	B (3,61)	B (3,68)	B (3,71)	A-(4,04)	A-(4,12)

Sumber : Kementerian PAN-RB Tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hulu sudah meningkat dari tahun sebelumnya namun masih berada dibawah angka Provinsi Riau.

2.1.4.1.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat inovasi dan kemajuan daerah tertentu. Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada dua aspek, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satuan inovasi daerah yang diterapkan. Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk menilai semua bentuk inovasi daerah, baik yang bersifat digital maupun non-digital. Inovasi daerah merupakan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Indeks Inovasi Daerah diharapkan dapat menjadi ukuran untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensinya untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II-87
Indeks Inovasi Derah (IID) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IID Kabupaten Rokan Hulu	Sangat Inovatif (2.899)	Inovatif (47,64)	Inovatif (50,36)	Inovatif (46,80)	Inovatif (47,75)
2	IID Provinsi Riau	Sangat Inovatif (3.078)	Inovatif (38,82)	Inovatif (50,94)	Inovatif (53,52)	Inovatif (53,63)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori inovatif sama dengan Provinsi Riau, namun skornya meningkat dari 46,80 menjadi 47,75.

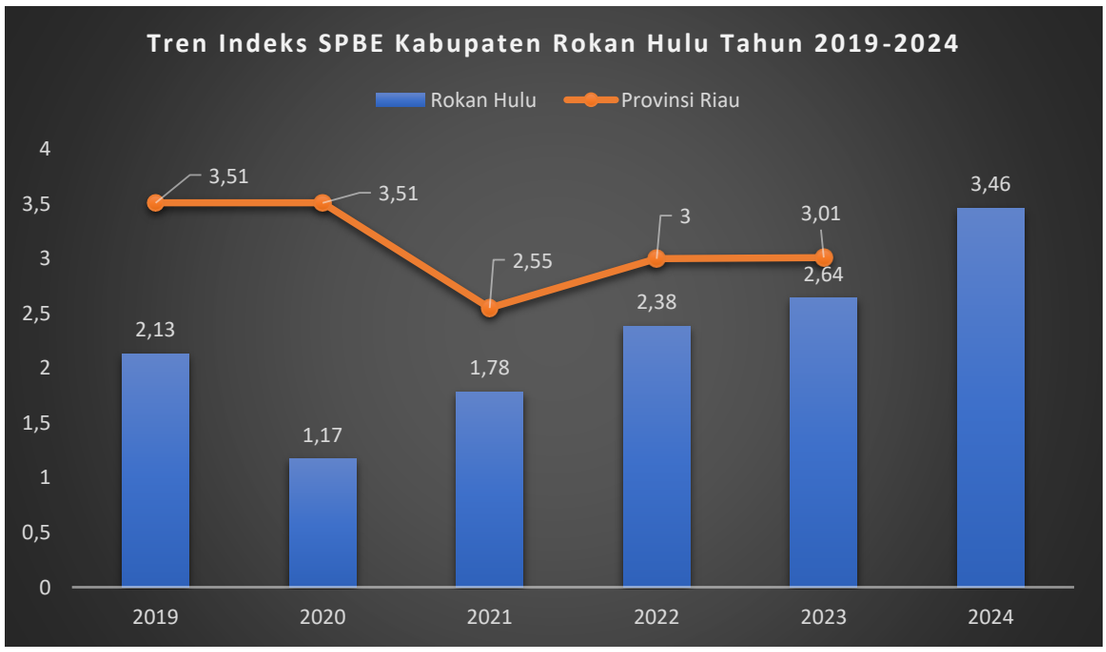
2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf tujuan pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

• Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
• Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu mencapai 3,46 dari skala 5. Ini menunjukkan peningkatan yakni 0,82 dari indeks sebelumnya yaitu 2,64 pada tahun 2023, dan di tahun 2022 nilai keterbukaan informasi publik dan indeks SPBE sebesar 2,38.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Gambar II-44
Tren Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024

2.1.4.1.5 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangundangan, meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Indeks Refromasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-88
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d 2024

No	Uraian	2023		2024	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	Indeks Reformasi Hukum	56,32	CC	87,88	BB

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2025

2.1.4.1.6 Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Integritas Nasional

Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Selanjutnya dalam mendukung pencegahan korupsi di daerah telah disusun Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. Manfaat IEPK ini antara lain dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi.

Tujuan dari IEPK ini untuk menguji Area of improvement terkait Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Audit Investigasi, Gratifikasi, Saber Pungli yang mencakup proses cegah deteksi dan respon pada Inspektorat Daerah,

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Indeks Integritas Nasional yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Survei Penilaian Integritas (SPI) ini bertujuan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi, meningkatkan kesadaran risiko korupsi, memperbaiki sistem anti korupsi, membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi.

Adapun perkembangan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Survei Penilaian Integritas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-89
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Survei Penilaian Integritas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,682	2,820	2,910
2	Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,36	71,50	73,81

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025

Pada tahun 2024 IEPK Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari 2,820 poin menjadi 2,910 poin sedangkan SPI juga mengalami peningkatan dari 71,50 poin menjadi 73,81 poin.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Sementara itu persentase penegakan Perda di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100 persen, dari 280 pelanggaran Perda yang masuk telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Tabel II-90
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	57	160	415	143	280
2	Jumlah pelanggaran PERDA	57	160	415	143	280
3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.2.2 Pencapaian Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan dan mencapai target Aksi HAM yang maksimal, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Panitia nasional RANHAM berharap pencapaian tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam memperkuat pelaksanaan Aksi HAM ke depan. Dalam pelaksanaan Aksi HAM tersebut terdapat 6 kriteria aksi penilaian sebagai berikut :

- Aksi 1 yaitu kriteria penilaian dengan memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- Aksi 2 yaitu kriteria optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;

- Aksi 3 yaitu kriteria penilaian dengan menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan pemerintah No 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta didik Penyandang Disabilitas;
- Aksi 4 yaitu kriteria dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- Aksi 5 yaitu kriteria penialaian Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya; dan
- Aksi 6 yaitu kriteria penilaian dengan membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

Adapun capaian penilaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Rokan Hulu beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel II-91
Pencapaian Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	B04	B08	B12	Capaian Pelaksanaan Aksi HAM
1	Tahun 2023	60,17	74,29	93,42	**76,14**
2	Tahun 2024	56,67	87,5	74,17	**72,80**

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2024

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratikanalitik karena pengukurannya didasarkan pada data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif.

IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari *Global Competitiveness Index*. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standardisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 sebesar 2,75, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 3,42. Capaian IDSD Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2023-2024 berada diatas capaian IDSD Provinsi Riau. Berikut disajikan indeks daya saing daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau, yaitu:

Tabel II-92
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

Dimensi	Pilar	Indikator	2022	2023	2024
Dimensi Lingkungan Pendukung	Pilar 1	Institusi	4,04	4,20	4,48
	Pilar 2	Infrastruktur	2,06	2,38	3,65
	Pilar 3	Adopsi TIK	3,06	4,20	4,40

Dimensi	Pilar	Indikator	2022	2023	2024
	Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,35	2,93	3,28
Dimensi SDM	Pilar 5	Kesehatan	3,85	3,88	3,82
	Pilar 6	Keterampilan	2,86	3,23	4,03
Dimensi Pasar	Pilar 7	Pasar Produk	0,75	0,75	2,48
	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	2,50	3,31	2,79
	Pilar 9	Sistem Keuangan	2,82	1,48	1,79
	Pilar 10	Ukuran Pasar	1,75	4,56	4,58
Dimensi Ekosistem Inovasi	Pilar 11	Dinamika Bisnis	5,00	2,35	3,96
	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	1,03	1,55	1,79
Skor IDSD Kab. Rokan Hulu			**2,75**	**2,90**	**3,42**
Skor IDSD Prov. Riau			**3,16**	**2,83**	**3,35**

Sumber: Badan Riset Nasional Tahun 2025

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan (1) pendidikan;(2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

2.1.4.4.1 Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.4.4.1.1 Urusan Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada bagian ini diuraikan jumlah paud, jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang TK/KB.

Tabel II-93
Jumlah Paud, Siswa dan Guru Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lembaga TK/KB	516	527	534	501	503
2	Jumlah murid TK/KB	134.667	15.193	11.308	16.801	16.906
3	Jumlah guru TK/KB	8,571	8.771	1.063	1.029	1.075

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam

rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Berikut tabel angka partisipasi kasar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel II-94
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	76.435	73.382	75.924	76.459	71.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76.849	75.336	75.336	74.070	74.693
	APK SD/MI	99.46	97,41	100,78	100,32	102,33
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	31.630	32.014	32.501	32.739	22.688
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.970	37.971
	APK SMP/MTs	85,83	87,07	88,39	87,92	88,67
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					Provinsi
	APK SMA/MA/SMK					Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023 sudah cukup baik untuk kategori SD/Mi dan SMP/Mts. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 97,41 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,07. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,78 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,39. Tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 100,23 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,92 persen. Terakhir tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 102,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,67 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat diartikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partispasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu dan merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel II-95
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	76.435	76.597	77.231	64.567	65.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76.849	75.336	75.336	74.681	74.693
	APM SD/MI	99,46	101,67	102.52	100.27	94,33
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	31.630	32.654	33.206	18.943	19.348
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.390	37.971
	APM SMP/MTs	85,83	88,81	90,31	77,14	80,99
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APM SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 101,67 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,81 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 102,52 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 90,31 persen. Tahun 2023 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,27 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 50,66 persen. Terakhir tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 80,99 persen. Nilai APM tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah, khususnya tingkat SMP/MTs sebesar 19,01 persen, yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SMA/MA/SMK data tersedia di provinsi.

4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Selama kurun waktu 2020 – 2024 jumlah penduduk yang lulus SD/MI relatif terus meningkat dan berfluktuatif. Angka pendidikan yang ditamatkan sampai akhir tahun 2024 jumlah lulusan SD/MI sebanyak 11.315 siswa, lulusan SMP/MTs sebanyak 7.257 siswa dan lulusan SMA/SMK/MA data tersedia di Provinsi.

Tabel II-96
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	11,617	11.315	11.315	11.315	11.315
2	SMP/MTs	7.256	7.257	7.257	7.257	7.257
3	SMA/SMK/MA	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Rendahnya angka penduduk tamat SD/MI disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masih berpendidikan SD/MI tidak mengikuti ujian persamaan dan belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel II-97
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	jumlah murid usia 7-12 tahun	76.500	76.502	72.477	76.499	65.404
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76,840	75.336	75.336	74.070	74.693
	APS SD/MI	**99,56**	**101,55**	**96,21**	**103,28**	**102,33**
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	31.662	32.127	22.449	32,739	19.348
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	36.770	37.390	37.971
	APS SMP/MTs	**85,92**	**87,37**	**61,05**	**87,54**	**99,12**
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	APS SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap kelompok umur pendidikan seluruh jenjang pendidikan cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Untuk angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2020 sebesar 99,56 persen mengalami peningkatan menjadi 101,55 persen di tahun 2021. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2020 sebesar 85,92 persen naik menjadi 87,37 persen ditahun 2021. Selanjutnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 96,21 persen di tahun 2022 dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 102,28 ditahun 2023. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2022 sebesar 61,05 persen naik menjadi 87,54 persen ditahun 2023. Terakhir tahun 2024 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 102,33 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 99,12 persen. Sementara Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 data tersedia di Provinsi.

6) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS selama kurun waktu 2020 -2024 cenderung meningkat dan berfluktuatif. Hal ini karena pengaruh kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sedangkan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2020-2024 data tersedia di provinsi. Lebih rinci realisasi capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-98
Angka Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	486	485	486	489	267
2	SMP/MTs	408	402	406	409	241
3	SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Angka Kelulusan

Sementara itu indikator lain dalam urusan Pendidikan adalah angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS yang sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran di sekolah dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik dalam memberikan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan target.

Tabel II-99
Angka Kelulusan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100
3	SMA/MA/SMK	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

8) Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus

diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2020 ketersediaan gedung sekolah diseluruh jenjang pendidikan tercatat sebanyak 740 unit dan mengalami peningkatan ditahun 2024 menjadi 1015 unit.

Tabel II-100
Jumlah Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Gedung Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD/TK	236	236	261	253	505
2	SD/MI	372	373	370	373	374
3	SMP/MTs	135	137	134	132	136
4	SMA/MA/SMK	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
Jumlah		740	743	765	758	1015

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

9) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel II-101
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	369	368	370	380	374
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	76,849	75.336	74.681	74.681	74.693
	Rasio	48,02	48,85	49,54	50,88	50,77
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	131	134	135	138	136
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	36.852	36.770	37.390	37.390	37.971
	Rasio	35,55	36,44	36,11	36,90	35,81
3	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	Rasio					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 51 fasilitas pendidikan sekolah dasar, artinya tiap satu fasilitas pendidikan sekolah dasar menampung 374 siswa. Setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 36 fasilitas pendidikan menengah pertama, artinya tiap satu fasilitas pendidikan SMP menampung 136 siswa.

10) Rasio guru terhadap murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada diKabupaten Rokan Hulu, sekaligus

juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel II-102
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
	Jumlah guru	4,150	4.038	5.044	4.038	4.713
	Jumlah murid	72.959	72.477	71.563	76.456	71.404
	Rasio murid per guru	17,58	17,95	14,19	18,93	15,15
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah guru	2.138	1.613	2.191	1.602	1.960
	Jumlah murid	21.420	22.449	22.584	32.739	22.688
	Rasio murid per guru	10,02	13,92	10,31	20,43	11,58

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 15,15 artinya satu guru melayani 16 murid, menurun dibandingkan tahun 2023. Sementara rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 11,58 tahun 2024, artinya satu guru melayani 23 murid, juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023.

11) Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM)

Tabel II-103
Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B Dan C Dari Dapodikmas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2022/2023

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
1	P9962967	SPNF SKB Rokan Hulu	Rambah Hilir	B	-	Ada	Ada
2	P9959995	PKBM Zaliyah	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
3	P9908421	PKBM Intan Gumalo	Kabun	B	Ada	Ada	Ada
4	P9908862	PKBM Maju Bersama	Tambusai Utara	B	Ada	Ada	Ada
5	P9908420	PKBM Bina Insan Mandiri	Bangun Purba	B	Ada	Ada	Ada
6	P9908722	PKBM Jannatul Makwa	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
7	P9908851	PKBM Giat Mitra	Tambusai	B	Ada	Ada	Ada
8	P2970207	PKBM Bina Karya	Pendalian	B	Ada	Ada	Ada
9	P9934286	PKBM Damai Sejahtera	Ujungbatu	B	Ada	Ada	Ada
10	P9926316	PKBM Maju Cendikia Gemilang	Rambah	C	Ada	Ada	Ada
11	P9908422	PKBM Bina Ilmu	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
12	P9908419	PKBM Bangun Karya Mandiri	Bangun Purba	C	-	Ada	Ada
13	P9970440	PKBM Tunas Baru Al-Hikmah	Ujungbatu	C	Ada	Ada	Ada
14	P9970093	PKBM Ibu Pertiwi	Kunto Darussalam	B	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

12) Capaian SPM Bidang Pendidikan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari tiga indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), dan pemenuhan SPM pendidikan pada Pendidikan kesetaraan. Adapun capaian dari SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-104
Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	97,62	87,72	89,76
2	Pendidikan Dasar	94,8	92,55	94,27
3	Pendidikan Kesetaraan	89,55	55,62	87,16

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.1.2 Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dari 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua sibayi. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, angka kematian bayi (AKB) mengalami fluktuatif. Data kematian bayi diperoleh dari survei Dinas Kesehatan dipuskesmas dan RSUD Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan para kader posyandu. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan

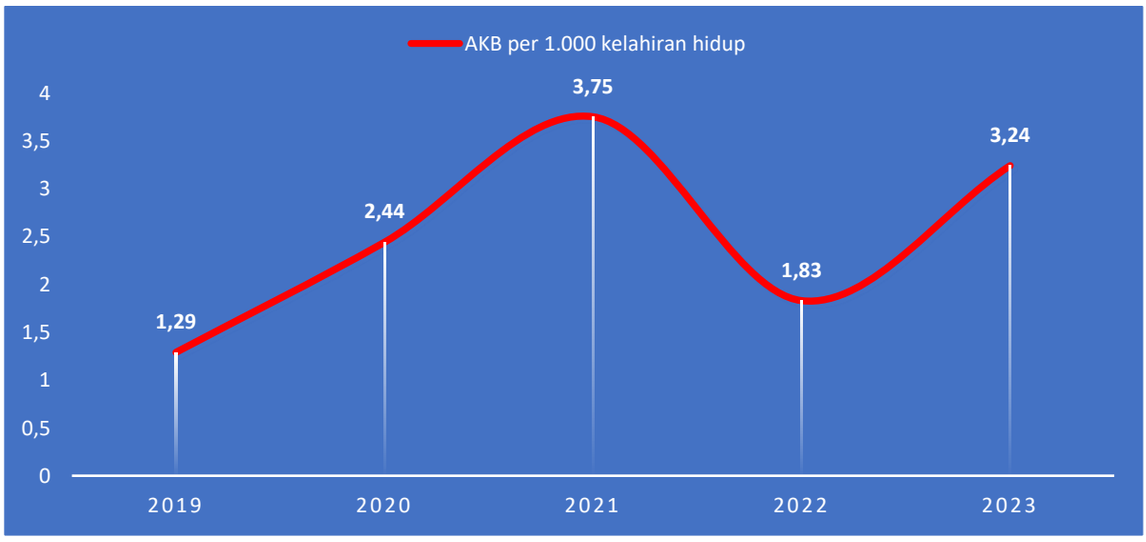
AKB menjadi 37 orang dari 15.177 kelahiran hidup atau 2,44 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan AKB sebesar 41 orang dari 10.939 kelahiran hidup atau 3,75 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan AKB sebesar 20 orang dari 10.941 kelahiran hidup atau 1,83 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dengan AKB sebesar 35 orang dari 10.792 kelahiran hidup atau 3,24 per 1.000 kelahiran hidup. Terakhir tahun 2024 terjadi peningkatan kembali dengan AKB sebesar 68 orang dari 9.814 kelahiran hidup atau 6,93 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel II-105
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	37	41	20	35	68
2	Kelahiran hidup (orang)	15.177	10.939	10.941	10.792	9.814
3	AKB per 1.000 kelahiran hidup	2,44	3,75	1,83	3,24	6,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Bila dilihat dari gambar di bawah ini, AKB per 1000 kelahiran hidup mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2024, dimana pada tahun 2024 sebesar 6,93 meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 3,24. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuatif, dimana tercatat 9.814 di tahun 2024 menurun dari tahun 2023 sebesar 10.792. Angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai adanya pemerataan status gizi dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, dan upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Dengan meningkatnya derajat kesehatan ibu dapat berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar II-45
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

2) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Neonatal. Angka kematian Neonatal di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir belum berjalan optimal. Meskipun begitu pada tahun 2022 angka kematian Neonatal mengalami penurunan dibanding tahun 2021.

Tabel II-106
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi(berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	36	31	17	35	64
2	jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	15.177	10.939	10.941	10.792	9.814
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	2,37	2,83	1,55	3,24	6,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kelahiran per 100.000 kelahiran hidup (tidak termasuk kasus insidentil atau kecelakaan).

Angka kematian ibu menggambarkan status kesehatan secara umum, gizi, pendidikan dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. Angka kematian sampai saat ini diperoleh dari berbagai pelaporan bidan – bidan desa dan dari pelayanan kesehatan yang melibatkan para kader posyandu diwilayah kerja masing – masing puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu melalui survei kohort dan autopsi verbal.

Angka Kematian Ibu dihitung pada per 100.000 kelahiran hidup, karena angka kelahiran hidup belum mencapai 100.000 per tahun maka Angka Kematian Ibu diganti menjadi Jumlah Kematian Ibu yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel II-107
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	7	15	6	3	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Indikator selanjutnya dalam urusan wajib kesehatan adalah jumlah kematian ibu hamil. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu hamil sebesar 7 kematian. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu hamil mengalami peningkatan menjadi 15 kematian. Tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kematian ibu hamil secara signifikan menjadi 3 kematian. Terakhir tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu hamil menjadi 5 kematian. Hal ini

mencerminkan jumlah kematian ibu di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kematian ibu hamil.

4) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan balita tercatat pada tahun 2020 sebesar 4,83 per seribu balita. Rasio posyandu per satuan balita kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,50 per seribu balita. Terakhir pada tahun 2024 peningkatan jumlah balita yang diikuti dengan kenaikan jumlah posyandu membuat pelayanan posyandu meningkat menjadi 12,09 posyandu per seribu balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-108
Rasio Posyandu Persatuan Balita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu	472	454	472	594	594
2	Jumlah balita	97.762	43.223	56.310	55.560	49.117
3	Rasio posyandu persatuan balita (1000)	4,83	10,50	8,38	10,69	12,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Jika dilihat untuk rasio posyandu per satuan balita kecamatan pada tahun 2024 dapat diketahui bahwa Rasio posyandu per satuan balita pada puskesmas Rambah Samo I kecamatan Rambah Samo adalah yang tertinggi Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 18,81. Atau dapat diartikan bahwa puskesmas Rambah Samo I memiliki layanan posyandu lebih banyak untuk melayani balita. Sedangkan puskesmas Tambusai Utara I kecamatan Tambusai Utara memiliki Rasio posyandu yang lebih sedikit per satuan balita yaitu sebesar 6,62 persen. Dengan kata lain, pada kecamatan Tambusai Utara sedikit posyandu melayani lebih banyak balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-109
Rasio Posyandu Persatuan Balita Menurut Kecamatan di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
1	Rambah	Rambah	45	3.596	12,51
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	37	2.111	17,53
		Rambah Hilir II	16	1.455	11,00
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	36	1.914	18,81
		Rambah Samo II	20	1.091	18,33
4	Kepenuhan	Kepenuhan	27	2.098	12,87
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	16	1.759	9,10
6	Tambusai	Tambusai I	38	4.280	8,88
		Tambusai II	15	1.530	9,80
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	33	4.984	6,62
		Tambusai Utara II	32	2.671	11,98
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	28	1.585	17,67

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
		Rokan IV Koto II	11	601	18,30
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	16	1.102	14,52
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	17	1.083	15,70
11	Ujungbatu	Ujungbatu	36	4.434	8,12
12	Tandun	Tandun I	22	1.752	12,56
		Tandun II	14	867	16,15
13	Bangun Purba	Bangun Purba	23	1.730	13,29
14	Kabun	Kabun	40	2.431	16,45
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	29	2.366	12,26
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	30	2.437	12,72
		Kunto Darussalam II	12	1.240	9,68
	Jumlah		**594**	**49.117**	**12,09**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan Kabupaten /Kota. Pada tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 23 unit dengan rincian puskesmas perawatan 11 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4 per 100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 25.522 penduduk atau setiap 100.000 penduduk ada 4 - 5 puskesmas. Hal ini berarti sarana puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi sesuai target nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, semakin tinggi rasio puskesmas terhadap penduduk, makin rata penyebaran dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Berdasarkan data pada tabel dibawah menggambarkan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel II-110
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas	21	22	22	23	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	78	78	78	80
3	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
4	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Rasio pustu persatuan penduduk	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan,

asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024 hal ini menyebabkan meningkatnya rasio rumah sakit perjumlah penduduk menjadi 0,010. Berikut rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-111
Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah sakit umum (pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah rumah sakit swasta	4	4	5	5	5
3	Jumlah seluruh rumah sakit	5	5	6	6	6
4	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
5	Rasio rumah sakit per jumlah penduduk	0,007	0,009	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum mengalami peningkatan yang berarti selama periode 2020-2024. Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 sebanyak 0,05 mengalami peningkatan menjadi 0,18 pada tahun 2024. Peningkatan rasio ini ditenggarai karena jumlah dokter yang terus bertambah pada tahun 2020 hingga 2024. Untuk lebih rinci rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-112
Rasio Dokter Persatuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokter	26	33	35	40	109
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio dokter persatuan penduduk (1000)	0.05	0,06	0,06	0,07	0,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

8) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali diartikan memiliki makna yang sama. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab III Pasal 11 butir 2, Tenaga medis adalah bagian dari Tenaga Kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2024 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,68 meningkat cukup besar dibanding tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan rasio sebesar 0,05, 0,06, 0,10 dan 0,13. Ini berarti bahwa pada tahun 2024 hanya terdapat sekitar 0,68 tenaga medis per seribu penduduk atau dengan kata lain ada sekitar tujuh tenaga medis yang melayani seribu

penduduk pada tahun 2024. Lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-113
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga medis	26	33	58	75	401
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000)	0,05	0,06	0,010	0,13	0,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

9) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2020-2024 terakhir terlihat mengalami penurunan secara signifikan. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan telah mencapai 7,8 persen dari total komplikasi kebidanan yang terjadi pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam menangani komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-114
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kabupaten Rokan Hulu	100	376	414	849	177
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu	1771	2.567	5,073	2.510	2.259
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	5,64	14,65	8,16	33,8	7,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat sudah baik. Dimana pada tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 78,24 persen. Namun, pada tahun 2021 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami kenaikan menjadi 91,91 persen. Terakhir pada tahun 2022, 2023 dan 2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan menjadi 90,12, 90,07 dan 87,69 persen. Hal ini menandakan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan kurang baik. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-115
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	14.457	11.799	10.909	10.807	9.854
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	18.478	12.837	12.105	11.998	11.237
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	78,24	91,91	90,12	90,07	87,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

11) Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Indikator Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi yang menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata di seluruh desa/kelurahan. Adapun target dari Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) ini adalah sebesar 80% dari total keseluruhan desa/kelurahan. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa pada tahun 2024 target Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) belum tercapai, karena baru 86,9 persen dari total 145 desa/kelurahan yang terkategori UCI. Artinya, dibanding tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kinerja dalam mencapai target Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-116
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	82	88	102	95	126
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	145	145	145	145	145
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	56.6	60,7	70,3	65,5	86,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

12) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera hidup. selain itu tentunya masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Oleh sebab itu penanganan gizi buruk terutama perawatan menjadi lebih utama dalam pelayanan kesehatan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-117
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat prevalensi gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dicapai 100,00 persen dengan kata lain balita yang menderita gizi buruk seluruhnya mendapat perawatan.

13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacteriumtuberculosis*. sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau ekstra paru yaitu antara lain TB Tulang, kulit dan kelenjar, penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara (*Droplet Infeksi*). Jumlah semua kasus TB pada tahun 2024 yaitu 1.192 kasus. sedangkan Pada tahun 2023 perkiraan penemuan kasus baru BTA positif untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah 580 kasus.

Tabel II-118
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	799	839	527	580	1.192
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu	2.204	2.474	8.522	2.679	1.654
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	36,25	33,91	6,18	21,6	72,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

14) Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 kasus TBC per 100.000 penduduk sebanyak 60 kasus. Pada tahun 2021 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) meningkat drastis menjadi sebanyak 142 kasus penderita TBC per seratus ribu penduduk, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 90 kasus TBC per 100.000 penduduk dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menjadi 101 kasus. Terakhir tahun 2024 Tingkat prevalensi Tuberkulosis meningkat kembali menjadi 242 kasus TBC per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-119
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC	381	809	527	580	1.422
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	68	142	90	101	242

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terlihat pada beberapa kecamatan

terdapat jumlah kasus TBC yang cukup tinggi, sementara pada beberapa kabupaten lain jumlah kasus TBC sudah rendah. Kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan kasus TBC terbanyak pada tahun 2024 mencapai 494 kasus baru dan lama. Banyaknya jumlah kasus TBC ini membuat Kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling tinggi, yaitu mencapai 905 penderita TBC per 100.000 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling rendah adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah kasus sebanyak 14 kasus per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-120
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	494	54332	905,0
2	Rambah Hilir I	Rambah Hilir	33	24757	133,3
3	Rambah Hilir II		16	17686	90,5
4	Rambah Samo I	Rambah Samo	23	22429	102,5
5	Rambah Samo II		10	12726	78,6
6	Kepenuhan	Kepenuhan	29	28729	100,9
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	27	19123	141,2
8	Tambusai I	Tambusai	67	45122	148,5
9	Tambusai II		24	17875	134,3
10	Tambusai Utara I	Tambusai Utara	86	58482	147,1
11	Tambusai Utara II		62	31323	197,9
12	Rokan IV Koto I	Rokan IV Koto	20	18564	107,7
13	Rokan IV Koto II		9	6368	141,3
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	15	12919	116,1
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	14	12691	110,3
16	Ujungbatu	Ujungbatu	321	51989	617,4
17	Tandun I	Tandun	23	20543	112,0
18	Tandun II		9	12949	69,5
19	Bangun Purba	Bangun Purba	39	20325	191,9
20	Kabun	Kabun	16	28506	56,1
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	30	28720	104,5
22	Kunto Darussalam I	Kunto Darussalam	36	28587	125,9
23	Kunto Darussalam II		19	18489	102,8
Jumlah			**1.422**	**586.994**	**242**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

15) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Untuk Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu lima tahun terakhir cendrung berfluktuatif dan menurun. Hal ini terlihat dari jumlah pasien TB yang meninggal tahun 2024 sebesar 8 kematian dalam seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-121
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	18	16	18	12	8
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,21	2,80	3,09	2,09	1,36

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

16) Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas *Directly Observe Treatment Shortcourse* (DOTS) merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam penanganan dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Dimana Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2020 sudah mulai membaik, yaitu mencapai 36,25 persen. Ini artinya peran DOTS sudah mulai optimal dalam penanganan TB di Rokan Hulu. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi kenaikan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menjadi 72,07 persen. Lebih jelas mengenai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-122
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	799	534	527	580	1.192
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	2.204	3.677	8.522	2.679	1.654
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	36,25	14,52	6,18	21,65	72,07

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

17) Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Pada tahun 2024 proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tercatat sebanyak 1.191 pasien, dengan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh 99,92 persen terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan tingkat kesembuhan sebanyak 460 pasien atau 57,57 persen Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel II-123
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	460	324	173	180	1.191
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	799	534	527	580	1.192
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	57,57	60,67	32,83	31,03	99,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

18) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terbukti dari jumlah penanganan DBD yang sudah mencapai 100 persen dari total kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-124
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	162	86	230	139	218
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah	162	86	230	139	218
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

19) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tujuan umum JPKMM adalah terselenggaranya jaminan pemeliharaan masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan khusus yang meliputi: (i) terlaksananya registrasi masyarakat miskin; (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin; (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal Ini terbukti dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap telah mencapai 100 persen.

Tabel II-125
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

20) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merujuk pada persentase bayi yang menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh dokter, bidan, atau perawat dengan kompetensi klinis di suatu wilayah kerja setidaknya sebanyak 4 kali dalam periode tertentu. Kunjungan bayi ini mencakup pelayanan kesehatan rutin seperti tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI eksklusif dan dini, serta pencegahan infeksi melalui perawatan mata, tali pusat, kulit, dan imunisasi. Cakupan kunjungan bayi ini mencakup bayi yang berusia antara 29 hari hingga 11 bulan, dan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti sarana pelayanan kesehatan (seperti polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit), atau melalui kunjungan petugas ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sejenisnya.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian mendekati 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan cakupan kunjungan bayi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-126
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	13.654	10.939	10.941	10.784	9.627
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	17.132	10.977	12.106	10.792	9.813
3	Cakupan kunjungan bayi	79.70	99,65	90,38	99,93	98,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

21) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Peningkatan cakupan puskesmas perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Cakupan puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,37 persen, meningkat menjadi 1,44 persen pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 masih pada angka 1,44 persen. Ini artinya setiap kecamatan sudah memiliki setidaknya satu puskesmas, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas.

Tabel II-127
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas	22	22	22	23	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	84	84	84	84	80
3	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
4	Jumlah desa/kelurahan	145	145	145	145	145
5	Cakupan puskesmas	1,37	1,37	1,37	1,44	1,44
6	Cakupan puskesmas pembantu	57.93	57,93	57,93	57,93	55,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sedangkan cakupan pembantu puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa. Cakupan pembantu puskesmas merujuk pada jumlah penduduk atau wilayah yang mendapat pelayanan dari seorang tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk melaksanakan tugas medis di puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 57,93 persen dan menurun menjadi 55,17 pada tahun 2024, dimana dari total 145 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru 80 desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas pembantu pada tahun 2024. Lebih rinci mengenai cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu diKabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel diatas.

22) Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sudah sebanyak 79,10 persen dari total 13.429 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Persentase ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 47,62 persen, dan pada tahun 2022 kenaikan cukup jauh dibanding tahun 2020, yaitu hanya sebanyak 85,17 persen anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Kemudian tahun 2023 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami penurunan menjadi 78,67 persen. Terakhir pada tahun 2024 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat secara signifikan menjadi 101,94 persen. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya peningkatan ini antaralain meningkatnya kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak terhadap anak untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi dan telah tersedianya vaksin campak gratis difasilitas kesehatan. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-128
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	13.429	8.024	12.481	11.890	10.881
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	16.976	16.849	14.654	15.113	10.780
3	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	79.1	47,62	85,17	78,67	100,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terlihat persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak telah mencapai 100,94 persen. Ada beberapa kecamatan yang pemberian imunisasi campaknya sangat tinggi diatas 90 persen diantaranya

kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan kecamatan dengan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak paling rendah adalah Kecamatan Kabun dengan persentase pemberian imunisasi campak sebesar 74,52 persen dari total anak usia 1 tahun di wilayah kecamatan tersebut. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-129
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	Rambah	Rambah	947	991	95,56
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	388	450	86,22
		Rambah Hilir II	282	321	87,85
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	459	407	112,78
		Rambah Samo II	196	231	84,85
4	Kepenuhan	Kepenuhan	851	820	103,78
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	327	325	100,62
6	Tambusai	Tambusai I	974	1062	91,71
		Tambusai II	657	569	115,47
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	653	522	125,10
		Tambusai Utara II	427	347	123,06
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	340	337	100,89
		Rokan IV Koto IV	79	116	68,10
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	530	519	102,12
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	412	336	122,62
11	Ujungbatu	Ujungbatu	228	231	98,70
12	Tandun	Tandun I	982	944	104,03
		Tandun II	377	373	101,07
13	Bangun Purba	Bangun Purba	179	235	76,17
14	Kabun	Kabun	275	369	74,52
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	426	518	82,24
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	662	522	126,82
		Kunto Darussalam II	230	235	97,87
	Jumlah		**10.881**	**10.780**	100,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

23) Non polio AFP rate per 100.000 penduduk

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio.

Pada tahun 2020 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk sebesar 0 kasus per seratus ribu penduduk. Kemudian Pada tahun 2021 Non Polio AFP

rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 1,15 kasus per seratus ribu penduduk. Terakhir pada tahun 2024 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 7,36 kasus per seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-130
Non Polio AFP Rate Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus AFP Non polio yang dilaporkan	0	2	13	14	17
2	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	0	173.088	169.854	165.961	231.113
3	Non Polio AFP rate	0	1,15	7,65	8,44	7,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan hanya pada beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Tambusai, Tambusai Utara, Rokan IV Koto, Tandun, Bangun Purba, Bonai Darussalam dan Kunto Darussalam. Selebihnya pada 7 kecamatan lain tidak ada kasus SFP polio yang dilaporkan. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-131
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	2	21.256	9,41
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	0	9.641	0
		Rambah Hilir II	0	6.887	0
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	8.734	0
		Rambah Samo II	1	4.956	20,18
4	Kepenuhan	Kepenuhan	0	11.188	0
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	7.446	0
6	Tambusai	Tambusai	2	17.571	11,38
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	5	6.961	71,83
		Tambusai Utara II	0	22.772	0
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1	12.198	8,20
		Rokan IV Koto II	1	7.229	13,83
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	0	2.480	0
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	5.031	0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	0	4.942	0
12	Tandun	Tandun I	1	20.245	4,94
		Tandun II	1	8.000	12,5
13	Bangun Purba	Bangun Purba	1	5.043	19,83
14	Kabun	Kabun	0	7.915	0
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	1	11.101	9,01
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1	11.184	8,94
		Kunto Darussalam II	0	11.133	0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
	Jumlah		**17**	**231.113**	**7,36**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

24) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. Pada tahun 2020 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan sebesar 14,9 persen. Pada tahun 2021 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menurun menjadi 12,01 persen. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 2,99 persen. Dan pada tahun 2023 penanganan balita yang terkena pneumonia naik menjadi 3,80 persen. Terakhir pada tahun 2024 turun kembali balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menjadi 1,65 persen. Jumlah penangan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini. Lebih jelas mengenai Cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-132
Cakupan Balita Pneumonia ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita Pneumonia yang ditangani	284	229	57	76	35
2	Jumlah Balita perkiraan penderita pneumonia	1.904	1.906	1.904	2001	2.122
3	Cakupan Balita Pneumonia ditangani	14.9	12,01	2,99	3,80	1,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 terlihat masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani. Dimana hanya 8 kecamatan jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani yang mencapai 1,65 persen. Padahal pada 8 kecamatan lainnya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita cukup tinggi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-133
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	Rambah	Rambah	0	178	0
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	0	84	0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
		Rambah Hilir II	0	54	0
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	84	0
		Rambah Samo II	1	34	2,94
4	Kepenuhan	Kepenuhan	1	152	0,66
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	75	0
6	Tambusai	Tambusai	1	225	0,44
			0	123	0
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	0	99	0
		Tambusai Utara II	0	65	0
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	0	66	0
		Rokan IV Koto II	0	22	0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	0	114	0
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	15	86	17,44
11	Ujungbatu	Ujungbatu	5	49	10,20
12	Tandun	Tandun I	2	233	0,86
		Tandun II	0	68	0
13	Bangun Purba	Bangun Purba	7	36	19,44
14	Kabun	Kabun	0	60	0
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	92	0
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	84	0
		Kunto Darussalam II	3	39	7,69
	Jumlah		**35**	**2122**	**1,65**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

25) Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit Diare adalah perubahan konsistensi feses selain dari frekwensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya atau bila BAB lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja (tiga kali atau lebih dalam satu hari), adapun penyebab terjadinya diare antara lain bakteri, virus, parasit (jamur, cacing, protozoa), keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia, kurang gizi, Alergi terhadap susu dan Immunodefisiensi. Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terjadi penurunanan yang signifikan dari tahun ketahun. Dimana, pada tahun 2020 Persentase Penderita diare yang ditangani sebesar 11,10 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2021 Persentase Penderita diare yang ditangani turun menjadi sebesar 0,6 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2022 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat signifikan menjadi sebesar 7,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2023 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat menjadi sebesar 8,4 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir pada tahun 2023 Persentase Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,9 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-134
Persentase Penderita diare yang ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	2.086	122	1.377	1.625	837
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	18.795	18.794	19.270	19.427	21.455
3	Persentase Penderita diare yang ditangani	11,1	0,6	7,1	8,4	3,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk persentase penderita diare yang ditangani per kecamatan secara rata-rata masih rendah, yaitu rata-rata 3,90 persen saja. Di beberapa puskesmas terdapat pelayanan yang sangat rendah, yaitu pada Kecamatan Tambusai (Puskesmas Tambusai II), Rokan IV Koto (Puskesmas Rokan IV Koto I), Kecamatan Tandun (Puskesmas Tandun I) dan Kecamatan Rambah Hilir (Puskesmas Rambah Hilir II). Padahal jumlah perkiraan penderita diare di beberapa kecamatan ini ada yang mencapai 2.354 orang yaitu di Kecamatan Tandun (Puskesmas Tandun I). Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-135
Penderita Diare yang Ditangani Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
1	Rambah	Rambah	54	1.795	3,01
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	28	849	3,29
		Rambah Hilir II	4	545	0,73
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	68	851	7,99
		Rambah Samo II	47	343	13,70
4	Kepenuhan	Kepenuhan	76	1.539	4,94
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	51	758	6,73
6	Tambusai	Tambusai I	59	2.280	2,59
		Tambusai II	1	1.242	0,08
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	13	999	1,30
		Tambusai Utara II	30	660	4,55
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	2	665	0,30
		Rokan IV Koto II	22	222	9,91
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	58	1.157	5,01
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	67	873	7,68
11	Ujungbatu	Ujungbatu	47	494	0,81
12	Tandun	Tandun I	10	2.354	0,42
		Tandun II	31	687	4,51

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
13	Bangun Purba	Bangun Purba	79	363	21,76
14	Kabun	Kabun	20	603	3,32
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	26	933	2,79
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	27	845	3,20
		Kunto Darussalam II	17	398	4,27
Jumlah			**837**	**21.455**	**3,90**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

26) Tingkat kematian akibat malaria

Berdasarkan data dari P2P & PL Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu angka kejadian malaria per 1000 orang tahun 2022 sebesar 0,090 dan tahun 2023 angka kejadian malaria per 1000 orang (API) sebesar 0,070. Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk. Pada tahun 2022 hingga 2023 tidak ada terjadi kasus kematian akibat malaria atau CFR Malaria nol di semua Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu. Karena untuk menjamin kasus malaria tetap rendah telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kasus supaya tidak meningkat seperti penemuan dini dan tatalaksana kasus yang tepat.

27) Prevalensi HIV/AIDS

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Rokan Hulu jika dibanding dengan total populasi telah berada dalam kategori sangat tinggi. Dimana sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 prevalensi HIV/AIDS cendrung berfluktuatif. Secara jumlah penderita menunjukkan adanya tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 6 orang, kemudian mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 122 orang penderita HIV/AIDS pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 18 orang penderita HIV/AIDS dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 30 orang penderita HIV/AIDS. Terakhir pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 41 orang penderita HIV/AIDS . Lebih rinci mengenai Persentase Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-136
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6	122	18	30	41
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.	0.001	0.021	0.003	0.005	0.007

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

28) Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun lima tahun terakhir sudah menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hingga tahun 2020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 80,31 persen dari total sasaran sebanyak 15.394 ibu hamil. Pada tahun 2024 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 meningkat menjadi 88,14 persen dari total sasaran. Menurunnya cakupan kunjungan Ibu Hamil pada tahun 2021-2023 ditenggarai salah satunya karena menurunnya jumlah posyandu di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-137
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	15.394	12.024	11.590	11.428	9.955
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	19.169	12.837	12.683	12.550	11.294
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4.	80,31	93,7	91,4	91,06	88,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terlihat masih belum merata. Kecamatan dengan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 paling tinggi adalah kecamatan Tambusai Utara (Puskesmas Tambusai Utara I) dengan cakupan mencapai 100 persen dari total sasaran. Selain itu kecamatan Rokan IV koto (Puskesmas Rokan IV Koto I) dan kecamatan Bangun Purba (Puskesmas Bangun Purba) juga menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 sangat tinggi dangan capaian sebesar 99,72 dan 99,74 persen dari total sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, pada kecamatan Bonai Darussalam cakupan kunjungan ibu hamil K4 hanya sebesar 51,88 persen dari total sasaran. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-138
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1.	Rambah	Rambah	1005	1.052	95,53
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	429	476	90,13
		Rambah Hilir II	271	337	80,42
3.	Rambah Samo	Rambah Samo I	389	427	91,10
		Rambah Samo II	173	244	70,90
4.	Kepenuhan	Kepenuhan	517	548	94,34
5.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	268	362	74,03
6.	Tambusai	Tambusai	775	862	89,91
		Tambusai II	284	342	83,04

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
7.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1110	1.110	100
		Tambusai Utara II	541	593	91,23
8.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	352	353	99,72
		Rokan IV Koto II	102	122	83,61
9.	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	197	244	80,74
10.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	225	241	93,36
11.	Ujungbatu	Ujungbatu	984	995	98,90
12.	Tandun	Tandun I	367	389	94,34
		Tandun II	160	245	65,31
13.	Bangun Purba	Bangun Purba	388	389	99,74
14.	Kabun	Kabun	372	540	68,89
15.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	276	532	51,88
16.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	465	541	85,95
		Kunto Darussalam II	305	350	87,14
	Jumlah		9.955	11.294	88,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

29) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari. 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan, dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi.

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. 2) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya. 3) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. 4) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam), dan 5) pelayanan KB pasca persalinan.

Untuk Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 2020-2024 tidak ada cakupan pelayanan dibawah 75 persen. Cakupan pelayanan nifas yang baik ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan pasca persalinan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-139
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.457	11.799	10.909	10.823	9.854
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	18.478	12.261	12.105	12.105	11.236
3	Cakupan pelayanan nifas	78.2	96,23	90,12	90,21	87,70

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tidak jauh berbeda, Cakupan pelayanan nifas per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merata antar kecamatan. Tidak ada kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 60 persen, sehingga boleh dikatakan cakupan pelayanan nifas di kecamatan cukup merata. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-140
Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
1.	Rambah	Rambah	994	1.047	94,94
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	368	473	77,80
		Rambah Hilir II	287	335	85,67
3.	Rambah Samo	Rambah Samo I	385	425	90,59
		Rambah Samo II	178	243	73,25
4.	Kepenuhan	Kepenuhan	519	545	95,23
5.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	356	360	98,89
6.	Tambusai	Tambusai	741	858	86,36
		Tambusai II	291	340	85,59
7.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1.065	1.105	96,38
		Tambusai Utara II	531	589	90,15
8.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	350	352	99,43
		Rokan IV Koto II	112	121	92,56
9.	Pendalian IV Koto	Pendalian Iv Koto	185	243	76,13
10.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	225	240	93,75
11.	Ujungbatu	Ujungbatu	984	990	99,39
12.	Tandun	Tandun I	315	387	81,40
		Tandun II	177	244	72,54
13.	Bangun Purba	Bangun Purba	387	387	100
14.	Kabun	Kabun	356	537	66,29
15.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	409	529	77,32

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
16.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	344	538	63,94
		Kunto Darussalam II	295	348	84,77
	Jumlah		**9.854**	**11.236**	**87,70**

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

30) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 4,39 persen dari total keseluruhan neonatus dengan komplikasi. Setiap tahun kinerja penanganan neonatus dengan komplikasi terus menunjukkan perbaikan kinerja hingga menjadi 100 persen neonatus berkomplikasi yang ditangani pada tahun 2024. Lebih rinci mengenai Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-141
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	100	109	49	365	101
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	2.277	1.641	825	365	101
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	4,39	6,64	5,94	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

31) Cakupan pelayanan anak balita

Setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun, pemberian vitamin A 2 kali dalam setahun, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024 cakupan pelayanan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 37.078 dengan persentase 75,49 persen mengalami penurunan di bandingkan dari tahun 2023 sebesar 39.124 atau 108,14 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan jumlah anak balita yang terjangkau oleh layanan kesehatan.

Tabel II-142
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	41.871	36.731	40.836	39.124	37.078
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	84.765	57.206	56.310	36.178	49.117
3	Cakupan pelayanan anak balita	49.4	64.21	72.52	108,14	75,49

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sudah termasuk dalam kategori baik dengan cakupan sebesar 75,49 persen. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada beberapa kecamatan Cakupan pelayanan anak balita masih terkategori sangat rendah. Misalnya pada puskesmas Kecamatan Kepenuhan yang memiliki Cakupan pelayanan anak balita hanya sebesar 19,35 persen dari total jumlah balita yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pelayanan kesehatan, yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar seluruh anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat terlayani dengan optimal. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-143
Cakupan Pelayanan Anak balita per Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
1	Rambah	Rambah	3.195	3.596	88,85
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	1.861	2.111	88,16
		Rambah Hilir II	1.293	1.455	88,87
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	1.923	1.914	100,47
		Rambah Samo II	768	1.091	70,39
4	Kepenuhan	Kepenuhan	406	2.098	19,35
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	1.588	1.759	90,28
6	Tambusai	Tambusai I	3.239	4.280	75,68
		Tambusai II	1.530	1.530	100,00
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	3.283	4.984	65,87
		Tambusai Utara II	2.382	2.671	89,18
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1545	1.585	97,48
		Rokan IV Koto II	335	601	55,74
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	801	1.102	72,69
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	1.011	1.083	93,35
11	Ujungbatu	Ujungbatu	4.365	4.434	98,44
12	Tandun	Tandun I	1.601	1.752	91,38
		Tandun II	608	867	70,13
13	Bangun Purba	Bangun Purba	872	1.730	50,40

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
14	Kabun	Kabun	1.560	2.431	64,17
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	732	2.366	30,94
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	972	2.437	39,89
		Kunto Darussalam II	1.208	1.240	97,42
	Jumlah		**37.078**	**49.117**	**75,49**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

32) Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah upaya memberikan tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Makanan memegang peranan penting untuk tumbuh kembang anak, karena anak yang sedang tumbuh kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Pemberian makanan tambahan merupakan suatu program untuk mencegah semakin memburuknya status kesehatan dan gizi masyarakat terutama keluarga miskin yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Tujuan dari PMT tersebut mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak balita terutama dari keluarga miskin, meringankan beban masyarakat serta memotivasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu. Untuk disarankan pemberian makanan tambahan diberikan secara terus menerus hingga kelompok sasaran dinyatakan berstatus gizi yang baik sesuai aturan kesehatan.

Tabel II-144
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-59 bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 6-59 bulan yang mendapat MP-ASI	440	761	56.309	4.881	6.528
2	Jumlah seluruh anak usia 6-59 bulan	440	761	56.309	5.024	6.804
3	Cakupan pemberian makanan pada pendamoingan ASI pada anak usia 6-59 bulan	100.0	100.0	100.0	97,15	95,94

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

33) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu cukup berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat tercatat sebesar 60,5 persen. Pada tahun 2021 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat meningkat menjadi sebesar 97,0 persen. Pada tahun 2022 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat mengalami penurunan sebesar 71,7. Pada tahun 2023 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat meningkat kembali menjadi 89,84 persen. Terakhir pada tahun 2024 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat

meningkat secara signifikan menjadi 95,29 persen dari total keseluruhan siswa SD/sederajat. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dan sekolah dalam pelaksanaan program penjaringan kesehatan. Lebih rinci mengenai Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-145
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	15.620	324	31.407	19.642	32.710
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	25.839	334	43.791	21.864	34.328
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	60,5	97,0	71,7	89,84	95,29

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

34) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dimana pada tahun 2024 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2021-2023 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) menurun menjadi 50 persen. Hal ini disebabkan jumlah pelayanan gawat darurat level 1 hanya terjadi penambahan sebesar 1 unit, jika dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan (RS) yang penambahannya 4 unit. Lebih rinci Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II-146
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan gawat darurat level 1	2	3	3	3	6
2	Jumlah RS	2	6	6	6	6
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	50	50	50	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

35) Cakupan desa/kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam adalah desa/kelurahan yang

mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan <24 jam oleh Kabupaten terhadap KLB pada periode/kurun waktu tertentu. Pada tahun 2020 tidak terdapat desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. Pada tahun 2021 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu terdapat 1 kasus dan Pada tahun 2022 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu meningkat menjadi 4 kasus. Dan pada tahun 2023 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu menurun menjadi 3 kasus. Terakhir pada tahun 2024 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu turun kembali menjadi 1 kasus.

Tabel II-147
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	0	1	4	3	1
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	1	4	3	1
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

36) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel II-148
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,7	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

37) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel II-149
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9,9	16,4	33,4	51	60,39

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

39) Capaian SPM Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal .Dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 100% untuk

setiap indikatornya. Target pencapaian SPM oleh daerah untuk bidang kesehatan di tahun 2022-2024 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Adapun Capaian SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-150
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89	92,53	77,59
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34,93	91,19	89,30
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83,23	95,08	86,86
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,81	81,92	76,85
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	91,5	90,66	58,28
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	98,45	63,10	69,04
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	93,07	89,84	93,83
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97,04	56,01	60,39
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	136,23	96,67	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	72,22	89,12
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	91,53	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	75,22	60,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Sampai tahun 2024 panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 35.193,57 meter, yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan.

Tabel II-151
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	19.401,75	18.431,66	18.431,66	23.094,06	35.193,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) lokasi irigasi di Kabupaten Rokan Hulu dan Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan

mempertahankan jaringan irigasi yang ada, Sampai dengan tahun 2020-2024 panjang saluran irigasi diKabupaten Rokan Hulu 29.790,00 km yang terdiri atas saluran irigasi primer, irigasi skunder, dan tersier dan luas lahan pertanian budidaya seluas 320,90 Ha dengan rasio 92,83 persen.

Tabel II-152
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang saluran irigasi	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00
2	Luas lahan budidaya pertanian	320.90	320.90	320.90	320.90	320.90
3	Rasio Jaringan Irigasi	92.83	92.83	92.83	92.83	92.83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Indikator lain yang cukup penting dalam menggambarkan kondisi urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase irigasi dalam kondisi baik. Irigasi sebagai sumber pengairan utama lahan pertanian tentu harus selalu dijaga dalam kondisi baik, agar dapat mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020-2021 tercatat sebesar 69,81 persen, pada tahun 2022 kondisi irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 78,90 persen. Dan pada tahun 2023 kondisi irigasi dalam kondisi baik meningkat kembali menjadi 80,90 persen. Terakhir, pada tahun 2024 kondisi irigasi dalam kondisi baik jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 82,60 persen.

Tabel II-153
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	3.251	3.251	1.036	1.062,26	1.084,58
2	Luas irigasi kabupaten	4.657	4.657	1.313	1.313	1.313
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69.81	69.81	78.90	80,90	82,60

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan

Salah satu indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah indikator Rasio bangunan ber -IMB persatuan bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah bangunan ber -IMB tahun bersangkutan dibagi jumlah bangunan pada tahun bersangkutan.

Tabel II-154
Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bangunan ber – IMB	581	96	35	25	120
2	Jumlah bangunan	16.768	16.768	16.768	16.768	16.768
3	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Air Minum Perpipaan

Persentase kepala keluarga berakses air minum perpipaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 79,43 persen, meningkat hingga tahun 2021 menjadi 80,85 persen, namun turun pada tahun 2022 menjadi 78,15 persen dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 89,41 persen. Terakhir pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 80,64 persen.

Tabel II-155
Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Jumlah Kepala Keluarga yang terlayani				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sumber Akses PAMSIMAS	8.828	11.126	11.126	11.126	10.729
2	Sumber Akses NON PAMSIMAS	66.171	65.059	65.059	65.059	104.883
3	Sumber Akses SR UPTD PAB	4.919	5.392	5.466	9.434	5.782
4	Sumber Akses Lainnya	54.966	60.898	60.898	60.898	15.923
5	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan akses air minum Perpipaan	134.884	142.475	142.549	146.517	137.317
6	Jumlah kepala keluarga	169.810	176.215	182.415	163.862	170.292
7	Persentase kepala keluarga berakses air minum Perpipaan	79,43	80,85	78,15	89,41	80,64

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel dibawah cakupan pelayanan air bersih dari tahun ketahun cenderung meningkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kondisi saat ini IKK yang sudah dibangun terdapat di 16 kecamatan dengan kapasitas terpasang 425 I/d, sedangkan IKK yang tidak berfungsi sebanyak 4 IKK pada 4 kecamatan yakni kecamatan Tambusai sebesar 15 l/d, kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 10 1/d. kecamatan Bonai Darussalam sebesar 20 l/d dan kecamatan Kepenuhan Hulu sebesar 20 1/d. Sehingga terjadi idle kapasiti sebesar 56 1/d secara total kabupaten. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk meningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih; peningkatan kapasitas pelayanan/cakupan layanan; pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan dan optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai.

Tabel II-156
Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	IKK RAMBAH	Desa Pematang Berangan	70	70	0	70	0	410	373	287	86	1883
		Desa Pawan	20	20	0	20	0					
2	SPAM IKK TANDUN I	Desa Tandun	10	10	0	10	0	97	89	74	15	741
		Desa Bono Tapung	20	20	0	15	5					
3	SPAM IKK UJUNG BATU I	Kelurahan Ujung Batu	10	10	0	10	0	87	79	63	16	461
		Desa Ngaso	50	50	0	35	15					
4	SPAM IKK TAMBUSAI	Kelurahan Tambusai Tengah	25	10	15	10	15	162	147	123	25	763
5	SPAM IKK RAMBAH HILIR	Desa Rambah	30	30	0	20	10	75	68	57	11	963
6	SPAM IKK KEPENUHAN	Desa Kepenuhan Tengah	20	20	0	10	10	8	7	6	620	34
7	SPAM IKK RAMBAH SAMO	Desa Rambah Samo Barat	20	20	0	10	10	6	5	5	459	119
8	SPAM IKK BANGUN PURBA	Desa Bangun Purba Timur Jaya	20	20	0	12	8	18	16	14	2	200
9	SPAM IKK PAGARAN TAPAH	Desa Pagaran Tapah	10	0	10	0	10	-	-	-	-	
10	SPAM IKK KUNTO DARUSSALAM	Desa Kota Lama	20	20	0	10	10	11	10	9	874	105
11	SPAM IKK KABUN	Desa Kabun	10	10	0	6	4	2	2	2	82	0
12	SPAM IKK PENDALIAN IV KOTO	Desa Pendalian	10	10	0	8	2	10	9	9	859	58
13	SPAM IKK ROKAN IV KOTO	Desa Koto Ruang	20	20	0	10	10	16	15	13	1	91
14	SPAM IKK TAMBUSAI UTARA	Desa Tambusai utara	20	20	0	12	8	69	63	52	10	295
15	SPAM IKK BONAI DARUSSALAM	Desa Sontang	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
16	SPAM IKK KEPENUHAN HULU	Desa Pekan Tebih	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
	T O T A L		**425**	**360**	**65**	**268**	**157**	**970.616**	**882.376**	**713,016**	**3060.466**	**5713**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-157
Data persentase rumah tangga perkotaan yang mempunyai akses air minum aman
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No.	Kecamatan	Unit	Kelurahan	SR Kelurahan	SR SPAM IKK
1.	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	Pasir Pengaraian	220	880
2.	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	Ujung Batu	118	472
3.	Kecamatan Tambusai	Tambusai	Tambusai Tengah	762	3.048
4.	Kecamatan Kepenuhan	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	34	136
5.	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	Rokan	68	272
6.	Kecamatan Kunto Darussalam	Kunto Darussalam	Koto Lama	2	8
	Jumlah			**1.204**	**4.816**
	Persentase rumah tangga perkotaan yang mempunyai akses air minum aman				25%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah pelanggan air dan pengelola air bersih adalah sebanyak 28.565 pelanggan, kecamatan rambah menjadi kecamatan dengan jumlah terbanyak diantara kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah pelanggan dari kecamatan Rambah adalah sebesar 9.415 pelanggan. Sementara itu kecamatan Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam dan Kabun selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggan dari kecamatan tersebut. Kemudian dari besaran volume air yang disalurkan, selama tahun 2024 kecamatan rambah menjadi kecamatan terbanyak dengan jumlah volume air yang disalurkan sebesar 753 m3. Sementara itu dikarenakan tidak adanya pelanggan di kecamatan Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam dan Kabun, maka volume air juga tidak ada disalurkan ke ketiga kecamatan tersebut. Total jumlah volume air yang disalurkan selama tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 2.285 m3. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-158
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp)
1	Rambah	9415	753	2.636.200
2	Rambah Hilir	4815	385	1.348.200
3	Rambah Samo	595	48	166.600
4	Kepenuhan	170	14	47.600
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-
6	Tambusai	3815	305	1.068.200
7	Tambusai Utara	1475	118	413.000
8	Rokan IV Koto	455	36	127.400
9	Pendalian IV Koto	290	23	81.200
10	Bonai Darussalam	-	-	-

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp)
11	Kunto Darussalam	525	42	147.000
12	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
13	Tandun	3705	296	1.037.400
14	Kabun	-	-	-
15	Bangun Purba	1000	80	280.000
16	Ujungbatu	2305	184	645.400
Jumlah		**28.565**	**2.285**	**7.998.200**

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki tingkat proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang keenam terendah di Provinsi Riau, dengan proporsi sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll tahun 2024, adalah sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan sebesar 92,46 persen, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-159
Persentase Rumah Tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu

Karateristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dl						
	Air Kemasan Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung/sumur tak terlindung	Mata Air Terlindung/ mata air Tak Terlindung	Lainya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin KRT							
Laki-Laki	NA	NA	36,22	56,95	1,09	7,37	100
Perempuan	0,00	0.00	18,06	72,27	NA	NA	100
Kuintal Pengeluaran							
40 % Terbawah	NA	NA	25,99	63,36	NA	6,76	100
40 % Tengah	NA	0.00	40,44	53,16	NA	9,51	100
20 % Teratas	0.00	NA	39,29	58,01	NA	3,85	100
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD Kebawah	NA	0.00	30,93	60.99	NA	7,71	100
SD Keatas	NA	NA	38,32	55,51	NA	6,73	100
Kab. Rokan Hulu	NA	NA	35,03	57,95	1,03	7.16	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel II-160
Persentase Rumah Tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dl			
	Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang/Leding	Sumur Bor/ Pompa/ Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung/Air Hujan	Lainya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin KRT				
Laki-Laki	NA	92,43	7,37	100
Perempuan	NA	92,78	NA	100
Kuintal Pengeluaran				
40 % Terbawah	NA	92,83	6,76	100
40 % Tengah	NA	90,83	9,51	100
20 % Teratas	NA	95,46	3,85	100

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dl			
	Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang/Leding	Sumur Bor/ Pompa/ Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung/Air Hujan	Lainya	Jumlah
Pendidikan Tertinggi KRT				
SD Kebawah	NA	91,45	7,71	100
SD Keatas	-	93,27	6,73	100
Kab. Rokan Hulu	**NA**	**92,46**	**7.16**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

10) Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 48 kegiatan Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum. Luasan RTH Publik Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020- 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017-2020 telah terbangun 64482,11 meter Luas jalan lingkungan yang sudah terbangun dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan jumlah panjang terbangun 93.180,17 meter.

11) Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk

Sarana peribadatan yang tidak ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah pura dan klenteng. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan Masjid dan Mushola. Rasio Masjid dan mushola pada tahun 2024 sebesar 1 : 380. Dimana tahun 2024 jumlah rasio tempat ibadah secara keseluruhan sebesar 1 : 369 artinya 1 rumah ibadah bisa menampung 369 jemaah.

Tabel II-161
Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Bangunan Ibadah	Jumlah Pemeluk Agama	Rasio
1	Mesjid dan musholla	1.351	514.133	1 : 380
2	Gereja	236	71.808	1 : 304
3	Pura	0	111	1 : 0
4	Vihara	2	198	1 : 99
5	Klenteng dan Lain-lain	0	1	1 : 0
Jumlah		**1.587**	**586.251**	**1 : 369**

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

Tabel II-162
Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
1	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Marga Mulya	475.000.000	1	Unit	2016	50	250
2	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	425.000.000	1	Unit	2016	50	250
3	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Giti	425.000.000	1	Unit	2016	50	250
4	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Ujung Batu	Suka Damai	425.000.000	1	Unit	2016	50	250
5	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Alahan	425.000.000	1	Unit	2016	50	250
6	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Dayo	425.000.000	1	Unit	2016	50	250
7	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara	425.000.000	1	Unit	2017	50	250
8	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah Hilir	Pasir Utama	425.000.000	1	Unit	2017	50	250
9	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	475.000.000	1	Unit	2017	50	250
10	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Maju	475.000.000	1	Unit	2017	50	250
11	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Ujung Batu	Pematang Tebih	475.000.000	1	Unit	2017	50	250
12	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Tambusai	Tambusai Tengah	475.000.000	1	Unit	2017	50	250
13	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Rambah Muda	475,000,000	1	Unit	2018	50	250
14	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Rambah Hilir	Serombou Indah	475,000,000	1	Unit	2018	50	250

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)								
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Lubuk Bilang	475,000,000	1	Unit	2018	50	250
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Sukamaju	475,000,000	1	Unit	2018	50	250
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Koto Tinggi	425,000,000	1	Unit	2018	50	250
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	425,000,000	1	Unit	2019	50	250
19	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur	475,000,000	1	Unit	2019	50	250
20	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Pendalian IV Koto	Pendalian	475,000,000	1	Unit	2019	50	250
21	SPALD Setempat Skala Individual	Tambusai Utara	Bangun Jaya	250,000,000	50	Unit	2019	50	250
22	SPALD Setempat Skala Individual	Rambah	Sialang Jaya	150,000,000	25	Unit	2019	25	125
23	SPALD Setempat Skala Individual	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	250,000,000	50	Unit	2019	50	250
24	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto (Swakelola)	Rokan IV Koto	Alahan	450,000,000	10	Unit	2020	10	50
25	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kabun Kec. Kabun (Swakelola)	Kabun	Kabun	315,000,000	7	Unit	2020	35	175
26	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ngaso Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
27	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
28	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Pasir Maju Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Pasir Maju	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
29	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sungai Dua Indah Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	225,000,000	5	Unit	2020	25	125
30	Pembangunan Tanki Septik Skala	Rambah Hilir	Muara Musu	450,000,000	10	Unit	2020	50	250

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Komunal (5-10KK) Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir (Swakelola)								
31	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sejati Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	225,000,000	5	Unit	2020	25	125
32	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Ulak Patian	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
33	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Rantau Binuang Sakti Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	360,000,000	8	Unit	2020	40	200
34	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepayang	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
35	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kota Lama Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Lama	450,000,000	10	Unit	2020	50	250
36	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ujungbatu Timur Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
37	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
38	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Menaming Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Menaming	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
39	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Koto Tinggi Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Koto Tinggi	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
40	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
41	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tambusai Timur	Tambusai	Tambusai Timur	250,000,000	50	Unit	2020	50	250

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Kec. Tambusai (Swakelola)								
42	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	250,000,000	50	Unit	2020	50	250
43	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu	520,500,000	1	Unit	2020	50	250
44	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Tengah (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	520,500,000	1	Unit	2020	50	250
45	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Tandun Kecamatan Tandun (Swakelola)	Tandun	Tandun	600,000,000	1	Unit	2020	50	250
46	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Utama	600,000,000	1	Unit	2020	50	250
47	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba	600,000,000	1	Unit	2020	50	250
48	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	600,000,000	1	Unit	2020	50	250
49	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Stunting Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	600,000,000	10	Unit	2021	50	250
50	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik	Tambusai Utara	Mahato	600,000,000	10	Unit	2021	50	250

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Penanggulangan Kemiskinan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (Swakelola)								
51	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	540,000,000	9	Unit	2021	45	225
52	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	714,000,000	102	Unit	2021	102	510
53	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	595,000,000	85	Unit	2021	85	425
54	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Karya Mulya	350,000,000	50	Unit	2021	50	250
55	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	Unit	2021	50	250
56	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	350,000,000	50	Unit	2021	50	250
57	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Muara Dilam	350,000,000	50	Unit	2021	50	250
58	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	980,000,000	140	Unit	2021	140	700

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)								
59	Pembangunan WC Individual	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	200,000,000	25	Unit	2021	25	125
60	-Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
61	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Kuning	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
62	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngaso Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
63	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei. Salak Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Salak	420,000,000	60	Unit	2022	50	250
64	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Masda Makmur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Masda Makmur	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
65	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
66	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Langkitin Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Langkitin	399,000,000	57	Unit	2022	50	250
67	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
68	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Rambah Tengah Hilir	350,000,000	50	Unit	2022	50	250
69	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Pasir Luhur Kec.	Bonai Darussalam	Pasir Luhur	350,000,000	50	Unit	2022	50	250

No	Nama Infrastruktur	Lokasi		Pagu	Output		Tahun Pembangunan	Output (Unit)	Outcome (Jiwa)
		Kecamatan	Desa		Jumlah	Satuan			
	Bonai Darussalam (Swakelola)								
70	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Jaya	600,000,000	1	Unit	2022	50	250
71	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Raya	600,000,000	1	Unit	2022	50	250
72	Pembangunan Tanki Septik Individual Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir	Rambah Hilir	Rambah Muda	100,000,000	10	Unit	2023	10	50
73	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Bangun Purba	Bangun Purba Timur Jaya	100,000,000	10	Unit	2024	10	50
74	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Rambah Hilir	Muara Musu	100,000,000	10	Unit	2024	10	50
75	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Kunto Darussalam	Desa Pasir Indah	100,000,000	10	Unit	2024	10	50
76	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 10 KK	Rambah	Tanjung Belit	100,000,000	10	Unit	2024	10	50
77	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 12 KK (Penurunan Stanting)	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	100,000,000	12	Unit	2024	12	60
78	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 12 KK (Penurunan Stanting)	Tambusai	Tambusai Timur	100,000,000	12	Unit	2024	12	60
79	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 13 KK (Penurunan Stanting)	Bangun Purba	Bangun Purba	100,000,000	13	Unit	2024	13	65
80	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 13 KK (Penurunan Stanting)	Kabun	Bencah Kesuma	100,000,000	13	Unit	2024	13	65
JUMLAH YANG DILAYANI								**3.657**	**18.285**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat Jumlah Rumah Tangga yang Sudah mendapat Akses Sanitasi Layak sebesar 15.862 KK yang telah dibangun. Sedangkan Jumlah Rumah Tangga yang harus Dilayani Berdasarkan STBM sebesar 130.419 KK dan Persentase Rumah Tangga yang sudah terlayani

melalui pembangunan sampai tahun 2022 sebesar 12.16 persen, sedangkan yang dibangun masyarakat sendiri 64,91 persen. sehingga persentase rumah tangga yang terlayani seluruhnya sampai dengan tahun 2022 sebesar 77,07 persen.

12) Capaian SPM Bidang Pekerjaan umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar . Adapun Capaian Indikator SPM bidang Pekerjaan umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II-163
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	78	90	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persen	77,07	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 dan dapat dilihat dari tabel berikut.

Luasan RTH Publik Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2007-2018 telah terbangun 76.083 m. Di tahun 2016 Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan bantuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan rokan IV koto 300 m, kecamatan rambah 500 m,kecamatan rambah hilir 337m, kecamatan tambusai utara 425 m. Ditahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan banuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan tambusai 231 m. Pada tahun 2019 pembangunan darinase di Kabupaten Rokan Hulu 25816,16 m.

2) Penghitungan Dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Tabel II-164
Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kawasan	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Luas Kumuh SK Terakhir 2024 (Ha)	Bangunan		Penduduk		
					Jumlah Bangunan	Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah MBR
1	Dusun I Tangun	Tangun	Bangun Purba	10,13	217	65	935	217	91
2	Dusun I Bangun Purba	Bangun Purba	Bangun Purba	3,72	165	33	709	165	38
3	Danau Dipo Boncah Balong	Kepenuhan Tengah	Kepenuhan	35,58	166	41	3320	676	30
4	Babussalam	Babussalam	Rambah	2,24	50	0	198	50	4
5	Koto Tinggi	Koto Tinggi	Rambah	11,99	180	61	751	185	156
6	Pasar Bawah	Pasir Pengaraian	Rambah	1,43	87	57	158	37	12
7	Tanjung Harapan	Pasir Pengaraian	Rambah	5,52	87	57	158	37	12
8	Pasir Pengaraian	Pasir Pengaraian	Rambah	2,83	54	4	206	54	18
9	Tanjung Belanti	Pasir Pengaraian	Rambah	7,22	123	14	494	129	80
10	Tulang Gajah	Pematang Berangan	Rambah	10,05	190	64	768	200	97
11	Pasir Putih	Pematang Berangan	Rambah	1,04	79	29	333	40	333
12	Pematang Baih	Pematang Berangan	Rambah	4,99	18	14	84	20	3

No	Kawasan	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Luas Kumuh SK Terakhir 2024 (Ha)	Bangunan		Penduduk		
					Jumlah Bangunan	Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah MBR
13	Kampung Padang	Rambah Tengah Utara	Rambah	3,37	73	3	286	73	29
14	Tanjung Pura Indah	Rambah Hilir	Rambah Hilir	8,36	118	49	488	122	88
15	Kuro-kuro Sei Taulan	Tambusai Tengah	Tambusai	26,78	372	37	1567	377	126
16	Petakur Bawah	Suka Damai	Ujung Batu	11,69	109	2	437	109	107
17	Kampung Baru Barat	Ujung Batu	Ujung Batu	12,15	109	4	428	109	6

Sumber: SK Kumuh Nomor 100.3.3.2/BAPPEDA/650/2024

3) SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya. Adapun Capaian Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II-165
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Penyediaan & RehabiitasiRumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	85	95
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	0	100	84,62

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang

kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Tabel II-166
Cakupan petugas Linmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah linmas	2.413	2.413	1.187	666	666
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Cakupan petugas Linmas	42,98	42,26	20,37	11,61	11,35

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,35 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 11,61. Hal ini disebabkan tidak adanya pengukuhan satlinmas dan tidak adanya kegiatan pendukung pada tahun 2024.

2) Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Tabel II-167
Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka konflik	5 kali	4 kali	7 kali	4 kali	4 kali
2	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat	5 kali	4 kali	7 kali	8 kali	8 kali
3	Pembinaan politik daerah	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	11 parpol
4	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10 anggota LSM,ormas dan OKP	10 LSM,ormas dan OKP	16 LSM,ormas dan OKP	25 LSM,ormas dan OKP	25 LSM,ormas dan OKP

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Kondusifitas daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain terjadi konflik sosial dan unjuk rasa. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

(OKP) selama kurun waktu 2020 - 2024 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

3) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2020 sebanyak 356 orang pegawai, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 sebanyak 395-397 orang pegawai. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah personil polisi Pamong Praja sebanyak 370 orang pegawai. Terakhir tahun 2024 terjadi penurunan jumlah personil polisi Pamong Praja sebanyak 363 orang pegawai. Berdasarkan tabel dibawah ini, Jumlah personil polisi Pamong Praja dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 63, pada tahun 2021 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat menjadi 69. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 61, artinya pada tahun 2024 terdapat sebanyak 61 satpol PP untuk melayani sekitar 10.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat lebih rinci pada dibawah ini.

Tabel II-168
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah polisi pamong praja	356	395	397	370	363
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	6,3	6,92	6,81	6,45	6,18

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-169
Jumlah PPNS Pada Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Nama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPNS	3	3	4	4	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

4) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)

Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 semuanya mencapai 100 persen. Pelangggaran K3 sampai pada tahun 2024 dapat diselesaikan karena ditangani dengan cepat oleh personil dari Satpol Pamong Praja. Dengan jumlah pelanggaran k3 yang terselesaikan sebanyak 21 kasus di tahun 2024. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-170
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran k3 yang terselesaikan	123	27	46	68	21
2	Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol pp	123	27	46	65	21

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	95,59	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

5) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 18 persen pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020-2021 sebesar 30 persen. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-171
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)
2	Luas wilayah kabupaten/kota	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30	30	18	18	18

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

6) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Untuk meningkatkan pelayanan kebakaran, pada tahun 2018 telah bertambah 1 (satu) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk menjangkau 2 kecamatan, sehingga jumlah pos sampai pada tahun 2021 menjadi 3 (tiga) Pos. Tingkat waktu tanggap daerah layanan ditargetkan sampai kelokasi kejadian kebakaran selama 15 menit. Adapun untuk indikator Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2020-2024 tercatat sebesar 100 persen. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan personil damkar yang telah mendapat pelatihan merupakan faktor pendukung meningkatnya rasio tingkat waktu tanggap WMK.

Tabel II-172
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	29	28	24	22	47
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	29	28	24	22	47
3	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

7) Penanganan dan penangulangan bencana

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya

pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya peningkatan jumlah penetapan desa siaga bencana dan layanan informasi rawan bencana. Tahun 2021, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 25 persen turun dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 46 persen. Hal ini disebabkan menurunnya aktifitas pelayanan informasi dan sosialisasi pada beberapa daerah rawan bencana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Sedangkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 200 persen pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 36 persen.

Dilain pihak jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 130,21 persen menurun dibandingkan tahun 2020 sebelumnya sebesar 211 persen. Selanjutnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 200 persen pada tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 207 persen.

Tabel II-173
Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024 (%)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	46	25	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	36	200	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	211	130,21	96	100	100
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	207	200	100	100	100

Sumber: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Rohul Tahun 2025

8) Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Adapun capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-174
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun (%) 2022	2023	2024
SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan Ketentraman danKetertiban Umum (TRANTIBUM)	139	90	96,67
SPM Kebencanaan				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100	100	85
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100	96	96
SPM Pemadam Kebakaran				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	99,38	98,87

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.1.6 Urusan Sosial

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

1) Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel II-175
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	33.340	39.232	22.489	42.209	18.517
2	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	51.872	51.872	51.872	52.766	18.517
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	64,27	75,63	43,35	79,99	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembinaan terhadap PPKS dari tahun ke tahun, jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2024 yaitu 18.517 orang dan yang diberikan bantuan 18.517 orang atau 100,00 persen menurun dibandingkan PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2023 yaitu 52.766 orang dan yang diberikan bantuan 42,209 atau 79,99 persen.

2) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian pada tahun 2021 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya meningkat kembali menjadi sebesar 25,4 persen. Namun tahun 2022-2024 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-176
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0	160	0	0	0
2	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0	631	0	0	0
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	25,4	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Rokan Hulu Tahun 2025

3) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan

Penanganan PPKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Di Kabupaten Rokan Hulu saat ini baru hanya tersedia sarana sosial yaitu panti asuhan. Terdapat 5 (lima) panti asuhan yaitu (1) Al-Khoiriyah yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 34 orang; (2) Budi Mulya yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 30 orang; (3) Teriak Putri Tujuh yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 35 orang; (4) Hidayatul Muslim yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 36 orang; dan (5) Ar-Royyan yang berlokasi di Kecamatan Kabun dengan jumlah penghuni 62 orang. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100 persen.

Tabel II-177
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
3	Persentase panti sosialyang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

4) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Permasalahan sosial khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PPKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024 Anak Terlantar 378 orang, Anak yang Berhadapan dengan Hukum 62 orang, Anak Jalanan 0, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 72 orang, Lanjut Usia Telantar 3.911 orang, Penyandang Disabilitas 2.421 orang, Korban Tindak Kekerasan 81 orang, Korban Bencana Alam 1.600 orang, Korban Bencana Sosial 31 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 6.294, Fakir Miskin 86.483.

Sementara itu jumlah PPKS yang diberikan bantuan pada tahun 2024 pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum 62 anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 71 anak, Penyandang Disabilitas 1.749 orang ,Gelandangan 0 orang, Korban Tindak Kekerasan 81

orang, Korban Bencana Alam 1.600 orang, Korban Bencana Sosial 31 orang, Fakir Miskin 86.483 orang.

Tabel II-178
Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak dengan Kedisabilitasan	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Telantar	Penyandang Disabilitas	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin
Ujung Batu	31	5	4	0	4	272	71	4	86	2	240	6099
Rokan IV Koto	18	13	4	0	5	160	58	6	377	2	155	5166
Rambah	16	20	7	0	7	111	113	8	208	5	305	8502
Tambusai	25	11	9	0	9	94	72	4	97	3	162	8160
Kepenuhan	18	19	7	0	4	207	229	3	712		146	3792
Kunto Darussalam	22	4	4	0	3	161	120	8	120	2	333	6382
Rambah Samo	17	3	2	0	6	60	24	9	0	1	86	6521
Rambah Hilir	17	2	4	0	7	71	14	5	0	4	137	7947
Tambusai Utara	35	17	0	0	8	475	87	4	0	3	697	10493
Bangun Purba	58	27	7	0	0	573	376	5	0	2	736	4373
Tandun	16	10	8	0	3	329	412	6	0	0	599	5314
Kabun	16	13	6	0	2	317	220	7	0	3	495	3907
Bonai Darussalam	33	11	0	0	6	245	161	8	0	4	658	3002
Pagaran Tapah Darussalam	24	30	0	0	4	313	89	4	0	0	815	1764
Kepenuhan Hulu	16	9	0	0	3	299	237	0	0	0	300	2841
Pendalian IV Koto	16	14	0	0	1	224	138	0	0	0	430	2220
Jumlah	**378**	**208**	**62**	**-**	**72**	**3.911**	**2.421**	**81**	**1.600**	**31**	**6.294**	**86.483**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-179
Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Penyandang Disabilitas	Gelandangan	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Fakir Miskin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
62	71	2.421	0	56	1.600	31	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

5) Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indikator lain dari Kinerja Sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Tujuan pemberdayaan sosial terhadap Kumunitas adat terpencil (KAT) adalah untuk mewujudkan: 1) Perlindungan hak warga Negara; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan 4)Kemandirian sebagai Warga Negara

Adapun kriteria Kumunitas Adat Terpencil (KAT) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 meliputi: 1) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; 2) Tertutup, homogen, dan penghidupnya tergantung kepada sumber daya alam; 3) Merjinal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau 4) Tinggal diwilayah perbatasan antar negara, daerah dan pesisir pulau-pulau terluar, dan terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 231 kk sudah diberdayakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam bentuk relokasi tempat tinggal ke lokasi yang baru dan biaya hidup selama 1 tahun, dengan sumber dana APBN dan APBD. Untuk relokasi perumahan bagi KAT Bonai melalui APBD Provinsi Riau telah dibangun perumahan di 2 tempat yaitu Dusun Tanjung Pauh Desa Bonai dan Dusun Kasang Salak Desa Bonai.

Sesuai surat dinas sosial provinsi riau nomor : 467.1/dinsos/2020/239 tanggal 3 April 2020 hal review data base KAT 2020-2024 dimana salah satu poin menyatakan bahwa berdasarkan data base KAT 2015-2019 agar dimuktahirkan kembali dengan mengurangi/mengahapus data lokasi KAT yang sudah di berdayakan selama kurun waktu 2015-2019. Sehingga berdasarkan keriteria KAT dan penjelasan surat di atas maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada karena sudah diberdayakan.

6) Pembentukan PUSKESOS di Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan PUSKESOS dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Rokan Hulu dimulai pada tahun 2022 melalui bantuan dari Kemensos berupa Pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan bantuan sarana dan prasarana, serta pembentukan PUSKESOS Kabupaten dengan

sarana dan prasarana melalui APBD Kabupaten tahun 2022. Pada Tahun 2024 melalui APBD tahun 2024, telah dianggarkan juga pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan sarana parasarananya.

Tabel II-180
Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No.	Jenis PSKS	Rokan Hulu	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	29	21
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	36	16
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	31	6
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	105	121
5	Karang Taruna (KT)	54	6
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	4
7	Keluarga Poineer	-	1
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (HKSKBM)	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0
10	Penyuluh Sosial	0	1
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	0
12	Dunia Usaha	0	0
13	Family Care Unit (FCU)	**0**	**0**
Total		**235**	**160**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

7) Capaian SPM Bidang Sosial

Pada tahun 2024 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Sosial di tahun 2022-2024 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.Rincian capaian indikator pelayan Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-181
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	15,4	96,92	97,49
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	13,09	96,67	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	50,57	91,51	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100	85
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59,43	96	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2 Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha baru.

Kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 44,37 persen di tahun 2024, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 68,00 persen. Kondisi ini perlu ditingkat demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat diamati pada tabel dibawah ini.

1) Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Tabel II-182
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	17	13	12	34	17
2	Kasus yang dicatatkan	49	23	25	50	38
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	34,69	56,52	48,00	68,00	44,37

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2) Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan

Persentase pencari kerja terbanyak menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 34,80 persen, tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 30,85 persen, tingkat universitas sebesar 21,31 persen, tingkat Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar sebesar 7,91 persen, tingkat DI/II/III sebesar 3,06 persen, tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 2,07 persen.

Tabel II-183
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar/ *No. Schooling or not yet completed primary school or primary school*	26	45	188	165	88

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Sekolah Menengah Pertama/ Junior High School	19	41	63	33	23
3	Sekolah Menengah Atas/ Senior High School	587	429	372	303	343
4	Sekolah Menengah Kejuruan/ *Vocational Senior High School*	-		352	364	387
5	Diploma I/II/III/Akademi/ Diploma I/II/III/Academy	28	22	25	24	34
6	Universitas/*University*	147	207	201	154	237
	Jumlah	**807**	**744**	**1201**	**1043**	**1112**

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah PNS perempuan yang memegang jabatan strategis eselon II-IV pada tahun 2024 sejumlah 143 orang. Menurut jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari laki-laki berjumlah 291.470 orang atau 50,82 persen sedangkan perempuan berjumlah 282.050 orang atau 49,18 persen. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan dan hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2024 sebesar 3.142 orang dari 97.301 orang pekerja perempuan atau masih sekitar 3,22 persen.

Tabel II-184
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II/ pimpinan tinggi pratama	1	1	1	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III/ administrator	22	25	29	29	30
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV/ pengawas	143	152	160	160	112
4	Pekerja PNS perempuan di pemerintah	3.391	3.309	3.333	3.333	3.142
5	Jumlah pekerja perempuan	100.362	112.091	103.354	89.063	97.301
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3,38	2,95	3,22	3,74	3,22

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan pada pasal 55 berbunyi keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30 persen. Untuk Kabupaten Rokan Hulu periode 2020-2024 berjumlah 45 (empat puluh lima orang) yang

terdiri dari 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau hanya 4,44 persen keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan periode 2024-2029 keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3 orang atau 6,66 persen.

Tabel II-185
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	2	2	2	2	3
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4,44	4,44	4,44	4,44	6,66

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2020 sebesar 96.971 dengan persentase sebesar 96,62%, mengalami fluktuasi menurun pada tahun 2024 menjadi 91.661 atau dengan persentase sebesar 94,20% dari total jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-186
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	96.971	108.782	100.021	85.822	91.661
2	Jumlah pekerja perempuan	100.362	112.091	103.354	89.063	97.301
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	96,62	97,05	96,78	96,36	94,20

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2025

4) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan dari 4 kasus KDRT turun menjadi 2 kasus KDRT pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Terakhit tahun 2024 kasus KDRT meningkat secara signifikan menjadi 14 kasus.

Tabel II-187
Rasio KDRT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	4	2	2	2	14
2	Jumlah rumah tangga	133.426	176.215	159.125	145.812	145.812
3	Rasio KDRT	0,003	0,001	0,001	0,001	0,010

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

5) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mengoptimalkan kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA cendrung meningkat. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 81 pengaduan dengan jumlah pengaduan yang masuk UPT PPA sebesar 81 pengaduan, dengan rasio sebesar 100 persen mengalami peningkatan dari 2020 dengan Rasio 71,43 persen. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-188
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	20	28	48	61	81
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	28	29	48	61	81
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	71,43	96,55	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel II-189
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	3	3	4	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	28	29	48	61	81
3	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7,14	10,34	6,25	6,56	7,41

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.3 Urusan Pangan

1) Ketersediaan pangan utama

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Pada tahun 2020-2024 rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama cendrung turun dan berfluktuasi. Berfluktuasinya ketersediaan pangan

tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangakan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurun produksi pertanian dapat ditekan. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-190
Ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (ton)	28.706.10	26.037.32	23.476.64	25.883,46	26.100,00
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Rasio	5,11	4,56	4,03	4,51	4,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Jika dilihat ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir sudah memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari.

Tabel II-191
Ketersediaan energi dan Protein perkapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD	3.042	2.970	2.480	2.437	2.468
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD	72,87	69,38	69,72	74,02	74,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Rokan Hulu sedikit di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2024 ketersediaan energi mencapai 2.468 kal/kap/hr di atas standar nasional yaitu 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan protein mencapai 74,96 gram/kapita/hari di atas standar nasional yaitu 63 gr/kap/hari. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam

bentuk energi dan protein per kapita di Kabupaten Rokan Hulu sedikit lebih mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.

3) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Dalam upaya melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan uji laboratarium terhadap komoditas pangan lokal untuk mengetahui aman atau tidaknya untuk di konsumsi. Untuk lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel II-192
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	10	10	4	10	10
2	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	10	10	4	10	10
3	Rasio	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tahun 2024 terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu cukup stabil, yaitu sebanyak 10 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain; (1) produksi beberapa komoditas penting cendrung meningkat; (2) pergerakan harga-harga pangan masih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar Nasional (Puasa, Idul Fitri dan Tahun Baru); (3) Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat yang diukur dari nilai upah (baik upah buruh tani maupun pekerja informal di sektor industri); (4) rata-rata nilai tukar petani meningkat; (5) kualitas konsumsi masyarakat meningkat; (6) proporsi penduduk rawan pangan dan penduduk miskin semakin menurun; (7) terjadinya perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa yang sebelumnnya terisolir; (8) pasokan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi hingga saat ini tetap lancar.

4) Pertumbuhan produksi bahan pangan

Perkembangan produksi pangan di Kabupaten Rokan Hulu terhadap 12 komoditi pangan yang di produksi petani. Pertumbuhan produksi pangan yang tertinggi bersumber dari komoditi buah-buahan, sayuran,ikan dan daging, sedangkan pertumbuhan pangan yang menurun berasal dari komoditi kacang tanah, kedelai ,kacang hijau, ubi jalar, jagung dan beras, dan untuk komoditi telur perkembangan produksi masih pada posisi yang sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel II-193
Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Komoditi (Ton)	Tahun					Pert (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Beras	27.224,14	19.418,27	12.817,61	7.947,82	10.415,89	-17,40
2	Jagung	6.374,84	4.602,93	420,18	426,49	745,38	-10,60
3	Kedelai	434,67	193,25	8,75	133	5,5	293,28
4	Kacang Tanah	96,66	117,78	176,03	117,78	87,77	3,18
5	Kacang Hijau	60,9	77,07	6,87	37,97	26,53	89,51
6	Ubi Jalar	504,93	444,07	390,5	528,92	543,65	3,53
7	Ubi Kayu	4.730,63	5.147,84	3.556,60	2.429,96	2.060,85	-17,24
8	Buah – buahan	13.636,40	675.605,79	119.879,53	89.970	76.186,39	1.182,98
9	Sayuran	17.540,90	15.885,81	9.036,30	9.344,94	42.795,68	77,20
10	Daging	1.277,42	1.475,46	1.952,63	888,63	888,63	-1,66
11	Telur	628,16	628,16	645,31	61,52	295,88	73,31
12	Ikan	8.902,05	9.020,03	9.297,75	9.306,69	8.994,39	0,29

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, produksi pangan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Secara umum, beberapa komoditas utama mengalami penurunan produksi, sementara sebagian lainnya mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Produksi beras mengalami tren penurunan yang cukup tajam dari 27.224,14 ton pada tahun 2020 menjadi 10.415,89 ton pada tahun 2024 atau turun sebesar 17,40 persen. Kondisi serupa juga dialami oleh jagung yang menurun dari 6.374,84 ton menjadi 745,38 ton dengan laju penurunan 10,60 persen. Demikian pula ubi kayu turun sebesar 17,24 persen dari 4.730,63 ton pada tahun 2020 menjadi 2.060,58 ton pada tahun 2024.

Sebaliknya, beberapa komoditas menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kedelai mengalami lonjakan produksi yang signifikan dari 434,67 ton pada tahun 2020 menjadi 5,5 ton pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 293,28 persen. Kacang hijau juga tumbuh pesat sebesar 89,51 persen, dari 60,9 ton pada tahun 2020 menjadi 26,35 ton pada tahun 2024. Sementara ubi jalar meningkat 3,53 persen, menunjukkan adanya perbaikan produksi meskipun relatif kecil. Untuk kelompok hortikultura, buah-buahan mencatat peningkatan yang signifikan dari 13.636,40 ton pada tahun 2020 menjadi 76.186,39 ton pada tahun 2024, atau naik sebesar 24,29 persen. Sayuran juga meningkat sebesar 6,78 persen dengan produksi mencapai 42.795,68 ton pada tahun 2024.

Komoditas peternakan menunjukkan fluktuasi, dimana daging turun 1,16 persen, sementara telur justru meningkat 78,31 persen, mencerminkan peningkatan produksi peternakan unggas di daerah tersebut.

Untuk komoditas perikanan, produksi ikan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari 8.902,05 ton pada tahun 2020 menjadi 8.994,39 ton pada tahun

2024, meningkat sebesar 0,29 persen. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar komoditas tanaman pangan mengalami penurunan produksi, sektor hortikultura, peternakan, dan perikanan tetap menunjukkan kinerja positif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran potensi produksi dari komoditas tanaman pangan menuju komoditas hortikultura dan peternakan, yang dapat menjadi arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hulu di masa mendatang.

5) Desa Rawan Pangan dan Rentan Pangan

Desa rawan pangan dan desa rentan rawan pangan adalah istilah yang digunakan dalam konteks keamanan pangan untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik tertentu dari suatu wilayah pedesaan. Desa rawan pangan merujuk pada wilayah pedesaan di mana terdapat risiko tinggi terhadap ketidakstabilan pangan. Faktor-faktor seperti rendahnya produksi pertanian, kurangnya diversifikasi sumber pangan, atau rentannya wilayah terhadap bencana alam dapat menyebabkan desa menjadi rawan pangan. Desa rentan rawan pangan menggambarkan wilayah pedesaan yang berisiko tinggi terhadap kekurangan pangan, terutama ketika terjadi ketidakstabilan harga atau pasokan pangan. Kabupaten Rokan Hulu memiliki tantangan utama karena memiliki desa rentan rawan pangan adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ketahanan pangan melalui diversifikasi dan peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian. Tantangan utama desa rentan rawan pangan di Kabupaten Rokan Hulu adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar dan meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi produksi dan penguatan sistem distribusi lokal. Adapun Desa Rawan Pangan dan Desa Rentan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-194
Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Desa Rawan Pangan	0	0	0	0
2	Desa Rentan Rawan Pangan	10	13	1	1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.4 Urusan Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Realisasi kinerja dalam urusan pertanahan pada Kabupaten Rokan Hulu cukup baik hal ini dapat dilihat tren dalam persentase luas lahan bersertifikat selama empat tahun terakhir cedrung tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada penyelesaian kasus tanah negara dimana pada tahun

2020 tidak ada sengketa tanah garapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel II-195
Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2020 s.d 2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	1,137	2,019	0,119	0,473	0,459
Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Penyelesaian izin lokasi	Izin Lokasi (Berkas)	10	10	11	14	14

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

Faktor-faktor penyebab turun dan naiknya indeks kualitas lingkungan hidup antara lain adalah indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas udara. Ketiga indikator penyebabnya saling mempengaruhi, untuk itu peningkatan pengelolaan dan intervensi kebijakan terkait hal-hal yang berhubungan terhdapa tiga indikator tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius.

1) Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH da PUU LH yang diterbitkan oleh pemda

Pada indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 100 persen seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-196
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditangani	399	445	446	461	475
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	399	445	446	461	475

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Pada tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki 1 orang PPLHD yang dilatih dan/atau dibina, namun belum memiliki sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-197
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	1	1	1	1	1
2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Tabel II-198
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tida Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Sedangkan untuk pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100 persen mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel II-199
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	14	3	3	8	4
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	14	3	3	8	4
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan untuk membangun TPA sebanyak 2 unit , TPS 3R sebanyak 5 unit, dan bank sampah sebanyak 3 unit. Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R cendrung meningkat dari Tahun 2020 hingga 2024. Ini berarti tingginya tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap lingkungan. Perkembangan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-200
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	5,31	5,34	5,15	5,13	7,1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Persentase cakupan area pelayanan

Salah satu Indikator kinerja urusan lingkungan hidup yaitu cakupan pelayanan penanganan sampah. Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sampai dengan 2024 relatif tetap, yaitu 3,73 persen dengan Luas areal pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 283 Km2/Ha.

Tabel II-201
Persentase cakupan area pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km2/Ha)	283	283	283	283	283
2	Luas area kabupaten (km2/ha)	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Persentase cakupan area pelayanan	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Persentase jumlah sampah yang tertangani

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2020, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 18,83 persen, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 18,43 persen kemudian tahun 2022 turun menjadi sebesar 16,32 persen, dan tahun 2023 turun kembali menjadi 15,85 persen. Terakhir tahun 2024 meningkatkan menjadi sebesar 23,32 persen. Peningkatan kapasitas layanan pengangkutan sampah,

optimalisasi armada operasional, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam mengelola sampah rumah tangga melalui program edukasi dan partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat sumber.

Tabel II-202
Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	24.040	23.533,80	21.642,97	21.833,27	24.061,61
2	Total jumlah timbulan sampah (ton)	127.685,15	127.685,15	132.613,8	137.732,69	103.202,06
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	18,83	18,43	16,32	15,85	23,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

- Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
- Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.

1) Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik dan pelayanan dari pemerintah daerah juga sudah baik.

Pada tahun 2020 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62 persen. Pada tahun 2021, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 97,11 persen, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 99,31 persen dan terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik.

Tabel II-203
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	353,079	367.647	374.550	385.532	398.987

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	381,196	378.590	383.976	388.210	397.006
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	92.62	97.11	97,55	99,31	99,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Rasio bayi ber akte Kelahiran

Salah satu Indikator dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio bayi berakte kelahiran. Dimana pada tahun 2020-2024 Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 100 persen. Namun jumlah bayi berakte kelahiran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hingga terakhir pada tahun 2023 jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 11.422 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte kelahiran menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-204
Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	7.971	10.218	14.493	11.422	
2	Jumlah bayi	8.013	10.247	14.525	11.422	
3	Rasio bayi berakte kelahiran	99	100	100	100	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Rasio pasangan berakta Nikah

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio pasangan berakta nikah. Dimana pada tahun 2020 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,40 persen. Jumlah ini setiap tahun mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2024 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,58 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akta nikah menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-205
Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	103.535	125.800	126.108	149.596	161.789
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	257,672	260.961	261.269	269.809	276.922
3	Rasio pasangan berakta nikah	0,40	0,48	0,48	0,55	0,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II-206
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	353,079	367.647	374.550	385.532	398.987
2	Jumlah penduduk wajib KTP	381,196	378.590	383.976	388.210	397.006
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP	92.62	97.11	97,55	99,31	99,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari tahun ketahun. tercatat tahun 2020 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62. Pada tahun 2021, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 97,11, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 99,31 persen dan terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,50 persen, Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi antaralain perekaman jemput bola (Disdukcapil datang kedesa/kelurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat).

5) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan. Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-207
Cakupan penerbitan akta kelahiran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	187,512	190.919	186.111	187.531	189.850

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	201,858	203.670	193.512	192.690	194.178
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	92.89	93.74	96.18	97,32	97,77

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tabel II-208
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten,
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Penerapan KTP Nasional brbasis NIK

Penerapan e-KTP dilakukan secara serentak secara Nasional dan begitu juga di Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan SIAK secara on-line di 16 kecamatan serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan pendukung.

Tabel II-209
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemadirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakat dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 145 desa/kelurahan yang terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan umum yang baik salah satunya adalah kondisi kantor desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 111 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 63,31 persen. Bahkan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kunto darussalam, Pendalian IV Koto, dan Tambusai Utara Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sudah mencapai 100 persen. Lebih rinci untuk

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-210
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
1	BangunPurba	4	7	57,14
2	Bonai Darussalam	4	7	57,14
3	Kabun	4	6	66,67
4	Kepenuhan	2	9	22,22
5	Kepenuhan Hulu	4	5	80
6	Kunto Darussalam	6	9	66,67
7	PagaranTapah Darussalam	2	3	66,67
8	Pendalian IV Koto	2	5	40
9	Rambah	9	13	69,23
10	Rambah Hilir	9	13	69,23
11	Rambah Samo	13	14	92,86
12	Rokan IV Koto	6	13	46,15
13	Tambusai	9	11	81,82
14	Tambusai Utara	7	11	63,64
15	Tandun	3	9	33,33
16	Ujung Batu	4	4	100
	Rokan Hulu	**111**	**139**	**63,31**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Sementara itu, dari total 155 PKK yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sudah semuanya terkategori aktif. Selain itu masing-masing PKK di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sudah berhasil membina 1.573 kelompok. Jumlah kelompok binaan PKK ini sama untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 200-2024. Hal ini menunjukkan bahwa PKK yang mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat desa, sudah memberikan pelayanan dan kinerja yang cukup baik sehingga menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK.

Tabel II-211
Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase PKK yang dibina terus meningkat, hal ini disebabkan aktifnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan kecamatan serta adanya alokasi anggaran untuk mendorong terlaksananya program PKK.

Sementara itu bila dilihat dari sebaran jumlah kelompok binaan PKK per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Pada beberapa kecamatan, seperti

Kecamatan Kepenuhan dan Rambah Hilir memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat tinggi. Sementara beberapa kecamatan lain memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kecamatan Kepenuhan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan PKK paling banyak, dengan rata-rata 34,5 kelompok binaan PKK, sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah belum memiliki kelompok binaan PKK sama sekali. Lebih rinci untuk Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-212
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1	Bangun Purba	22	8	2,8
2	Bonai Darussalam	4	8	0,5
3	Kabun	3	7	0,4
4	Kepenuhan	345	10	34,5
5	Kepenuhan Hulu	2	6	0,3
6	Kunto Darussalam	34	10	3,4
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	4	0,0
8	Pendalian IV Koto	12	6	2,0
9	Rambah	58	14	4,1
10	Rambah Hilir	440	14	31,4
11	Rambah Samo	304	15	20,3
12	Rokan IV Koto	50	14	3,6
13	Tambusai	2	12	0,2
14	Tambusai Utara	29	12	2,4
15	Tandun	129	10	12,9
16	Ujung Batu	139	5	27,8
Rokan Hulu		**1573**	**155**	**10,15**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Rokan Hulu terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan PKK. Sedangkan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Lembaga Kerapatan Adat yang tersebar di seluruh Kecamatan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-213
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		Karang Taruna		Pos Yandu		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Ujung Batu	1	4	47	87	13	34	1	4	1	38	1	4	1	4
Rokan IV Koto	1	12	11	174	4	82	1	13	1	36	1	13	1	13
Rambah	1	11	30	259	14	121	1	13	1	42	1	13	1	13
Tambusai	1	3	31	206	15	93	1	11	1	44	1	11	1	11

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		Karang Taruna		Pos Yandu		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Kepenuhan	1	7	32	122	10	61	1	9	1	23	1	9	1	9
Kunto Darussalam	1	2	90	172	16	56	1	9	1	23	1	9	1	9
Rambah Samo		8		235		91		14		59		14		14
Rambah Hilir		8		288		113		13		55		13		13
Tambusai Utara		2		340		125		11		67		11		11
Bangun Purba		4		143		59		7		23		7		7
Tandun		5		173		62		9		38		9		9
Kabun		5		105		43		6		45		6		6
Pagaran Tapah		2		70		24		3		17		3		3
Bonai Darussalam		6		117		53		7		21		7		7
Kepenuhan Hulu		3		89		39		5		17		5		5
Pendalian IV Koto		1		65		31		5		19		5		5
Jumlah	**6**	**83**	**241**	**2645**	**72**	**1087**	**6**	**139**	**6**	**567**	**6**	**139**	**6**	**139**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

3) Lembaga ekonomi desa

Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yag terus dikembangkan di Kabupaten Rokan Hulu adalah program BUMDes yang merupakan pengembangan kreatif yang dilakukan atas program UED-SP. Dengan program ini diharapkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah dapat terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah membentuk 153 BUMDes. Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes pada dasarnya dibentuk untuk melengkapi wadah perekonomian desa dan berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.

Tabel II-214
Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2024

No	Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Modal
1	2019	153	Rp.698.487.334.759
2	2020	153	Rp.765.900.921.659
3	2021	153	Rp.155.049.796.424
4	2022	153	Rp.160.163.841.485
5	2023	153	Rp.163.052.227.408
6	2024	153	Rp.172.008.626.485
Jumlah		**153**	**Rp. 2.114.662.748.220**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah memiliki 153 Badan Usaha di Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUEK) dan Badan Usaha Milik Desa

Bersama (BUMDESMA). Badan Usaha Ekonomi Desa Bersama (BUMDESMA) yang ada sudah sebanyak 7 (tujuh) badan usaha yang berdiri dari Tahun 2022 dan merupakan transformasi eks-PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang terdapat pada 7 (tujuh) Kecamatan. BUMDesa, BUEK dan BUMDESMA mempunyai unit-unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi Desa masing-masing yang sampai saat ini telah mencapai 461 Unit Usaha. Adapun potensi desa di Kabupaten Rokan Hulu didominasi perkebunan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-215
BUMDES dan Unit Usaha BUMDES Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
1	Damai Mandiri	Sukadamai/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. BNI Link 3. Pertanian	Perdagangan, Jasa, Batu Kali, Galian C, Kuliner	PT, SAI
2	BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso / Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Rental Mobil 3. Unit Cucian Hidrolik 4. Budidaya Cacing Sutra	Industri Batu Bata, Perdagangan,	Nihil
3	Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi (Pupuk) 3. BRIlink 4. Sewa Kios	Perdagangan, Pertanian Dan Perkebunan	PUAP
4	BUMDesa TEBIH MANDIRI	Pematang Tebih/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Gas LPG	Industri Batu Bata, Perdagangan, Perkebunan	PT, SAI, PT UKL, PT BRJ, PT Syuhada, PT Reval
5	Berkat Yakin	Cipang Kanan/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Edc BRIlink	Wisata Air Terjun, Perkebunan, Pertanian	Nihil
6	Mentawai Hulu Sepakat	Cipang Kiri Hulu/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Wifi 4. Sewa Alat Pertanian	Perkebunan, Pertanian,Hasil Hutan	Nihil
7	Titian Barokah	Cipang Kiri Hilir/ Rokan Iv Koto	1.Simpan Pinjam 2. Mobil Angkutan L300 3. Depot Air Minum 4. Wifi 5. Penjualan Gas Elpiji 6. Sarana Pertanian 7. Sewa Tenda dan Pelaminan	Perkebunan, Pertanian	Nihil
8	BUMDesa Berkat Usaha	Tanjung Medan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan dan BNI 46	Perkebunan, Pertanian	Nihil
9	BUMDesa Luberti Jaya	Lubuk Bendahara Timur/ Rokan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Transaksi Online	Perkebunan, Pertanian	KUD Setia, PT SAI

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			4. Perikanan		
10	Lubend Karya Mandiri	Lubuk Bendahara/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2.Perikanan	Wisata Budaya Dan Air Terjun, Perkebunan	Kebun YPLI, PT KCN
11	Jaya Mandiri	Sikebau Jaya/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan 3. Pasar 4. Kolam Pancing	Perkebunan, Pertanian	KUD Karya ssepakat, Kube Tunas merapi Manunggal
12	BUMDesa Tuah Bosamo	Rokan Koto Ruang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Wisata	Pertanian Sawah, Wisata Kerajaan Rokan, Dan Perkebunan	Nihil
13	BUMDesa Rotim Jaya	Rokan Timur/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	Perkebunan, Pertanian	Nihil
14	BUMDesa Betung Mandiri	Lubuk Betung/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Grosir Eceran Barang Harian 3. Serbuk Ayam Pedaging	Perkebunan, Pertanian Dan Perdagangan	Kopwan Istiqomah, PUAP mandiri
15	BUMDesa Pemandang Indah	Pemandang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa 3. Wifi Desa	Perkebunan Dan Pertanian	Nihil
16	BUMDesa Alahan Mandiri	Alahan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3.Pasar Karet Tender 4. Kedai Sembako	Perkebunan Dan Pertanian	Nihil
17	BUMDesa Setia Amana	Tibawan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Wifi dan ATK 3. Pengolahan Makanan	Wisata Sport Parahlayang, Perkebunan Dan Pertanian	Nihil
18	BUMDes Ratu Jaya	Rambah Tengah Utara/ Rambah	1. Konveksi 2. Penjualan Beras	Perdagangan, Jasa Dan Kuliner	Pusar Kota
19	BUM Desa Bina Usaha	Rambah Tengah Hilir/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Danau 4. Unit Pasar 5. Unit TPS 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah)	Wisara Danau, Perkebunan, Pertanian Dan Perkebunan	Gapoktan
20	Maju Bersama	Rambah Tengah Hulu/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	Perkebunan Dan Pertanian	Nihil
21	BUMDes Haiti Karya	Rambah Tengah Barat/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Fotocopy ATK 2. Unit Serbuk Gula Aren	Perkebunan Aren, Karet Dan Sawit	Nihil
22	BUMdes Mekar Jaya	Menaming/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Sembako 3. Kredit Barang 4. Bangunan	Sawah, Potensi Air, Lahan Peternakan Luas,	Kelompok Tani dan PUAP

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			5. Perikanan	Perkebunan Dan Pertanian	
23	BUMDes Mitra Mandiri	Pasir Baru/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Toko Bangunan 3. Unit Usaha Saprodi	Sawah, Pertanian, Peternakan	KUD Daya Mak mur, Kopwan Tunas Baru
24	BUMDes Cipta Karya Bersama	Sialang Jaya/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit LPG 3 Kg 3. Unit Saprotan	Wisata , Perkebunan, Pertanian	Kelompok Tani
25	Tanjung Mandiri	Tanjung Belit / Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Keramba Ikan	Perkebunan Dan Pertanian	Nihil
26	Jaya Bersama	Koto Tinggi / Rambah	1.Simpan Pinjam 2.Pasar dan Pariwisata	Perdaganagan Dan Jasa	Pusat kota
27	Maju Bersama	Suka Maju / Rambah	1. Unit Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan	Perdagangan Dan Perkebunan	Koperasi Dei Tunggal
28	BUMDesa Pematang Jaya	Pematang Berangan/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Perkreditan Barang 3. LPG 4. Papan Bunga	Pusat Kota, Reklame, Perhotelan, Pasar Dan Kuliner	Pusat kota
29	BUMDes Babussalam Sejahtera	Babussalam/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Pariwisata	Perdagangan, Jasa, Reklame, Perhotelan, Pasar Dan Kuliner	Pusat kota
30	BUMDes Maju Lestari	Pasir Maju/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Brilink 4. Taman Hiburan	Pertanian, Sawah, Perkebunan	KUD Daya Makmur, Kopwan Mekar Bersemi
31	BUM Desa Maju Jaya	Tambusai Barat/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Unit BRIlink 3. Unit Transfortasi 4. Unit Abu Senator	Perkebunan, Pertanian, Batas Kabupaten Dan Provinsi	Koperasi Hati Nurani,PT Genk, Pt Jabal Perkasa, Kopwan
32	BUMDesa Amanah	Tambusai Timur/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Kantin	Perkebunan Dan Pertanian	KUD Kepertam, KUD Siaga Makmur
33	BUMDes Usaha Sepakat Jaya	Batas/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Sewa Molen 3. Leasing Syariah 4. Sewa Tenda	Perkebunan, Petanian Dan Perdagangan	Koptan Sialang Sakti
34	BUM Desa Bertuah	Talikumain / Tambusai	1. Unit BUMDesmart 2. Unit Simpan Pinjam dan BRIlink 3. Unit Futsal	Perdagangan, Dekat Pusat Kecamatan, Jasa	Nihil
35	Bina Usaha	Rantau Panjang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	Perkebunan Dan Pertanian	PT GSM
36	BUMDesa D.Lima Saroha	Sungai Kumango/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. ATK 3. Transportasi 4. Edc BRIlink	Perkebunan Dan Pertanian	Nihil

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			5. Pangkalan LPG 3 Kg		
37	BUMDes Maju Bersama	Tambusai/ Batang Kumu	1. Simpan Pinjam 2. Jasa Angkutan 3. Unit LPG Belum di Gunakan	Perkebunana	Nihil
38	BUMDes Usaha Bersama Sialang Rindang	Sialang Rindang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Unit Resto 3. Unit Lele 4. Unit Ubi Casesa	Perkebunan, Pertanian Dan Perdagangan	Kopwan dan Gapoktan
39	BUM Desa Sumber Rezeki	Suka Maju/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Wahana Permainan 3. Papan Bunga 4. Jual Beli Tbs	Perdagangan, Jasa Dan Perkebunan	Kelompok Tani
40	BUM Desa SAROHA	Lubuk Soting/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Kebun Sawit	Perkebunan	KUD Sawit Perkasa, KUD Siaga Makmur
41	BUMDesa Tingkok Bersatu Insan Lubis	Tingkok/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Kebun	Perkebunan Dan Pertanian	Kelompok Tani
42	BUMDesa Bina Usaha	Kepenuhan Barat / Kepenuhan	1. Simpan Pnjam 2. PB Sawit 3. Saprodi	Perkebunan	Kelompok Tani
43	BUMDes Maju Bersama	Kepenuhan Hilir/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	Perkebunan	Koperasi Kasimang, Koperasi Karya nyata
44	BUM Desa Timur Makmur	Kepenuhan Timur/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Toko Bangunan 4. Penambahan Modal Usaha Perdagangan	Perkebunan Dan Dagang	Koperasi Sawit Mekar Sari,Kopsatimja, PT Sji
45	Karya Bina Mulya	Kepenuhan Barat Seroja/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Dagang	
			2. Pangkalan Elpiji 3 Kg		
46	Makmur Sejahtera	Kepenuhan Raya / Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi		
47	BUM Desa Maju Lancar	Kepenuhan Baru/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	Perkebunan Dan Dagang	KUD Sumber Makmur
48	BUMDes Karya Bina Mulia	Kepenuhan Barat Mulya/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Gas	Perkebunan	KUD Barat Myulya, PT Era sawita
49	BUMDesa ULPA Jaya	Ulak Patian/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Pertamini 3. Toko Bangunan	Perkebunan, Perikanan	Koperasi BBL, PT Piss 2, PT Sji Coy
50	BUMDesa Bunga Tanjung Jaya	Rantau Binuang Sakti/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Wisata Religi 3. Gas Pengecer	Wisata Religi, Perkebunan Dan Perikanan	KUD Kapsa Muda
51	BUMDes Kota Intan	Kota Intan/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Sarana Produksi Pertanian	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD kota Intan
52			1. Simpan Pinjam		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	BUMDesa Bina Usaha	Muara Dilam/Kunto Darussalam	2. Kedai BUMDesa	Perkebunana Dan Perdagangan	KUD elok Busamo, Kopwan, PT CBA,PT SIS, PT Hutayan, PT SAM, PT DBC,PT CSA, Pertashop
53	BUM Desa Sumber Rezeki	Kota Raya/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun 3. Ternak Sapi 4. Usaha Kredit Barang 5. Tapak Hunian	Perkebunan, Peternakan	KUD Sido Muncul, PT Edi, PT CBA, PT EMA
54	BUMDesa Sumber Makmur	Kota Baru/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel + Sperpark	Perkebunan Dan Peternakan	
55	BUMDes Karya Mulia	Sungai Kuti/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun Sawit 3. Unit Penyewaan Tenda	Perkebunan	
56	BUMDesa Syari'ah Mitra Mandiri	Pasir Indah / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Pertanian 4. BRIlink	Perkebunan, Pertanian Dan Dagang	KUD, Kelompok tani 3, kopwan
57	BUMDesa Sri Rejeki	Pasir Luhur / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Depot Air Minum 4. Penggemukan Sapi 5. Kebun Sawit 6. Kantin Gor	Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Dagang	KUD Usaha Bersama, Kopwan
58	BUMDesa Usaha Makmur	Bukit Intan Makmur/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Intan Makmur
59	BUMDes Permata Jaya	Bagan Tujuh/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Saprotan	Perdagangan, Perkebunan, Jasa	KUD Tujuh Permata, PT SJI
60	BUM Desa Maju Berkah	Rambah Samo/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kredit Barang 3. Unit TBS Sawit 4. Unit Dagang Sarana Pertanian	Perkebunan Dan Dagang	Gapoktan Makmur Bersama
61	BUMDes Mitra Usaha Mandiri	Rambah Samo Barat / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BUMserda 3. Puyuh Petelur	Perkebunan, Reklame, Lapangan Pesawat	
62	BUMDes Mekar Sari	Rambah Baru/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Perkreditan Barang 3. Perdagangan Beras 4. Bahan Bangunan 5. Pasar Desa	Sawah Yang Luas, Peternakan Perkebunan, Pertanian, Perikanan	Gapoktan
63	BUMDes Rambah Utama	Rambah Utama/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Pasar Desa 4. Unit Toko Bangunan	Sawah, Peternakan , Percetakan Batu Bata, Perkebunan,	KUD Sri Rezeki

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
				Pertanian, Perikanan	
64	BUMDesa Sarana Makmur	Pasir Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel dan Sperpark 3. Budidaya Ikan	Sawah Yang Luas, Peternakan Perkebunan, Pertanian, Perikanan	
65	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Karya Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Jasa Transportasi 4. Air Masak	Sawah , Peternakan Perkebunan, Pertanian, Perikanan	
66	BUMDes Mitra Usaha Mulya	Marga Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang & Layanan BRIlink 3. Transportasi 4. Peternakan	Sawah Peternakan Perkebunan, Pertanian, Perikanan	Gapoktan Tani Mulya
67	BUMDesa Langkitin	Langkitin/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bus Anak Sekolah 3. Bengkel dan Sperpark	Perkebunan, Pertanian Dan Dagang	
68	BUMDes Masda Mandiri	Masda Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Depot Air Masak 4. Sewa Alat Pertanian 5. Alat Pertanian 6 Unit	Sawah , Peternakan Perkebunan, Pertanian, Perikanan	
69	Suka Maju	Lubuk Napal/ Rambah Samo	1.Kredit Barang 2.Dagang Kelontong	Perkebunan Dan Pertanian	
70	BUM Desa Aur Sejahtera	Teluk Aur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Embung 4. Unit Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan	Wisata Bendungan, Perkebunan Dan Perdagangan	Gapoktan Korojo Busamo, PT KSM
71	BUMDesa Sei Salak Bersatu	Sungai Salak/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Lele 3. Pengelohan Pakan Ternak	Perkebunan Dan Pertanian	
72	BUMDesa Maju Jaya	Sei Kuning/ Rambah Samo	1. Perkreditan Barang 2. Transportasi 3. Gas LPG	Perkebunan Dan Perdagangan	PT SAI, PT Agro Jaya
73	BUMDesa Cahaya Baru	Lubuk Bilang/Rambah Samo	1. Saprodi 2. Galon	Perkebunan Dan Pertanian	PT SAI, PT Agro Lestari,
74	BUMDesa Rambah Hilir	Rambah Hilir/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Mini Market 3. Edc	Perkebunan, Perdagangan, Galian C	
75	Karya Muda Mandiri	Rambah Hilir Tengah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Harian	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Muman
76	BUMDesa Bersatu	Ranbah Hilir Timur/Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	Perkebunanan Dan Perdagangan	
77	BUMDesa Jaya Utama	Pasir Utama / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			2. Saprodi,Kredit Barang dan Penggemukan Sapi		
78	BUMDes Karya angun	Pasir Jaya/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	
			2. Unit Usaha Gas		
			3. Unit Usaha Jasa Listrik		
			4. Unit Usaha Saprodi		
79	BUMDes Rambah Muda Jaya	Rambah Muda/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan, Pertanian Dan Perdagangan	KUD, Gapoktan
			2.Kredit Barang Syariah		
			3.BRIlink		
			4.Penanaman Semangka		
80	BUMDesa Bina Usaha	Sungai Sitolang/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	
			2. ATK		
			3. Tenda Pelaminan		
81	BUMDesa Berkah Mandiri	Lubuk Kerapat/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	KUBE
			2. Air Isi Ulang		
			3. Tenda Dan Dekorasi		
82	BUMDesa Kumu Jaya Bersama	Rambah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perdagangan, Jasa Dan Perkebunan	
			2. Unit Usaha Distributor Beras		
			3. Unit Usaha Kredit Barang		
			4. Unit Usaha Mandirilink		
			5. Mesin Produksi		
83	BUM Desa Tuah Serombou Jaya	Serombou Indah / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Pertanian	
			2. Unit Air Bersih		
			3. Unit Penyewaan Molen		
84	BUMDesa Rezki Bersama	Sungai Dua Indah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Pertanian	Gapoktan
			2 Toko Bangunan		
86	Tuah Negeri	Muara Musu / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	
			2. Unit Pangkalan LPG 3kg		
86	BUM Desa Rahmat Sejati	Sejati / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	
			2. Pupuk Subsidi		
87	BUMDes Rantau Kasai	Tambusai Utara/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	Koperasi Hati Nurani
			2. Pangkalan Gas LPG		
			3. Penyewaan Alat Pertanian		
88	BUMDesa Arwana	Mahato/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	Koperasi Persukuan,KUD Mahato Bersatu, KUD Karya Bakti, KUD Rumpun Melayu
			2. Pangkalan LPG		
89	BUMDes Mitra Jaya Mandiri	Bangun Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	Koperasi Dwi Tunggal
			2. Penggaduhan Sapi		
90	BUMDesa Harapan Jaya Lesatari	Simpang Harapan/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	Gapoktan
			2. Perdagangan		
			3. Ternak Sapi		
			4. Pertanian		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
91	BUMDes Sumber Makmur	Pagar Mayang/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang/Gas LPG 3. Unit Peternakan Ayam 4. Unit Peternakan Sapi	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	PUAP
92	BUMDes Sumber Mulya	Payung Sekaki/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Saprotan 3. Unit LPG 4. Ternak Sapi	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	PUAP
93	BUMDes Maju Jaya	Mekar Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Peternakan Sapi 3. Giling Jenang	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	PUAP
94	BUM Desa Syariah Kembang Setanjung	Tanjung Medan/ Tambusai Utara	1. Simpanan Dan Pembiayaan Syariah 2. Brilink 3. Gas LPG (Subsidi dan Non Subsisdi)	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	Koperasi CU Mandiri
95	BUM Desa Syariah Nur Amanah	Suka Damai/Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Agen BRI Link 3. Perkreditan Barang 4. Sewa Alat Pertanian	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	Koperasi Karya Bakti
96	BUMDes Sumber Rejeki	Rantau Sakti/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit LPG 3. Depot Air Minum	Perkebunan, Peternakan Dan Perdagangan	KUD Sumber Ayu, PUAP
97	BUMDesa Syariah Usaha Bersama	Mahato Sakti / Tambusai Utara	1.Pembiayaan Syariah 2. Pangkalan Gas elpiji 3 kg 3. Suplayer TBS Sawit 4. Mini ATM EDC BRIlink	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	Nihil
98	Karya Agung Mandiri	Pasir Agung / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit BRIlink 3. Pasar Desa 4. Sembako 5. Penggemukan Sapi 6. Kantin	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	Gapoktan
99	BUMDes Intan Makmur	Pasir Intan/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit Sapi 3. Wisata Air 4. Digital Aplikasi	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	Kopwan
100	BUMDesa Jaya Bersama	Rambah Jaya/ Bangun Purba	1.Simpan Pinjam 2.Kolam Renang	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	Gapoktan Bina Usaha
101	BUMDes Satahi	Bangun Purba/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Perdagangan.	
			2. Toko Bangunan		
102	BUMDes Mekar Serumpun	Bangun Purba Timur Jaya / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit Ternak Kerbau	Perkebunan, Peternakan,	

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			3. Unit Kebun Desa	Perikanan Dan Perdagangan.	
103	BUMDes Tunas Muda	Bangun Purba Barat/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk 3. Alat Pertanian	Perdagangan, Perkebunan Dan Pertanian	Koperasi Sari Utama dan Kelompok Tani
104	BUMDes Harapan Baru	Tangun/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Ayam Potong	Perdagangan, Perkebunan Dan Pertanian	
105	BUMDesa Tandun Mandiri	Tandun/ Tandun	1.Simpan Pinjam 2. Ram 3. Pengetaman Kayu	Perdangan, Pasar, Perkebunan, Jasa	KUD Tansba, PKS PTPN
106	BUMDes Lestari	Desa Kumain /Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Pembiayaan 3. Edc 4. Toko Bangunan 5. Depot Air Minum 6. Pangkalan Gas	Perkebunan, Perdaganan	KUD Mekar Jaya, Kopwan Amanah
107	BUMDesa Bono Tapung	Bono Tapung/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ayam Potong 3. Permainan Anak Anak	Perkebunan, Perdaganan	KUD Tani Sejahtera
108	BUMDes Dayo Sejahtera	Dayo/ Tandun	1. Simpan Pinjam	Perkebunan, Perdaganan	KUD Dayo Mukti
109	BUMDesa Bunga Sari	Tapung Jaya / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Wifi 4. Perikanan & Peternakan	Perkebunan, Perdaganan	KUD Karya Mukti
110	BUMDesa Tunas Harapan Jaya	Puo Raya/Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Toko Saprotan 4. Toko Bangunan	Perkebunan, Perdaganan	
111	BUMDesa Makmur Jaya	Sei Kuning/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Ayam Potong	Perkebunan, Perdaganan	
112	BUMDesa Kotan Mandiri	Koto Tandun / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRIlink 3.Pemgelolaan Pasar Kaget 4. Ternak Ayam Pedaging 5.Penyewaan Alat Pertanian	Perkebunan, Perdaganan	
113	Padura Lestari	Tandun Barat / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. ATK (Alat Tulis Kantor) 3. Gedung Serbaguna 4. Penggaduhan Sapi	Perkebunan, Perdaganan	Nihil
114	BUMDesa Kabun Sejahtera	Kabun / Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan	Perdagangan, Jasa Dan Perkebunan	KUD Bumi Asih
115	BUM Desa Aliantan Sepakat	Aliantan/ Kabun	1. Sp Ditutup 2. Kredit Brg Ditutup 3. Bahan Bangunan 4. Unit Wisata	Perdagangan, Jasa Dan Perkebunan	PT Padasa, PT FAA
116	BUMDes Maju Bersama	Koto Ranah/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Unit Potocopy & ATK	Perkebunan Dan Pertanian	Kelompok Tani

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			3. Kebun Kelapa Sawit		
			4. Sewa Alat Camping		
			5. Mandiri Link		
117	BUMDesa Artha Mitra Kesuma	Boncah Kesuma/ Kabun	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Pertanian	Koperasi Bangkit Usahan Makmur, dan Kopwan
			2. Air Galon		
			3.Toko Saprodi		
			4. Toko Bangunan		
			5. Pasar		
			6. Sewa Tenda		
			7. Online BRIlink		
			8. Posfin		
118	BUMDesa Barokah Jaya	Batu Langkah Besar/ Kabun	1. Toko Saprotan	Perkebunan , Dan Batas Kabupaten	
119	BUMDesa Perdana Bakti	Giti/Kabun	1. Simpan Pinjam	Perkebunan , Dan Batas Kabupaten	
			2. Kredit Barang		
			3. Online Transfer		
120	BuUMDesa Anugrah Sejahtera	Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perikanan	Kopwan, PT SAM, PT utayan, Pt Andika
			2. BRIlink		
			3. Dagang		
			4. Pertanian		
121	TUAH KAMPUNG	Sontang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perikanan	KUD Sontang Bertuah, PT RAS, PT GPH, PT SSP, PT APSL, PT BDB
			2. Adc- BRIlink		
122	BUMDesa Kualo Bonai	Bonai/ Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perikanan	
			2. Fotokopi dan ATK		
			3. EDC BRIlink		
123	Mandiri Jaya Makmur	Rawa Makmur / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	
			2. ATK & Foto Copy		
			3. Depot Air Minum		
			4. Gas elpiji		
124	BUMDesa Mahligai Sri Pauh	Pauh/ Bonai Darussalam	1. Siman Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	Cepron, PT Alim Desa, PT Parna, PT Raka
			2. Depot Air Minum Isi Ulang		
125	BUMDesa Kasang Padang Mandiri	Kasang Padang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	Kopwan
			2. Edc BRIlink		
126	Mekar Bersama	Kasang Mungkal / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Sungai 2 Cemerlang, Kopwan, PT PIS 2
			2. Dagang		
			3. Lele		
127	BUMDes Patap Mandiri	Pagaran Tapah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perdagangan Dan Perkebunan	KUD panca Usaha, PTPN 5 Sei Rokan
			2. Unit Dagang		
128	BUM Desa Kembang Damai	Kembang Damai/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perdagangan Dan Perkebunan	
			2.BRIlink		
			3.Perkreditan		
			4.Spare Park		
			5.Molen		
129	BUMDes Sangkir Sejahtera	Sangkir Indah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	Perkebunan Jeruk, Pertanian Dan Perkebunan	KUD, PT SAI, Kelompok Tani 3 klp
			2. Depot Air "Ro"		
			3. Lumbung Jeruk		
130		Kepenuhan Hulu/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam		
			2. Unit Dagang		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	BUM Desa Tangkerang Jaya		Wisata Kuliner & Edukasi	Perkebunan Dan Perdagangan	
131	BUMDesa Pekan Tebih	Pekan Tebih/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Kebun Sawit 3. Quari	Perkebunan Dan Perdagangan	
132	Kepayang Abadi	Kepayang / Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Depot Air 4. Kebun Desa	Perkebunan Dan Perdagangan	
133	BUMDesa Muara Jaya	Muara Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Minum 3. Gas LPG	Perkebunan Dan Perdagangan	
134	BUMDes Sinar Gemilang	Kepenuhan Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Galon	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Sari Mukti, PT Eka Dura
135	Pendalian Mandiri	Pendalian/Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Penyewaan Sarana Dan Prasarana Lapangan Sepak Bola	Perdagangan, Pertanian Dan Perkebunan	KUD Tapak Sakti, PT MCM, PTPN V Sei Asam
136	Mitra Bersama	Bengkolan Salak/ Pendalian Iv Koto	1.Perikanan 2.BRIlink	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Hasta Utama, PTPN V sia sam
137	BUMDes Suligi Mandiri	Suligi / Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Pinjaman Barang 3. Unit Pengelolaan Pasar 4.Unit Kredit Candak Kulak 5. Unit Perdagangan Skala Mikro 6. Unit Peternakan	Perkebunan Dan Perdagangan	
138	Usaha Madani	Air Panas/Pendalian IV Koto	1.Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Doorsmeer Hidrolik 4. Kebun 5. Peternakan Kambing	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Wisma Tani dan 25 Kelompok Tani
139	Maju Jaya Sejahtera	Sei Kandis/ Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi Pertanian 3. Lebah Kelulut 4. Kebun	Perkebunan Dan Perdagangan	KUD Mekar Bersama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

5) Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi jasa sukarelawan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah.

Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk LSM di setiap desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah sosial yang ada di Kabupaten Rokan Hulu

6) Persentase PKK aktif

Persentase PKK aktif selama tahun 2020-2024 cudah mencapai 100 persen yang terdiri dari jumlah PKK sebanyak 155 dan PKK aktif sebanyak 155. Lebih rinci disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II-216
Persentase PKK aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKK aktif	155	155	155	155	155
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

7) Persentase Posyandu aktif

Indikator lain dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah persentase posyandu aktif. Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan pelayanan yang sangat baik pada periode 2020-2024. Hal ini dilihat dari persentase posyandu yang sudah aktif mencapai 100 persen dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa.

Tabel II-217
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu aktif	564	564	614	564	595
2	Total posyandu	564	564	614	564	595
3	Persentase Posyandu aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-218
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total program pemberdayaan masyarakat	2	2	1	1	1
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	50	50	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-219
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak.

1) Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercatat sebesar 17,24 persen dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB sebanyak 5 perangkat daerah dibandingkan jumlah semua Perangkat Daerah (Dinas/Badan). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-220
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	5	5	5	5	5
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Indikator lain dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kurun waktu tahun 2020- 2024 perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk sebanyak 4 Perangkat Daerah atau 13,79 persen.

Tabel II-221
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	4	4	4	4	4
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	13.79	13,79	13,79	13,79	13,79

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

3) Jumlah kebijakan Perda/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Tabel II-222
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

4) Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Sedangkan untuk sektor yang memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tercatat sebesar 5 sektor pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel II-223
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sektor	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

5) Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan program keluarga berencana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Rokan Hulu agak sangat berhasil di tahun 2020-2024 karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 (dua) orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 3 (tiga) orang. Hal ini disebabkan karena penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur akan pentingnya program KB.

Tabel II-224
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	1	1	1	3	3

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-225
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak	253.650	265.065	258.353	105.879	149,326
2	Jumlah keluarga	159,500	116.389	117.443	126.660	130,093
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

6) Rasio akseptor KB

Prevalensi akseptor KB (KB aktif) persentasenya cendrung menurun dan berfluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan bertambahnya akseptor KB, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-226
Jumlah Rasio Akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aseptor KB	52.298	55.280	20.952	44.159	55,311
2	Jumlah pasangan usia subur	70.359	73.828	41.853	75.179	86,292
3	Rasio akseptor KB	74,33	74,87	50,06	58,74	64,09

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi pencapaian akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 mencapai 64,09 persen mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian akseptor KB pada tahun 2023 sebesar 58,74 persen. Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2024 pasangan usia subur sebesar 86.292 dan jumlah peserta KB sebesar 55.311 PUS (64,09%) dan yang tidak ber-KB PUS (35,91%).

7) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 tahun

Jumlah pasangan usia subur dengan istri di bawah 20 tahun meningkat dari 125 pada tahun 2020 menjadi 634 pada tahun 2021, kemudian menurun hingga tahun 2024 menjadi 167. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun terus meningkat selama periode yang sama, dari 25.278 pada 2020 menjadi 28.250 pada 2023. Terakhir pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 22.305. Cakupan pasangan usia subur dengan istri di bawah 20 tahun juga mengalami fluktuasi, meningkat dari 0,48% pada 2020 menjadi 2,35% pada 2021, namun kembali menurun menjadi 1,59% pada 2023. Dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 0,13. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk perempuan muda meningkat, proporsi pasangan usia subur dengan istri di bawah 20 tahun cenderung menurun dalam dua tahun terakhir.

Tabel II-227
Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang Istrinya dibawah 20 tahun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	125	634	515	450	167
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	25.950	26.970	27.782	28.250	22.305
3	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	0,48	2,35	1,85	1,59	0,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

8) Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (*Intra Uterine Device*). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Tabel II-228
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.850	13.395	5.938	7.348	7.834
2	Jumlah akseptor KB	19.950	55.280	20.952	44.159	54.679
3	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.29	24,23	28,34	16,63	14,33

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

9) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel II-229
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	18.060	10.936	2.053	12.969	9.920
2	Jumlah akseptor KB	20.000	55.280	20.952	44.159	54.679
3	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	90,30	74,87	50,06	58,74	18,14

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

10) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel II-230
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	53	53	68	1.365	685

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah anggota kelompok BKB	53	53	68	4.113	4.235
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	33,26	16,17

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

11) Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB stabil pada angka 24 dari tahun 2020 hingga 2021, namun meningkat signifikan menjadi 1.136 pada tahun 2024. Jumlah anggota kelompok BKB keseluruhan juga meningkat, dari 24 pada tahun 2020 hingga 2.506 pada tahun 2024. Cakupan anggota BKB ber-KB yang awalnya 100% dari 2020 hingga 2022, mengalami penurunan drastis menjadi 45,33% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggota kelompok BKB secara signifikan, tetapi persentase anggota yang ber-KB mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2023, mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota baru yang belum ikut serta dalam program KB.

Tabel II-231
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	24	24	37	411	1.136
2	Jumlah anggota kelompok BKR	24	24	37	1.643	2.506
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	25,01	45,33

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

12) Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB sebesar 20 orang selama periode 2020 hingga 2021, kemudian meningkat menjadi 24 pada tahun 2022 dan meningkat signifikan menjadi 80 orang pada tahun 2023. Terakhir pada tahun 2024 kembali meningkat signifikan menjadi 271. Proporsi cakupan anggota BKL yang ber-KB tetap stabil di angka 100% sampai tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 Proporsi cakupan anggota BKL yang ber-KB menurun di angka 12,89%, disebabkan meningkatnya jumlah anggota, serta kurangnya kepatuhan penuh di kalangan lansia yang mengikuti program KB.

Tabel II-232
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	24	80	271
2	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	24	80	2.102
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	12,89

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

13) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Jumlah PPKS sebesar 8 pusat pelayanan pada tahun 2020 hingga 2022, namun mengalami peningkatan menjadi 9 pada tahun 2023. Terakhir pada

tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 11. Jumlah kecamatan juga tetap konstan di angka 16 selama periode tersebut. Persentase PPKS di setiap kecamatan juga stabil di angka 50% dari tahun 2020 hingga 2022, dan meningkat menjadi 56,25% dan 68,75 pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel II-233
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	8	8	8	9	11
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50	50	50	56,25	68,75

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

14) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Jumlah PIK R/M tetap stabil di angka 52 dari tahun 2020 hingga 2022, namun mengalami penurunan menjadi 40 dari tahun 2023-2024. Jumlah kecamatan yang tercakup tetap konstan di angka 16 selama periode tersebut. Cakupan remaja dalam PIK R/M juga menunjukkan tren penurunan, dari 325 remaja pada tahun 2020 hingga 2022, menjadi 250 remaja pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel II-234
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	52	52	52	40	40
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	325	325	325	250	250

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

15) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan oleh Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk, terlihat bahwa cakupan tersebut tetap 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa setiap PKB/PLKB yang ada selalu dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun jumlah petugas PKB/PLKB meningkat dari 2 orang pada 2020 hingga 2022 menjadi 3 orang pada 2023, terakhir pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 5 orang. Tingkat pemanfaatannya tetap optimal. Hal ini mencerminkan bahwa penambahan petugas di tahun 2024 tidak mengurangi efektivitas, melainkan justru memperkuat kapasitas dalam mendukung pelaksanaan program KB dan pengendalian penduduk di daerah tersebut.

Tabel II-235
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	2	2	2	3	5
2	Jumlah PKB/PLKB	2	2	2	3	5
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

16) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Pada tahun 2020 hingga 2022, cakupan peserta KB mandiri berada di angka 100%, namun pada tahun 2023 turun drastis menjadi 34,57%. Terakhir pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 55,24 %. Penurunan yang cukup tajam ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah anggota kelompok UPPKS secara keseluruhan, proporsi peserta KB mandiri mengalami penurunan yang besar.

Tabel II-236
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	16	16	20	93	195
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	16	16	16	269	353
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	34,57	55,24

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

17) Cakupan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Jumlah petugas PPKBD dan jumlah desa/kelurahan mengalami sedikit penurunan dari 148 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 145 pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Meskipun demikian, rasio petugas PPKBD di setiap desa/kelurahan tetap stabil di angka 100% selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah petugas dan desa/kelurahan, setiap desa atau kelurahan masih tetap memiliki satu petugas PPKBD, sehingga cakupan pelayanan tetap maksimal di setiap wilayah. Rasio yang konsisten ini menunjukkan efektivitas dalam mempertahankan penyebaran petugas PPKBD di seluruh desa/kelurahan.

Tabel II-237
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	148	148	145	145	145
2	Jumlah desa/kelurahan	148	148	145	145	145
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

18) Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi yaitu pada tahun 2020 sebesar 2841,4, menurun drastis menjadi 210,3 pada tahun 2021, namun turun hingga tahun 2024 menjadi 120,464.

Tabel II-238
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	26.993	22.708	22.622	20.457	21,557
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	9.500	10.799	12.635	16.665	17,895
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2841,4	210,3	179,04	122,75	120,464

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Rokan Hulu Tahun 2025

19) Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Persentase Faskes yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan sesuai standar tetap di angka 100% dari tahun 2020 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, persentase tersebut turun menjadi 62,82%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah Faskes yang bekerja sama dengan BPJS meningkat, tidak semua Faskes baru dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga cakupan fasilitas yang sesuai dengan standardisasi pelayanan menurun pada tahun 2024.

Tabel II-239
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	28	31	35	50	49
2	Jumlah Faskes dan jejaring	28	31	35	72	78

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	69,44	62,82

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

20) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa berada pada 100% dari tahun 2020 hingga 2024, yang berarti setiap desa telah sepenuhnya menyediakan informasi data mikro keluarga secara konsisten selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi ini telah terkelola dengan baik dan cakupannya telah optimal di seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-240
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro kelurga yang tersedia	4	4	4	4	4
2	Jumlah Seluruh informasi data mikro keluarga	4	4	4	4	4
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

21) Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga selalu berada di angka 100% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa semua kelompok yang ada sepenuhnya melaksanakan pembinaan keluarga sesuai dengan 8 fungsi keluarga.

Tabel II-241
Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3	3	4	4	4
2	Jumlah Kelompok kegiatan	3	3	4	4	4
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

22) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pada tahun 2020 dan 2021, anggaran untuk urusan PPKB tidak ada anggaran yang dialokasikan. Anggaran kembali dialokasikan pada tahun 2022 sebesar 1.003.893.582 dan meningkat menjadi 1.811.545.210 pada tahun 2023. Terkahir pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk urusan PPKB menurun dari tahun sebelumnya menjadi 269.494.000. Jumlah APBD dan

APBDes juga mengalami peningkatan signifikan, dari 663.790.660 pada 2020 menjadi 6.207.805.939 pada tahun 2024. Persentase pembiayaan program ini menunjukkan adanya kenaikan dari 0,24% pada 2022, menjadi 0,36% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 4,34% pada 2024.

Tabel II-242
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	0	0	1.003.893.582	1.811.545.210	269.494.000
2	Jumlah APBD dan APBDes	663.790.660	3.708.345.574	4.141.161.547	4.968.698.358	6.207.805.939
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0	0	0,24	0,36	4,34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.9 Urusan Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun.

Tabel II-243
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penumpang bis	105.521	117.838	134.037	152.989	132.477
2	Jumlah penumpang pesawat udara	407	0	1159	1066	2.147
3	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	105.928	117.838	135.196	154.055	134.624

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal dan bandara di Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang waktu 2020 - 2024 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang bis masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu. Terlihat pada tahun 2023 jumlah

penumpang angkutan yang melalui terminal (bis) yaitu sebesar 152.989 lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui bandar udara (pesawat) yaitu sebesar 1.066 penumpang.

2) Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah ijin trayek yang ada di Rokan Hulu tidak ada penambahan, tetap berjumlah 25 trayek yang tersebar di wilayah perkotaan.

Tabel II-244
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin trayek perkotaan	25	25	25	0	0
2	Izin trayek perdesaan	0	0	0	0	0
3	Jumlah izin trayek	25	25	25	0	0
4	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
5	Rasio izin trayek	4,45	4,38	4,29	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Jumlah uji KIR angkutan umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-245
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

No	Angkutan Umum	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Mobil penumpang umum**					
	Jumlah unit	8	8	12	10	62
	KIR	0	0	12	6	14
	Persentase	0.00	0	100	60,00	22,58
2	**Mobil bus**					
	Jumlah unit	239	243	245	245	259
	KIR	83	47	44	90	64
	Persentase	34.73	19.34	17.96	36,73	24,71
3	**Mobil barang**					
	Jumlah unit	14.307	14.457	15.030	13.954	16.293
	KIR	8.844	5.654	5.690	5.788	4.853
	Persentase	61.82	39.11	37,86	41,48	29,79
4	**Kereta tempelan**					
	Jumlah unit	3	3	3	3	3
	KIR	1	0	0	1	2
	Persentase	33,33	0	0	33,33	66,67

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat jumlah angkutan umum (mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan kereta tempelan) sebanyak 16.617 unit dan kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 4.933 unit atau 35,94 persen. Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum.

4) Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, terdapat 1 (satu) pelabuhan udara yaitu Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berdiri tahun 1980an sebagai Bandara Perintis dan kemudian menjadi Bandara keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Rokan Hulu dari dan kebandar udara embarkasi sejak tahun 2007. Bandara Tuanku Tambusai memiliki landasan pacu sepanjang 1300 x 23 meter dengan arah 18/36, pada elevasi 38 meter diatas permukaan laut (MSL/124,67 FT) serta koordinat 10007'08,00" lintang utara/104006'51,00" bujur timur. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 (tiga) terminal bis tipe C yaitu Terminal Pematang Puti (Kecamatan Ujungbatu, Teminal Pasir Pengaraian (Kecamatan Rambah) dan Terminal Rantau Kasai (Kecamatan Tambusai Utara).

Tabel II-246
Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
2	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
3	Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang terjangkau oleh masyarakat. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Rokan Hulu cendrung berfluktuatif. Tahun 2024 tercatat sebesar 0,24 persen terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,17 persen.

Tabel II-247
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan darat	278	293	297	255	321
2	Jumlah penumpang angkutan darat	105,521	117.858	134.037	152.989	132.477
3	Persentase layanan angkutan darat	0.16	0.25	0.22	0.17	0.24

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terlihat cendrung berfluktuatif. Pada tahun 2020 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 15,67 persen, dan hingga tahun 2023 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan menjadi 58,57 persen. Pada akhir tahun 2024 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami penurunan menjadi sebesar 16,76 persen.

Tabel II-248
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n	314	381	254	1.760	208
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	2,004	1.741	1.160	3.005	1.241
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	15.67	21,88	21,90	58,57	16,76

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Pemasangan Rambu-rambu

Pelaksanaan dan Pemasangan Perelengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu ini di Maksudkan untuk keselamatan berlalu lintas juga terhadap kebutuhan fasilitas LLAJ guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama pada jalan-jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuanya sebagai berikut :

- Peningkatan pengamanan dan Keselamatan pengguna Jalan.
- Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/kendaraan bermotor
- Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ.

Tabel II-249
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	0	0	0	85	62
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	296	296	296	296	296
3	Pemasangan Rambu-rambu	0.00	0.00	0.00	28,72	20,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu semakin sedikit, tahun 2020-2022 tidak ada pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebesar 296 unit. Adanya pergeseran dan pengurangan anggaran daerah akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2021 berdampak pada pengurangan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2023 jumlah pemasangan rambu-rambu dilaksanakan kembali sebanyak 85 unit. Terakhir pada tahan 2024 jumlah

pemasangan rambu-rambu dilaksanakan mengalami penurunan menjadi sebanyak 62 unit.

8) Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 sebanyak 134.624 jiwa. Penyebab utama penurunan ini diakibatkan oleh perubahan pola mobilitas masyarakat, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak penurunan arus penumpang masuk dan keluar dari Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum ini meliputi moda transportasi darat dan transportasi udara.

Tabel II-250
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	105.521	117.838	135.196	154.055	134.624
2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	3,55	0	8,97	8,58	10,89

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu jumlah barang yang terangkut angkutan umum yang terdata baru pada moda transportasi udara, dimana pada tahun 2024 terdapat angka 10,89 yang berarti bahwa pada tahun 2022-2024 telah diaktifkan kembali penerbangan udara dari dan menuju ke Kabupaten Rokan Hulu. Sementara jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada moda transportasi darat belum dilakukan pendataan.

9) Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Tabel II-251
Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per tahun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang melalui dermaga per tahun	Orang	0	0	0	0	0
2	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	Ton	0	0	0	0	0
3	Jumlah orang melalui bandara per tahun	Orang	407	0	1159	1066	2147
4	Jumlah barang melalui bandara per tahun	Ton	3,55	0	8,97	8,58	10,89
5	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	Orang	105,928	117.838	134.037	154.055	134.624
6	Jumlah barang melalui terminal per tahun	Ton	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tida ada data, hal ini disebabkan bahwasanya Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki dermaga yang beroperasi.

Tabel II-252
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	96	86	107	85	88

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas adalah 96 kasus, pada tahun 2021 turun menjadi 86 kasus, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 107 kasus dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 85 kasus. Terakhir pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 88 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu cenderung bervariasi dari tahun ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat secara signifikan.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas telah dilakukan, namun masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah kecelakaan lalu lintas seperti peningkatan jumlah kendaraan di jalan, kondisi infrastruktur dan perilaku pengemudi di jalan raya.

Tabel II-253
Jumlah pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) per tahun	45	58	228	148	31

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 tercatat 45 kasus pelanggaran ODOL, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 58 kasus, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran ODOL secara signifikan menjadi 228 kasus dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 148 kasus. Terkahir pada tahun 2024 jumlah pelanggaran ODOL menurun drastis menjadi 31 kasus. Jumlah pelanggaran ini terdata pada saat dilakukannya kegiatan Razia rutin dan terpadu yang melibatkan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Riau.

Pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) terjadi ketika kendaraan melampaui batas dimensi atau beban yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau tanki yang melebihi kapasitas atau dimensi yang diizinkan.

Penyebab dari peningkatan jumlah pelanggaran ODOL dapat melibatkan beberapa faktor, seperti peningkatan aktivitas perdagangan atau konstruksi yang mengakibatkan peningkatan penggunaan kendaraan-kendaraan berat, atau kesadaran yang rendah dari pengemudi kendaraan-kendaraan tersebut terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi jumlah pelanggaran ODOL, perlu dilakukan upaya yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan berat, serta penerapan teknologi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran tersebut.

2.1.4.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah dan sambungan untuk fasilitas Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat

Selain itu, untuk memperluas cakupan layanan informasi, maka Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki 29 unit *Base Transceiver Station* (BTS) yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator yang terletak di 16 kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2024 sebanyak 3 jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan telepon genggam sebanyak 2 unit dan jaringan telepon stationer sebanyak 1 unit.

Tabel II-254
Jaringan Komunikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jaringan telepon genggam	4	4	8	2	2
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	5	5	9	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat kita lihat peran swasta didalam pemenuhan jaringan komunikasi, dimana telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Terdapat 3 (tiga) jaringan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu.

2) Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio swara Lima luhak dan Radio islamic center, sementara penyiaran televisi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat empat lembaga penyiaran yaitu LPPL Rokan Hulu Tv , UB TV dan Madani TV dan Ginta Vixion.

Tabel II-255
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	5	4	2	2
2	Jumlah penyiaran TV lokal	2	2	3	4	4
3	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2)	7	7	7	6	6

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah siaran radio lokal berkurang dari 5 siaran radio pada tahun 2020 menjadi 2 siaran radio tahun 2024 dan siaran tv lokal bertambah semula 2 stasiun tv lokal menjadi 4 stasiun tv lokal hingga 2024.

3) Website Pemerintah Daerah

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah, komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi dan ditambah situasi Pandemi Covid sejak 2019, Pemerintah Kabupeten Rokan Hulu semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan daerah harus dibuka seluas-luasnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki web yaitu www.rokanhulukab.go.id yang dikeloka oleh Bagian Pendataan Data Elektronik dan seluruh OPD juga telah memiliki web yang dikelola oleh masing-masing OPD yang menyajikan profil dan data yang up to date dan akurat.

4) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Komunitas informasi masyarakat (KIM) bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu ada 5 KIM atau 31,25 persen.

Tabel II-256
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KIM	5	5	5	5	5
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	16	16	16	16	16
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Demikan halnya dengan cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah yang tercoverage pada tahun 2020 - 2024 seluas 7.326, yang tersebar di tiap kecamatan.

Tabel II-257
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	7,326	7,326	7,326	7,326	7,326
2	Luas Wilayah Keseluruhan	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Indikator jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2024 tercatat sebanyak 375.930 orang meningkat dibandingkan dari tahun 2020 sebanyak 369.961 orang. Sedangkan Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2024 sebesar 65,55 persen menurun dari tahun 2020 sebesar 65,90 persen.

Tabel II-258
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/ telepon	369.961	369.961	369.961	375.930	375.930
2	Jumlah penduduk	561.385	570.952	582.679	573.520	586.994
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	65,90	64,80	63,50	65,55	65,55

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet tetap stabil hingga 2024. Jumlah total rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 170.928 pada 2020, yang juga stabil hingga 2024. Proporsi rumah tangga dengan akses internet juga tetap stabil dari 0,96 persen dari 2020 hingga tahun 2024.

Tabel II-259
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	170,928	170,928	170,928	170,928	170,928
2	Jumlah rumah tangga	176,215	176,215	176,215	176,215	176,215
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

8) Nilai keterbukaan informasi publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-260
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Kualifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ketebukaan Informasi Publik	-	Menuju informatif (80-89)	Informatif (90-100)	Informatif (90-100)	Informatif (90-100)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

9) Data *Low Signal* (Sinyal Lemah) dan *Blankspot* menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 dari 9 (sembilan) Kecamatan/21 (dua puluh satu) Desa yang masih terdapat Low Signal dan *blankspot* wilayahnya. Data kecamatan/Desa yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-261
Data *Low Signal* (Sinyal Lemah) dan *Blankspot* menurut Kecamatan/Desa
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	Sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
Tambusai Utara	Mahato	1.391389	100.198333	Blankspot	Mahato	0
Tambusai Utara	Mahato Sakti	1.349056	100.151333	Blankspot	Batang Kumuh	0
Rambah Samo	Sungai Kuning	0.767389	100.479917	4G	Sungai Kuning	-109
Rambah Samo	Sungai Salak	0.784611	100.414694	4G	Rambah Samo	-110
Rambah Samo	Lubuk Bilang	0.748972	100.430222	4G	Sungai Kuning	0
Kepenuhan	Ulak Patian	1.161472	100.666833	4G	Ulak Patian	-115

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	Sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	1.249861	100.687972	Blankspot	Mahato	
Kepenuhan Hulu	Kepayang	1.080639	100.449222	Blankspot	Kepayang	
Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	0.964528	100.568139	4G	Muara Jaya	-110
Rambah	Sialang Jaya	0.822167	100.282833	Blankspot	Rambah	
Rambah	Pematang Berangan	0.899417	100.302361	4G	Rambah	-115
Rokan IV Koto	Pemandang	0.698056	100.421806	Blankspot	Lubuk Bendahara Timur	
Rokan IV Koto	Tanjung Medan	0.663333	100.427361	Blankspot	Lubuk Bendahara Timur	
Rokan IV Koto	Cipang Kanan	0.614250	100.246444	Blankspot	Cipang Kanan	
Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	0.464528	100.306528	Blankspot	Cipang Kanan	
Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	0.950444	100.452417	4G	Sungai Dua Indah	-105
Rambah Hilir	Sorombu Indah	0.929722	100.439083	Blankspot	Masda Makmur	
Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	0.992444	100.400056	4G	Aur Betung	-115
Kepenuhan	Sontang	1.137917	100.754000	3G	Sontang	
Bonai Darussalam	Kasang Padang	1.238028	100.87275	Blankspot	Kasang Padang	
Kepenuhan	Kasimang	1.079972	100.647028	Blankspot	Pasir Pandak	
Rambah	Sungai Bungo	0.789500	100.267111	Blankspot	Rambah	
Pagaran Tapah	Sangkir Indah	0.773028	100.546167	3G	Pagaran Tapah	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 tercatat sebesar 67,90 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 50,15 Persen, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 53,65 persen. Pada tahun 2023 Persentase koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan kembali menjadi 54,70 persen. Terakhir pada tahun 2024 Persentase koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan menjadi 56,68 persen. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif di Rokan Hulu berjumlah 220 unit, turun menjadi 171 unit pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 191 koperasi aktif. Pada tahun 2023 dan 2024 terus meningkat hingga pada akhir tahun 2024 menjadi 212 koperasi aktif. Hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun secara berturut-turut dan usaha koperasi yang tidak jalan sehingga banyak koperasi di Kabupaten Rokan Hulu yang di bubarkan. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-262
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	220	171	191	198	212
2	Jumlah koperasi	324	341	356	362	374
3	Persentase koperasi aktif	67,90	50,15	53,65	54,70	56,68

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pada tahun 2024 jumlah usaha mikro tercatat sebesar 37.845 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah pelaku UMKM dibandingkan tahun 2023 sebesar 37.476. Hal ini disebabkan adanya program pendataan pelaku UMKM melalui Sistem I Formasi data tinggal yang dibiayai KemenkopUmkm RI. Target yg ditetapkan untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 44.000 data (Selain UMKM Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pedagang Asongan). Pendataan dilakukan oleh 110 Enumerator di 16 Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-263
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha mikro dan kecil	1.454	2.159	2.498	37.476	37.845
2	Jumlah seluruh UKM	15.604	21.918	23.958	37.476	37.845
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	9,32	9.85	10,43	100	100

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah investor berskala nasional pada pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor, pada tahun 2021 sebanyak 1.822 investor dan pada tahun 2022 sebanyak 4.327 investor, pada tahun 2023 sebanyak 8.352 investor, kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 6.660 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar usahanya dan pelaku usaha yang migrasi Perizinan usahanya, yang mana sistem OSS 1.1 telah migrasi ke OSS RBA sebagai yang di amanatkan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2024 terdapat banyak pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang mendominasi pendaftaran Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi walaupun pelaku usaha banyak mendaftar usahanya di tahun 2024 yang dibuktikan dengan data NIB 6.660, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2024, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Tabel II-264
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	1.135	1.822	4.327	8.352	6.660

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai Investasi diperoleh dari nilai modal suatu usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ketika memasukkan permohonan izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Nilai Investasi berdasarkan jumlah modal yang terdapat dari jumlah izin yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS tersebut.

Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dari dalam dan luar negeri cenderung berfluktuasi. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dengan Nilai investasi sebesar 1.452.441.461.514,- Menurunnya nilai nivestasi pada tahun 2020. disebabkan jumlah perizinan yang mendaftar pada tahun 2020 hanya IUMK dan Non IUMK yang nilai Investasi nya sangat kecil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 peralihan sistem perizinan dari SPIPISE ke OSS. dengan diimplentasikannya perizinan OSS maka seluruh pelaku usaha wajib mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB adalah sebagai legalitas pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Selain itu pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1.0 ke versi 1.1 sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan tidak berjalan maksimal yang menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia.

Pada Tahun 2022 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP Nomor 5 tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 sebagai turunannya dan berakhirnya pandemi covid-19 juga membuat iklim usaha semakin membaik di tahun 2022.

Penyederhanaan syarat serta semakin cepat dan mudahnya proses perizinan berusaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, sehingga iklim investasi akan semakin membaik di tahun berikutnya.

Tabel II-265
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	452.441.461.514	562.178.673,212	1.059.722.327.643	2.626.240.533.402	4.735.944.822.299

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMDN/PMA tersebut

Adapun rasio daya serap tenaga kerja cenderung menurun dan berfluktuasi pada periode 2020 - 2024. Pada tahun 2020 rasio tenaga kerja 1,70. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,92, selanjutnya pada tahun 2022 turun kembali menjadi 2,22. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,00 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,04.

Tabel II-266
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	3.533 Orang	5.321 orang	9.598 orang	25.043 orang	25.217 TKI
2	PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN	OSS : 2.083	OSS : 1.822	OSS : 4.327	OSS : 8.352	OSS : 6.660
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1,70	2,92	2,22	3,00	3,04

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Kenaikan dan penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Pada tahun 2020 nilai investasi mengalami penurunan yang drastis sebesar 91,30 persen. Hal ini disebabkan salah satunya dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 24,26 persen dan 88,50 persen . Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai realisasi PMDN di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 147,82 persen. Terakhir tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai realisasi PMDN di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 113,98 persen. Peningkatan Nilai Investasi ini menunjukan bahwa iklim investasi di Kabupaten Rokan Hulu membaik.

Tabel II-267
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Uraian		
	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi (milyar rupiah)	Realisasi PMDN sebelum evaluasi (milyar rupiah)	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN
2020	(4.750.411.532.434)	5.202.852.993.948	(91.30)
2021	109.741.211.698	452.437.461.514	24.26
2022	497.543.654.431	562.178.673.212	88.50
2023	1.566.518.205.759	1.059.722.327.643	147.82
2024	2.993.491.145.850	2.626.240.533.402	113,98

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk mewujudkan manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dan mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis.

1) Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Rokan Hulu dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Mencermati data tabel dibawah terlihat selama kurun tahun 2020-2024 terdapat 12,5 persen organisasi pemuda yang aktif.

Tabel II-268
Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4	4	4	4	4
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	32	32	32	32	32
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

2) Cakupan pembinaan olahraga

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Mulai tahun 2020 hingga 2024, cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen dengan jumlah cabang olah yang dibina dan terdaftar sebanyak 23 cabang.

Tabel II-269
Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23	23	23	23	23

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	23	23	23	23	23
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

3) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Pada indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sampai tahun 2024, sebesar 28,94 persen. Dengan pelatih yang memiliki sertifikat sebanyak 123 orang. Perkembangan indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-270

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	138	138	138	138	123
2	Jumlah seluruh pelatih	325	325	325	325	425
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	43	43	43	43	28,94

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan terhadap atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi. Oleh sebab itu pembinaan terhadap atlet muda merupakan hulu dari prestasi olahraga yang harus dilakukan. Semakin banyak atlet muda yang berpotensi dibina semakin besar peluang untuk meraih prestasi kedepannya. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 20,7 persen dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 215 atlet dari 1.040 atlet sampai tahun 2024. Perkembangan indikator cakupan pembinaan atlet muda secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-271

Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	215	215	215	215	215
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	1040	1040	1040	1040	1040
3	Cakupan pembinaan atlet muda	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Jumlah atlet berprestasi

Jumlah atlet Kabupaten Rokan Hulu yang berprestasi sebanyak 6 atlet di tahun 2024. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-272

Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	3	3	3	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Jumlah berprestasi olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada tahun 2024 sebanyak 3 cabang olahraga. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-273
Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	2	2	2	2	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab

Pada tahun 2020, jumlah peserta yang berpartisipasi mencapai 22.625, dan pada tahun 2021 hingga 2024 jumlah peserta sedikit menurun menjadi 22.441, dan stabil selama empat tahun tersebut. Stabilitas jumlah peserta dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan dari 2021, partisipasi dalam kegiatan kepramukaan tetap terjaga dengan baik selama empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan kepramukaan di wilayah ini tetap konsisten dalam menarik minat peserta.

Tabel II-274
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	22.625	22.441	22.441	22.441	22.441

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

8) Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan adalah 625, dan jumlah ini meningkat menjadi 670 pada tahun 2021. Jumlah partisipasi tersebut tetap stabil pada 670 pemuda hingga tahun 2023. Dan pada tahun 2024 jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan menurun drastis menjadi 44 pemuda.Peningkatan partisipasi dari 625 pada tahun 2020 menjadi 670 pemuda pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya pertumbuhan minat pemuda dalam berorganisasi di tingkat Kabupaten/Kota. Stabilitas jumlah pemuda yang berpartisipasi dari 2021 hingga 2023 menunjukkan konsistensi dalam keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-275
Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota	625	670	670	670	44

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.14 Urusan Statistik

Dalam melakukan aktivitas pembangunan di segala bidang yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan penganggaran sampai pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, maka dibutuhkan data statistik yang lengkap, akurat dan terpercaya. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Buku statistik yang tersedia adalah Rokan Hulu Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Daerah dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-276
Bidang Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Produk Domestik Regional Bruto”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.15 Urusan Persandian

Fungsi Persandian adalah untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun yang menjadi tugas dari Lembaga Sandi pada tingkat Kabupaten adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program persandian tersebut dengan kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfatan persandian di pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah dan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Pada tahun 2020-2022 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 6,67 persen dari total keseluruhan Perangkat Daerah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, hingga pada akhir tahun 2023-2024 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 100 persen dari total keseluruhan Perangkat Daerah.

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat dari pada tahun 2020 sebesar 4,44%, meningkat pada tahun 2022 menjadi 6,67%, dan meningkat lagi menjadi 100% pada tahun 2024.

Tabel II-277
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	2	2	3	45	45
2	jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	4.44	4.44	6,67	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.16 Urusan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah Rokan Hulu sehingga kebudayaan Rokan Hulu akan tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi serta bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Upaya yang dilakukan adalah inventarisasi budaya-budaya Rokan Hulu dan menyelenggarakan event-event budaya Rokan Hulu sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Rokan Hulu di tingkat regional maupun nasional. Ajang promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian dalam daerah, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan pendataan dan pembuatan data benda cagar budaya bergerak.

Sektor seni dan budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hulu, terutama di bidang kebudayaan. Sebab sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya Melayu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki keunikan tersendiri, sebab mempunyai perbauran budaya. Selain kebudayaan Melayu, di Rokan Hulu juga hidup dan berkembang Kebudayaan lain, seperti Mandailing, Minangkabau, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Keberadaan kebudayaan-kebudayaan di luar kebudayaan melayu ini semakin menambah khasanah kekayaan budaya melayu itu sendiri.

1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2023, festival seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 96 kali, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang menyelenggarakan festival seni budaya sebanyak 35 kali. Berkurangnya aktivitas festival seni dan budaya tahun 2020-2021 disebabkan wabah pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel.

Tabel II-278
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10 Kali	13 Kali	35 Kali	96 Kali	47 kali

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Bentuk lainnya pelestarian budaya melayu adalah melakukan inventarisasi dan revitalisasi karya dan budaya melayu. Upaya revitalisasi dan inventarisasi sudah dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Adapun jumlah revitalisasi dan inventarisasi yang dilakukan selama kurun tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II-279
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	0	5	6	7

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Salah satu strategi dalam upaya pelestarian budaya yang lebih terarah dengan penggelolan cagar budaya terpadu. Selama lima tahun terakhir pengelolaan cagar budaya secara terpadu tidak berubah hanya berjumlah 13 cagar budaya. Untuk kedepannya pengelolan cagar budaya secara terpadu sangat diharapkan dalam menjamin ke efektivitasaan dalam mengelola cagar budaya pada Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-280
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.17 Urusan Perpustakaan

1) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Tabel II-281
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	2.287	3.092	12.990	7.014	11.132
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	556.199	560.747	563.419	573.520	586.994
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,004	0,006	0,023	0,012	0,019

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ketahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. Di tahun 2022 sebesar 12.990 meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar 3.092 di tahun 2021. Namun tahun 2023 pengunjung perpustakaan menurun kembali menjadi 7.014.

Terakhir pada tahun 2024 pengunjung perpustakaan meningkat kembali menjadi 11.132. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan banyaknya tersedia sarana membaca secara online, oleh karena itu perlu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara offline dan online.

2) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk menyediakan buku-buku agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan. Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Pada tahun 2024, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah 9.229 judul buku (mengalami peningkatan dari tahun 2023). Rasio koleksi buku yang tersedia diperpustakaan Kabupaten Rokan Hulu cendrung berfluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sedikit terjadi penurunan ditahun 2020 dan 2021 sebesar 18,20 persen.

Tabel II-282
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	8.978	8.990	8.864	8.866	9.229
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	49.319	49.400	48.318	48.696	50.116
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18,20	18,20	18,35	18,21	18,42

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga diharapkan tumbuh budaya baca dikalangan masyarakat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu sampai tahun 2024 sebanyak 332 pustaka yang terdiri dari 1 (satu) perpustakaan milik pemerintah daerah dan 331 milik non pemerintah daerah. Rasio perpustakaan persatuan penduduk per tahun di Kabupaten Rokan Hulu stabil di tahun 2023-2024 sebesar 0,6 persen.

Tabel II-283
Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	32	168	265	365	332
2	Jumlah penduduk	561.390	570.950	563.419	573.520	586.994
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,06	0,3	0,5	0,6	0,6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui

sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II-284
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	2.287	3.092	12.990	7.014	11.132

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Jumlah pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun tahun 2020-2024 cendrung berfluktuatif dari 2.287 pengunjung tahun 2020 menjadi 11.132 pengunjung tahun 2024. Rata-rata pengunjung yang terbanyak berada pada tahun 2022 sebesar 12.990 pengunjung yang tersebar diseluruh kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain disebabkan oleh metode layanan pustaka keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC dan suasana nyaman.

5) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 8.990 tahun 2021 menjadi sebanyak 8.866 tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya peminjaman buku yang belum dikembalikan oleh pengunjung pustaka. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-285
Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku	8.978	8.990	8.864	8.866	9.229

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 1 orang tahun 2021 menjadi sebanyak 66 orang tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan menjadi 173 orang. Hal ini disebabkan adanya pelatihan/pemagangan pustakawan dan tenaga teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Secara lebih jelas jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-286
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	2	1	66	66	173
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	2	1	66	66	173
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.2.18 Urusan Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

1) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu secara baku dari Tahun 2020 - 2024 sudah dilakukan sesuai dengan norma dan standar tapi masih belum tercapai. Sampai tahun 2020 sudah 45 Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 45 Perangkat Daerah atau 53,33 persen. pada tahun 2020-2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dampak merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Rokan Hulu. Pada tahun 2023 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip

secara baku meningkat kembali menjadi 4 Perangkat Daerah atau 8,89 yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku. Terakhir pada tahun 2024 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku meningkat kembali menjadi 6 Perangkat Daerah atau 13,33 yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku.

Tabel II-287
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	0	0	1	4	6
2	Jumlah Perangkat Daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	0	2,22	8,89	13,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan ketertataan kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selama kurun tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel. Secara umum pada urusan ini masih diperlukan upaya lebih banyak lagi dalam upaya penciptaan kearsipan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-288
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti

Untuk Kinerja Kearsipan Jumlah Rekomendasi Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti, yang Indikatornya pada Kab/Kota adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Kab. Rokan Hulu sebanyak 64 rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Tabel II-289
Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindak lanjuti
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	2	5	32	64

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.3 Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

2.1.4.4.3.1 Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu sangat besar, terutama untuk wisata alam maupun wisata budaya dan

wisata buatan. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin mengembangkanpotensi wisata yang ada, serta melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang ada.

Selain Air Panas Hapanasan dan Danau Cipogas, Air Panas Suaman dan Aek Martua, Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata dan budaya. Diantaranya adalah Benteng Tujuh Lapis, Makam Raja Rambah dan Objek Wisata Religi Rantau Binuang Sakti. Pemerintah Daerah juga merencanakan pengembangan terhadap Daya Tarik Wisata diantaranya Objek Wisata Hapanasan, Danau Sipogas dan Desa Wisata Sungai Bungo serta melakukan promosi objek-objek wisata tersebut.

1) Kunjungan wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Tabel II-290
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisatawan	876.535 orang	543.585 orang	1.036.635 orang	967.402 orang	1.088.084 orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan klasifikasi destinasi. Pada tahun 2020 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 876.535 orang. Tahun 2021 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rokan Hulu menurun menjadi 543.585 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan di tahun 2022 menjadi 1.036.635 orang disebabkan tingginya angka kunjungan wisata religi ke Mesjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada tahun 2021 angka kunjungan wisata menurun secara signifikan menjadi 543.585 disebabkan wabah pandemi covid-19. Pada tahun 2023 pasca pandemi jumlah kunjungan wisatawan meningkat kembali menjadi 967.402 orang. Terakhir pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan menjadi 1.088.084 orang.

2) Lama kunjungan wisata

Rata-rata kunjungan wisata di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 adalah tiga hari, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021-2024 menjadi dua hari. Ini menunjukkan wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten Rokan Hulu dan menghabiskan lebih banyak uang di Rokan Hulu pada tahun 2020. Peningkatan lama kunjungan wisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, karena semakin lama wisatawan tinggal, maka akan semakin banyak uang yang mereka habiskan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-291
Lama kunjungan Wisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama kunjungan wisata	3	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

3) PAD sektor pariwisata

Peningkatan PAD sektor pariwisata selain dapat ditingkatkan dengan lama kunjungan wisata, dapat pula ditingkatkan dengan penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda dan situs budaya. Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pariwisata cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 2,497,825,021,-, dengan rasio sebesar 2,47 persen dan pada tahun 2021 PAD sektor pariwisata sebesar Rp.3.118.937.816,-, dengan rasio sebesar 1,96 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 - 2024 seiring berakhirnya wabah covid -19 di Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan PAD sektor pariwisata meningkat. Terakhir pada tahun 2024 PAD sektor pariwisata meningkat menjadi Rp. 5.656.878.552, Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-292
PAD sektor pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Uraian		
	PAD Sektor Pariwisata	Total PAD	PAD Sektor Pariwisata
2020	2.497.825.021	101.038.192.579.64	2,47
2021	3.118.937.816	159.349.414.319	1,96
2022	4.329.058.642	108.322.526723.15	4,08
2023	4.721.987.634	193.270.150045.51	2,44
2024	5.656.878.552	154.878.407.686,00	3,65

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Desa Wisata Kabupaten Rokan Hulu

Tabel II-293
Desa Wisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Nomor Sk	Tahun Berdiri	Ket
1	Kelurahan Ngaso	Ujung Batu	-	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
2	Kelurahan Rokan	Rokan IV Koto	Puncak Kabur	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
3	Desa Babussalam	Rambah	Agro Wisata Kebun Kurma	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
4	Desa Rambah Tengah Barat	Rambah	Air Panas Hapanasan	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
5	Desa Teluk Riti	Rambah Hilir	Danau Conga	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
6	Desa Rambah	Rambah	Makam Raja Rambah	Kpts.556/DISPARBUD	2021	

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Nomor Sk	Tahun Berdiri	Ket
				/571/ 2021		
7	Desa Serombou Indah	Rambah Hilir	Goa Serombou Indah	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
8	Desa Rokan Koto Ruang	Rokan IV Koto	Wisata Sawah	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
9	Desa Bangun Purba	Bangun Purba	Air Terjun Aek Martua	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
10	Desa Tali Kumain	Tambusai	Benteng Tujuh Lapis	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
11	Desa Aliantan	Kabun	Suligi Hill dan Goa Garuda	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
12	Desa Koto Ranah	Kabun	Puncak Ranah	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
13	Desa Rantau Binuang Sakti	Kepenuhan	Surau Suluk	Kpts.556/DISPARBUD /571/ 2021	2021	
14	Desa Air Panas	Pendalian IV Koto	Kawasan Hutan Air Panas dan Agro Wisata	-	2022	
15	Desa Rambah Tengah Hilir	Rambah	Sungai	-	2023	
16	Desa Rambah Tengah Utara	Rambah	Embung	-	2024	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.1.4.4.3.2 Urusan Pertanian

1) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 54,22%, meningkat menjadi 55,61% pada tahun 2021, namun sedikit menurun hingga tahun 2024 menjadi 54,89%.

Tabel II-294
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan *(Miliaran Rupiah)*	19,566,35	23.454,97	27.136,88	28.315,49	30.985,12
2	Jumlah PDRB *(Miliaran Rupiah)*	36,087,00	42.177,51	49.614,31	52.156,58	56.446,72
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	54.22	55,61	54,70	54,29	54,89

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Jumlah produksi padi atau bahan pangan utama lokal yang dihasilkan oleh kelompok petani mengalami penurunan selama periode 2020-2024.

Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 45.381,64 ton, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33.040,35 ton. Namun, pada tahun 2022 - 2024 produksi terus menurun hingga menjadi 17.501,73 ton, pada tahun 2024.

Tabel II-295
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	45.381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22	17.501,73
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n	45.381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22	17.501,73
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

3) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Produktivitas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dari 39,72 menjadi 46,55 Kw/ha. Namun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan sebesar 44,78 Kw/ha. Terakhir pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 44,95 Kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman.

Tabel II-296
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton/Ha)	45,381.64	33.040,35	21.797,31	21.145,22	17.501,73
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	7.930,75	5.006,75	4.854,50	4.137,50	3.553,68
3	Luas areal panen padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	11.426,75	7.804,25	4.682,50	4.722,25	4.722,25
4	Produktivitas padi atau bahan pangan	39,72	42,34	46,55	44,78	44,95

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	utama lokal lainnya (Kw/Ha)					

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Cakupan bina kelompok petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Pada tahun 2023, cakupan bina kelompok tani adalah 3,27 persen, artinya belum optimalnya kelompok tani yang memperolah bantuan pemerintah daerah melalui program pembinaan ini. Namun pada tahun 2024 cakupan bina kelompok tani sudah mencapai 10,85 persen, dan diharapkan program pembinaan ini tetap menjadi salah satu fokus prioritas daerah.

Tabel II-297
Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	9	7	30	79	259
2	jumlah kelompok tani	2.232	2.330	2.388	2.419	2.388
3	Cakupan bina kelompok petani	0,40	0,30	1,26	3,27	10,85

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

5) Luas areal tanam dan panen

Pada tahun 2020-2024 luas tanaman padi cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2020 Luas tanam padi seluas 7.931 ha dan menurun menjadi 3.553,68 ha pada tahun 2024. Sementara untuk komoditas palawija secara umum menunjukkan trend yang menurun cukup tajam.

Tabel II-298
Luas Areal Tanam dan panen Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas areal tanam dan panen padi (ha)					
	a. Tanam	7,931	5.006,75	4.854,50	4.137,02	3.553,68
	b. Panen	11,427	7.804,25	4.682,50	4.722,25	3.893,27
2	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)					
	a. Tanam	2,571	2.023,10	537.80	669	540,7
	b. Panen	2,727	2.074,70	322.90	588,15	574,25
3	Luas areal tanam dan panen buah-buahan (ha)					
	a. Tanam	10.193	9.540	9316,39	3.767,63	5.248,48
	b. Panen	4.008	4832,17	7827,12	4.804,79	2.361,16
4	Luas areal tanam dan panen biofarmaka (m^2)					
	a. Tanam	808.934	7.655	82.934	52.852	103.445
	b. Panen	1.390	1.479,50	1.393	12.444	24.497
5	Luas areal tanam dan panen hias (m^2)					
	a. Tanam	0,02	1	20	103	225
	b. Panen	0,01	1	22	64	226

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran (ha)					
	a. Tanam	1798	1.644	1.644	1.637,14	
	b. Panen	43.537	43.589	2.618	25.912,97	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Produktivitas dan produksi pertanian

Produksi padi sangat ditentukan oleh kondisi musim pada tahun yang bersangkutan, disamping kemampuan petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan juga dipengaruhi ketersediaan sarana produksi dan harganya dipasaran. Khusus untuk padi sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi. Sementara pada lahan tadah hujan dipengaruhi oleh perhitungan ketepatan musim dan jadwal tanam yang disepakati petani. Perkembangan produktivitas dan produksi pertanian di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-299
Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas padi (kw/ha)	39.72	42.34	46.55	44,78	44,78
2	Produktivitas palawija (kw/ha)	45.01	51.44	88.50	62,11	61,97
3	Produksi padi (ton)	45.381.64	33.040.35	21.797,36	21.145,22	17.501,73
4	Produksi palawija (ton)	12.275.55	10.677.07	4.557,74	3.653,01	3.571,06
5	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	54,22	55,61	54,70	54,29	54,89

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Rokan Hulu sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 dengan ketentuan mengatur perencanaan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan. Untuk luas lahan sawah yang digunakan melalui data ATR BPN seluas 1.683,64 Ha

7) Konsumsi dan pendapatan petani

Berdasarkan perkembangan data dua tahun terakhir jumlah produksi peternakan/populasi ternak dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel II-300
Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Produksi Perternakan Populasi ternak	Ekor	68.438	68.241	69.114	48.835	69.114	50.131
	- Sapi & Kerbau	Ekor	50,402	49,988	50.906	30.250	50.906	31.464
	- Kambing & Domba	Ekor	18,036	18,253	18.208	18.585	18.208	18.667
2	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	Ton/Tahun	775,620	777,390	776.396	816.162,18	776.396	844.453
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	694,074	695,965	694.768	781.068,15	694.768	810.660
	- Karet	Ton/Tahun	81,530	81,410	81.612	35,079,73	81.612	33.779
	- Aren	Ton/Tahun	15,65	15,62	15,67	14,30	15,67	14,31
3	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	Persentase	4.75	10.71	4,51	-8,88	4,51	26,27

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Kawasan sentra peternakan dan perkebunan meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu merupakan kabupaten yang mempunyai keunggulan komoditas ternak pada ternak sapi potong dengan nilai *Location Question* (LQ) sebesar 1,36. Kawasan peternakan di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau N0. Kpts.2045/XII/2020 Tentang Penetapan Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi beberapa sentra pengembangan komoditas peternakan, meliputi:

- Sapi Potong meliputi Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai Utara, KuntoDarussalam, Tandun dan Rambah Samo;
- Kerbau meliputi Kecamatan Bangun Purba dan Rambah;
- Kambing meliputi Kecamatan Tambusai Utara, Bangun Purba, Rambah Samo, Rambah dan Rambah Hilir;

Sedangkan kawasan perkebunan terdiri dari:

- Karet, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 80.338 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 2.670 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 67.806 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 9.862 Ha .
- Produksi karet kurang lebih 81.367,30 Ton, produktifitas kurang lebih 1.200 Kg/Ha Ton dengan petani sebanyak 22.567 KK.
- Kelapa Dalam, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 986 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 855 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 131 Ha.
- Produksi kelapa dalam kurang lebih 473,04 Ton, produktifitas kurang lebih 553 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 4.464 KK.

- Kelapa Sawit, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 264.942,41 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 29.344 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 229.977 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88 Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Nasional (PBN) seluas kurang lebih 35.055Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 784 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 34.271 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas kurang lebih 180.667.84 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 180.667,84 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0 Ha. Total Luas Areal Perkebunan Besar Swasta(PBS) seluas kurang lebih 480.665,25 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 30.128 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 444.915,89 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88 Ha.
- Produksi kelapa sawit rakyat kurang lebih 689.931,15 Ton, produktifitas kurang lebih 3.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111 KK. Kelapa sawit Perusahaan Besar Negara (PBN) kurang lebih 141.279,00 Ton, produktifitas kurang lebih 3.900,00 Ton, dengan petani sebanyak 0 KK. Kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) kurang lebih 409.312,00 Ton, produktifitas kurang lebih 4.100,00 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 0 KK. Total Produksi Kelapa sawit kurang lebih 1.240.522,15 Ton produktifitas kurang lebih 11.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111 KK.
- Kakao, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 194,77 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 60,06 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 134,69 Ha.
- Produksi kakao kurang lebih 37,03 Ton, produktifitas kurang lebih 617 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 492 KK.
- Kopi, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 184,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 129,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 51 Ha.
- Produksi kopi kurang lebih 94,61 Ton, produktifitas kurang lebih 733 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 414 KK.
- Pinang, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 119,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 71,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 48 Ha.
- Produksi Pinang kurang lebih 29,02 Ton, produktifitas kurang lebih 409 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 526 KK.
- Enau, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 279,13 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 267,01 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 10,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 2,12 Ha.

- Produksi Enau kurang lebih 15,62 Ton, produktifitas kurang lebih 1.562 Ton, dengan petani sebanyak 441 KK.
- Gambir, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 30,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0,00 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 30,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0,00 Ha.
- Produksi Gambir kurang lebih 6,90 Ton, produktifitas kurang lebih 230 Ton, dengan petani sebanyak 58 KK.

2.1.4.4.3.3 Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan sebesar 6,25 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 5,35 persen dan Kemudian tahun 2022 turun menjadi 5,06 persen. Pada tahun 2023 kontribusi kategori ini mencapai 2.506,400,08 miliar rupiah atau sekitar 5,05 persen. Terakhir pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan mencapai 2.859,833,72 miliar rupiah atau sekitar 5,48 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung berfluktuatif pada tahun 2019 sebesar 25,08 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 25,25 persen. selanjutnya pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 25,25 persen. kemudian tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,06 persen. Terakhir pada tahun 2023 turun kembali menjadi 25,97 persen.

Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-301
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta)	9.113.030,88	10.568.202,22	12.974.185,93	13.545.540,46	14.560,937,66
		25,25	25,06	26,42	25,97	25,70
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga	850	981	995	1020	1065
3	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam Juta)	1.929.021,55	2.132.630,33	2.506.400,08	2.859.833,72	3.085.833,70
		5,35	5,06	5,05	5,48	5,45
4	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam juta)	5.406.361,10	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Sementara itu untuk indikator Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun 2024 sebanyak 1 (tiga) kelompok

pengrajin. kelompok pengrajin ini mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan bantuan peralatan dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil produksi kerajinan. Kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dan peralatan pada tahun 2024 adalah Pengrajin Bambu di Kecamatan Rambah, Pengrajin Lidi Sawit dan Pengrajin Batik Rokan Hulu. Pada Tahun 2022 Jumlah kelompok pengrajin sebanyak 28 kelompok pengrajin, sementara pada tahun 2023 sebanyak 32 pengrajin, terdapat peningkatan jumlah kelompok pengrajin sebanyak 4 kelompok. adapun 4 kelompok pengrajin tesebut adalah :

1. Kelompok Pengrajin Rotan di Kecamatan Pendalian IV Koto
2. Kelompok Pengrajin Bambu di Kecamatan Pendalian IV Koto
3. Kelompok Pengrajin Rajutan (tas, dompet, boneka, gantungan kunci) di Kecamatan Rambah Samo
4. Kelompok Pengrajin Batik Rokan Hulu di Kecamatan Rambah

Sedangkan, jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah bertanda tera sah dan masih berlaku pada tahun 2024 mencapai 965 unit, meningkat sebanyak 89 unit dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran pemilik UTTP akan pentingnya legalitas dan akurasi alat ukur mereka melalui proses tera. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.065 unit, meningkat sebanyak 45 unit dari tahun 2023 yang berjumlah 1.020 unit.

Lebih rinci untuk Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-302
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	0	1	2	3	1
2	Jumlah kelompok pengrajin	24	25	28	32	35
3	Jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	508	351	761	876	965
4	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	850	981	995	1020	1065
5	Jumlah Pasar Tradisional	97	97	96	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dalam proses produksi baik itu kelapa sawit maupun karet yaitu pada saat masa panen, petani menggunakan alat-alat panen yang terbuat dari besi. Alat panen pada perkebunan kelapa sawit yaitu dodos (*chisel*), egrek (*sickle*), dan untuk pembersihan kebun disamping alat berat juga menggunakan parang, golok, tajak, cangkul, sabit dan sebagainya, sedangkan pada perkebunan karet adalah pisau deres/sadap, dan untuk pembersihan kebun sama halnya dengan kebun kelapa sawit.

Kebutuhan alat produksi pada saat masa panen dan pembersihan kebun diproduksi oleh pandai besi yang terdata sebagai pelaku Industri Kecil dan

Menengah (IKM) Pandai Besi baik yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu maupun dari daerah lain. Lebih rinci untuk Jumlah IKM Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-303
Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambah	16	25	25	26	26
2	Rambah Samo		4	2	2	2
3	Bangun Purba	1	2	4	4	4
4	Rambah Hilir	2	3	3	3	3
5	Tambusai	3	4	5	5	5
6	Pagaran Tapah		1	1	1	1
7	Kabun	1	4	4	4	4
8	Tandun	2	2	2	2	2
9	Rokan IV Koto	1	4	4	4	4
10	Pendalian IV Koto	2	6	6	6	6
11	Kunto Darussalam		1			
12	Kepenuhan Hulu					
13	Kepenuhan		1	1	1	1
14	Tambusai Utara	2	4	4	4	5
15	Bonai Darussalam					0
16	Ujung Batu	1	1	2	2	2
		31	**62**	**63**	**64**	**65**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan terobosan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM Pandai Besi dapat bersaing dengan produk dari daerah lain dengan kualitas sesuai standar, dan berkesinambangun. Untuk itu perlu dibangun suatu Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu yang tentu saja dipusatkan dimana pelaku usaha tersebut banyak berdomisili.

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Pandai Besi direncanakan dibangun di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.530/DISPERINDAG/738/2022 Tentang Penetapan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Pandai Besi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.Luas Tanah yang tersedia untuk Pembangunan SIKIM seluas 5,021 Ha. Dengan adanya SIKIM ini diharapkan Produk Pandai Besi yang di Produksi dapat memenuhi Standar (SNI) sehingga IKM Pandai Besi dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan – Perusahaan Kelapa Sawit yang ada dan dapat menjual produknya ke daerah lain.

2.1.4.4.3.4 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu telah menerima transmigran sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2004 dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Sebagian besar daerah

transmigrasi sudah ditingkatkan menjadi desa definitif, sampai dengan saat ini hanya tinggal 3 desa transmigrasi yang belum ditingkatkan menjadi desa definitif yakni SP3, SP4 dan SP5 di Kecamatan Kepenuhan.

1) Transmigrasi swakarsa

Transmigran swakarsa adalah penduduk yang melakukan transmigrasi atas keinginan sendiri tanpa dorongan dari pihak lain. Transmigran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu merupakan transmigran swakarsa mandiri yaitu masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang sudah mampu mengembangkan diri dan ingin meningkatkan mutu kehidupannya. Lokasi transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat di 14 (empat belas) kecamatan dan 55 (lima puluh lima) desa/penempatan. Jumlah transmigran swakarsa sebanyak 13 desa/penempatan atau sebesar 23,64 persen.

2) Penerbitan sertifikat lahan transmigrasi per desa

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan percepatan proses pembuatan sertifikat tanah hak milik transmigran untuk memperjelas status kepemilikan tanah secara sah dan diakui sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif transmigran. Pada tahun 2015 Sampai dengan tahun 2019, penerbitan sertifikat tanah dikawasan transmigrasi telah berhasil menerbitkan sebanyak 5.359 persil dari 24.878 persil atau 21,54 persen. Sedangkan pada tahun 2020 akan diterbitkan sertifikat sebanyak 5.697 persil. selanjutnya realisasi penerbitan SHM pada tahun 2021 sebanyak 72.408 persil yang terdiri dari sertifikat hak milik masyarakat, fasum dan fasos.

2.1.4.4.3.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama stakeholder terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

1) Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan Masyarakat dan Peningkatan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan

Perkembangan jumlah produksi perikanan, Konsumsi Ikan Masyarakat dan Peningkatan kelompok/jumlah rumah tangga petani ikan di Kabupaten

Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-304
Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan Masyarakat
dan Peningkatan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	8.902,08	9,020.93	9,306.73	9.317,70	9.352,62
	Perikanan tangkap	1.944,24	1,964.90	1.982.52	1.964,8	2.002,59
	Perikanan budidaya	6.957,84	7,056.03	7.324.206	7.352,85	7.350,03
2	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	41,38	41.10	41.09	42,7	43,60
3	Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan	6.269	6.255	18,22	8,6	9,9
4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	54,22	55,61	54,70	54,29	54,89

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Produksi perikanan Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020 produksi ikan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 8.902,08 ton. Pada tahun 2021 jumlah perikanan mengalami peningkatan menjadi 9.020,93 ton selanjutnya pada tahun 2022 jumlah produksi perikanan meningkat manjadi 9.306,73 ton dan pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 9.306,63 ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 9.335,92 ton.

Pada tahun 2020 konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebesar 41,38 (Kg/kapita/Tahun). Pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 41,10 (Kg/kapita/Tahun) dan 41,09 (Kg/kapita/Tahun), selanjutnya tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 42,7 (Kg/kapita/Tahun) dan, terakhir tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 43,60 (kg/ kapita/ tahun). Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih jauh di bawah konsumsi ikan nasional yaitu 62,5 kg/ kapita/ tahun pada tahun 2024.

2) Cakupan bina kelompok nelayan

Pembinaan kelompok nelayan yaitu pembinaan yang diarahkan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan dan nelayan, di tingkat lapangan dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan tujuan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-305
Cakupan Bina kelompok nelayan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	0	2	6	6	3

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kelompok nelayan	26	26	32	42	45
3	Cakupan Bina kelompok nelayan	0	7,7	18,75	8,6	13,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Produksi perikanan kelompok nelayan

Peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Rokan Hulu ditenggarai karena meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan. Dimana pada tahun 2020 produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 1.944,24 ton, kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 1.964,90 ton dan 1.982,52. Selanjutnya pada tahun 2023 produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan menjadi 1.964,85 ton. Terakhir pada Tahun 2024 meningkat kembali menjadi 2.002,59 ton. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Perikanan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-306
Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	1,944.24	1,964.90	1.982,52	1.964,85	2.002,59
2	Jumlah produksi ikan di daerah	8,902.08	9,020.93	9.306,73	9.317,70	9.352,62
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	21,84	21.78	21,30	21,10	21,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Komoditas Unggulan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Komoditas unggulan perikanan Kabupaten Rokan Hulu antara lain Ikan Lele, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Baung. Ikan Lele dipilih sebagai komoditas unggulan yang pertama dengan rencana lokasi pengembangan Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, Rambah, Tambusai dan Tambusai Utara karena tingginya permintaan terhadap komoditas Lele baik dalam bentuk segar maupun olahan belum tercukupi sepenuhnya. Pertimbangan lainnya karena usaha budidaya ikan Lele sudah sangat berkembang pada daerah tersebut, bisa dibudidayakan dengan teknologi sederhana dan sumberdaya air yang terbatas serta siklus produksi yang cepat.

Sedangkan komoditas unggulan Nila permintaan juga cukup tinggi, namun potensi kolam yang umumnya tadah hujan menjadi kendala dalam pengembangannya selain dari harga pakan yang terus meningkat. Adapun lokasi pengembangannya mencakupi Recamatan Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai dan Tambusai Utara.

Untuk komoditas Patin dan Baung dijadikan komoditas unggulan pelengkap pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu karena permintaan pasar terhadap komoditas tersebut tidak sebesar permintaan komoditas Lele dan Nila, akan tetapi pembudidaya ikan tetap melakukan usaha pembudidayaan ikan tersebut, karena harga komoditasnya yang lumayan tiggi dibandingkan dengan ikan Lele.

2.1.4.4.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.1.4.4.4.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Rokan Hulu telah disusun tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tabel II-307
Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Dokumen	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009	Ada	Ada	Ada	Ada	
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024					Ada
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Restra Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020	Ada				
	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021					
	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022					
	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023					
	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024					
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pada tabel berikut disajikan kinerja Bappeda didalam meningkatkan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan sehingga terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan. Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 10 indikator, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2021-2026, dirumuskan menjadi 6 indikator.

Tabel II-308
Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2022	2023	2024
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100 persen	100 persen
2	Persentase E-database yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	100 persen
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun tepat waktu	7 dokumen	8 dokumen	9 dokumen
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	72 persen	80 persen	85 persen
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	99 persen	99 persen	100 Persen
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapakan didaerah	100 persen	100 Persen	100 Persen

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

1. Dokumen penetapan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pada Tanggal 25 Februari 2020, Badan Informasi Geospasial Mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 – 2040 Nomor : RTRW-7/BIG/IGT/PTRA/2/2020 Tepat Pada Tanggal 06 Maret 2020 diterbitkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 526/III/2020 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040. Dimana Bupati Rokan Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, selanjutnya menyampaikan kembali Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperda tersebut ke Gubernur Riau untuk mendapatkan Nomor Register, dan setelah mendapatkan nomor Register Bupati Rokan Hulu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040.

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Perda oleh Gubernur Riau Nomor : 4.07.D/2020, Bupati Rokan Hulu tepat pada Tanggal 30 Maret 2020 Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 –

2040 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 31 Maret 2020 dengan lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor : 1. Untuk sekarang ini proses penetapan sudah selesai, sehingga dapat dimasukkan kinerja penetapan revisi RTRW Kab. Rokan Hulu yaitu 100.

Tabel II-309
Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	118	79	99	106	116
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	178	176	112	146	123
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	66.29	44,89	88,39	72,60	94,30

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Tabel II-310
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	118	79	99	106	116
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	178	176	112	146	123
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	66.29	44,89	88,39	72,60	94,30

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas bahwa Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD, adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan, serta adanya kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

3. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang jika dibandingkan dengan dokumen RTRW kesesuaiannya hanya berkisar 80 persen, hal ini disebabkan masih adanya pembangunan yang belum sesuai peruntukan tata ruang.

2.1.4.4.4.2 Urusan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundangundangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Riau) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel II-311
Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase silpa terhadap APBD	0,44 persen	5,46 persen	2,75 persen	4,04 persen	0,54 persen
3	Persentase program/kegiatan/Sub kegiatan yang tidak terlaksana	0,11 persen	0,12 persen	0,03 persen	0,02 persen	0,12 persen
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	32.25 persen	34.84 persen	36,28 persen	27,06 persen	33,43 persen
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	17.40 persen	18.25 persen	12,19 persen	12,31 persen	11,72 persen
6	Perbandingan antara:					
	Belanja tidak langsung	59.71 persen	-	-	-	-
	Belanja langsung	40.29 persen	-	-	-	-
	Belanja Operasi		84,45 persen	68,60 persen	65,80 persen	65,25 persen
	Belanja Modal		13,87 persen	15,10 persen	19,64 persen	16,72 persen
	Belanja Tidak terduga		1,29 persen	1,64 persen	0,50 persen	0,04 persen
	Belanja Transfer		0,40 persen	14,66 persen	14,05 persen	13,98 persen
7	Dana bagi hasil	12.80 persen	11,67 persen	12,81 persen	19,82 persen	17,52 persen
8	Penyusunan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	6.64 persen	9.68 persen	6,87 persen	8,05 persen	9,03 persen

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Didalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil beberapa langkah strategis antara lain akuntabilitas dan transparansi diberbagai bidang. Langkah-langkah strategis dan inovatif didalam mengakselerasikan kinerja aparatur pemerintahan pada tingkatan paling tinggi sampai pada tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang benar-benar solid dan dipercaya sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terhadap hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan. Hasilnya adalah Pemerintah Rokan Hulu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan daerah tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Dengan 8 (delapan) kali berturut-turut menerima penghargaan ini, membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal porsi penggunaan anggaran maupun pelaporannya.

1) Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Tabel II-312
Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

Uraian/ Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA terhadap APBD
2020	6.750,283,379,10	1,684,410,168,163	0,4
2021	160,860,260,332.49	1,662,295,506,060.49	9.68
2022	44,440,071,941.81	1,616,530,239,903.71	2.75
2023	73.324.610.531,08	1.815.923.804.111,95	4,04
2024	10,048,998,328.32	1,850,380,791,427.25	0,54

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase SILPA terhadap APBD dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang meningkat di tahun 2021, tercatat sebesar Rp. 160.860.260.332,49,- dari total APBD sebesar Rp. 1.662.295.506.060,49,- dengan persentase SILPA tercatat sekitar 9,68 persen terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Pada tahun 2023, dana APBD yang digunakan untuk belanja pendidikan tercatat sebesar 27,06 persen lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 36,28 persen, masih lebih tinggi dari target nasional sebesar 20 persen. Sementara belanja kesehatan, tahun 2023 tercatat sebesar 12,31 persen, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 12,19 persen.

2.1.4.4.4.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melihat gambaran kinerja pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

1) Rata – rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 hingga 2024 adalah 0,1 JP/Tahun.

Tabel II-313
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Secara kumulatif, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 adalah 0,25 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020,2021, 2022 dan 2023 masing - masing sebesar 0,11, 0,18, 0,24 dan

0,11 persen. Tingginya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 disebabkan ketersediaan anggaran daerah yang meningkat untuk kegiatan tersebut.

Tabel II-314
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	10	13	6	13
2	Jumlah total ASN	5,575	5.486	5.452	5.265	5.076
3	Persentase	0,11	0,18	0,24	0,11	0,25

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

3) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Secara kumulatif, jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 mencapai 1,3 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,2 persen. Pada tahun 2024, sebanyak 7 orang pejabat ASN dari total 531 jabatan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih optimal dalam mendorong pengembangan kompetensi pejabat struktural. Meningkatnya jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur, adanya dukungan anggaran yang lebih memadai, serta kebijakan internal yang mendorong percepatan pemenuhan persyaratan kompetensi jabatan.

Tabel II-315
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1	2	13	6	7
2	Jumlah total Jabatan	778	796	523	520	531
3	Persentase	0.1	0.3	2,5	1,2	1,3

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Tabel II-316
Diklat Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklatpim Tk.II (orang)	1	1	6	1	1
2	Diklatpim Tk.III (orang)	0	1	5	2	5
3	Diklatpim Tk.IV (orang)	0	0	2	3	1
4	Jumlah	1	2	13	6	7

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1 orang. Sementara itu, peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III berjumlah 5 orang, dan untuk Tingkat IV sebanyak 1 orang. Rendahnya jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya kuota pelatihan yang tersedia,

keterbatasan anggaran, serta belum meratanya distribusi informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pelatihan struktural sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan jenjang karier ASN.

5) Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan di tahun 2024 dari tahun sebelumnya yakni dari 835 jabatan menjadi 1.244 jabatan.

Tabel II-317
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	744	762	489	835	1.244

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

6) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Sementara jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu meningkat dari 4.420 jabatan tahun 2023 menjadi 4.566 jabatan pada tahun 2024.

Tabel II-318
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.676	3.796	4.050	4.420	4.566

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

7) Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

Terdapat 45 instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 5.076 orang pada tahun 2024.

Tabel II-319
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	14	0.26	11	0.20	10	0,19	8	0,15
2	Sekolah Menengah Pertama	16	0.29	14	0.26	24	0,46	28	0,55
3	Sekolah Menengah Atas	1,018	18.62	834	15,30	860	16,34	808	15,91
4	Diploma I	7	0.13	7	0.13	25	0,48	11	0,22
5	Diploma II	202	3.69	162	2,97	84	1,60	104	2,05
6	Diploma III	532	9.73	584	10,71	624	11,65	551	10,86
7	Diploma IV/ S1	3,430	62.73	3,533	64,80	3.422	65	3.182	62,69
8	S2/S	249	4.55	307	5,63	216	4,11	384	7,57
9	S3	0	0.00	0	0.00	0		0	0
	Jumlah	**5,468**	**100.00**	**5,452**	**100.00**	**5.265**	**100**	**5.076**	**100**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan Diploma IV/S1 mendominasi komposisi ASN pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 62,69 persen. Meskipun masih menjadi yang tertinggi, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 65 persen.

Sementara itu, ASN dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebesar 15,91 persen pada tahun 2024, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 16,34 persen. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya pergeseran komposisi pendidikan ke arah jenjang yang lebih tinggi.

8) Jumlah PPPK menurut pendidikan

Tabel II-320
Jumlah PPPK menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar						
2	Sekolah Menengah Pertama						
3	Sekolah Menengah Atas	12	0,1	55	0,2		
4	Diploma I						
5	Diploma II						
6	Diploma III	14	0,2	408	0,16		
7	Diploma IV/ S1	656	0,96	2.078	0,81		
8	S2/S			1	0,03		
9	S3						
	Jumlah	**682**	**1,26**	**2.542**	**1,2**	**0**	**0**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat pendidikan ASN dalam periode tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan dominasi pada jenjang pendidikan Diploma IV/S1. Pada tahun 2022, ASN dengan kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 656 orang atau sebesar 0,96 persen dari total ASN. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 2.078 orang, meskipun secara persentase mengalami sedikit penurunan menjadi 0,81 persen. Penurunan persentase ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan total jumlah ASN yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan ASN dengan jenjang pendidikan tersebut.

9) Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan

Tabel II-321
Jumlah Pegawai Tidak Tetap menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	11	0,21	204	5,17	204	6,5
2	Sekolah Menengah Pertama	13	0,25	123	3,12	123	3,9
3	Sekolah Menengah Atas	834	15,79	1884	47,73	1803	57,6
4	Diploma I		0,00	2	0,05	1	0,0
5	Diploma II		0,00	25	0,63	23	0,7

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
6	Diploma III	584	11,06	410	10,39	191	6,1
7	Diploma IV/ S1	3.533	66,89	1.281	32,46	772	24,6
8	S2/S	307	5,81	18	0,46	15	0,5
9	S3	0	0,00	0	0,00	0	0,0
	Jumlah	**5.282**	**100,00**	**3.947**	**100,00**	**3.132**	**100,0**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, komposisi tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga tahun terakhir (2022–2024), terjadi perubahan signifikan dalam struktur kualifikasi pendidikan ASN. Secara keseluruhan, jumlah ASN mengalami penurunan dari 5.282 orang pada tahun 2022 menjadi 3.947 orang di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 3.132 orang pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pensiun, mutasi, atau belum optimalnya rekrutmen ASN baru.

10) Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan

Tabel II-322
Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	**Golongan I**	**16**	**0,29**	14	**0,27**	**12**	**1,32**
	I/a (Juru Muda)	2	0,04	2	0,04	2	0,22
	I/b (Juru Muda Tingkat I)	4	0,07	3	0,06	2	0,22
	I/c (Juru)	6	0,11	6	0,11	4	0,44
	I/d (Juru Tingkat I)	4	0,07	3	0,06	4	0,44
2	**Golongan II**	**993**	**18,21**	905	**17,19**	**677**	**74,23**
	II/a (Pengatur Muda)	34	0,62	26	0,49	23	2,52
	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	88	1,61	77	1,46	72	7,89
	II/c (Pengatur)	307	5,63	297	5,64	259	28,40
	II/d (Pengatur Tingkat I)	564	10,34	505	9,59	323	35,42
3	**Golongan III**	**3,400**	**62,36**	3.379	**64,18**	**3475**	**381,03**
	III/a (Penata Muda)	873	16,01	850	16,14	997	109,32
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	596	10,93	588	11,17	541	59,32
	III/c (Penata)	918	16,84	785	14,91	794	87,06
	III/d (Penata Tingkat I)	1.013	18,58	1156	21,96	1143	**125,33**
4	**Golongan IV**	**1,043**	**19,13**	967	**18,37**	**912**	100,00
	IV/a (Pembina)	496	9,10	464	8,81	444	48,68
	IV/b (Pembina Tingkat I)	504	9,24	439	8,34	383	42,00
	IV/c (Pembina Utama Muda)	43	0,79	64	1,22	84	9,21
	IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0,00	0	0,00	1	0,11
	Jumlah	**5,452**	**100.00**	**5.265**	**100,00**	**912**	**100,00**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan jumlah ASN pada golongan I dan II, sementara golongan III dan IV menunjukkan dominasi. Golongan I

mengalami penurunan dari 16 orang (0,29%) pada 2022 menjadi 12 orang (1,32%) pada 2024. Golongan II juga mengalami penurunan signifikan dari 993 orang (18,21%) pada 2022 menjadi 677 orang (74,23%) pada 2024. Sebaliknya, golongan III tetap mendominasi jumlah ASN, dengan 3.475 orang (381,03%) pada 2024, meskipun ada lonjakan angka persentase yang tidak biasa. Golongan IV juga menunjukkan penurunan jumlah dari 1.043 orang (19,13%) pada 2022 menjadi 912 orang (100%) pada 2024. Secara keseluruhan, ASN cenderung naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, mencerminkan perbaikan dalam karier ASN.

11) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Tabel II-323
Jumlah Jabatan Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian Jabatan Struktural	2021	2022	2023	2024
1	Eseleon II	34	34	34	21
2	Eselon III	171	167	166	158
3	Eselon IV	591	322	322	251
	Jumlah	**796**	**523**	**522**	**430**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data jabatan struktural, terjadi penurunan jumlah jabatan di setiap tingkat eselon. Jabatan Eselon II mengalami penurunan dari 34 jabatan pada 2021 dan 2022 menjadi 21 jabatan pada 2024. Eselon III juga menunjukkan penurunan, dari 171 jabatan pada 2021 menjadi 158 jabatan pada 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada Eselon IV, yang berkurang drastis dari 591 jabatan pada 2021 menjadi 251 jabatan pada 2024. Secara keseluruhan, jumlah jabatan struktural menurun dari 796 jabatan pada 2021 menjadi 430 jabatan pada 2024, mencerminkan adanya efisiensi dan perampingan dalam struktur organisasi.

2.1.4.4.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kelitbangan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi dasar pentingnya peran kelitbangan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai salah satu upaya penting untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Rokan Hulu adalah melalui penelitian sebagai pintu awal kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu amanat di dalam Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi. Invensi dan inovasi tersebut juga ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan daerah dan/atau menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan utama kelitbangan terdiri dari Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan penerapan yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk melihat kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Persentase implementasi rencana kelitbangan

Tabel II-324
Persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	2	1	1	6	2
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	2	2	2	5	2
	Rasio	**100**	**50**	**50**	**120**	**100**

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Data mengenai jumlah kelitbangan dalam RKPD dan RPJMD menunjukkan fluktuasi yang mencolok selama periode 2020–2024. Pada RKPD,

jumlah kelitbangan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 1 kelitbangan, setelah sebelumnya tercatat 2 kelitbangan pada tahun 2020. Namun, jumlah kelitbangan meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 6, sebelum kembali turun menjadi 2 kelitbangan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam perencanaan dan pencapaian target yang tercantum dalam RKPD dari tahun ke tahun. Sementara itu, pada RPJMD, jumlah kelitbangan relatif stabil dengan 2 kelitbangan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 5 pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 2 pada tahun 2024, mencerminkan fluktuasi dalam pencapaian indikator kinerja jangka panjang yang tercantum dalam RPJMD.

2) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel II-325
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	0	1	1	6	2
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	2	1	1	6	2
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren yang konsisten dalam hal tindak lanjut hasil kelitbangan, meskipun jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, tidak ada kelitbangan yang ditindaklanjuti, sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan tercatat 0%. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, seluruh kelitbangan yang ada dalam rencana (renja perangkat daerah) berhasil ditindaklanjuti dengan persentase pemanfaatan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam menindaklanjuti hasil kelitbangan yang telah direncanakan.

3) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi didaerah

Tabel II-326
Persentase perangkat daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi	5	24	16	15	26
2	Jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Rasio	11.11	53,33	35,55	33,33	57,78

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 5 perangkat daerah yang difasilitasi, dengan rasio fasilitasi sebesar 11,11% dari total 45 perangkat daerah. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2021, dengan 24 perangkat daerah yang difasilitasi, menghasilkan rasio fasilitasi sebesar 53,33%. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya intensif dalam mendorong inovasi di kalangan perangkat daerah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah perangkat daerah yang difasilitasi menurun menjadi 16

dan 15 perangkat daerah, dengan rasio masing-masing 35,55% dan 33,33%. Pada 2024, jumlah perangkat daerah yang difasilitasi kembali meningkat signifikan menjadi 26, dengan rasio fasilitasi mencapai 57,78%, yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan penerapan inovasi di tingkat perangkat daerah.

4) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah

Tabel II-327
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	5	25	16	16	26
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	18	66	42	23	36
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	27,78	37,88	38,09	69,56	72,22

Sumber: Rekap data PPI tahun Tahun 2025

Dari empat indikator yang digunakan masih ada indikator yang belum menemui target pada tahun 2024 yaitu pada Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capain yang masih jauh dari harapan.

Peningkatan persentase penerapan inovasi di daerah sangat penting guna meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa Inovasi Daerah yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

5) Penerapan SIDa

A. Kemudahan perizinan pelayanan terpadu satu pintu

SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, maupun masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah provinsi Riau maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

1. Mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi.
1. dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan.
2. tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Tabel II-328
Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi Tahun 2021		Nama Inovasi Tahun 2022		Nama Inovasi Tahun 2023		Nama Inovasi Tahun 2024	
1.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	1.	Nihil	1.	Nihil	1	Aplikasi "Aset Bos"	1.	Aplikasi "Aset Bos"
2.	Kecamatan Ujung Batu	1.	Siler	1.	Pelobang Mulsa Gampil (Gampang, Pintar, Terampil)	1.	Nihil		
3.	Puskesmas Ujung Batu	1.	Putri Mewa (Putuskan Antrian Melalui Wa	1.	Gerdu Jelita (Gerakan Peduli Jentik Di Sekitar Kita	1.	Masak Ptm (Masyrakat Sadar Skrining Penyakit Tidak Menular)	1	Muka Imoet (Temukan Kasus Hiv Melalui Mobile Vct)
4.	Dinas Kesehatan	1.	Germes Berbudi	1.	Germes Berbudi	1.	Germes Berbudi		
		2.	Psc	2.	Psc	2.	Psc		
						3.	Klinik Layanan Berhenti Merokok		
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.	Nihil	1.	Puskesos Cerdik (10 Lokus)	1.	Puskesos Cerdik (10 Lokus)		
6.	Kecamatan Kepenuhan	1.	Gerakan Pelayanan Keliling Administrasi Kecamatan Terpadu (Gpkakt)	1.	Lahir Langsung Dapat Akta Kelahiran (Laldakta)	1.	Kumpulan Layanan Inovasi Kecamatan (Klik)	1	Kumpulan Layanan Inovasi Kecamatan (Klik)
		2.	Paperles	2.	Direct Answer				
7.	Puskesmas Kepenuhan							1	Kapten (Kelas Atasi Penyakit Hipertensi)
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.	Pecel Desa	1.	Pecel Desa	1.	Pecel Desa		
				2.	Sesuli Banja	2.	Sesuli Banja		
						3.	Kamu Nanya		
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan	1.	Siskeudes	1.	Siskeudes	1.	Siskeudes		

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi Tahun 2021		Nama Inovasi Tahun 2022		Nama Inovasi Tahun 2023		Nama Inovasi Tahun 2024	
	Pemerintahan Desa								
10.	Kecamatan Tambusai Utara					1.	Pentas (Pelayanan Tak Terbatas)	1	Pelayanan Tanpa Batas
11.	Puskesmas Rambah Samo II	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Sehari Ceria		
12.	Dinas Komunikasi Dan Informatika								
13.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.	Gercep Lkpm	1.	Klinik Lkpm	1.	Ok Bos		
		2.	Jelita On Call						
		3.	Sosialisasi Oss Dan Sicantik						
		4.	Pelayanan Perizinan Di Jam Istirahat						
14.	Kecamatan Bonai Darussalam	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Ada	1	Konftuntas (Penyelesaian Konflik Lahan Di Kecamatan Bonai Darussalam)
15.	Puskesmas Tambusai Utara II	1.	Bekazi (Bekal Gizi Sehari)	1.	Bekazi (Bekal Gizi Sehari)	1.	Bekazi (Bekal Gizi Sehari)		
16.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata		
17.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Simperang (Sistem Informasi Pelayanan Tera-Tera Ulang		
18.	Puskesmas Tambusai I	1.	Nihil	1.	Anjeli	1.	Nihil	1	Laskar Tb (Laksanakan Dan Kejar Penyakit Tb Di Wilayah Puskesmas Tambusai)
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					1.	E-Bangkit	1.	E-Sembako (Sisteminformasipemantauan Harga Komoditas Kabupaten Rokan Hulu Plus)
								2	Srigala Merajut Rusa (Stategi Penaggulangan Kemiskinan Melalui Kolaborasi Menuju Kabupaten

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi Tahun 2021		Nama Inovasi Tahun 2022		Nama Inovasi Tahun 2023		Nama Inovasi Tahun 2024	
									Rokan Hulu Yang Sejahtera
20.	Badan Pendapatan Daerah	1.	Simpatda	1.	Hot To Host (Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah)	1.	Siretda (Sistem Retribusi Daerah)		
21.	Puskesmas Pagaran Tapah	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Oralit Sehat (Obrolan Lima Menit Seputar Kedsehatan		
22.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Sipenggali		
23.	Sekretariat Daerah	1.	Elektronik RFK	1.	Elektronik RFK	1.	Elektronik RFK	1	Sipormat (Sistem Informasi Dan Pelaporan Kecamatan Terintegrasi)
				2.	E-Fopi (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	2.	Sistem Informasi Dan Pelaporan Kecamatan Terintegrasi (Sipormat)		
						3.	Aplikasi E-Sakip		
24.	Puskesmas Tandun Ii	1.	Nihil	1.	Nihil	1.	Program Pangkat Tinggi	1	Pangkat Tinggi (Bapak Angkat Stunting Dan Gangguan Gizi)
25.	Inspektorat	1.	Siap (Sistem Informasi Absensi Pegawai)	1.	Siaudit (Sistem Informasi Audit)	1.	E-Kinerja (Elektronik Kinerja)		Sidapeg (Sistem Informasi Data Kepegawaian)
26.	Puskesmas Rokan Iv Koto I	1.	Nihil	1.	Basmi Pelakor (Bersama Kami Petugas Lacak Kesehatan Rokan Satu)	1.	Pesan Terbukti (Pelayanan Kesehatan Enam Desa Trerpadu Lubuk Bendahara Timur)	1	Gerakan Bts (Bawa Tumler Sendiri)
								2	Puskesdes Terpadu Desa Lubuk Bendahara
27.	Puskesmas Pendalian IV Koto	1.	Pertolongan Persalinan 4 Tangan	1.	Nihil	1.	Gemas Janda (Tb)		
28.	Puskesmas Rambah							1	Jawara Bilas (Jaga Kesehatan Warga Binaan Lapas Pasir Pengaraian)

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi Tahun 2021		Nama Inovasi Tahun 2022		Nama Inovasi Tahun 2023		Nama Inovasi Tahun 2024	
29	Puskesmas Kunto Darussalam							1	Ossela (One Stop Service Lansia)
30	Puskesmas Kepenuhan Hulu							1	Gema Denting (Gerakan Bersama Demi Pencegahan Stunting)

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

B. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem *e-government*

Penerapan TIK dan *E-Government* di Kabupaten Rokan Hulu ternyata telah menjadi inspirasi bagi daerah lainya, kita harapkan kedepan, penerapan TIK dapat lebih di tingkatkan sehingga sistem ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan penerapan TIK dan *E-Government* di Rokan Hulu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya rangking Rokan Hulu dalam sistem perangkingan E-Government baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Jika pada tahun 2012 lalu, Rokan Hulu menduduki peringkat ke 5 penerapan TIK dan *E-Government* di Riau, maka tahun 2014 Rokan Hulu sudah menduduki peringkat 1 tingkat Riau dalam penerapan TIK dan E-Government. Keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama dari seluruh OPD yang mau bersinergi dengan PDE dalam Pengelolaan data elektroniknya, saat ini seluruh OPD dan kecamatan Sudah terhubung dengan server utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan kedepan kita akan upayakan untuk mengkoneksikan seluruh UPTD OPD, baik melalui internet ataupun wireless.

2.1.4.4.4.5 Pengawasan

Dari segi akuntabilitas keuangan dan kinerja memang harus diawali dengan ketepatan waktu dan kedisiplinan. Ini menunjukkan integritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat dan selalu menyerahkan LKJIP dan PENJA tepat waktu setiap tahunnya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara konsisten setiap tahun mengukur kinerja dengan mengevaluasi capaian-capaian dalam indikator yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

1) Persentase tindak lanjut temuan

Pada tahun 2024, persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat adalah sebesar 49,62 menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 79,24 persen. Sedangkan jumlah temuan BPK RI menurun menjadi 28 temuan di tahun 2024 dari 36 temuan di tahun 2023. Perkembangan indikator pengawasan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-329
Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024

1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	99	132	174	187	131
2	Jumlah total temuan	161	162	200	236	264
3	Persentase tindak lanjut temuan	61.49	81,48	87,00	79,24	49,62

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2) Jumlah temuan BPK

Tabel II-330
Jumlah temuan BPK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan BPK	15	10	13	15	53

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dan Rekap matrik BPK Tahun 2025

3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi
e) Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

Tabel II-331
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	3.000 (level 3)	3.212 (level 3)	3.217 (level 3)	3.141 (level 3)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

4) *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga

yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-332
Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for prevention* (MCP) KPK	90	84	76	75,42

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Nilai rata-rata capaian kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren penurunan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian MCP Kabupaten Rokan Hulu mencapai 90, yang merupakan nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Namun, nilai ini mengalami penurunan menjadi 84 pada tahun 2022, lalu menurun lagi menjadi 76 pada tahun 2023, dan sedikit turun kembali menjadi 75,42 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kembali dalam pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi yang menjadi indikator dalam penilaian MCP, termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan terpadu, dan manajemen ASN.

2.1.4.4.4.6 Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi/keberhasilan capaian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II-333
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Target	Capaian	Capaian
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	persen	87,5	87,5	90	94,76
2	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	persen	82,5	82,5	85	72,76
3	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	persen	97,5	97,5	100	100
4	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	87,5	87,5	90	85,33
5	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	persen	87,5	87,5	90	80

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD menunjukkan hasil yang cukup baik. Pemenuhan kebutuhan administrasi meningkat dari 90 persen (2023) menjadi 94,76 persen (2024), melampaui target 87,5 persen . Layanan keuangan juga berhasil dipertahankan di angka 100 persen, melebihi target 97,5 persen. Namun, beberapa indikator belum mencapai target. Pemenuhan kebutuhan gedung turun menjadi 72,76 persen, di bawah target 82,5 persen. Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD juga sedikit menurun ke 85,33 persen, serta persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda turun menjadi 80 persen.

Tabel II-334
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu secara konsisten telah memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT). Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi dalam perencanaan kerja legislatif, yang menjadi dasar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih terarah dan terukur.

Tabel II-335
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, program-program kerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran telah tersusun dan terintegrasi secara konsisten ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Ketersediaan dan integrasi ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, serta selaras dengan fungsi dan kewenangan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah.

Tabel II-336
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, program-program DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran telah secara konsisten terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Konsistensi ini mencerminkan upaya yang terarah dan sistematis dalam mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD secara efektif, serta memastikan sinergi antara perencanaan strategis dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lembaga legislatif.

2.1.4.4.5 Capaian Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 - 2026

Tabel II-337
Capaian Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2026

MISI RPJMD	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Indikator	Baseline	Target Pada RPJMD Tahun Ke-			Realisasi Pada RPJMD Tahun Ke-			Target Pada Akhir Tahun 2026	Keterangan
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
MISI 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa											
1.1	**Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**	**IPM**	**69,38**	**69,47**	**69,67**	**69,86**	**70,31**	**71,02**	**73,07**	**69,98**	**tercapai**
1.1.1	***Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat***	*a. Angka Harapan Lama Sekolah*	12,84	12,9	12,93	12,96	12,86	12,88	12,94	13,00	belum tercapai
		b. Rata rata Lama Sekolah	8,39	8,36	8,4	8,45	8,55	8,81	8,94	8,60	tercapai
1.1.2	***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***	*Angka Harapan Hidup*	70,06	70,55	71,01	71,56	70,51	70,84	73,67	72,42	tercapai
MISI 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah											
2.1	**Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kreatif, dan Berdaya Saing**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**1,51**	**2,06**	**2,50**	**3,00**	**5,02**	**4,12**	**2,71**	**4,00**	**belum tercapai**
2.1.1	***Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunnya Kesenjangan Pendapatan***	*-Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)*	36.083,71	37.449,48	38.385,71	39.537,28	49614,31	52.156,58	56.646,72	42.557,93	tercapai
		-Indeks Gini	0,314	0,279	0,278	0,277	0,268	0,259	0,272	0,275	tercapai
		-PDRB Perkapita	50,23	50,29	50,45	50,95	85,15	89,13	95,45	51,67	tercapai
		Persentase Petumbuhan PAD	10.33	11,86	12,77	13,75	6,75	10,38	9,02	15,98	belum tercapai
2.1.2	***Meningkatnya Investasi Daerah***	*Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (miliar rupiah)*	4.817,27	4.926,26	5.000,15	5.087,65	5436,01	5.690,61	5.870,67	5.319,14	tercapai
2.1.3	***Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah***	*Indeks Ketahanan Pangan*	53,24	58,03	63,25	68,95	54,92	54,91	58,88	81,92	belum tercapai
2.1.4		*Persentase Penduduk Miskin*	10,31	10,14	10,06	9,97	9,95	9,72	9,62	9,8	tercapai

MISI RPJMD	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Indikator	Baseline	Target Pada RPJMD Tahun Ke-			Realisasi Pada RPJMD Tahun Ke-			Target Pada Akhir Tahun 2026	Keterangan
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	*Tingkat Pengangguran Terbuka*	4,42	4,33	4,3	4,27	3,62	3,45	2,73	4,21	tercapai
2.2	**Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata**	**PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)**	**2.497,83**	**2.722,63**	**2.967,67**	**3.234,76**	**4.308**	**4.172,98**	**5.656,00**	**3.843,21**	**tercapai**
2.2.1	***Meningkatnya Daya Tarik Objek Wisata Daerah***	*Jumlah Kunjungan Wisatawan*	876.535	876.535	964.118	1.060.607	1036635	967.405	1.088.084	1.283.334,00	tercapai
MISI 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan											
3.1	**Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah**	**Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastuktur Dasar (%)**	**25,06**	**41,00**	**43,77**	**71,5**	**54,81**	**64,38**	**64,43**	**72,70**	**belum tercapai**
3.1.1	***Meningkatnya Pelayanan Transportasi dan Infrastruktur Pendukungnya***	*Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/ Barang Melalui Terminal/ Dermaga/ Bandara Pertahun*	0	10	10,5	11	14,73	13,95	12,61	12,00	tercapai
3.1.2	***Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman***	*Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih*	51,1	60,52	65,13	69,23	91,12	90,75	93.45	78,98	tercapai
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	66,33	76,2	81	86	90,1	89,49	90,64	96,32	tercapai
		Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	0	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
		Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	15,23	15,59	15,93	16,17	2,8	10,66	0,9	16,66	belum tercapai
		Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum)	46,45	51	54	56	41,84	51,13	85	62	tercapai
3.1.3	***Meningkatnya Cakupan dan***	Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	70	71,4	73,19	75,01	84,97	96,37	86,52	78,81	tercapai

MISI RPJMD	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Indikator	Baseline	Target Pada RPJMD Tahun Ke-			Realisasi Pada RPJMD Tahun Ke-			Target Pada Akhir Tahun 2026	Keterangan
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Kualitas Gedung Negara										
3.1.4	***Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air***	*Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi Dengan Baik*	70	71,04	72,25	73,25	57,54	78,9	82,6	75,00	tercapai
3.2	**Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**64,41**	**65,37**	**65,85**	**66,33**	**67,27**	**62,82**	**65,31**	**67,29**	**belum tercapai**
3.2.1	***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup***	*-Indeks Kualitas Air*	70	59,37	59,47	59,57	62	50	52,73	59,77	belum tercapai
		-Indeks Kualitas Udara	90,21	87,34	87,44	87,54	90,67	91,05	93,11	87,74	tercapai
		-Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31,4	35,06	36,89	38,72	33,06	32,64	35,49	42,38	belum tercapai
MISI 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda											
4.1	**Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis**	**Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/ SARA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**52,08**	**56**	**56,5**	**57**	**52,4**	**52,4**	**55**	**58**	**belum tercapai**
4.1.1	***Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama***	*Angka kejadian Konflik SARA*	0	0	0	0	0	0	0	0	tercapai
4.1.2	***Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat***	*Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Penegakkan Perda/ Perkada*	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
4.1.3	***Meningkanya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak***	*-Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani*	4	6	5	2	2	51	12	0	belum tercapai
		-Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	83	83	85,3	90,1	100	100	100	100	tercapai
4.2	**Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah**	**Persentase Pemajuan Budaya Daerah**	**7**	**7**	**8**	**9**	**7,82**	**8**	**27,27**	**11**	**tercapai**

MISI RPJMD	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Indikator	Baseline	Target Pada RPJMD Tahun Ke-			Realisasi Pada RPJMD Tahun Ke-			Target Pada Akhir Tahun 2026	Keterangan
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4.2.1	***Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan***	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina*	41	41	42	43	42	42	103	46	tercapai
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan											
5.1	**5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**C**	**CC**	**CC**	**B**	**CC**	**CC**	**BB**	**BB**	**tercapai**
5.1.1	***Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi***	*Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi*	34,48	100	100	100	100	100	74,37	100	belum tercapai
5.1.2	***Meningkatnya Penerapan E-government***	*Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*	2,13	2,75	3	3,25	1,17	2,64	3,46	4	tercapai
5.1.3	***Meningkatnya Pelayanan Publik yang Handal***	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	79,75	80	80,5	81,5	91,05	89,1	90,72	83,5	tercapai
5.1.4	***Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah***	*Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal, apabila diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*) dan digunakan dengan tepat.

Oleh karena itu keuangan daerah haruslah dikelola dengan baik agar dapat memperoleh pendapatan yang maksimal, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk digunakan sebagai belanja pendanaan pembangunan.

Berkanaan dengan itu, untuk memperdiksikan kedepan perlu mencermati kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Disamping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, mengikat serta pengeluaran untuk prioritas utama. Dengan melakukan analisis perhitungan tersebut, dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, oleh sebab itu pengolahan data dan analisis dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap Neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut

Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat terdiri daeri Dana Perimbangan ykni Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan Transfer Pemerintah Pusat lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II-338

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**1,521,847,391,961.56**	**1,662,295,506,060.49**	**1,577,337,109,474.15**	**1,845,813,897,701.22**	**1,787,799,323,235.49**	**5.78**
1,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**101,038,192,579.64**	**160.860,260,332.49**	**108,322,526,723.15**	**148,540,528,998.22**	**161,467,554,113.49**	**18.09**
1.1.1	Pajak daerah	38,553,663,462.67	88,391,667,091.04	45,407,125,436.02	67,829,112,388.92	57,924,527,651.00	28.85
1.1.2	Retribusi daerah	6,443,907,628.00	6,482,748,313.00	8,208,584,693.00	8,533,083,042.00	5,772,558,665.00	-0.29
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,424,569,020.00	2,094,755,438.00	2,114,662,284.00	2,398,005,508.00	16,364,094,205.00	160.95
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	54,616,052,468.97	63,891,089,490.45	52,592,154,310.13	69,780,328,059.30	81,406,373,592.49	12.16
1,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,340,458,189,381.92**	**1,400,185,696,497.00**	**1,376,524,490,105.00**	**1,697,148,794,040.00**	**1,626,331,769,122.00**	**5.47**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,233,841,403,536.00	1,259,058,528,859.00	1,227,333,311,289.00	1,486,045,853,910.00	1,521,657,333,523.00	5.75
1.2.1	Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	1,059,383,430,585.00	1,102,550,616,859.00	1,064,016,070,289.00	1,332,681,526,410.00	1,363,762,567,146.00	7.04
1.2.1.1	Dana Bagi hasil pajak	49,365,863,595.00	103,036,338,900.00	87,597,180,127.00	100,172,266,859.00	99,172,798,000.00	26.77
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam	145,468,131,308.00	90,969,705,981.00	114,397,541,000.00	265,590,979,370.0	214,072,002,000.00	25.26
1.2.1.3	Dana alokasi umum	647,253,374,000.00	641,923,852,000.00	642,058,489,477.00	678,915,439,397.00	758,207,599,872.00	4.15
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	217,296,061,682.00	266,620,719,978.00	219,962,859,685.00	288,002,840,784.00	292,310,167,274.00	9.41
1.2.2	Trasfer pemerintahan pusat lainnya	174,457,972,951.00	156,507,912,000.00	163,317,241,000.00	153,364,327,500.00	157,894,766,377.00	-2.27
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah	0.00	9,173,013,000.00	25,497,828,000.00	13,493,601,500.00	18,425,595,000.00	-2.63
1.2.2.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	174,457,972,951.00	147,334,899,000.00	137,819,413,000.00	139,870,726,000.00	139,469,171,377.00	-5.20
1.2.3	Transfer pemerintah provinsi	106,616,785,845.92	141,127,167,638.00	149,191,178,816.00	211,102,940,130.00	104,674,435,599.00	7.29
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	88,905,585,845.92	114,347,358,038.00	127,638,303,816.00	155,121,779,862.00	98,399,635,599.00	6.30
1.2.3.2	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	17,711,200,000.00	26,779,809,600.00	21,552,875,000.00	55,981,160,268.0	6,274,800,000.00	25.66
1,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**85,734,030,158.19**	**101,249,549,231.00**	**92,490,092,646.0**	**124,574,663.00**	**-**	**-47.60**
1.3.1	Pendapatan Hibah	80,351,010,000.00	101,249,549,231.00	92,490,092,646.0	124,574,663.00	-	-45.63

Sumber : BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Mencermati data pada tabel diatas, terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020-2024 bertumbuh rata-rata sebesar 5,78 persen per tahun. Pertumbuhan terbesar dalam komponen pendapatan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang tumbuh rata-rata sebesar 18,09 persen per tahun selama periode 2020-2024. Sedangkan komponen bertumbuh paling kecil yang sebesar (47,60) persen selama periode yang sama. Sementara itu komponen transfer Pemerintah Pusat yang secara nominal cukup besar, dilihat dari pertumbuhan selama periode yang sama rata-rata dapat bertumbuh sebesar 5,75 persen.

Pendapatan Asli Daerah yang tumbuhn cukup signifikan adalah berasal dari Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,85 persen, sedangkan yang teredah adalah retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (0,29) persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah adalah sebagai sumber yang potensial untuk ditingkatkan jika dikelolah dengan baik.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja Daerah tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Secara umum komponen belanja menurut tersebut sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek Langsung yang didalamnya terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
2. Belanja Modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
4. Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah dihadapkan pada semakin besarnya kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berdampak ada semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Sementara itu dari sisi ketersediaan anggaran sangat terbatas. Berkenaan dengan hal itu Pemerintah Daerah haruslah menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Alokasi pada Belanja Daerah haruslah diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar, dan mandatori karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu pada urusan ini Pemerintah menetapkan standar pelayanan mimimal. Setelah urusan ini terpenuhi penganggarannnya barulah kemudian dialokasikan untuk pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disediakan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja suatu daerah dalam menggunakan anggaran. Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-339

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	**1,522,580,070,083.16**	**1,582,662,580,816.22**	**1,616,530,239,903.71**	**1,815,923,804,111.95**	**1,850,375,091,427.25**	5.08
BELANJA OPERASI	**1,068,159,342,078.04**	**1,103,934,919,327.94**	**1,108,927,587,073.14**	**1,194,920,933,139.95**	**1,281,465,187,832.90**	4.70
Belanja pegawai	610,324,628,055.00	624,343,459,048.00	596,925,726,030.00	603,842,271,673.00	736,418,524,678.00	5.25
Belanja Barang dan Jasa	384,615,008,023.04	416,351,185,158.94	461,026,180,627.70	532,662,237,285.95	472,103,116,391.90	5.79
Belanja hibah	72,417,206,000.00	62,067,469,621.00	49,448,489,040.44	57,407,324,181.00	72,868,346,763.00	2.10
Belanja bantuan sosial	802,500,000.00	1,172,805,500.00	1,527,191,375.00	1,009,100,000.00	75,200,000.00	-12.53
BELANJA MODAL	**188,671,793,994.95**	**219,509,938,284.50**	**244,048,047,090.57**	**356,642,073,590.00**	**309,473,866,741.35**	**15.11**
Belanja Tanah	0.00	567,960,000.00	149,670,000.00	0.00	0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	24,188,157,955.00	43,033,342,612.00	66,006,237,949.50	50,670,206,258.00	26,809,356,967.35	15.24
Belanja Gedung dan Bangunan	46,056,567,390.00	76,633,481,391.67	89,832,903,897.07	64,342,140,106.00	96,874,483,346.00	26.45
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,767,237,951.95	99,011,712,320.83	85,881,648,940.00	235,512,051,262.00	179,392,804,580.00	34.10
Belanja Aset Tetap Lainnya	18,659,830,698.00	263,441,960.00	2,177,586,304.00	6,038,713,964.00	6,063,721,848.00	201.43
Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	78,962,000.00	333,500,000.00	
BELANJA TAK TERDUGA	**21,495,223,088.00**	**20,362,686,574.78**	**26,553,965,877.00**	**9,153,526,845.00**	**783,993,000.00**	-32.96
Belanja tak terduga	21,495,223,088.00	20,362,686,574.78	26,553,965,877.00	9,153,526,845.00	783,993,000.00	-32.96
TRANSFER	**244,253,710,922.17**	**238,855,036,629.00**	**237,000,639,863.00**	**255,207,270,537.00**	**258,652,043,853.00**	1.51
Bagi hasil pajak ke desa	6,264,732,442.35	6,265,828,116.00	6,664,212,649.00	7,205,792,096.00	7,800,736,003.00	5.69
Belanja bantuan keuangan	237,988,978,479.82	232,589,208,513.00	230,336,427,214.00	248,001,478,441.00	250,851,307,850.00	1.40

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Data pada tabel diatas memperlihatkan bahwa selama periode 2020-2024 realisasi belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu bertumbuh rata-rata sebesar 5.08 persen setiap tahunnya.

Selanjuntnya dilihat dari masing-masing komponen belanja daerah, komponen yang pertumbuhan paling tinggi adalah belanja modal yang tumbuh rata-rata sebesar 15,11 persen per-tahun selama perriode 2020-2024. Sedangkan komponen yang pertumbuhannya paling rendah adalah belanja tidak terduga yang selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar (32,96) persen.

Tingginya pertumbuhan belanja modal ini menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berpihak kepada masyarakat dengan mengalokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berhubungan atau dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Secara umum komponen pembiayaan Kabpaten Rokan Hulu terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2020-2024 realisasinya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 286,16 persen. Penyumbang terbesar dari peningkatan tersebut berasal dari Silpa yang naik rata-rata sebesar 286,83 persen. Secara lebih rinci pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-340

Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**7.482.961.500,70**	**6.766.004.179,10**	**83.633.202.371,37**	**44,434,516,941.81**	**73.325.610.532,08**	**286.16**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)	7.482.961.500,70	6.750.283.379,10	83.633.202.371,37	44,433,516,941.81	73.325.610.532,08	286.83
3.1.2	Pencairan dana cadangan				1,000,000.00		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah						
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		15.720.800,00		1,000,000.00		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						
3.1.7	Penerimaan pengembalian dari perusda						
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					**700.000.000,00**	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal pemerintah daerah		-			700.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang		-				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah		-				
3.2.5	Pembayaran utang lainnya		-				
	PEMBIAYAAN NETTO	**7.482.961.500,70**	**6.766.004.179,10**	**83.633.202.371,37**	**44,434,516,941.81**	**72,625,610,531.08**	285.77
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**6,750,283,379.10**	**86.398.929.423,37**	**44.440.071.941,81**	**73,324,610,531.08**	**9,990,587,554.57**	277.50

Sumber: BPKAD Kab.Rokan Hulu Tahun 2025

Tabel II-341
Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101,038,192,579.64	160.860,260,332.49	108,322,526,723.15	148,540,528,998.22	161,467,554,113.49
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,340,458,189,381.92	1,400,185,696,497.00	1,376,524,490,105.00	1,697,148,794,040.00	1,626,331,769,122.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85,734,030,158.19	101,249,549,231.00	92,490,092,646.0	124,574,663.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,521,847,391,961.56**	**1,662,295,506,060.49**	**1,577,337,109,474.15**	**1,845,813,897,701.22**	**1,787,799,323,235.49**
2	**BELANJA**					
2.1	BELANJA OPERASI	1,068,159,342,078.04	1,103,934,919,327.94	1,108,927,587,073.14	1,194,920,933,139.95	1,281,465,187,832.90
2.2	BELANJA MODAL	188,671,793,994.95	219,509,938,284.50	244,048,047,090.57	356,642,073,590.00	309,473,866,741.35
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	21,495,223,088.00	20,362,686,574.78	26,553,965,877.00	9,153,526,845.00	783,993,000.00
2.4	BELANJA TRANSFER	244,253,710,922.17	238,855,036,629.00	237,000,639,863.00	255,207,270,537.00	258,652,043,853.00
	JUMLAH BELANJA	**1,522,580,070,083.16**	**1,582,662,580,816.22**	**1,616,530,239,903.71**	**1,815,923,804,111.95**	**1,850,375,091,427.25**
3	**PEMBIAYAAN**					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**7.482.961.500,70**	**6.766.004.179,10**	**83.633.202.371,37**	**44,434,516,941.81**	**73.325.610.532,08**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**				**700.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**7.482.961.500,70**	**6.766.004.179,10**	**83.633.202.371,37**	**44,434,516,941.81**	**72,625,610,531.08**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**6,750,283,379.10**	**86.398.929.423,37**	**44.440.071.941,81**	**73,324,610,531.08**	**9,990,587,554.57**

Sumber: BPKAD Kab.Rokan Hulu Tahun 2025

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Laporan tersebut menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dengan informasi tersebut diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih terarah sehingga pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dapat dilakukan secara efesien dan efektif.

Selama periode 2020 - 2024 asset yang tercatat dalam Neraca Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,07 persen. Komponen dalam asset yang bertumbuh cukup tinggi adalah investasi jangka panjang yang dalam kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 2,53 persen. Selanjutnya aset tetap yang secara nominal dalam neraca memiliki jumlah paling besar selama periode 2020-2024 juga dapat bertumbuh rata-rata 2,53 persen. Pertumbuhan asset tetap ini sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja modal daerah selama kurun waktu yang sama. Pertumbuhan asset tetap ini tentu saja menggambarkan kebijakan daerah pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Selanjutnya dari sisi kewajiban daerah pada neraca daerah, selama kurun waktu 2020 - 2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 178 persen. Penurunan Kewajiban Daerah disebabkan menurunnya kewajiban jangka pendek selama waktu yang sama sebesar 178 persen.

Sementara itu Ekuitas dana selama kurun waktu 2020-2024 mengalami sedikit peningkatan yakni tumbuh rata-rata sebesar 2,80 persen. Peningkatan ekuitas dana ini walaupun tidak signifikan menjadi hal yang positif karena meningkatkan kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah. Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-342
Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -rata Pertumbuhan
1	**ASET**	**3,415,079,915,794.72**	**3,201,229,176,348.32**	**3,382,713,418,813.28**	**3,655,296,923,891.80**	**3,831,349,699,224.58**	3.07
1.1.	**ASET LANCAR**	**96,694,403,368.16**	**148,006,624,486.77**	**106,466,504,376.50**	**141,406,633,662.83**	**144,029,414,127.13**	14.92
1.1.1.	Kas	6,793,465,765.10	86,406,128,531.37	44,472,783,789.81	73,324,610,531.08	10,084,048,050.22	275.50
1.1.2.	Investasi Jangka pendek						
1.1.4.	Piutang	74,029,216,571.98	46,509,540,487.83	44,204,158,666.77	38,117,995,336.13	105,808,386,673.22	30.42
	Beban dibayar dimuka						
1.1.5.	Persediaan	15,871,721,031.08	15,090,955,467.57	17,789,561,919.92	29,964,027,795.62	28,136,979,403.69	18.83
1.2.	**ASET TETAP**	**3,176,731,879,838.54**	**2,917,086,181,334.45**	**3,100,581,239,674.95**	**3,265,941,590,205.71**	**3,483,353,597,320.65**	2.53
1.2.1.	Tanah	400,730,099,868.07	402,076,059,868.07	402,922,737,118.07	402,044,320,768.07	404,139,477,419.77	0.21
1.2.2.	Peralatan dan mesin	546,132,450,200.89	591,372,195,882.67	644,040,132,348.86	692,688,718,344.86	716,092,534,923.24	7.03
1.2.3.	Gedung dan bangunan	1,445,339,920,171.54	1,503,904,201,476.43	1,596,551,323,945.06	1,619,168,804,918.61	1,715,963,937,707.71	4.40
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	2,655,115,463,403.74	2,709,003,481,197.72	2,801,847,863,529.54	3,046,417,146,816.54	3,320,104,114,147.54	5.79
1.2.5.	Aset tetap lainnya	91,043,132,811.81	92,679,704,606.81	95,445,502,018.8	102,741,986,117.81	123,152,055,789.81	8.07
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	118,190,080,521.84	123,360,328,591.84	126,052,652,296.44	147,708,212,640.44	172,429,463,667.34	10.12
1.2.7	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	(2,079,819,267,139.35)	(2,505,309,790,289.09)	(2,566,278,971,581.83)	(2,744,827,599,400.62)	(2,968,527,986,334.76)	9.50
1.3.	**ASET LAINNYA**	**71,984,091,823.02**	**65,541,288,274.09**	**105,291,293,644.83**	**89,999,747,726.15**	**38,445,780,093.07**	-5.03
1.3.1.	Aset Tidak Berwujud	3,863,256,492.00	4,040,286,926.23	4,615,061,926.23	6,247,031,826.23	6,816,496,826.23	15.82
1.3.2	Aset Lain-lain	16,278,015,582.94	14,620,321,972.58	14,036,277,143.44	31,911,073,694.92	31,439,027,747.18	27.92
1.3.3	(Amortisasi)	(2,588,272,795.92)	(3,218,924,342.91)	(3,672,107,030.41)	(4,246,451,795.00)	(4,781,312,480.34)	16.67
1.3.4	Dana Transfer Defosit Fasility	70,391,900.00	70,773,199.00	41,470,724,229.00	56,088,094,000.00	4,971,568,000.00	14610.33
	Asset yang dibatasi pengggunaannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-441.37
1.3.5	Kemitraan dengan pihak ketiga	54,360,700,644.00	50,028,830,519.20	48,841,337,376.57	0.00	0.00	14.27
1,4	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**69,669,540,765.00**	**70,595,082,253.00**	**70,374,381,117.00**	**104,724,463,420.00**	**112,310,026,806.62**	2.53
1.4.1	Investasi Non Permanen						
	- Investasi Non Permanen - Dana bergulir						
	- Dana bergulir Diragukan Tertagih						

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -rata Pertumbuhan
1.4.2	Investasi Permanen						
	- Penyertaan modal Pemerintah daerah	69,669,540,765.00	70,595,082,253.00	70,374,381,117.0	104,724,463,420.00	112,310,026,806.62	2.53
	JUMLAH ASET DAERAH	**3,415,079,915,794.72**	**3,201,229,176,348.32**	**3,382,713,418,813.28**	**3,655,296,923,891.80**	**3,831,349,699,224.58**	3.07
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**92,333,113,481.54**	**33,422,423,945.83**	**16,845,922,897.16**	**14,682,505,218.67**	**137,754,475,439.98**	178.00
2.1.1.	Utang kepada pihak ketiga	62,166,604,723.23	93,466,199.00	0.00	0.00	34,205,710.90	-49.96
2.1.2.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	43,071,886.00	7,199,108.00	32,711,848.00	0.00		42.78
2.1.3.	Utang jangka pendek lainnya	7,860,757,566.00	20,026,520,000.00	8,335,520,000.00	0.00		
2.1.4.	Utang belanja	21,526,736,759.31	12,602,398,126.00	7,730,412,672.00	14,009,781,230.00	137,086,346,439.00	219.90
2.15.	Pendapatan diterima dimuka	735,942,547.00	692,840,512.83	747,278,377.16	672,723,988.67	633,923,290.08	-3.44
2,2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2.2.1	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	**92,333,113,481.54**	**33,422,423,945.83**	**16,845,922,897.16**	**14,682,505,218.67**	**137,754,475,439.98**	178.00
3	**EKUITAS**						
	Jumlah EQUITAS	**3,322,746,802,313.18**	**3,167,806,752,402.48**	**3,365,867,495,916.12**	**3,640,614,418,673.13**	**3,693,595,223,784.60**	2.80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,415,079,915,794.72**	**3,201,229,176,348.32**	**3,382,713,418,813.28**	**3,655,296,923,891.80**	**3,831,349,699,224.58**	3.07

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

1) Rasio likuiditas, yaitu abalisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya . Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.
2) Rasio aktivitas, adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. dan
3) Rasio solvabilitas (*leverage*), adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-343
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Rasio Likuiditas**					
1	Rasio lancar (current ratio)	104.72	442.84	632.00	963.10	104.56
2	Rasio cepat (quick ratio)	87.53	397.68	526.40	759.02	84.13
B.	**Rasio Solvabilitas**					
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0.03	0.027	0.005	0.004	0.04
4	Rasio hutang terhadap modal	0.028	0.011	0.005	0.004	0.04
C.	**Rasio Aktivitas**					
5	Rata-rata umur piutang (Hari)	21.03	13.23	10.50	8.14	14.69

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Merujuk pada tabel di atas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

- Rasio Lancar (*Current Ratio*) selama periode 2020-2023 menunjukkan trend yang semakin meningkat dari 104,72 persen tahun 2020 meningkat menjadi 963,10 persen tahun 2023. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 104,56. Namun demikian secara keseluruhan dari nilai rasio yang didapat maka disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai hutang jangka pendeknya sangat baik, yaitu kas, persediaan dan piutang dari Rp. 1 hutang jangka pendek dijamin dengan lebih dari Rp 1 asset lancar.
- Rasio Cepat (*Quick Ratio*) selama periode 2020-2023 menunjukkan trend yang semakin meningkat dari 130,00 persen tahun 2019 meningkat menjadi 759,02 persen tahun 2023. Nemun pada tahun 2024 menurun menjadi 84,13.Dari nilai rasio yang didapat maka disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai hutang jangka pendeknya sangat baik, pada tahun 2021 sampai 2023 yaitu kas,

dan piutang dari Rp. 1 hutang jangka pendek dijamin dengan Rp. 3,97 asset lancar dikurangi persediaan meningkat menjadi Rp. 7,59. Namun tahun 2020 dan 2024 kurang baik karena Rp. 1 hutang jangka pendek hanya dijamin dengan asset lancar dikurangi persedian dibawah Rp 1.

B. Rasio Solvabilitas

- Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 0.03 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.004 pada tahun 2023 Dari nilai rasio tersebut dapat diartikan solvabilitas Kabupaten Rokan Hulu semakin membaik. Artinya pada tahun 2019 hutang sebesar Rp. 0,026 dijamin dengan Rp. 1 rupiah asset, yang kemudian semakin membaik pada tahun 2023 dimana Rp. 0.004 hutang dijamin dengan Rp. 1 asset. Namun demikian pada tahun 2024 menurun menjadi 0.04. Dari nilai rasio tersebut dapat diartikan solvabilitas Kabupaten Rokan pada tahun 2024 semakin menurun.
- Rasio Hutang terhadap Modal (*Total Debt to Total Equity Ratio*) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 0.028 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.004 pada tahun 2023. Ini berarti bahwa pada tahun 2020 ada sebesar 0.028 hutang yang dijamin Rp.1 modal. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 0.004 hutang yang dijamin oleh Rp.1 modal. Namun pada tahun 2024 rasionya menurun menjadi 0.04. Hal ini menunjukkan rasio Hutang terhadap Modal pada tahun 2024 memburuk.

C. Rasio Aktivitas

- Rata-rata umur piutang Kabupaten Rokan Hulu semakin menurun dari 21,86 hari pada tahun 2020 dari 21,03 menurun menjadi 8,14 hari pada tahun 2023 Kondisi ini menunjukkan bahwa piutang pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada pihak ketiga dengan penagihan semakin cepat dari 21,86 hari menjadi 8,14 hari. Namun demikian pada tahun 2024 rasionya menurun menjadi 14,069. Artinya penagihan hutang semakin melambat

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.

A. Proporsi Realisasi Belanja

Proporsi alokasi Belanja Daerah mncerminkan kebijakan dalam belanja Pemerintah Daerah. Masing-masing jenis belanja mendapatkan alokasi dengan besaran tertentu, berdasarkan kebutuhan dan upaya untuk mencapai terget yang berhubungan dengan program dan kegiatan. Adapun proporsi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020–2024 secara nominal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-344
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	Realisasi									
	2020		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
BELANJA	**1,522,580,070,083.16**	**100**	**1,582,662,580,816.22**	**100**	**1,616,530,239,903.71**	**100**	**1,815,923,804,111.95**	**100**	**1,850,375,091,427.25**	**100**
BELANJA OPERASI	**1,068,159,342,078.04**	**70.15**	**1,103,934,919,327.94**	**69.75**	**1,108,927,587,073.14**	**68.60**	**1,194,920,933,139.95**	**65.80**	**1,281,465,187,832.90**	**69.25**
Belanja pegawai	610,324,628,055.00	40.08	624,343,459,048.00	39.45	596,925,726,030.00	36.93	603,842,271,673.00	33.25	736,418,524,678.00	39.80
Belanja Barang dan Jasa	384,615,008,023.04	25.26	416,351,185,158.94	26.31	461,026,180,627.70	28.52	532,662,237,285.95	29.33	472,103,116,391.90	25.51
Belanja hibah	72,417,206,000.00	4.76	62,067,469,621.00	3.92	49,448,489,040.44	3.06	57,407,324,181.00	3.16	72,868,346,763.00	3.94
Belanja bantuan sosial	802,500,000.00	0.05	1,172,805,500.00	0.07	1,527,191,375.00	0.09	1,009,100,000.00	0.06	75,200,000.00	0.00
BELANJA MODAL	**188,671,793,994.95**	**12.39**	**219,509,938,284.50**	**13.87**	**244,048,047,090.57**	**15.10**	**356,642,073,590.00**	**19.64**	**309,473,866,741.35**	**16.72**
Belanja Tanah	-		567,960,000.00	0.04	149,670,000.00	0.01	0	0.00		
Belanja Peralatan dan Mesin	24,188,157,955.00	1.59	43,033,342,612.00	2.72	66,006,237,949.50	4.08	50,670,206,258.00	2.79	26,809,356,967.35	1.45
Belanja Gedung dan Bangunan	46,056,567,390.00	3.02	76,633,481,391.67	4.84	89,832,903,897.07	5.56	64,342,140,106.00	3.54	96,874,483,346.00	5.24
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,767,237,951.95	6.55	99,011,712,320.83	6.26	85,881,648,940.00	5.31	235,512,051,262.00	12.97	179,392,804,580.00	9.69
Belanja Aset Tetap Lainnya	18,659,830,698.00	1.23	263,441,960.00	0.02	2,177,586,304.00	0.13	6,038,713,964.00	0.33	6,063,721,848.00	0.33
Belanja Aset Lainnya	-	0.00	0		0		78,962,000.00	0.00	333,500,000.00	0.02
BELANJA TAK TERDUGA	**21,495,223,088.00**	**1.41**	**20,362,686,574.78**	**1.29**	**26,553,965,877.00**	**1.64**	**9,153,526,845.00**	**0.50**	**783,993,000.00**	**0.04**
Belanja tak terduga	21,495,223,088.00	1.41	20,362,686,574.78	1.29	26,553,965,877.00	1.64	9,153,526,845.00	0.50	783,993,000.00	0.04
TRANSFER	**244,253,710,922.17**	**16.04**	**238,855,036,629.00**	**15.09**	**237,000,639,863.00**	**14.66**	**255,207,270,537.00**	**14.05**	**258,652,043,853.00**	**13.98**
Bagi hasil pajak ke desa	6,264,732,442.35	0.41	6,265,828,116.00	0.40	6,664,212,649.00	0.41	7,205,792,096.00	0.40	7,800,736,003.00	0.42
Belanja bantuan keuangan	**237,988,978,479.82**	**15.63**	**232,589,208,513.00**	**14.70**	**230,336,427,214.00**	**14.25**	**248,001,478,441.00**	**13.66**	**250,851,307,850.00**	**13.56**

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Data pada tabel diatas memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi selama kurun waktu 2020-2024 adalah yang tertinggi yakni berkisar antara 65,80 persen sampai dengan 70.15 persen. Dilihat dari kecenderungan proporsinya selama kurun waktu tersebut menunjukkan trend yang berfluktuasi, yang besarannya tergantung besaran belanja secara total. Terdapat kecenderungan jika total belanja daerah rendah maka proposri belanja operasi tinggi, namun jika total belanja meningkat maka proporsi belanja operasi akan turun. Hal ini dapat dipahami karena belanja pegawai merupakan belanja wajib dan mengikat merupakan bagian dari belanja operasi, yang besaran tidak dapat diturunkan, sehingga kalau jumlah total belanja turun sedangan jumlah belanja pegawai tidak berubah maka proporsi belanja ini akan meningkat.

Selanjutnya pada komponen belanja modal menunjukkan trend yang meningkat selama periode 2020-2023, dari 12,39 persen tahun 2020 meningkat menjadi 19,64 persen dan menurun proporsinya pada tahun 2024 menjadi 16,32 persen. Sedangkan belanja transfer menunjukkan trend yang semain menurun proporsinya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyediaan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah adalah rangka untuk menjamin terlaksananya secara baik pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-345
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)		
		(a)	(b)	(a)/(b)*100%
1	Tahun Anggaran 2020	610,324,628,055.00	1,522,580,070,083.16	40.08
2	Tahun Anggaran 2021	624,343,459,048.00	1.582.662.580.816,22	39.45
3	Tahun Anggaran 2022	596,925,726,030.00	1,616,530,239,903.71	36.93
4	Tahun Anggaran 2023	603,842,271,673.00	1,815,923,804,111.95	33.25
5	Tahun Anggaran 2024	736.418.524.669,00	1.850.223.040.875,25	39,80

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Mencermati data pada tabel diatas terihat bahwa secara selama periode 2020-2024 belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara nominal menunjukkan trend yang berfluktuatif. Namun demikian sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 jumlahnya secara nominal menunjukkan trens yang semakin meningkat. Selanjutnya dilihat dari proporsinya terhadap total

pengeluaran daerah untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 4 tahun yakni 2020-2023 menunjukkan trend yang menurun, dan sejak tahun 2023 sampai 2024 kembali meningkat. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2020-2024 belanja pemenuhan kebutuhan arapatur masih diatas 30 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pada tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belanja ini maksimal adalah 30 persen.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaki dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analsis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Silpa tahun lalu penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan maupun penjualan asset yang dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-346
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,521,847,391,961.56	1,662,295,506,060.49	1,577,337,109,474.15	1,845,813,897,701.22	1,787,799,323,235.49
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1,522,580,070,083.16	1,582,662,580,816.22	1,616,530,239,903.71	1,815,923,804,111.95	1,850,375,091,427.25
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.000,00
	Surplus/ Defisit riil	**(732,678,121.60)**	**79,632,925,244.27**	**(39,193,130,429.56)**	**29,890,093,589.27**	**(63,275,768,191.76)**

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025

Mencermati data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2020-2024 terdapat surplus anggaran pada tahun 2021 dan 2023. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut jumlah pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja. Kemudian pada tahun 2020, 2022 dan 2024 keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi defisit, yakni jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja. Untuk menutupi defesit ini digunakan SILPA pada tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Rokan Hulu 2020-2024 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-347
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**PENDAPATAN**	**1,521,847,391,961.56**	**1.662.295.506.060,49**	**1,577,337,109,474.15**	**1,845,813,897,701.22**	**1,787,799,323,235.49**
B	**BELANJA**	**1,522,580,070,083.16**	**1.582.662.580.816,22**	**1,616,530,239,903.71**	**1,815,923,804,111.95**	**1,850,375,091,427.25**
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.000,00
A-(B+C)	**DEFISIT RIIL**	**(732,678,121.60)**	**79,632,925,244.27**	**(39,193,130,429.56)**	**29,890,093,589.27**	**(63,275,768,191.76)**
Ditutup dengan penerimaan pembiayaan:						
	Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	7.482.961.500,70	6.750.283.379,10	83.633.202.371,37	44,433,516,941.81	73.325.610.532,08
	Pencairan Dana Cadangan					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		15.720.800,00		1,000,000.00	0.00
D	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**7.482.961.500,70**	**6.766.004.179,10**	**83.633.202.371,37**	**44,434,516,941.81**	**73.325.610.532,08**
D+ DEFISIT RIIL	**Sisa Lebih PembiayaanAnggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**6,750,283,379.10**	**86.398.929.423,37**	**44.440.071.941,81**	**73,324,610,531.08**	**9,990,587,554.57**

Sumber: Badan Penngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa defisit riil terjadi pada tahun 2020, 2022 dan 2024. Seluruhnya ditutupi dari silpa tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun anggaran 2021 dan 2023 realisasi anggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi surplus. Dengan demikian pada tahun 2021 dan 2023 realisasi pembiayaan tidak digunakan untuk menutup defisit. Adapun secara rinci komposisi penutup defisit rill seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-348
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu (%)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100		100	-	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	-		-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-		-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-		-	-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-		-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

2.2.3 Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2025 - 2030

Dalam keuangan daerah kerangka pendanaan adalah bagian dari dari kerangka keuangaan yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah. Maksud penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka memengah daerah lima tahun kedepan

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 - 2030

Proyeksi pendapatan daerah adalah memperkirakan besaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah selama 5 tahun kedepan. Proyeksi pendapatan daerah merupakan akan

menentukan kapasistas keuangan daerah dan sebagai dasar untuk membuat perkiraaan besaran belanja daeran untuk 5 tahun kedepannya.

Pada dasar proyeksi pendapatan dan belanja untuk lima tahun kedepan berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama lima tahun kebelakang. Disamping rata-rata pertumbuhan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi kedepan yang mempengaruhi pendapatan daerah. proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja, dan proteksi kemampuan kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 - 2030

Proyeksi terhadap pendapatan daerah dalam hal ini berpedoman pertumbuhan pendapatan dengan memprediksi kecenderungan ekonomi saat ini dan kedepannya. Perekonomian saat ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik seiring dengan membaiknya ekonomi global. Diperkirakan ekonomi global akan berkontribusi bagi meningkatnya aktivitas perekonomian nasional.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2026 hingga tahun 2030 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,33 persen atau naik dari Rp. 1,897 triliun tahun 2026 naik menjadi Rp. 2,000 triliun tahun 2030. Proporsi kenaikan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp. 0,226 triliun tahun 2026 menjadi 0,262 triliun tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,72 persen per tahun. Selanjutnya, proyeksi pendapatan transfer naik dari Rp. 1,671 triliun tahun 2026 menjadi 1,739 triliun tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,99 persen per tahun. Selanjutnya, proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah naik dari Rp. 85,695 miliar tahun 2026 menjadi 91,676 miliar tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70 persen per tahun. Proyeksi pendapatan ini diperoleh dari asumsi penerimaan pendapatan daerah untuk mendanai target pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu. Namun demikian, bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menjamin keberlanjutan pendanaan untuk mencapai target pembangunan secara optimal.

Berkenaan dengan itu upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetap terus dilakukan, melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi
   - Optimalisasi pemungutan pajak daerah seperti PBB-P2, pajak hotel, restoran, reklame, dan BPHTB melalui digitalisasi sistem pajak.
   - Pemutakhiran data wajib pajak serta integrasi data antar Perangkat Daerah untuk menghindari kebocoran pajak.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah
   - Inventarisasi dan evaluasi ulang aset daerah untuk dimanfaatkan secara produktif (disewakan, dikerjasamakan, dan diinvestasikan).
   - Revitalisasi BUMD agar lebih berorientasi profit.
3. Perbaikan Manajemen PAD
   - Penguatan kapasitas BPKAD dan Bapenda dalam perencanaan, pemungutan, dan pelaporan pendapatan.
   - Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak/retribusi untuk meningkatkan kedisiplinan fiskal.

Selain itu melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan melakukan Penguatan dan Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan seperti wisata alam dan buatan.

Selanjutnya untuk menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan, strategi optimalisasi dilakukan melalui tiga arah utama antara lain:

a. Strategi Kebijakan Fiskal Daerah
   - Menyusun kebijakan fiskal yang berimbang antara peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja daerah.
   - Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah.

b. Strategi Kelembagaan dan Teknologi
   - Membangun sistem informasi pajak daerah terintegrasi (e-PAD) untuk seluruh jenis pajak dan retribusi.

- Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pendapatan melalui pelatihan, supervisi, dan reward system.
- Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi potensi PAD dan menutup celah kebocoran.

c. Strategi Ekonomi Produktif dan Investasi

- Meningkatkan investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap PAD.
- Mendorong pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi lokal seperti jalan usaha tani, pasar rakyat, dan sentra UMKM.
- Pengembangan kawasan ekonomi potensial, seperti kawasan industri kecil, wisata, dan agroforestri.

Sehubungan dengan itu komponen Pendapatan Asli Daerah diproyeksi akan dapat meningkat. Hal ini dikarena masih terdapat potensi pendapatan asli daerah yang dapat ditingkatkan seperti pajak dn retibusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu komponen pendapatan dari transfer dana perimbangan juga diperkirakan terus meningkat. Pendapatan transfer antar daerah akan menurun karena pada tahun 2025 terdapat 2 jenis pajak yaitu Pajak Kendaparan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya dibagi hasilkan, pada tahun 2025 akan menjadi opsen pajak Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2026 dan seterusnya, transfer antar daerah diproyeksi akan meningkat. Namun demikian menurunnya pendapatan transfer antar daerah ini tidak mengurangi pendapatan secara keseluruhan, karena hanya perpindah sup komponen saja dari pendapatan transfer berpindah ke pendapatan asli daerah sub komponen pajak daerah. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan 2025-2030 dapat dilihat pada tabel II-374.

2. Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2025 - 2030

Proyeksi belanja berdasarkan pada pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja daerah mengikuti perkiraan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Belanja Daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan akan meningkat, karena meningkatkannya pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Khusus pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI),

untuk pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2026 dan pada tahun 2027 untuk pengadaan peralatan medis dan penunjang. Dengan adanya pinjaman tersebut, maka komponen belanja daerah akan meningkat pada tahun 2026 dan 2027 dan selanjutnya pada tahun 2028 menurun, dan meningkat lagi pada tahun 2029 dan 2030. Selanjutnya dilihat dari proporsi belanja diproyeksikan bahwa komponen belanja pegawai belum dapat memenuhi mandatory spending maksimal 30% dari total belanja sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini disebabkan karena bertambahnya beban belanja pegawai sebagai dampak dari beralihnya status Pegawai Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan besaran perkirakan belanja tersebut pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2030 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada Tabel II-374.

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada dasar adalah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu. Pada Komponen penerimaaan pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2026 dan 2027 direncanakan akan melakukan pinjaman ke PT. SMI yang akan digunakan untuk belanja pembangunnan gedung dan peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah. Sementara kompornen pengeluaran pembiayaan pada tahun 2027 sampai 2030 direncanakan akan dilakukan pembayaran hutang daerah. Disamping pembayaran hutang daerah pada komponen pengeluaran pembiayaan ini juga direncanakan penyertaan modal kepada BUMD pada tahun 2026, 2028 dan 2030. Lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-349

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 s.d 2030

Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1,787,833,016,749.49	1,884,559,561,532.56	1,897,692,681,444.41	1,920,404,265,245.97	1,946,465,442,401.00	1,976,873,178,993.36	2,000,733,082,132.89
PENDAPATAN ASLI DAERAH	161,501,247,627.49	219,924,604,824.68	226,322,504,169.57	233,820,291,495.72	242,793,476,609.05	253,159,702,822.65	261,937,471,981.49
Pajak daerah	57,924,527,651.00	110,305,359,281.93	116,361,791,735.23	122,179,881,321.99	128,288,875,388.09	135,703,319,157.49	141,438,485,115.37
Retribusi daerah	5,772,558,665.00	6,197,711,477.60	6,224,107,487.70	6,307,830,712.33	6,497,065,633.70	6,691,977,602.71	6,892,736,930.79
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16,364,094,205.00	17,910,471,447.52	18,041,413,861.01	18,943,484,554.06	19,890,658,781.77	20,885,191,720.85	21,929,451,306.90
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81,440,067,106.49	85,511,062,617.64	85,695,191,085.63	86,389,094,907.34	88,116,876,805.49	89,879,214,341.60	91,676,798,628.43
PENDAPATAN TRANSFER	1,626,331,769,122.00	1,664,634,956,707.88	1,671,370,177,274.84	1,686,583,973,750.25	1,703,671,965,791.95	1,723,713,476,170.71	1,738,795,610,151.40
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,521,657,333,523.00	1,583,968,427,234.73	1,587,283,136,795.21	1,594,434,127,572.66	1,602,670,328,264.10	1,612,993,027,820.94	1,617,403,537,544.08
Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	1,363,762,567,146.00	1,430,546,687,458.45	1,433,881,492,662.06	1,439,024,860,421.65	1,445,225,331,372.98	1,453,483,800,973.34	1,456,801,181,520.61
Dana Bagi hasil pajak	99,172,798,000.00	105,642,692,639.25	106,179,379,039.20	107,242,966,619.98	108,347,825,952.38	111,494,782,471.43	112,684,678,120.86
Dana bagi hasil bukan pajak	214,072,002,000.00	224,684,245,769.07	226,218,073,820.05	227,299,164,189.15	228,385,660,010.10	229,477,588,310.15	230,574,976,251.70
Dana alokasi umum	758,207,599,872.00	793,418,841,457.23	794,243,463,101.89	792,765,950,028.09	793,291,481,928.15	794,820,064,892.00	795,351,705,021.79
Dana alokasi khusus	292,310,167,274.00	306,800,907,592.90	307,240,576,700.92	311,716,779,584.43	315,200,363,482.35	317,691,365,299.76	318,189,822,126.26
Trasfer pemerintahan pusat lainnya	157,894,766,377.00	153,421,739,776.28	153,401,644,133.15	155,409,267,151.01	157,444,996,891.12	159,509,226,847.60	160,602,356,023.47
Dana Insentif Daerah	18,425,595,000.00	9,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dana Penyesuaian	139,469,171,377.00	144,421,739,776.28	143,401,644,133.15	145,409,267,151.01	147,444,996,891.12	149,509,226,847.60	150,602,356,023.47
Transfer pemerintah provinsi	104,674,435,599.00	80,666,529,473.15	84,087,040,479.63	92,149,846,177.59	101,001,637,527.85	110,720,448,349.77	121,392,072,607.32
Pendapatan bagi hasil pajak	98,399,635,599.00	74,077,989,473.15	77,169,073,479.63	84,885,980,827.59	93,374,578,910.35	102,712,036,801.39	112,983,240,481.53
Bantuan Keuangan	6,274,800,000.00	6,588,540,000.00	6,917,967,000.00	7,263,865,350.00	7,627,058,617.50	8,008,411,548.38	8,408,832,125.79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BELANJA DAN TRASFER	1,850,379,767,711.25	1,894,648,684,257.88	1,994,359,348,111.41	1,957,737,598,578.97	1,872,465,442,401.00	1,912,873,178,993.36	1,974,733,082,132.89
BELANJA	1,591,727,723,858.25	1,629,587,759,324.88	1,726,589,308,409.05	1,703,230,475,376.77	1,596,399,071,477.47	1,633,984,048,734.13	1,695,843,951,873.66
BELANJA OPERASI	1,281,469,864,116.90	1,289,871,856,563.16	1,270,894,110,100.22	1,275,542,850,164.64	1,206,156,954,572.38	1,218,739,300,628.86	1,266,004,048,437.79
Belanja pegawai	736,418,524,678.00	740,100,617,301.39	742,801,120,387.90	745,290,942,194.11	749,257,726,619.79	752,014,015,252.89	754,789,085,329.15
Belanja Bunga	0	-	3,068,148,148.00	8,634,370,370.00	6,666,666,667.00	2,752,000,000.00	82,666,667.00
Belanja Barang dan Jasa	472,107,792,675.90	476,824,147,555.82	450,592,389,031.38	440,426,837,262.26	434,288,321,515.03	440,676,392,407.47	466,607,135,842.15
Belanja hibah	72,868,346,763.00	73,597,030,230.63	74,333,000,532.94	75,076,330,538.27	15,812,714,500.56	23,145,638,908.00	44,351,218,429.91
Belanja bantuan sosial	75,200,000.00	86,480,000.00	99,452,000.00	114,369,800.00	131,525,270.00	151,254,060.50	173,942,169.58
BELANJA MODAL	309,473,866,741.35	330,715,902,761.72	446,695,198,308.83	418,687,625,212.13	381,242,116,905.09	406,244,748,105.27	420,839,903,435.87
Belanja Tanah							
Belanja Peralatan dan Mesin	26,809,356,967.35	32,171,228,360.82	38,605,474,032.98	95,799,354,769.28	46,712,623,579.91	51,383,885,937.90	56,522,274,531.69
Belanja Gedung dan Bangunan	96,874,483,346.00	101,718,207,513.30	213,470,784,555.64	112,144,323,783.41	113,751,539,972.58	122,639,116,971.21	126,821,072,819.77
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179,392,804,580.00	190,156,372,854.80	187,281,836,284.13	1922,673,132,879.75	211,900,058,194.94	222,456,060,522.74	226,754,302,943.65

Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Aset Tetap Lainnya	6,063,721,848.00	6,670,094,032.80	7,337,103,436.08	8,070,813,779.69	8,877,895,157.66	9,765,684,673.42	10,742,253,140.76
Belanja Aset Lainnya	333,500,000.00						
BELANJA TAK TERDUGA	783,993,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
Belanja Tak Terduga	783,993,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
BELANJA TRANSFER	258,652,043,853.00	265,060,924,933.00	267,770,039,702.36	270,507,123,202.20	273,272,468,283.58	276,066,370,923.53	278,889,130,259.23
Belanja Bagi Hasil	7,800,736,003.00	11,701,104,004.50	11,876,620,564.57	12,054,769,873.04	12,235,591,421.13	12,419,125,292.45	12,605,412,171.84
Bantuan Keuangan	250,851,307,850.00	253,359,820,928.50	255,893,419,137.79	258,452,353,329.16	261,036,876,862.45	263,647,245,631.08	266,283,718,087.39
SURPLUS/DEFISIT	-62,546,750,961.76	-10,089,122,725.32	-96,666,666,667.00	**-37,333,333,333**	74,000,000,000.00	64,000,000,000.00	26,000,000,000.00
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**73,335,873,687.08**	**10,089,122,725.32**	**106,666,666,667.00**	**53,333,333,333**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	73,334,873,687.08	10,089,122,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pencairan Dana Cadangan				-	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah			106,666,666,667.00	53,333,333,333	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,000,000.00	-	-		-		
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-		

Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-	-	-	-	-		
PENGELUARAN	**700,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000,000.00**	**16,000,000,000.**	**74,000,000,000**	**64,000,000,000**	**26,000,000,000**
Pembentukan Dana Cadangan				-	-		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**700,000,000.00**		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-		
ADB	-	-	-	-	-		
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga				16,000,000,000	64,000,000,000	64,000,000,000	16,000,000,000
PEMBIAYAAN NETTO	**72,635,873,687.08**	**10,089,122,725.32**	**96,666,666,667**	**37,333,333,333**	**- 74,000,000,000**	**- 64,000,000,000**	**- 26,000,000,000**

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dan Data diolah

2.2.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang 2025-2030, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah.

Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel II-350
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	**Pendapatan**	1,884,559,561,532.56	1,897,692,681,444.41	1,920,404,265,245.97	1,946,465,442,401.00	1,976,873,178,993.36	2,000,733,082,132.89
B	**Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)**						
C	**Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran**	10,089,122,725.32					
D	**Pinjaman Daerah**		106,666,666,667.00	53,333,333,333			
D= A-(B+C)	**Total Penerimaan**	1,894,648,684,257.88	1,991,226,228,199.56	1,951,026,014,777.41	1,946,465,442,401.00	1,976,873,178,993.36	2,000,733,082,132.89
E	**Dikurangi**	**1,087,845,052,465.02**	**1,107,071,760,771.19**	**1,124,623,136,104.58**	**1,054,141,101,340.94**	**1,127,129,279,144.92**	**1,113,286,042,854.87**
	Belanja Pegawai	740,100,617,301.39	742,801,120,387.90	745,290,942,194.11	749,257,726,619.79	752,014,015,252.89	754,789,085,329.15
	Belanja Bunga		3,068,148,148.00	8,634,370,370.00	6,666,666,667.00	2,752,000,000.00	82,666,667.00
	Belanja Hibah	73,597,030,230.63	74,333,000,532.94	75,076,330,538.27	15,812,714,500.56	23,145,638,908.00	44,351,218,429.91
	Belanja Bantuan Sosial	86,480,000.00	99,452,000.00	114,369,800.00	131,525,270.00	151,254,060.50	173,942,169.58
	Belanja Tak Terduga	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
	Belanja Transfer	265,060,924,933.00	267,770,039,702.35	270,507,123,202.20	273,272,468,283.59	276,066,370,923.53	278,889,130,259.23
	Pengeluaran Pembiayaan	**0.00**	**10,000,000,000.00**	**16,000,000,000.**	**74,000,000,000-**	**64,000,000,000**	**26,000,000,000**
G= D-(E+F)	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	806,803,631,792.86	884,154,467,428.37	826,402,878,672.83	892,324,341,060.06	849,743,899,848.44	887,447,039,278.02

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dan Data diolah

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah bupati terpilih resmi dilantik.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I,

Dialokasikan untuk mendanai membiaya belanja langsung wajib mengikat serta pemenuhan penerapan urusan wajib pelayanan dasar, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori diantara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% , anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16 persen, serta belanja Infrastruktur 25% dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu

Prioritas II,

Dialokasikan untuk pendanaan:

- Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati periode 2025-2029, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III,

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Tabel II-351
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Prioritas I**						
	Pendidikan	378,929,736,851.58	385,021,064,956.32	389,750,274,107.08	394,895,071,188.57	402,147,629,106.35	407,436,622,469.54
	Kesehatan	80,754,005,031.75	83,010,171,215.84	84,876,260,480.08	86,700,092,126.89	89,692,114,051.27	91,697,973,615.98
	Infrastruktur	267,863,099,968.00	269,005,657,760.44	270,160,228,990.29	271,327,020,209.31	272,506,241,972.66	275,448,108,918.40
2	**Prioritas II**	47,554,073,964.92	56,151,212,045.83	62,385,504,734.02	68,464,497,858.20	79,575,800,709.78	85,486,920,594.63
3	**Prioritas III**	31,702,715,976.61	37,434,141,363.89	41,590,336,489.35	45,642,998,572.13	53,050,533,806.52	56,991,280,396.42

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dan Data diolah

2.2.3.4 Pembiayaan Alternatif

Pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan nasional. Namun demikian, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali menjadi kendala utama dalam merealisasikan berbagai program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakatsatu strategi yang semakin relevan dan dibutuhkan adalah pembiayaan alternatif pembangunan daerah, yaitu pendekatan pembiayaan non-tradisional yang melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah, seperti sektor swasta, masyarakat, lembaga donor.

Beberapa bentuk pembiayaan alternatif yang potensial diterapkan antara lain:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU / PPP)
   Menggandeng swasta untuk mendanai, membangun, mengoperasikan dan/atau memelihara proyek infrastruktur publik. Proyek KPBU dapat diterapkan untuk sektor transportasi, energi, air minum, pengolahan limbah, rumah sakit, dan lainnya.
2. Pemanfaatan Dana CSR dan ZISWAF
   Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan filantropi Islam (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) dapat digunakan untuk proyek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Internasional
   Hibah atau pinjaman lunak dari lembaga seperti Bank Dunia, ADB, JICA, USAID, dan lainnya untuk proyek pembangunan berkelanjutan.
4. *Green Financing* / Pembiayaan Hijau
   Pendanaan untuk proyek ramah lingkungan melalui skema green bonds, sustainability-linked loans, atau pembiayaan karbon.

Pembiayaan alternatif bukanlah sekadar solusi teknis untuk mengatasi defisit anggaran, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pembangunan daerah yang lebih partisipatif, inovatif, dan inklusif. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang mendukung pengembangan pembiayaan alternatif, termasuk penguatan regulasi, penyusunan pipeline proyek yang bankable, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

Telaah permasalahan pembangunan daerah dan perumusan isu strategis daerah menjadi dasar untuk penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih. Rumusan visi dan misi selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa waktu lima tahun yang akan datang. Isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil telaah dari permasalahan pembangunan daerah yang disarikan dari analisis data existing condition hasil-hasil pembangunan daerah, telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu strategis pembangunan daerah menjadi bahagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi pertimbangan

utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas pembangunan daerah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan dimana masih terdapat sekolah yang sarana prasarananya belum terpenuhi disisi lain masih terdapat masyarakat yang berdomisili di daerah sulit dan terpencil
2) Rendahnya nilai rapor pendidikan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
3) Belum terpenuhinya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sementara masih banyak tenaga pendidik yang berstatus belum ASN dan pengangkatan tenaga pendidik menjadi ASN masih terbatas
4) Belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5) Masih banyaknya tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan umum daripada berlatar belakang pendidikan keguruan dan masih berpendidikan dibawah S.1/ D.IV
6) Masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat diartikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu Masih banyaknya penduduk yang masih berpendidikan SD/MI tidak mengikuti ujian persamaan dan belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

B. Kesehatan

1) Target Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) belum tercapai
2) Masih banyak masyarakat yang menjadi penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2024
3) Masih terdapat balita usia 1 tahun yang menjadi penderita campak
4) Masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani
5) Mutu dan akses layanan masyarakat ke fasilitas kesehatan masih belum optimal karena sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang serta jarak dan akses ke fasilitas kesehatan ada yang masih sulit, bahkan masyarakat di beberapa daerah terkendala karena tidak adanya transportasi umum menuju fasilitas kesehatan terdekat
6) *Prevalensi stunting* di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong tinggi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi, pola asuh balita yang kurang tepat, disamping itu kualitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta intervensi yang dilakukan kurang tepat sasaran

7) Ketersedian SDM layanan kesehatan di Puskemas dan Rumah Sakit belum terpenuhi/merata, dan kecenderungan yang terjadi penumpukan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah perkotaan
8) Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan karena kurangnya kesadaran pada ibu hamil tentang pentingnya memeriksakan diri ke puskesmas dan cakupan K6, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan nifas
9) Masih belum optimalnya fungsi dan peran posyandu karena kurangnya kader yang terlatih dan sarana dan prasarana belum memadai

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Kurang optimalnya prasarana infrastruktur air minum sehingga belum maksimal dalam menjangkau daerah-daerah rawan air yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan. Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum masih sebesar 80,64 persen pada tahun 2024 sementara SPAM jaringan perpipaan ataupun non perpipaan air minum yang dibangun belum beroperasi maksimal karena berbagai kendala. Sementara itu pemanfaatan SPAM IKK Kecamatan masih berada pada *idle capacity* yang tinggi
2) Pembangunan SPAL-S akses dasar belum mencapai target nasional dikarenakan IPLT yang sudah dibangun belum bisa beroperasi karena masih membutuhkan payung hukum untuk pembentukan struktur kelembagaan operasional IPLT. Sementara pembangunan SPALD-T akses aman belum mencapai target dikarenakan pembangunan SPALD-T terpusat kurang ideal karena jarak antar rumah yang berjauhan sehingga membutuhkan dana yang besar
3) Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses sanitasi layak dimana pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baru sebesar 90,64 persen
4) Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Rokan Hulu masih rendah, terakhir tahun 2024 sebesar 24,02 persen yang disebabkan jalan yang sudah ditangani tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya rusak kembali karena banjir dan kendaraan yang melebihi tonase melintas pada ruas jalan yang ada
5) Kinerja sistem drainase perkotaan masih rendah dikarenakan pembangunan perlengkapan jalan belum terpenuhi dari panjang jalan yang dibangun
6) Belum optimalnya bangunan Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Rokan Hulu dimana panjang saluran irigasi dalam kondisi rusak ringan 2.470,87 meter dan rusak berat 9.097,38 meter yang memerlukan rehabilitasi kawasan irigasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi padi

7) Wilayah sungai di Kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi kritis, seperti terjadinya longsor/erosi, banjir dan pendangkalan sungai pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
8) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan selama 4 tahun mulai dari tahun 2020-2040, sejalan dengan adanya revisi penyusunan perubahan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau yang masih berjalan maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan evaluasi serta sinkronisasi
9) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang dan pemenuhan integrasi layanan informasi geospasial yang berakibat terjadinya penyimpangan pemanfaatan pola ruang. Penyimpangan pemanfaatan pola ruang juga terjadi karena belum adanya peraturan kepala daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/ Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada seluruh ibukota kecamatan sebagai turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040. Disamping itu belum adanya sistem aplikasi Tata Ruang berbasis spasial yang terintegrasi di daerah sebagai dukungan dalam Jaringan Informasi Spasial Daerah guna pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan Tata Ruang
10) Belum optimalnya pembangunan fasilitas umum dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelayanan publik

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1) Masih banyak terdapat pemukiman kumuh di Rokan Hulu
2) Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni baik di permukiman kumuh maupun diluar permukiman kumuh
3) Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum belum memadai

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Masih kurangnya kelembagaan dalam penanggulangan Bencana
2) Penanganan pencegahan bencana (mitigasi) yang masih rendah
3) Belum optimalnya penanganan perkara terhadap pelanggaran Perda/Perkada karena terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani pelanggaran Perda/Perkada sampai tingkat pengadilan
4) Dalam pencegahan dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, standar sarana dan prasarana trantibum belum terpenuhi secara layak
5) Masih rendahnya Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah (IKD) dalam pengelolaan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat pada efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana yang masih kurang karena belum optimalnya penyelenggaraan penanganan dalam hal penanggulangan bencana. Dilain pihak dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah belum tersedia, keterlibatan instansi terkait dalam penanganan bencana dan koordinasi antar lintas sektor yang belum maksimal

6) Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana. Saat ini aparatur pelaksana penanggulangan bencana masih banyak yang belum memiliki sertifikasi atas keterampilan dan keahlian dalam penanggulangan bencana
7) Masih tingginya resiko bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena kondisi geografi dan klimatologi daerah yang berdampak pada terjadinya resiko banjir, sementara kondisi kawasan yang berlahan gambut beresiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
8) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup seperti masih banyak masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuang sampah ke sungai serta pembukaan hutan secara liar
9) Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB yang diterbitkan tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu berada pada kelas resiko tinggi dengan nilai indeks resiko bencana sebesar 155,20
10) Rendahnya tingkat waktu tanggap daerah diluar wilayah layanan manajemen kebakaran karena luasnya wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang seharusnya memiliki beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada 16 kecamatan yang ada.

F. Sosial
1) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas di luar panti dimana masih ada anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas diluar panti yang belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
2) Penerima bantuan sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena pengusulan penerima bansos kurang objektif dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak di update sesuai kondisi di lapangan
3) Masih tingginya angka kemiskinan yang masih belum terpenuhi kebutuhan dasarnya
4) Masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang belum direlokasi
5) Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Rokan Hulu khususnya keluarga fakir miskin dan penyandang disabilitas karena rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja
1) Lapangan kerja yang tersedia belum terbuka optimal disamping itu gaji yang ada tergolong rendah, disisi lain besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rokan Hulu tahun 2023 adalah yang keempat terendah di Provinsi Riau
2) Angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi lulusan SMK dan SMA yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Skill/ kemampuan lulusan SMK dan SMA kurang bisa bersaing di dunia

kerja. Pekerjaan yang dilakukan cenderung tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup

3) Kurangnya akses informasi pasar kerja (job fair) untuk mengetahui peluang kerja
4) Angkatan kerja yang mau menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha minim disamping itu akses pelatihan kewirausahaan juga masih kurang.
5) Masih adanya ketimpangan gender dalam penyediaan lapangan pekerjaan hal ini dapat dilihat dari sektor pendapatan Kabupaten Rokan Hulu yang didominasi perkebunan kelapa sawit dimana lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki
6) Kualitas dan keterlibatan peran perempuan dalam pasar tenaga kerja belum memadai. Dimana keterlibatan pekerja perempuan lebih banyak pada sektor yang lebih ringan yang membuat pendapatan/upah pekerja perempuan menjadi lebih rendah

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat
2) Pengarusutamaan gender belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai stakeholder sehingga upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender masih belum maksimal
3) Belum maksimalnya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah
4) Keterwakilan perempuan di legislatif belum memenuhi kuota meskipun sudah ada regulasi untuk afirmasinya disebabkan kurangnya elektabilitas calon legislatif perempuan
5) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pada umumnya disebabkan masalah moralitas dan pengaruh media sosial
6) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak di bawah umur, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi, masalah moralitas dan juga pengaruh media sosial dan psikososial
7) Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak

C. Pangan

1) Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat
2) Masih banyak sembako yang disuplai dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam daerah, sementara produksi dari dalam

daerah masih rendah yang berakibat penentuan basis harga cenderung ditentukan oleh pensuplai dari luar daerah

3) Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan produk pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok selain beras
4) Masih ada desa rentan rawan pangan di daerah karena sarana dan prasarana pangan di desa masih sedikit

D. Pertanahan

1) Masih ada aset tanah Pemerintah Daerah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

E. Lingkungan Hidup

1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan lingkungan dan pengawasan lingkungan.
2) Masih adanya permasalahan lingkungan yang perlu ditangani, yakni terkait pembuangan limbah industri ke aliran sungai sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan lingkungan hidup terutama; sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah
4) Terbatasnya sarana dan prasarana (alat uji) laboratorium lingkungan hidup daerah.
5) Rendahnya nilai peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2024 adalah 35,49 point disebabkan penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan akibat adanya alih fungsi hutan dan lahan
6) Persentase timbunan sampah yang tertangani pada tahun 2024 masih sebesar 23,32 persen, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana penanganan sampah. Disisi lain persentase cakupan area pelayanan persampahan masih rendah yaitu sebesar 3,73 persen dan hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten.
7) Belum terpenuhinya persentase Ruang Terbuka Hijau secara minimal yakni sebesar 30 persen dari kawasan perkotaan. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Rokan Hulu terdata hanya sebesar 118,89 ha atau sebesar 0,76 persen sedangkan luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 15.668 ha sesuai RTRW Kabupaten Rokan Hulu, seharusnya luasan minimal RTH yang ada sebesar 4.700 ha
8) Masih minimnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang seharusnya dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini hanya 2 (dua) Perda yang baru ditetapkan yaitu Perda Pengelolaan Persampahan dan Perda Pengelolaan Hutan Taman Kota

9) Belum optimalnya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) disebabkan belum tersusunnya dokumen teknis terkait, minimnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan TAHURA, serta masih terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan TAHURA

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran.
2) Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 masih sebesar 0,58 persen, hal ini menjadi masalah karena belum terdata secara optimal disebabkan masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah walaupun secara hukum agama sudah menikah, selain itu juga dikarenakan belum terdatanya seluruh penduduk yang memiliki akta nikah tetapi belum melaporkan/mengupdate Nomor Akte Nikah nya kedalam Server Adminduk Kabupaten Rokan Hulu
3) Belum optimalnya akses dan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di UPTD Kecamatan dikarenakan terbatasnya akses aplikasi SIAK di UPTD Kecamatan, sumber daya manusia pengelola aplikasi SIAK di UPTD Kecamatan masih kurang serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan SIAK di UPTD Kecamatan masih minim

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Belum optimalnya peran BUMDesa sebagai pilar ekonomi di desa
2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara umum masih belum optimal
3) Belum optimalnya sinergitas lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat dengan pemerintah desa, yang mana hal ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat desa oleh pemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan serta kurangnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat desa itu sendiri
4) Kantor Desa masih banyak yang belum memadai dan merupakan bekas kantor UPT Transmigrasi yang ada di desa

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun
2) Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (*unmeet need*).
3) Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
4) Belum berkembangnya rumah data kependudukan di kampung KB disebabkan kurangnya kemandirian dan partipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program rumah data kependudukan di kampung KB

5) Masih kurangnya pemanfaatan data dalam intervensi program dan kegiatan akibatnya pelayanan KB belum maksimal
6) Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan atau penyiapan kehidupan berkeluarga, akibatnya angka pernikahan dini masih tinggi dan program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) belum menjangkau sasaran remaja secara luas

I. Perhubungan
1) Masih kurangnya SDM dalam pengendalian dan pengawasan urusan perhubungan.
2) Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.
3) Masih perlu dilakukan upaya yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan berat, serta penerapan teknologi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL)
4) Kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dapat terlihat dari persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang melakukan uji KIR pada tahun 2024 sebesar 35,94 persen
5) Belum optimalnya sarana dan prasarana Bandar Udara Tuanku Tambusai
6) Terbatasnya infrastruktur pendukung transportasi seperti terminal, halte dan pendukung lainnya
7) Belum optimalnya transportasi antar moda yang melayani pergerakan orang dan barang antar desa dalam kabupaten dan antar kabupaten dengan kabupaten dan/atau provinsi lainnya karena tingginya ketergantungan pada transportasi pribadi dimana masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil
8) Belum tersedianya terminal penumpang dan barang sebagai sarana naik turun penumpang dan bongkar muat barang untuk mengurangi angkutan barang masuk kedalam kota dikarenakan kurangnya pembangunan infrastruktur terminal barang di Kabupaten Rokan Hulu

J. Komunikasi dan Informatika
1) Masih terdapat 23 desa yang low signal dan blankspot dari 139 desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dikarenakan kurangnya infrastruktur telekomunikasi seperti menara di daerah yang lemah signal tersebut. Disisi lain terdapat sebaran penduduk pada beberapa wilayah yang tidak memenuhi syarat untuk berdirinya Stasiun Pemancar-Penerima Dasar/ *Base Transceiver Station* (BTS) termasuk topografi yang sulit dan biaya infrastruktur yang tinggi serta keterbatasan akses jaringan listrik atau backhaul
2) Masih perlunya penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3) Terbatasnya sumber daya manusia yang mengampu TIK di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis digital yakni disebabkan Infrastruktur TIK yang terbatas, kurangnya infrastruktur TIK yang memadai yang dapat menghambat efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik digital
5) Belum sepenuhnya terlaksana konsep keterpaduan layanan sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disebabkan belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan layanan publik berbasis elektronik

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1) Rendahnya Usaha yang memiliki perizinan, yang mendaftar pada IUMK maupun Non IUMK
2) Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebanyak 212 koperasi, tidak signifikan dengan peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT karena kurangnya pengawas dan anggota koperasi yang mewajibkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
3) Batasan kewenangan pembinaan dan pengawasan koperasi antara kabupaten/kota dan provinsi yang belum jelas dimana ada beberapa koperasi yang operasional kerjanya di wilayah kabupaten yang kewenangan pembinaan berada pada tingkat provinsi/pusat. Namun pada kenyataannya, pembinaan dan pengawasan koperasi tersebut tetap berada di kabupaten, disisi lain personil untuk melakukan pengawasan masih terbatas
4) Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya izin usaha yang dimiliki baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Halal atau izin lainnya yang telah diterbitkan
5) Masih terbatasnya akses pelaku UMKM terkait ketersediaan bahan baku, permodalan usaha dan pemasaran produk dikarenakan harga produk UMKM masih relatif tinggi serta belum adanya kerjasama antara pelaku UMKM dengan pemasok bahan baku produknya.

L. Pemuda dan Olahraga
1) Masih perlu pendampingan secara konsisten untuk atlet berprestasi di Rokan Hulu guna mengembangan bibit unggul
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan, kepemudaan dan kepramukaan sebagai tempat generasi muda beraktifitas
3) Prestasi olahraga pada tingkat jenjang pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu masih kurang karena belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu

M. Statistik
1) Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi

2) Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral secara periodik dan berkelanjutan karena terbatasnya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, ketidaktersediaan data yang akurat serta belum terintegrasinya sistem pendataan dan informasi dan lemahnya kerjasama antar perangkat daerah dalam mendukung tersedianya data yang lengkap dan terintegrasi
3) Belum terlaksananya Satu Data Indonesia Kabupaten Rokan Hulu secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data

N. Persandian

1) Belum optimalnya penerapan dan standarisasi keamanan siber (informasi dan persandian) yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi dan insiden siber

O. Kebudayaan

1) Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk tidak sebanding dengan jumlah grup kesenian penduduk yang semakin bertambah
2) Kurangnya minat generasi muda dalam melestarikan kebudayaan tradisional
3) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan tenaga ahli dibidang kebudayaan yang masih kurang disebabkan belum adanya pelatihan sertifikasi tenaga ahli dibidang kebudayaan yang intensif
4) Kurangnya pendokumentasian terkait kebudayaan Rokan Hulu. Hal ini ditunjukkan oleh alat bukti artefak yang tidak tersimpan dan tidak terdokumentasikan dengan baik.
5) Menurunnya jumlah apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki gedung kesenian daerah, disamping itu saat ini sulit untuk mencari sanggar seni yang ingin tampil dalam sebuah pementasan dan kurangnya kehadiran dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penampilan seni dan budaya
6) Berkurangnya regenerasi pelaku budaya. Kurangnya minat masyarakat dan generasi muda untuk mengenal dan belajar tentang budaya
7) Pengesahan hak terhadap produk seni dan budaya masih kurang. Belum adanya produk seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu yang dipatenkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
8) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9) Kurangnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki museum, disamping itu pembugaran terhadap cagar budaya di Kabupaten Rokan Hulu masih belum optimal

P. Perpustakaan

1) Masih kurangnya minat baca masyarakat di Rokan Hulu untuk ke Perpustakaan

2) Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan banyaknya tersedia sarana membaca secara online, oleh karena itu perlu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara offline dan online
3) Belum memadainya koleksi perpustakaan dan sistem layanan perpustakaan digital berbasis teknologi, inklusi sosial dan gender
4) Masih minimnya perpustakaan sekolah yang terakreditasi, dikarenakan jumlah dan kapasitas/ kompetensi pustakawan di sekolah masih minim dan rendah

Q. Kearsipan

1) Terjadinya penurunan perangkat yang menerapkan arsip secara baku di Rokan Hulu pada tahun 2020-2022 akibat merebaknya dampak covid-19
2) Belum optimalnya pengelolaan transisi arsip fisik ke arsip digital hal ini dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023 baru sebesar 30 persen jumlah arsip yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

R. Penanaman Modal

1) Belum pulihnya investasi di Rokan Hulu sebesaryang turun dari tahun 2020 diakibatkan oleh Covid-19 dan belum maxsimalnya pengurusan perizinan dan non perizinan pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1.0 ke versi 1.1
2) Masih Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terkait pengurusan perizinan berusaha dan non perizinan di Kabupaten Rokan Hulu
3) Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rokan Hulu karena belum adanya peraturan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan peraturan daerah mengenai pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi secara online akan tetapi belum terlaksana secara optimal dikarenakan pelaku usaha masih harus mengurus syarat ke perangkat daerah terkait
5) Rendahnya daya serap tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (PMDN/ PMA) dimana pada tahun 2024 rasionya hanya sebesar 3,04 dari 6.660 perusahaan yang terdaftar dan 25.217 tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut yang terdata pada aplikasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di daerah
6) Masih belum optimalnya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
7) Di beberapa tempat masih ada tempat pelayanan (Tenan) yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian Tenan masih menggunakan layanan secara terjadwal, letak MPP yang kurang strategis, sarana dan

prasarana yang belum memadai serta sosialisasi keberadaan MPP yang masih belum secara luas tersebar ke masyarakat

8) Pengendalian dan pengawasan penanaman modal belum optimal karena masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini disebabkan jumlah perusahaan yang ada tidak sebanding dengan tenaga pengawasan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan belum memadai, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan dan belum optimalnya koordinasi lintas sektora

S. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Belum optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak
2) Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal
3) Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat
4) Pengarusutamaan gender belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai stakeholder sehingga upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender masih belum maksimal
5) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum terlaksanan secara optimal
6) Keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah disebabkan kurangnya elektabilitas calon legislatif perempuan
7) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
8) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak di bawah umur, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi, masalah moralitas dan juga pengaruh media sosial dan psikososial

2.3.1.3 Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1) Belum tercukupinya permintaan terhadap komoditas pangan ikan baik dalam bentuk segar maupun olahan di Rokan Hulu
2) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya dan tangkap yang disebabkan kurangnya minat petani untuk melakukan usaha budidaya ikan sebagai pendapatan utama karena biaya produksi yang tinggi
3) Rendahnya angka konsumsi ikan di daerah dimana pada tahun 2024 masih sebesar 43,60 kg/kapita/tahun, masih jauh dari angka konsumsi ikan nasional yang sudah mencapai 62,5 kg/kapita/tahun.

B. Pariwisata

1) Terjadi penurunan PAD sektor pariwisata dikarenakan dampak pandemi covid-19 sementara beberapa destinasi yang diunggulkan mengalami kerusakan
2) Belum optimalnya promosi pariwisata di daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan minimnya kerjasama dengan organisasi pariwisata
3) Belum terbinanya desa wisata secara optimal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan desa wisata
4) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hulu seperti Atraksi (*Attraction*), Aksesibilitas (*Accessibilitas*), Amenitas atau Fasilitas (*Amenities*) dan *Ancillary Services* (Organisasi Kepariwisataan)
5) Pengembangan Ekonomi Kreatif belum optimal karena minimnya pembinaan dan dukungan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif pariwisata
6) Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata serta belum tertatanya pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan dokumen perencanaan pengembangan pembangunan di kawasan objek wisata belum lengkap dan permasalahan status kawasan

C. Pertanian

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami penurunan
2) Bantuan pemerintah daerah melalui program pembinaan kelompok tani belum dilaksanakan secara optimal
3) Berdasarkan standar FAO kebutuhan konsumsi daging sebesar 10,1 kg/kapita/tahun terkait hal ini pemenuhan kebutuhan daerah masih belum tercapai untuk memenuhi kebutuhan daging di daerah
4) Kurangnya infrastruktur pendukung dan pelayanan kesehatan hewan menyebabkan keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan hewan yang berkualitas
5) Sulitnya petani ternak mendapatkan pakan berkualitas dengan harga terjangkau disamping itu pengetahuan tentang alternatif pakan lokal yang bisa dimanfaatkan masih rendah
6) Masih rendahnya pemahaman petani tentang teknik budidaya yang efektif dan penerapan praktik-praktik intensifikasi pertanian
7) Harga komoditas perkebunan masih ditentukan fluktuasi harga pasar global
8) Infrastruktur pendukung aktivitas pertanian kelapa sawit masih belum memadai
9) Minimnya nilai tambah produk perkebunan karena kurangnya pengembangan hilirisasi hasil perkebunan

10) Menurunnya produksi tanaman pangan dan hortikultura di daerah dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian digantikan dengan perkebunan sawit
11) Sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi dan saluran irigasi yang rusak, mahalnya harga pupuk dan terbatasnya pupuk bersubsidi serta belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi budidaya pertanian
12) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM (Petugas Penyuluh/ POPT/ PBT/ Petani) dan kelembagaan pertanian
13) Tingginya ketergantungan pangan strategis (beras) terhadap daerah lain (pemenuhan kebutuhan beras dari dalam daerah tahun 2023 sebesar 13,39%)

D. Perdagangan
1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Rokan Hulu mengalami penurunan
2) Masih terdapat Industri Kecil Menengah (IKM) yang produknya belum mendapatkan perizinan seperti *barcode*, PIRT, label halal
3) Banyaknya sarana prasarana pasar yang belum memenuhi standar bahkan ada bangunan pasar yang sudah tidak layak lagi seperti los, MCK dan pembuangan drainase yang tidak lancar/ tidak ada
4) Banyaknya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum bertanda tera sah yang beredar di masyarakat khususnya pasar

E. Perindustrian
1) Terdapat 2 (dua) rencana kawasan industri yang tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yaitu kawasan industri Ujungbatu dan kawasan industri Kepenuhan yang belum terlaksana, sudah dicantumkan kembali pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) namun untuk pembangunan dan pengembangannya masih belum ada kajian-kajian lanjutan seperti feasible study untuk kedua kawasan tersebut
2) Rendahnya produktivitas dan daya saing bidang industri dimana hasil produksi dan pemasaran produk IKM masih rendah belum mampu bersaing dengan produk dari luar
3) Masih terbatasnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pemasaran produk disebabkan pelaku usaha belum menggunakan TI dalam pemasaran produknya
4) Masih banyak potensi IKM yang belum terkelola dengan baik dalam bentuk Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) dan belum mampu menjalin kemitraan dengan pengusaha besar dan menengah

F. Transmigrasi
1) Terdapat 3 (tiga) UPT transmigrasi yang telah berdiri sejak lama dan belum ditingkatkan menjadi desa

2.3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

1) Belum optimalnya Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Skor EPPD), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
2) Perbatasan dengan kabupaten dan provinsi tetangga belum seluruhnya terselesaikan karena belum adanya kesepakatan dan untuk proses penyelesaiannya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah

B. Sekretariat DPRD

1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu masih belum maksimal karena pembangunan gedung DPRD yang baru masih belum selesai

2.3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Minimnya sumber daya aparatur yang bersertifikat dan terlatih dibidang perencanaan
2) Migrasi proses perencanaan dari manual ke digital masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur dan stakeholder terkait

B. Keuangan

1) Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rendahnya penyelenggaraan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih belum optimalnya peralihan dari sistem manual ke digital
2) Masih terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang belum dilakukan pendataan dan penerbitan pajaknya
3) Pemungutan/penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi masih belum optimal karena kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan melaporkan jumlah penghasilannya masih rendah
4) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, sertifikasi tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum terlaksana, disamping itu pendataan aset dampak dari Pemekaran/ Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) yang belum juga terlaksana dengan baik
5) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah dalam mendukung pembangunan

C. Kepegawaian

1) Masih rendahnya profesionalitas aparatur sipil negara (ASN)
2) Implementasi sistem MERIT dalam manajemen ASN di daerah belum optimal dan pelayanan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik

D. Pendidikan dan Pelatihan
   1) Masih banyak pejabat administrator dan pejabat pengawas yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan
   2) Masih banyaknya pemangku jabatan fungsional tertentu yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal

E. Penelitian dan Pengembangan
   1) Masih rendahnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
   2) Minimnya sumber daya aparatur yang bersertifikat dan terlatih dibidang penelitian dan pengembangan

2.3.1.6 Unsur Pengawasan

A. Pengawasan
   1) Belum optimalnya sistem pengawasan dan rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di perangkat daerah
   2) Minimnya sumber daya aparatur pengawasan
   3) Penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan belum maksimal

2.3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik
   1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat ikut serta dalam politik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada untuk memilih
   2) Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang menunjukkan menurunnya wawasan kebangsaan generasi muda
   3) Meningkatnya angka konflik dan unjuk rasa karena banyaknya permasalahan tanah antar masyarakat dan perusahaan serta kebebasan menyampaikan pendapat yang tidak memperhatikan norma dan etika

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Lingkungan global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1) **Demografi Global**; Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia, dimana menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini telah mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Tentunya hal ini menjadi tantangan terkait semakin meningginya kebutuhan atas pemenuhan kehidupan dengan ketersediaan sumberdaya daya alam dan lahan. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global akan mempengaruhi kualitas keluarga.
2) **Geopolitik dan Geoekonomi**; Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang

meluas dan memunculkan kekuatan baru yang kemunculannya telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global. Disisi lain, Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya termasuk invasi Israel terhadap Palestina. Perang tersebut tentunya berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya berupa tekanan inflasi global yang tinggi serta munculnya krisis energi dan pangan. Krisis di berbagai sektor ini akan menimbulkan risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan yang selanjutnya dapat memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global.

Di bidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang sudah menyumbang 55 persen dari nilai output dunia dan diperkirakan meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2050, dimana Kawasan Asia diperkirakan akan menyumbang hingga 54 persen dari total output dunia. Terkait hal ini, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 dan menjadi anggota kesepuluh dalam aliansi ekonomi strategis tersebut. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam perannya pada geoekonomi strategis melalui sumber daya alam yang melimpah, demografi yang produktif, serta posisi geografis yang menghubungkan jalur perdagangan internasional utama. Kondisi lain, tantangan global juga memerlukan perhatian yang serius dimana ketegangan perdagangan, fragmentasi rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta proteksionisme, menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan yang adaptif.

3) **Perkembangan Teknologi**; Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, terkait hal ini kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Harapannya disamping mampu memanfaatkan teknologi secara optimal juga diiringi dengan risiko minimal yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi tersebut. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. *Artificial Intelligence* (AI) menjadi berkembang pesat menginovasi sektor pendidikan dan industri media dan lainnya. Teknologi yang berkembang ini kedepan akan mempengaruhi berbagai baik sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. Perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.
4) **Konstelasi Perdagangan Global**; Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional

berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 (Brazil, Cina, Indonesia, India, Meksiko, Rusia, dan Turki) diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7 (US, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman).

5) **Tata Kelola Keuangan Global**; Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang flat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.
6) **Pertumbuhan Kelas Menengah**; Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang seperti pekerjaan dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi, dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).
7) **Persaingan Sumber Daya Alam**; Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. Hal ini cukup beralasan karena seiring bertambahnya populasi penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berujung pada peningkatan kebutuhan SDA baik air, pangan, dan energi sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik.
8) **Perubahan Iklim**; Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia menjadi kebijakan

dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, Indonesia mendeklarasikan pada Tahun 2060.

9) **Kependudukan**; Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324 juta jiwa.
10) **Modal Sosial dan Budaya**; Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadikan kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia berkarakter guyub, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditranformasikan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan.
11) **Kekayaan Alam**; Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejateraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem. Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pengerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya masyarakat.

2.3.2.2 Isu Strategis Kebijakan Nasional

Dalam Lampiran 1 RPJMN Tahun 2025-2026 disebutkan peluang dan tantangan pembangunan yang menjadi salah satu pijakan dalam perumusan Visi ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas"***, yang dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi/ Asta Cita, antara lain adalah:

Peluang Pembangunan:

- Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif
- Keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan
- Potensi sumber daya manusia dan modal sosial
- Pengembangan teknologi

- Sumber-sumber pertumbuhan inovatif

Tantangan Pembangunan:

- Rendahnya produktivitas
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia
- Pergeseran struktur kelas masyarakat
- Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
- Krisis lingkungan
- Geopolitik dan geoekonomi
- Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 ini telah ditetapkan bahwa Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025 - 2029 antara lain:

1. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan; dengan indikator *Gross National Inc*ome (GNI) per kapita sebesar 8.000 USD pada tahun 2029, Penurunan Intensitas Emisi (GRK) sebesar 45,17 persen pada tahun 2029 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 77,20 poin pada tahun 2029
2. Penurunan kemiskinan; dengan indikator tingkat kemiskinan sebesar 4,5 - 5,00 persen pada tahun 2029 dan Rasio Gini sebesar 0,372 - 0,375 poin pada tahun 2029
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dengan indikator Indeks Modal Manusia sebesar 0,59 pada tahun 2029

Dalam implementasinya maka isu kebijakan nasional yang diambil adalah:

1. Peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan inovatif
2. Perkuatan Peran Kelas Menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas terutama pada sektor-sektor produktif
3. Perkuatan peran sektor eksternal melalui peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global
4. Penerapan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong petumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*)
5. Stabilitas moneter sebagai enabler transformasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu (*enabler*) untuk mengakselerasi transformasi ekonomi
6. Pemerataan ekonomi di setiap wilayah dimana sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah

2.3.2.3 Isu Strategis Regional Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelajutan” dengan sasaran makro

pembangunan pada akhir RPJMN tahun 2029 sebesar 7,2 persen untuk pertumbuhan ekonomi, 22,5 persen untuk Kontribusi PDRB, 124,4 juta rupiah untuk PDRB per Kapita, 3,82 - 4,42 persen untuk TPT dan 4,24 - 5,24 persen untuk Tingkat Kemiskinan.

Isu Wilayah Sumatera antara lain:

1. Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.
2. Diversilikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak pada sektor ekstraktif dan industri hulu.
3. Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan.
5. Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan serta pertambangan.
6. Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/ talent drain, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/ kejuruan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya brain/ talent drain pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023).
7. *Prevalensi stunting* masih relatif tinggi, rata-rata untuk wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen (2023).
8. Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023) dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen.
9. Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bemilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas.

Potensi Wilayah Sumatera antara lain:

1. Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektare darl menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional
2. Komoditas perkebunan potensial lainnya: karet (70 persen produksi nasional), kopi (62 persen produksi nasional), tebu (36 persen produksi nasional), kelapa (32 persen produksi nasional)
3. Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan nasional

4. Potensi ketahanan energi: Cadangan terbukti batu bara mencapai 12,6 miliar ton, Gas bumi 10.729,9 TSCF, dan minyak bumi 2.313,93 MMSTB, Potensi *clean energy* berupa EBT air (6,8 GW), EBT panas bumi (9,48 GW) EBT surya terapung (4,5 GWp), EBT bioenergi (29,5 GW), EBT arus laut (10 Gw)
5. Bahan Tambang: terdapat resource logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan *resource* bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jararg (REE)
6. *Geographical gift* dekat dengan *main line* dalam *global maritime trade route*, yaitu Selat Malaka, yang memberikan *comparative advantage*, terutama dalam sektor perdagargan dan logistik
7. Potensi dari perairan laut yang tuas, yaitu perairan Selat Malaka, laut Natuna, dan Samudera Hindia, memberikan potensi besar untuk sektor perikanan tangkap

2.3.2.4 Isu Strategis Provinsi Riau

Sebagaimana Lampiran 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 terkait Arah Pembangunan Kewilayahan dicantumkan bahwa Provinsi Riau diarahkan dengan sasaran makro pembangunan pada akhir RPJMN tahun 2029 sebesar 5,9 persen untuk pertumbuhan ekonomi, 4,9 persen untuk Kontribusi PDRB, 249,7 juta rupiah untuk PDRB per Kapita, 2,94 - 3,42 persen untuk TPT, 3,25 - 4,25 persen untuk Tingkat Kemiskinan, 0,279 - 0,283 poin untuk Rasio Gini, 0,60 poin umtuk Indeks Modal Manusia, 83,68 persen untuk Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan 72,59 untuk IKLH Daerah.

Adapun isu intervensi kewilayahan antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekanbaru
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Rengat
4. Pengembangan Kawasan Swasembada Energi Riau pada 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Riau salah satunya Kabupaten Rokan Hulu
5. Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan dan Air
6. Pengembangan Kawasan Afirmasi
7. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Sawit pada 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Riau salah satunya Kabupaten Rokan Hulu
8. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru
9. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
10. Daerah Prioritas intervensi Program Makanan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC) pada 6 kabupaten salah satunya Kabupaten Rokan Hulu

Disamping itu Provinsi Riau secara strategis juga merupakan:

1. Salah satu pengembangan Kawasan Wisata Halal di Sumatera sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) No. 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, yang bertujuan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan layanan bagi wisatawan muslim serta meningkatkan iklim pelayanan pariwisata halal di Riau

2. Daerah pengembangan kawasan hilirisasi kelapa sawit dan kelapa di Sumatera dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditi/ produksi, yang berpotensi sangat besar dalam peluang investasi dan ketersediaan bahan baku, kesiapan industri serta penyerapan tenaga kerja.
3. Daerah yang berada pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka) dan merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia maupun berbagai kepentingan lainnya sehingga Provinsi Riau berpotensi besar sebagai penyuplai kebutuhan jalur maritim tersebut.

Dilain pihak jalur ini juga merupakan jalur yang rawan terhadap penyelundupan, perompakan, dan konflik perbatasan yang dapat berdampak pada stabilitas nasional dan peran Indonesia di kawasan regional ASEAN

1. Jalur konektivitas dan infrastruktur logistik Pulau Sumatera, baik sektor ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Daerah yang memiliki wilayah yang merupakan Kawasan Gambut dan Hutan yang harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya, dimana sering terjadi deforestasi, kebakaran hutan/ lahan gambut termasuk dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan/ lahan gambut dan kabut asap bahkan sampai mencapai lintas negara.
3. Daerah yang masih memiliki wilayah didalamnya berada pada ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan/ kemiskinan masyarakat diatas angka 7 persen, yang harus dientaskan guna menghindari potensi konflik sosial dan konflik lainnya serta hambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Daerah penghasil sumber daya alam seperti batubara, minyak dan gas, kelapa sawit, dan mineral, akan tetapi eksploitasi yang terjadi sering tidak memperhatikan berkelanjutan dan dampaknya ke daerah masih minim.

2.3.2.5 Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

Isu strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan target kegiatan penting yang telah dimandatory pada dokumen RTRW Kab. Rokan Hulu khususnya pada tahun pelaksanan 2025 - 2029. Target kegiatan ini penting diperhatikan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat dilaksanakan pada dokumen mendatang sesuai dengan surat edaran Nomor: 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa isu pembangunan strategis yang dimandatorikan pada pembangunan hingga tahun 2030 pada dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel II-352
Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2029 yang Terdapat Dalam Dokumen RTRW Kab. Rokan Hulu

No	Indikasi Program RTRW	Keterangan
A.	**Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**	
1	Pengembangan, peningkatan, revitalisasi dan pemantapan fungsi sistem perkotaan yang holistik, terintegrasi, inklusif, adaptif serta berkelanjutan. (RDTR, KLHS RDTR pada PKW dan PKL)	RDTR PKW belum ada, RDTR Kec. Ujung Batu masih proses ranperbub, RDTR PKL (14 ibukota kec. lainya masih belum)

No	Indikasi Program RTRW	Keterangan
2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi (Pada 16 Kecamatan, dan seluruh Desa)	Sudah terkoneksi pada 16 kecamatan dan seluruh desa tapi kondisi jalan masih belum seluruhnya aspal/rigit
3	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keterpaduan serta kualitas akses jaringan energi (seluruh desa dan dusun)	Seluruh desa sudah teraliri listrik akan tetapi masih ada dusun yang belum teraliri listrik.
4	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi (seluruh desa)	Belum seluruh desa terakses pelayanan jaringan telekomunikasi.
5	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air (Tangkapan Air, Daerah Aliran Sungai, Irigasi dan Air Minum)	
6	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya (Air minum, limbah sampah, drainase)	Sudah terbangun jaringan air minum pada 16 IKK (Ibu Kota Kecamatan) namun 3 IKK masih belum operasional (Kec. Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam dan Kepenuhan Hulu). TPA sampah baru ada 2 1. Tanjung Belit Rambah (Sanitary Landfill) , 2. Ujung Batu (Open Dumping). IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) Sudah ada 1 di Rambah belum operasional Sistem drainase perkotaan belum terdesain secara optimal.
B.	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**	
7	Peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Lindung)	
8	Penataan, peningkatan dan pemantapan kualitas sempadan kawasan perlindungan setempat	
9	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan keberlangsungan fungsi utama, kualitas nilai dan keanekaragaman kawasan konservasi	
10	Pelindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, revitalisasi, dan adaptasi kawasan cagar budaya	
11	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan produksi hasil hutan (kawasan peruntukan budidaya)	
12	Pengembangan dan peningkatan produksi hasil hutan yang bernilai tambah tinggi serta berkelanjutan (hutan rakyat)	
13	Pengembangan dan peningkatan produksi serta sentra pengolahan, tata kelola distribusi, dan penguatan kelembagaan bagi pemanfaat kawasan pertanian	
14	Pengembangan dan peningkatan kualitas produksi dan distribusi serta sarana penunjang kawasan perikanan	
15	Eksplorasi dan eksploitasi, pengembangan, peningkatan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya pada kawasan pertambangan dan energi	

No	Indikasi Program RTRW	Keterangan
16	Penataan, pengembangan, dan peningkatan keterkaitan industri, invensi produksi bernilai tambah tinggi, dan kualitas sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri	
17	Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta akses kawasan dalam mendukung promosi wisata (kawasan pariwisata)	
18	Pengembangan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi, peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman	
19	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan	
20	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi lokal dan regional yang terpadu dan terintegrasi	
C	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**	
21	Perencanaan, pengembangan, dan peningkatan konektivitas lokal maupun regional kawasan strategis kabupaten (kawasan industri kepenuhan dan ujung batu)	
22	Perencanaan, pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi kawasan strategis kabupaten sudut sosial budaya (kawasan: istana raja rokan, benteng tujuh lapis, makam raja-raja rambah, istana kepenuhan, istana dan masjid tuo kunto darussalam)	
23	Perencanaan, perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk meningkatkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (kawasan kebun raya pasir pengaraian)	

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

2.3.2.6 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2025 - 2045.

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2025 - 2029 sebagaimana Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025- 2045 berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi dengan arah kebijakan umum pada periode tersebut sebagai berikut :

1. **Misi 1**; Transformasi Sosial untuk Masyarakat Rokan Hulu yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, berupa pemenuhan penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan gender dan jaminan perlindungan sosial.
2. **Misi 2**; Transformasi Ekonomi Daerah dengan Meningkatkan Produktivitas dan Potensi Daerah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau, berupa peningkatan produksi, produktivitas dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) serta penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif dan penguatan kolaborasi bidang ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), masyarakat, baik dalam dan luar negeri mendukung penguatan

pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi.

3. **Misi 3**; Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif, berupa penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. **Misi 4**; Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, berupa penguatan hukum terkait keamanan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) yang sinergi perencanaan dan penganggaran terhadap prioritas daerah dan prioritas nasional.
5. **Misi 5**; Mewujudkan Keharmonisan Nilai-Nilai Budaya dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial Dan Ekologi, berupa peningkatan kualitas ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama dan adat istiadat melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan agama dan adat serta seni budaya mendukung keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif yang tanggap lingkungan dan bencana.
6. **Misi 6**; Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan dalam Daerah baik Perkotaan maupun Perdesaan, berupa peningkatan pembangunan kewilayahan secara merata dan berkeadilan.
7. **Misi 7**; Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, berupa peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
8. **Misi 8**; Mewujudkan Rokan Hulu Maju melalui Kesinambungan Pembangunan, berupa sinkronisasi periodisasi RTRWN dan RPJPD Provinsi dengan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang sesuai dan sinergi terhadap arah kebijakan Nasional dan prioritas daerah.

2.3.2.7 Isu Strategis Berdasarkan Hasil Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rokan Hulu yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menunjukkan bahwa terdapat 220 indikator TPB di Kabupaten Rokan Hulu. Kategori yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional berjumlah 128 indikator, kategori yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional berjumlah 37 indikator, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai

target nasional sebanyak 38 indikator dan kategori tidak/belum ada data (NA) berjumlah 17 indikator Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Capaian Indikator TPB disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-353
Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Perangkat Daerah	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2	0	0	3
2	Bappeda	10	3	6	2	21
3	BPBD	3	0	2	1	6
4	BPKAD	1	0	0	0	1
5	BPS	4	0	0	0	4
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	0	4	0	10
7	Dinas Kesehatan	26	9	1	0	36
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	1	1	0	5
9	Dinas Koperasi UKM	0	1	2	0	3
10	Dinas Lingkungan hidup	4	1	5	0	10
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2	3	1	0	6
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa	16	4	3	2	25
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	11	3	2	0	16
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1	0	0	0	1
15	Dinas Perhubungan	0	0	1	3	4
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	2	2	4
17	Dinas Pertanian	1	0	0	0	1
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	7	5	2	22
19	Dinas Tenaga Kerja	2	0	0	0	2
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak	14	2	0	0	16
21	DISDUKCAPIL	5	0	0	0	5
22	DPMPTSP	0	0	0	1	1
23	Inspektorat	1	0	2	0	3
24	Kepolisian	6	0	0	3	9
25	Kesbangpol	0	0	0	1	1
26	Sekretariat Daerah	3	1	1	0	5
Total		**128**	**37**	**38**	**17**	**220**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029

Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS Kabupaten Rokan Hulu ini terdiri dari 32 isu strategis, yaitu:

Adapun Rumusan isu strategis dari Dari Capaian Indikator TPB diidentifikasi sebanyak 32 rumusan isu strategis seperti berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Terbatasnya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak;

3. Belum optimalnya penguatan pengurangan risiko bencana daerah, pendampingan pikososial korban bencana sosial, dan Sekolah Aman Bencana;
4. Masih terjadinya kerugian ekonomi langsung akibat bencana;
5. Rendahnya Pola Pangan Harapan (PPH) serta tingginya penduduk dengan asupan kalori minimum;
6. Masih adanya *Prevalensi stunting* pada anak di bawah lima tahun/balita;
7. Masih tingginya persentase penduduk mengkonsumsi alkohol dan penyalahgunaan narkoba;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, pencegahan penyakit filariaris, penggunaan alat kontrasepsi metode modern, serta *Unmet need* pelayanan kesehatan;
9. Belum optimalnya akses layanan dan kualitas pendidikan ;
10. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah ;
11. Terbatasnya akses sanitasi layak dan rendahnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku;
12. Belum optimalnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta fasilitas kebersihan;
13. Rendahnya kontribusi PDB, dan laju pertumbuhan per tenaga kerja;
14. Rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan dan rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit;
15. Masih tingginya Tingkat setengah pengangguran;
16. Rendahnya Jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah pekerja pada industri pariwisata;
17. Rendahnya infrastruktur regional dan lintas batas (jalan tol, kereta api);
18. Rendahnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dan nilai tambah industri kecil;
19. Rendahnya anggaran riset pemerintah terhadap PDB;
20. Rendahnya jumlah desa mandiri dan tingginya proporsi penduduk yang hidup dibawah 50% dari median pendapatan;
21. Masih rendahnya kebijakan yang non diskriminatif menurut hukum HAM;
22. Rendahnya jumlah kawasan perkotaan yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan sebagai kota pusaka;
23. Tingginya kerugian ekonomi langsung akibat bencana;
24. Rendahnyanya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 dan jumlah produk ramah lingkungan;
25. Belum adanya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah;
26. Belum optimal rehabilitasi terhadap lahan kritis dan ketersediaan kerangka kerangkalegislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata;

27. Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan dan rendahnya Jumlah kebijakan yang non diskriminatif;
28. Lemahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam penegakan hukum (IPAK, SAPIK, dan Indeks Reformasi Birokrasi);
29. Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB ;
30. Rendahnya akses internet di perkotaan, perdesaan dan 3T;
31. Rendahnya jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa);
32. Belum optimalnya sistem pendataan kepuasan konsumen terhadap akses data BPS.

Hasil penentuan isu utama yang didasarkan pada penentuan isu strategis berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana dalam menentukan isu paling strategis maka dilakukan sintesis yang didasari oleh analisis terhadap lingkungan hidup, analisis dari capaian indikator TPB, analisis dari dokumen perencanaan Kabupaten Rokan Hulu dan dari hasil konsultasi publik, sehingga didapat isu yang telah disederhanakan sebanyak 5 isu paling strategis yaitu:

1. Terbatasnya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak (TPB 1, TPB 3, & TPB 6)
2. Rendahnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku (TPB 6)
3. Belum optimalnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat dan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta fasilitas kebersihan (TPB 6 & TPB 11)
4. Rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan dan rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (TPB 8)
5. Belum optimal rehabilitasi terhadap lahan kritis dan ketersediaan kerangka kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata (TPB 15)

2.3.2.8 Isu-Isu Strategis Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah dipaparkan sebelumnya maka disusun *longlist* isu strategis daerah antara lain:

1. Transformasi Sistem Pendidikan untuk Mewujudkan Akses yang Merata dan Kualitas Pendidikan yang Berkeadilan.
2. Transformasi Pelayanan Kesehatan yang Merata, Berkualitas, dan Responsif terhadap Permasalahan Prioritas Kesehatan Masyarakat.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
4. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman untuk Mewujudkan Lingkungan yang Layak Huni dan Berkelanjutan.
5. Peningkatan Ketangguhan Daerah terhadap Bencana melalui Penguatan Kelembagaan, Mitigasi Risiko, dan Partisipasi Masyarakat

6. Penguatan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat Terdampak Risiko Sosial dan Bencana.
7. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Responsif terhadap Kebutuhan Dunia Usaha.
8. Peningkatan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak melalui Penguatan Kapasitas, Representasi, dan Tata Kelola yang Terintegrasi.
9. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal untuk Mengurangi Kerentanan dan Ketergantungan Pangan.
10. Peningkatan pengelolaan aset daerah.
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Keberlanjutan Ekosistem dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
12. Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Layanan Publik.
13. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian dan Pembangunan Desa Berkelanjutan.
14. Penguatan Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga Melalui Edukasi, Layanan Berkualitas, dan Pemanfaatan Data yang Akurat.
15. Meningkatkan Kualitas, Keamanan, dan Keterhubungan Sistem Transportasi melalui Penguatan Infrastruktur, Pengawasan, dan Pengembangan Layanan.
16. Peningkatan Infrastruktur, SDM, dan Layanan Publik Digital untuk Mendukung Transformasi Digital yang Terpadu dan Berkualitas.
17. Penguatan Ekosistem UMKM dan Koperasi melalui Legalitas Usaha, Tata Kelola yang Baik, serta Akses terhadap Sumber Daya dan Pemasaran.
18. Penguatan Ekosistem Keolahragaan dan Kepemudaan melalui Pembinaan Atlet, Pengembangan Sarana Prasarana, dan Peningkatan Prestasi di Lingkungan Pendidikan.
19. Penguatan Tata Kelola Data Terpadu melalui Optimalisasi Validitas Data, Pengelolaan Statistik Sektoral, dan Implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
20. Optimalisasi penerapan dan pengembangan standarisasi keamanan siber untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap data, sistem, dan infrastruktur digital dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
21. Penguatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Perlindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Pelestarian, Apresiasi, serta Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Seni dan Budaya Tradisional.
22. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Perpustakaan, melalui
23. Penguatan Koleksi Digital, Peningkatan Kunjungan Masyarakat, dan Akreditasi Perpustakaan Sekolah untuk Mendorong Minat Baca yang Lebih Tinggi.
24. Peningkatan Penerapan Sistem Pengarsipan yang Baku dan Penguatan Transisi Pengelolaan Arsip Fisik ke Arsip Digital di Rokan Hulu.
25. Peningkatan Investasi di Rokan Hulu melalui Penguatan Sistem Perizinan,

26. Pelayanan Publik, dan Pengawasan Penanaman Modal, serta Peningkatan
27. Daya Serap Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
28. Peningkatan Produksi, Ketersediaan, dan Konsumsi Ikan untuk Mencapai Kecukupan Pangan yang Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.
29. Peningkatan Sektor Pariwisata melalui Pengembangan Infrastruktur, Promosi, Desa Wisata, dan Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Daya Tarik Wisata.
30. Penguatan Sistem Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang Terintegrasi melalui Peningkatan Produktivitas, Infrastruktur, Hilirisasi, dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah.
31. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Kecil Menengah melalui Penguatan Legalitas Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pasar, dan Standarisasi Sarana Perdagangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
32. Penguatan Sektor Industri melalui Pengembangan Kawasan, Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas, serta Pemanfaatan Teknologi dan Kemitraan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
33. Peningkatan Status UPT Transmigrasi menjadi desa.
34. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penuntasan Penyelesaian Batas Wilayah.
35. Penguatan Peran dan Fasilitasi Efektif dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
36. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Digitalisasi Proses Perencanaan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya.
37. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pengelolaan Administrasi, Sumber Pendapatan Potensial, Kesadaran Pajak Masyarakat, dan Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif.
38. Peningkatan Profesionalitas ASN Melalui Penerapan Sistem Merit dan Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
39. Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan dan Profesionalisme Melalui Pelatihan Bagi Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pemangku Jabatan Fungsional.
40. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Daerah dalam Menerapkan Inovasi dan Kebijakan Inovasi yang Berbasis Penelitian dan Pengembangan.
41. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Penguatan SPIP, Kapasitas Aparatur Pengawasan, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
42. Penguatan Partisipasi Demokratis, Rasa Kebangsaan, dan Pengelolaan Konflik Sosial dalam Rangka Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Sosial Masyarakat.

Selanjutnya *longlist* isu strategis di atas dilakukan pengelompokan kembali menjadi *shortlist* isu strategis daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang ada sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Transformasi Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga.
2. Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan untuk Mendukung Konektivitas dan Lingkungan Layak Huni.
3. Penguatan Ketahanan Sosial terhadap Kemiskinan, Bencana, dan Risiko Sosial Lainnya.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan UMKM, Industri, Koperasi, dan Investasi Daerah.
5. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Pertanian, Perikanan, dan Kemandirian Pangan Daerah.
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif, dan Inklusif.
7. Transformasi Digital dan Penguatan Infrastruktur Teknologi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah.
8. Penguatan Administrasi Kependudukan, Pengarsipan, dan Data Terpadu untuk Efektivitas Layanan Publik.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.
10. Penguatan Peran Gender, Perlindungan Anak, dan Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Daerah.
11. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
12. Penguatan Tata Kelola Keamanan Siber, Data, dan Sistem Informasi Pemerintah.
13. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Lembaga melalui Profesionalisme, Inovasi, dan Sistem Merit.
14. Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Kemudian dari shortlist isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan di atas dan menelaah isu-isu strategis global, nasional, regional Sumatera dan Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 - 2029 maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1) Pembangunan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu saat ini dominan didorong oleh sektor perkebunan dan pertambangan. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, memerlukan upaya transformasi ekonomi dengan tetap berbasiskan sektor perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh pengembangan sektor peternakan, pangan dan hortikultura serta perikanan juga harus menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi daerah. Menciptakan diversifikasi ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor utama perlu diarahkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dalam hal perizinan usaha, insentif fiskal, serta kemudahan berusaha bagi investor. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor potensial termasuk sektor pariwisata, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung tumbuhnya usaha-usaha baru di daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi harus didukung dengan strategi pembangunan yang terpadu dan komprehensif. Upaya pemberdayaan wirausaha muda, revitalisasi koperasi, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Rokan Hulu.

Memanfaatkan bonus demografi sangat penting untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, investasi pendidikan dan keterampilan akan sangat mendukung penciptaan tenaga kerja yang terampil, memiliki kompetensi yang siap pakai. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan kepemudaan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Rokan Hulu. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Strategi pembangunan ekonomi daerah harus difokuskan pada penguatan sektor industri berbasis masyarakat. Pemberdayaan wirausaha muda harus menjadi prioritas melalui program pelatihan dan penyuluhan yang relevan, agar mendapatkan dukungan untuk memulai usaha. Selain itu, revitalisasi koperasi juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi serta memaksimalkan potensi sumberdaya daerah, seperti perkebunan kelapa sawit, peternakan, pangan dan hortikultura, perikanan dan industri pengolahan.

Perhatian pada kondisi ketahanan pangan masih diperlukan untuk menjamin kecukupan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan belum maksimalnya produktivitas pertanian serta perikanan menjadi ancaman bagi pencapaian ketahanan pangan daerah. Tingkat kemiskinan yang masih terkategori tinggi menjadikan daya beli masyarakat menjadi rendah sehingga menjadi ancaman dalam penyediaan kebutuhan pangan dan non pangan yang mencukupi. Semua permasalahan ini saling terkait dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat memerlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, agar seluruh masyarakat terjamin

pendapatannya dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan.

Pengembangan ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya alam daerah dan keunggulan ekonomi daerah akan semakin penting untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil, koperasi, dan penguatan sektor-sektor produktif lainnya dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan. Dengan menciptakan ekonomi yang inklusif, diharapkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2) Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah terus dilaksanakan seiring dengan berjalannya waktu dan dan sejalan dengan itu, ketimpangan peran gender, lemahnya perlindungan terhadap anak, dan rendahnya partisipasi sosial masih menjadi hambatan utama menuju pembangunan yang inklusif. Perempuan kerap mengalami keterbatasan dalam mengakses peran strategis karena faktor struktural dan budaya, sementara anak-anak masih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan dini akibat lemahnya sistem perlindungan.

Disisi lain, partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok marjinal seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, masih minim karena kurangnya ruang partisipatif dan rendahnya literasi sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam penguatan peran gender, perlindungan anak, dan partisipasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tangguh, dan sejahtera.

Kemiskinan, bencana, dan berbagai risiko sosial lainnya masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Daerah masih belum memiliki sistem perlindungan sosial yang memadai untuk menghadapi guncangan ekonomi, perubahan iklim, maupun krisis kesehatan. Masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap bantuan, layanan dasar, dan perlindungan hukum.

Selain tu, ketahanan sosial juga diuji oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya data yang akurat, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan risiko. Akibatnya, respons terhadap bencana atau krisis sosial sering bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, perlu dibangun sistem ketahanan sosial yang tangguh, adaptif, dan berbasis komunitas agar masyarakat mampu menghadapi dan pulih dari berbagai tekanan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Pelestarian kebudayaan daerah juga menghadapi tantangan serius di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat. Banyak warisan budaya, baik berupa tradisi, bahasa, kesenian, maupun situs bersejarah, mulai

tergerus karena minimnya perhatian, dokumentasi, dan regenerasi. Generasi muda cenderung kurang mengenal atau menghargai budaya lokal akibat dominasi budaya populer dan kurangnya integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan. Selain itu, pelaku seni dan budaya daerah belum maksimal mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari sisi pendanaan maupun kebijakan. Kondisi ini perlu diatasi karena dapat menyebabkan hilangnya identitas lokal dan melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat.

Ketimpangan pembangunan desa dan kota maupun antar wilayah kecamatan juga terjadi akibat dampak pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perkembangan/ pertumbuhan sektor primer berbeda pada setiap kawasan, dimana hal ini tentunya sangat berhubungan terhadap akses kesempatan berusaha dan bekerja terutama bagi penduduk tempatan. Lebih jauh dapat dilihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun kualitas hidup masyarakat masih rendah akibat rendahnya kualitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis pembangunan daerah dalam bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan sosial serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Pembangunan Infrastruktur Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah degradasi infrastruktur dan keterbatasan aksesibilitas. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, terutama jalan dan transportasi, menghambat mobilitas orang, barang, dan jasa. Selain itu, masalah pengelolaan sampah yang belum optimal juga menjadi tantangan serius dalam pengelolaan kawasa npermukiman. Pertumbuhan pemukiman baik di perkotaan maupun perdesaan masih dihadapkan pada permasalahan kumuh dan kekurangan fasilitas umum.

Beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan permasalahan pembangunan infrastruktur daerah adalah keterbatasan konektivitas wilayah yang disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang buruk sehingga menghambat konektivitas antar wilayah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas lingkungan hidup berhubungan dengan pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Kurangnya fasilitas umum pada kawasan permukiman dan keberadaan pemukiman kumuh dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan manusia. Kurangnya inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, terutama di bidang ekonomi.

Upaya-upaya pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur daerah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan transportasi dengan pembangunan jalan baru, perbaikan jalan yang rusak, dan penyediaan transportasi umum yang memadai. Penerapan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan perlu menjadi pendekatan krusial dalam pembangunan daerah dengan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

Penataan lingkungan hidup dan permukiman di daerah perkotaan dan perdesaan perlu pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efisien dengan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ramah lingkungan dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kecamatan, serta program pengurangan, reuse (menggunakan ulang) dan daur ulang sampah. Permasalahan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pemukiman kumuh merupakan tantangan serius yang dihadapi daerah dimasa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pemilihan strategi yang tepat perlu menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik.

4) Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah

Pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hulu masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan utama yang saling berkaitan. Kualitas sumber daya manusia masih perlu terus dioptimalkan. Pada bidang pendidikan penuntasan target wajib belajar 13 tahun masih terus dioptimalkan, menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan perlu terus ditingkatan dengan kualitas pelayanan kesehatan dasar yang semakin baik.

Beberapa isu daerah dalam konteks pembangunan sumberdaya manusia daerah perlu diarahkan pada aspek kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan pada aspek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia memerlukan strategi yang sistematis dan konprehensif untuk membangun sumberdaya manusia daerah. Pilihan-pilihan strategi pembangunan pendidikan melalui penuntasan wajib belajar 13 tahun perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui pembangunan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi guru. Menurunkan angka

putus sekolah perlu dilakukan denan memberikan bantuan biaya pendidikan, program beasiswa, dan program bimbingan belajar bagi siswa yang berpotensi putus sekolah. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan perlu didorong melalui sosialisasi pentingnya pendidikan, penyediaan informasi tentang peluang pendidikan, dan kemudahan akses sampai pada tingkat perguruan tinggi. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan melalui perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan. Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan dan menjaga lingkungan. Sementara itu, swasta dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam investasi dan pengembangan usaha.

5) Pengelolaan Pemerintah Daerah

Kualitas tata kelola pemerintah daerah menjadi dasar dalam optimalisasi pembangunan daerah. Beberapa permasalahan utama tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal tercermin dari beberapa aspek, seperti perencanaan dan penganggaran yang belum efektif dan efisien, kapasitas fiskal yang rendah, kinerja ASN yang belum optimal, inovasi daerah yang minim, dan infrastruktur yang belum memadai. Semua faktor ini saling terkait dan berdampak pada pencapaian target pembangunan daerah.

Beberapa isu strategis pembangunan daerah yang perlu diatasi adalah kelemahan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan oleh kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal yang masih rendah seingga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja ASN yang belum optimal dapat disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia aparatur negara menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Inovasi yang masih lemah dalam penyelesaian masalah dan pengembangan potensi daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai yang tergambar dari keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat konektivitas dan aksesibilitas, serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan tata kelola pemerintahan memerlukan strategi pembangunan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran dengan melakukan reformasi birokrasi dalam perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi pengeluaran, dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Peningkatan kinerja ASN perlu diupayakan melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN, reformasi birokrasi, dan penerapan sistem merit. Membangun budaya inovasi di lingkungan

pemerintahan, memberikan insentif bagi inovasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses inovasi.

Strategi peningkatan Pendapatan Daerah dan penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah memerlukan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan retribusi daerah, pajak daerah, dan pengembangan potensi daerah. Pemanfaatan sumber daya alam denan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pilihan terhadap pola-pola kemitraan dengan investor adalah hal penting dalam menarik investasi untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi potret membaiknya tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi e-government dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik untuk mempermudah akses layanan publik dan meningkatkan transparansi. peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas pelayanan publik, serta penerapan standar pelayanan minimal. Selain itu, juga diperlukan partisipasi masyarakat denan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pelayanan publik.

Tabel II-354
Kesimpulan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur	Belum optimalnya Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan untuk Mendukung Konektivitas dan Lingkungan Layak Huni	Terbatasnya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak	Persaingan Sumber Daya Alam		Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pembangunan Infrastruktur Daerah
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga	Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	Rendahnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Persaingan Sumber Daya Alam		Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan serta pertambangan	Pembangunan Infrastruktur Daerah
					Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		Belum optimalnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat dan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta fasilitas kebersihan	Perubahan iklim	Pemerataan ekonomi di setiap wilayah dimana sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah		
Potensi Sumber Daya Alam dan Nilai Tambah Ekonomi	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan UMKM, Industri, Koperasi, dan Investasi Daerah	Rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan dan rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Geopolitik dan Geoekonomi	Peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan inovatif	Diversilikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak pada sektor ekstraktif dan industri hulu.	Pembangunan Perekonomian Daerah
			Tata Kelola Keuangan Global	Penerapan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong petumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga	Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang	Pembangunan Perekonomian Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
				keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability)	rentan terhadap fluktuasi pasar global	
				Stabilitas moneter sebagai enabler transformasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu (enabler) untuk mengakselerasi transformasi ekonomi		
	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan dan rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Perubahan Iklim	Pemerataan ekonomi di setiap wilayah dimana sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah		Pembangunan Perekonomian Daerah
Kebudayaan Melayu	Pelestarian Kebudayaan Daerah		Modal Sosial dan Budaya			Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga	Belum optimalnya Penguatan Ketahanan Sosial terhadap kemiskinan,Bencana dan Resiko sosial lainnya	Belum optimal rehabilitasi terhadap lahan kritis dan ketersediaan kerangka kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Perubahan Iklim	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan	Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan serta pertambangan	
Jumlah penduduk dan bonus demografi	Belum optimalnya Penguatan Administrasi Kependudukan, Pengarsipan, dan Data Terpadu untuk Efektivitas Layanan Publik		Kependudukan	Perkuatan Peran Kelas Menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas terutama pada sektor-sektor produktif	Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bemilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas	Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Masih kurangnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Transformasi Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga		Demografi Global	Perkuatan Peran Kelas Menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas terutama pada sektor-sektor produktif	Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/ talent drain, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/ kejuruan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya brain/ talent drain pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023).	Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah
					Prevalensi stunting masih relatif tinggi, rata-rata untuk wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen	Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah
					Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023) dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen	Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Kurang optimalnya Penguatan Peran Gender, Perlindungan Anak, dan Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Daerah		Pertumbuhan Kelas Menengah	Perkuatan Peran Kelas Menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas terutama pada sektor-sektor produktif	Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bemilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas	Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah
Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif, dan Inklusif		Pertumbuhan Kelas Menengah	Perkuatan Peran Kelas Menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas terutama pada sektor-sektor produktif		Pengelolaan Pemerintah Daerah
	Transformasi Digital dan Penguatan Infrastruktur Teknologi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		Perkembangan Teknologi	Peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan inovatif	Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bemilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar,	Pengelolaan Pemerintah Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
					konektivitas, dan digital masih terbatas	
	Penguatan Tata Kelola Keamanan Siber, Data, dan Sistem Informasi Pemerintah					
	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Lembaga melalui Profesionalisme, Inovasi, dan Sistem Merit.					
Potensi Sumber Daya Alam dan Nilai Tambah Ekonomi	Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Pertanian, Perikanan, dan Kemandirian Pangan Daerah		Geopolitik dan Geoekonomi	Peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan inovatif	Diversilikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak pada sektor ekstraktif dan industri hulu.	Pembangunan Perekonomian Daerah

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang telah disampaikan pada masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025 - 2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2025 - 2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025 - 2029.
Visi Pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hulu 2025 - 2029 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG RELIGIUS MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Penjelasan kata kunci pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Rokan Hulu memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya. Majunya sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan.
Religius	Menguatnya identitas Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk dengan aktifnya kegiatan keagamaan, dan pembinaan keagamaan dalam suasana yang harmonis dan toleran.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan	Sumberdaya alam di Rokan Hulu harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat, tetapi harus tetap menjaga keseimbangan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungannya.
Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan	Terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, IPM tinggi, sehat, damai, bahagia, dengan tingkat pendapatan yang memadai, merata dan bisa dipertahankan terus menerus pada generasi-generasi selanjutnya.

Makna dari setiap visi pembangunan ini tentunya sangat berkaitan dengan visi dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau, sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki keselarasan serta berdampak positif bagi

pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana sasaran pembangunan yang merupakan visi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Disamping itu visi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 merupakan tahapan periode pertama RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045. Adapun sasaran pembangunan/visi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III-1
Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025 s.d 2029

Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 - 2029						Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025 - 2029					
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Baseline (2024)**	**2025**	**2029**	**No**	**Sasaran**	**Indikator**	**Baseline (2024)**	**2025**	**2029**
1	Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju	Pertumbuhan Ekonomi	5,05 % (2024)	5,3	8	1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	2,71	3,34-3,63	3,89-4,73
		GNI Per Kapita	4.870 USD (2023)	5.410	8.000			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	95,447	101,77 - 107,79	130,93-138,07
		Kontribusi PDB Maritim	7,9 % (2022)	8,1	9,1			Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	25,7	26,44 - 27,61	27,80-28,38
		Kontribusi PDB Manufaktur	18,67 % (2023)	20,08	21,9						
2	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia lnternasial Meningkat	Global Power Index	34 (2023)	33	29	2	Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,75 (2023)	2,9	3,15
3	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan	9,03 % (Mar 2024)	7,0-8,0	4,5-5,0	3	Pengentasan Kemiskinan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,62	9,2-9,51	8,13 -8,48
		Kemiskinan Ekstrim		2,15 - < 0,5 (2026)				Rasio Gini	0,272	0,266-0,269	0,241-0,258
		Rasio Gini	0,379 (Mar 2024)	0,378-0,382	0,372-0,375			Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	5,10	5,17	5,36
		Kontribusi PDRB KTI	20,9 % (2023)	21,4	22,4						
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2020)	0,56	0,59	4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,07	73,57-73,99	75,30-75,91
								Pemajuan Budaya Daerah (%)	27,27	30	50
								Persentase Penanganan Konflik SARA (%)	100	100	100
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission	Intensitas Emisi GRK	34,09 % (2022)	35,53	45,17	5	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	65,31	69,32	70,39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	77,20						

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Di dalam kampanye Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan misi pembangunan yang akan dijalankan serta sesuai dengan Berita Acara Penyesuaian misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu secara Teknokratik pada tanggal 5 Maret 2025 yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati tertuang misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 adalah:

1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Wilayah.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana.
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial.
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah

Misi 1 Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal, terutama di sektor agribisnis (kelapa sawit, karet) dan supportingnya infrastrukturnya. Fokus penguatan ekonomi meliputi pengembangan dan dukungan pembangunan industri hilir/pabrik pengolahan hasil perkebunan maupun pertanian, pemberdayaan UMKM dengan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pemasaran digital, serta fasilitasi dan kemudahan berinvestasi di daerah. Selain itu, ekonomi kreatif akan digerakkan melalui pengembangan produk kerajinan lokal dan promosi wisata alam maupun buatan daerah, yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi lainnya. Sejalan dengan berkembangnya wilayah, prioritas pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan konektivitas melalui pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta fasilitas pendukungnya sebagai penghubung dan pendukung perpindahan barang/jasa dan orang, baik dalam perekonomian maupun konteks lainnya. Pengembangan jaringan listrik internet difasilitasi/dibangun dan diperluas sampai ke daerah terpencil guna mendukung digitalisasi UMKM. Dukungan pembangunan rumah tangga dengan akses hunian layak juga menjadi prioritas infrastruktur dan merupakan bagian dalam pengembangan perkotaan dan perdesaan. Pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata dan layanan publik juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan pada misi ini. Dalam lima tahun ke depan, misi ini diharapkan meningkatkan PDRB sektor unggulan, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana

Misi ke 2 ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam potensi daerah yang dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta tanggap terhadap bencana. Kabupaten Rokan Hulu yang kaya akan sumber daya alam seperti sektor pertanian baik perkebunan kelapa sawit, karet, peternakan maupun sektor pertanian lainnya serta pertambangan, memerlukan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan. Misi ini berfokus pada optimalisasi pemanfaatan SDA dengan prinsip keberlanjutan melalui peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi daerah, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi, peningkatan pengelolaan layanan persampahan dan limbah, pelestarian lingkungan serta peningkatan tata kelola dan tanggap bencana daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan berusaha meminimalkan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan mendorong praktik-praktik agroforestri (sistem tata guna lahan yang dinamis dan ramah lingkungan yang secara sengaja mengintegrasikan pepohonan dan semak dengan tanaman pertanian dan/atau ternak) untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya melalui program-program pembangunan termasuk penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi prioritas dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan daerah serta konservasi sumber daya air. Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan tanggap bencana, yang mengindikasikan adanya strategi dan tindakan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan mengatasi dampak bencana alam terkait dengan sumber daya alam yang dikelola/dieksploitasi. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ketahanan pangan dan air serta kualitas lingkungan hidup yang berkontribusi pada ketahanan ekologi sekaligus mensejahterakan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya

Seiring dengan berkembangnya penduduk dan daerah, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan Wilayah Melayu, saat ini sudah terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya, akan tetapi integrasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam pembangunan sudah menjadi bagian dari masyarakatnya yang religius. Misi ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling toleran dalam hidup sehari-hari termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaannya dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, misi ini juga bertujuan dalam rangka pelestarian budaya Melayu dan lokal lainnya yang diwujudkan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah yang juga merupakan bagian dari obyek wisata daerah. Pemerintah juga mendorong peran aktif tokoh adat dan ulama dalam program pencegahan konflik sosial dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Tantangan

modernisasi dan pengaruh global yang dihadapi diatasi dengan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya identitas budaya, termasuk kurikulum muatan lokal di sekolah. Harapannya, misi ini memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menjadikan budaya sebagai modal sosial untuk menarik investasi pariwisata.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Pembangunan manusia menjadi fondasi utama kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. Di sektor pendidikan, misi ini fokus pada pemerataan akses pendidikan berkualitas termasuk pembangunan sekolah di daerah terpencil/sulit, pelatihan guru berbasis kompetensi, dan penyediaan beasiswa maupun bantuan lainnya bagi siswa kurang mampu. Kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lokal diperkuat untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Di bidang kesehatan, prioritas pada misi ini diberikan pada penguatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas, posyandu) dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis disamping penguatan fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit). Program pencegahan stunting, imunisasi menyeluruh, serta layanan kesehatan gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas menjadi langkah konkret. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi kesehatan terpadu dan telemedicine akan diterapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan. Tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang sanitasi diatasi melalui kampanye hidup sehat berbasis komunitas. Misi ini juga difokuskan pada penguatan perlindungan sosial, prioritas pada misi ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan-bantuan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan disabilitas serta peningkatan pendapatannya melalui program-program sosial dan pembangunan yang ada. Dampak yang diharapkan melalui misi ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka putus sekolah, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta penurunan angka kemiskinan di daerah.

5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum

Misi ini menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen memerangi korupsi melalui digitalisasi layanan publik (*e-government*), penguatan inspektorat daerah, serta penerapan sistem pengadaan barang/jasa elektronik (*e-procurement*). Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui forum musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dari tingkat desa sampai kabupaten, pembentukan kelompok pengawas anggaran, dan kanal aduan berbasis aplikasi. Pemerintah juga mendorong pemanfatan riset dan peningkatan inovasi untuk mendukung pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi makro daerah serta meningkatkan keadilan hukum dan keamanan daerah. Pelatihan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan birokrasi yang responsif menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilu/pemilukada diantisipasi dengan peningkatan edukasi politik di berbagai

platform termasuk dialog interaktif. Dengan misi ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif, korupsi berkurang signifikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik meningkat, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai aspirasi rakyat.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu merupakan cita-cita masyarakat Rokan Hulu yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2025 - 2029. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Rokan Hulu **sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang religius melalui pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera dan berkelanjutan**. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hulu periode 2025 - 2029. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur dan relevan dengan apa yang akan diubah dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Tabel III-2

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025 s.d 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan.										
1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.34-3.63	3.83-4.24	3.85-4.28	3.87-4.32	3.89-4.37	3.91-4.42	
			PDRB per Kapita (juta rupiah) (Juta Rupiah)	101.77-107.79	109.06-115.36	116.35-122.93	123.64-130.50	130.93-138.07	138.22-145.64	
			Rasio Gini (Rasio)	0.266-0.269	0.259-0.266	0.253-0.263	0.247-0.260	0.241-0.258	0.236-0.255	
		1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.95 -3.20	2.86 -3.11	2.78-3.03	2.69-2.94	2.60-2.85	2.51-2.76	
		1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	26.44-27.61	26.78-27.80	27.12-27.80	27.46-28.19	27.80-28.38	27.99-28.57	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	16,07	16,32	16,57	16,82	17,07	17,57	
		1.1.3.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat	Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	60.416,54	64.186,36	67.956,18	71.726	75.495,82	79.265,64	
			Persentase Desa Mandiri (%)	49,64	51,98	54,32	56,65	58,99	61,33	
		1.1.4. Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	6.088	6.305,33	6.522,66	6.739,99	6.957,32	7.174,65	
		1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.33	0.33-0.35	0.35-0.37	0.37-0.39	
	1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah		Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur (%)	48,25	49,59	50,93	52,27	53,61	54,92	
		1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	3,48	3,51	3,53	3,55	3,58	3,6	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	82,41	82,92	83,44	83,95	84,47	84,98	
		1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio konektifitas (Rasio)	41,83	43,47	45,1	46,73	48,37	50	
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana	2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah		Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%)	0,594	0,597	0,6	0,602	0,605	0,608	
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	61	63,12	65,24	67,36	69,48	71,6	
		2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)	16.392,99	16.810,2	17.227,42	17.644,64	18.061,85	18.479,07	
		2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	8,19	7,7	7,21	6,71	6,22	5,73	
	2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana (IRB) (*)	154,87	154,53	154,2	153,87	153,53	153,2	
		2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	69,32	69,59	69,86	70,12	70,39	70,66	
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	91,14	91,64	92,14	92,64	93,14	93,64	
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	29,57	29,97	30,37	30,77	31,25	32,81	
		2.2.2. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	14,37	17,03	19,69	22,34	25	31,25	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya	3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis		Persentase Pemajuan Budaya Daerah (%)	30	30	30	40	50	60	
		3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%)	77,13	79,56	82	84,43	86,86	89,29	
		3.1.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	0	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial	4.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks) (Indeks)	73.57-73.99	74.00-74.42	74.44-74.85	74.87-75.28	75.30-75.91	75.93-76.34	
		4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.90-13.04	13.02-13.16	13.15-13.29	13.27-13.41	13.39-13.53	13.51-13.65	
			Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)	8.82-8.93	9.05-9.16	9.28-9.39	9.51-9.62	9.74-9.85	9.97-10.08	
		4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73.71-75.22	74.21-75.67	74.71-76.12	75.21-76.56	75.71-77.01	76.21-77.46	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,38	19,36	18,34	17,32	16,3	15,28	
		4.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan (Persentase)	9.20-9.51	8.92-9.25	8.65-8.98	8.39-8.73	8.13-8.48	7.87-8.25	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial	36,6	40,03	43,47	46,9	50,33	53,76	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			ketenagakerjaan kabupaten (%)							
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3,36	4,25	5,13	6,02	6,91	7,8	
		4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,495	0,49	0,485	0,48	0,47	0,45	
			Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,7	
		5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	3,48*(SPBE)	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
			Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	81,359	82,151	82,551	82,739	82,95	83,229	
			Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai)	74	74,78	75,55	76,33	77,1	77,88	
			Indeks Sistem Merit (Indeks)	263	267	270	274	275	280	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	50	51,88	53,75	55,63	57,5	59,38	
		5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,19	4,2	4,21	4,22	4,23	4,24	
		5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi (%)	2.5 -3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.10-0.11	0.12-0.13	0.13-0.14	0.13-0.15	0.14-0.17	0.15-0.18	
		5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daera h (%)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pencapaian Aksi HAM (%)	75,5	76,13	76,75	77,38	78	78,63	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

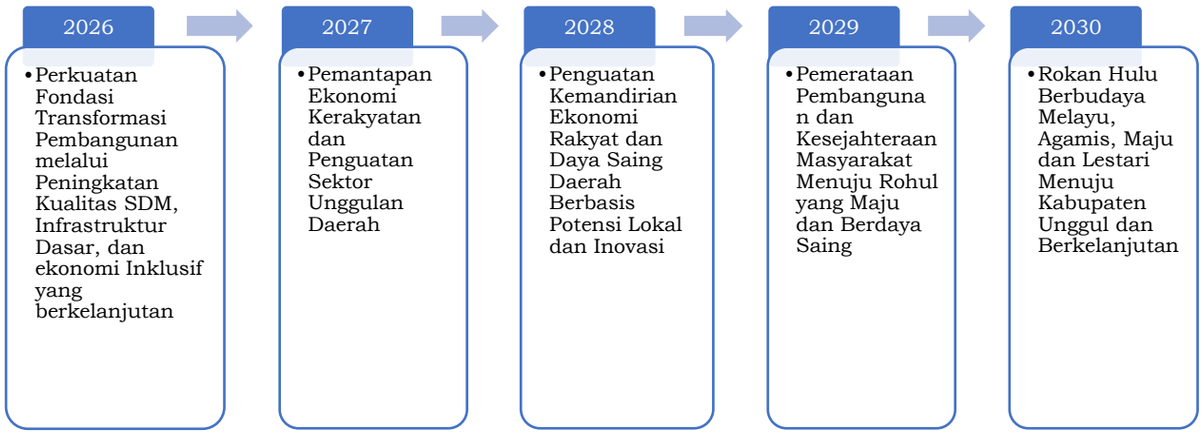
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran dan target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada BAB sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Selanjutnya, pentahapan pembangunan RPJMD yang disusun berdasarkan runtut waktu serta dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pentahapan pembangunan RPJMD ini dapat dijadikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar III-1
Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 s.d 2030

1. ***Fokus Pembangunan Tahun Pertama (2026): Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan***

Pada tahun awal RPJMD, fokus utama pembangunan diarahkan untuk membenahi fondasi pembangunan daerah. Prioritas utama adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung desa dan kecamatan, jaringan irigasi, akses air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kualitas SDM juga menjadi sasaran strategis, melalui pelatihan tenaga pengajar dan tenaga medis, penguatan sarana pendidikan, serta program intervensi kesehatan berbasis komunitas. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan didorong dengan mempercepat digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan OPD. Upaya ini dilengkapi dengan integrasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang menggabungkan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perlindungan sosial berbasis data. Pemerintah Kabupaten Rohul juga akan mendorong kemitraan antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan, untuk memastikan inklusivitas dan keberpihakan pada masyarakat yang paling rentan.

2. *Fokus Pembangunan Tahun Kedua (2027): Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah*

Pembangunan tahun kedua ditujukan untuk memantapkan transformasi yang telah dibangun, dengan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan sektor unggulan lokal. Pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan perikanan darat akan diprioritaskan melalui peningkatan produktivitas, akses pasar, dan teknologi tepat guna. Pemerintah daerah akan mengembangkan sentra ekonomi di kecamatan serta memperkuat konektivitas antarwilayah agar produk lokal dapat bersaing dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, peran BUMDes, koperasi, dan UMKM akan diperkuat melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan. Revitalisasi pasar desa dan pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. Strategi ini ditujukan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor besar yang belum inklusif.

3. *Fokus Pembangunan Tahun Ketiga (2028): Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi*

Memasuki tahun ketiga, Kabupaten Rokan Hulu diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dengan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal melalui hilirisasi dan inovasi. Program-program yang dikembangkan akan mendorong petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal untuk tidak hanya memproduksi bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai pasar lebih tinggi. Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pembangunan pusat logistik dan digitalisasi rantai pasok, serta memacu pemanfaatan teknologi digital dalam usaha tani dan dagang.

Pemerintah juga akan mendorong pengembangan desa wisata, agrowisata, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal untuk memperluas

diversifikasi ekonomi. Inkubasi bisnis dan penguatan komunitas wirausaha muda akan menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing daerah. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku swasta, dan lembaga pendanaan akan digalakkan guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang adaptif terhadap perubahan pasar dan tantangan global.

4. *Fokus Pembangunan Tahun ke Empat (2029): Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing*

Tahun 2029 menjadi momentum untuk memantapkan hasil pembangunan dengan fokus pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten akan mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal dengan mengalokasikan anggaran yang berpihak pada kecamatan dan desa dengan pendapatan masyarakat rendah. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi akan diperluas hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga layanan publik dan distribusinya menjadi perhatian serius.

Dana Desa akan dioptimalkan untuk pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan pelibatan partisipatif warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pemerintah juga akan memperluas program padat karya berbasis komunitas untuk menciptakan lapangan kerja jangka pendek sekaligus memperbaiki infrastruktur dasar. Tujuan akhirnya adalah mengurangi ketimpangan antar kawasan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memperkuat rasa keadilan sosial dalam pembangunan daerah.

5. *Fokus Pembangunan Tahun ke Lima (2030): Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Masyrakat Sejahtera Dan Berkelanjutan*

Sebagai puncak tahapan RPJMD, tahun 2030 menjadi tahun refleksi dan penyempurnaan arah pembangunan menuju Kabupaten Rokan Hulu yang maju dan berkelanjutan dengan identitas pusat pertumbuhan ekonomi dan religiusitas yang kuat. Pemerintah daerah akan memprioritaskan pelestarian budaya Melayu melalui program revitalisasi situs budaya, penguatan seni tradisional, dan integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan karakter. Nilai keagamaan juga akan diperkuat melalui moderasi beragama, peningkatan literasi spiritual, dan pengembangan program sosial berbasis masjid dan pesantren.

Di sisi lain, pembangunan lingkungan hidup akan menjadi elemen utama. Pemerintah akan memperkuat perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya air, serta menerapkan prinsip pembangunan rendah karbon melalui inisiatif seperti desa hijau dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Keseluruhan pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan Kabupaten Rokan Hulu yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam budaya, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

Secara rinci, tahapan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu diuraikan melalui misi Kepala Daerah yang sejalan dengan fokus pembangunan setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-3
Penjabaran Pentahapan Pembangunan Tahun 2025 s.d 2029 Berdasarkan Misi

Misi	TEMA 2026 **Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	TEMA 2027 **Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah**	TEMA 2028 **Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi**	TEMA 2029 **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing**	TEMA 2030 **Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan**
MISI 1: Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan Peningkatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan Peningkatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha yang berkelanjutan
	Fasilitasi Pengembangan industri pengolahan berbasis potensi wilayah	Perluasan hasil pengembangan industri pengolahan berbasis potensi wilayah	Pemanfataan dan penggunaan hasil riset dan teknologi mendorong peningkatan produktifitas hasil industri	Faslitasi dan dukungan Pengembangan hilirisasi komoditas produk unggulan daerah berbasis teknologi produksi	Peningkatan kerjasama luar daerah dalam pengembangan dan pemasaran hasil produksi unggulan daerah
	Fasilitasi Pengembangan potensi ekonomi lokal dan inklusif baik pada IKM, UMKM, koperasi dan BUMD guna peningkatan nilai tambah usaha	Penguatan kualitas kelembagaan dan proses bisnis IKM, UMKM, Koperasi dan BUMD	Pemanfaatan ekosistem digital dan inkubator bisnis dalam pengembangan dan peningkatan usaha IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMD	Industrialisasi IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMD berbasis ekosistem digital dan indikator bisnis	Pemantapan nilai tambah usaha IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMD secara berkelanjutan
	Pengembangan dan Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik	Peningkatan Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik	Peningkatan Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik pada kawasan strategis	Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik pada kawasan strategis dan PKW serta PKL	Perkuatan infrastruktur transportasi dan logistik daerah yang andal mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan perkotaan dan perdesaan

Misi	TEMA 2026 **Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	TEMA 2027 **Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah**	TEMA 2028 **Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi**	TEMA 2029 **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing**	TEMA 2030 **Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan**
	Penyediaan Pembangunan rumah layak huni dan penurunan luasan kawasan kumuh	Pemerataan pembangunan rumah layak huni dan penurunan luasan kawasan kumuh	Peningkatan pemerataan pembangunan rumah layak huni dan Peningkatan penurunan luasan kawasan kumuh	Peningkatan pengelolaan dan pengentasan rumah layak huni dan kawasan kumuh	Pemantapan pengelolaan dan pengentasan rumah layak huni dan kawasan kumuh di daerah bertahap, merata dan berkelanjutan
MISI 2: Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana	Peningkatan produktifitas pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan) serta perikanan	Perluasan peningkatan produktifitas (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan) serta perikanan melalui pemanfaatan teknologi pertanian/ perikanan	Pemantapan produktifitas (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan) serta perikanan mendukung ketahanan pangan daerah	Diversifikasi produk dan pengembangan kerjasama dengan sektor industri/ badan usaha terkait dengan tetap meningkatkan ketahanan pangan daerah	Promosi dan pemasaran produk pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan) serta perikanan yang menjadi unggulan ke luar daerah
	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui pemantauan dan pengawasan atas kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penyusunan regulasi	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan regulasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan atas kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup	Penguatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan regulasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan atas kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara berkala dan berkelanjutan	Pemantapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan regulasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan atas kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara berkala dan berkelanjutan

Misi	TEMA 2026 **Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	TEMA 2027 **Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah**	TEMA 2028 **Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi**	TEMA 2029 **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing**	TEMA 2030 **Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan**
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan sampah dan limbah serta ketersediaan sanitasi	Perluasan penanganan permasalahan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan pengelolaan penanganan sampah dan limbah serta ketersediaan sanitasi	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu pada simpul-simpul strategis	Peningkatan penguatan pengelolaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Pemantapan pengelolaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu berkelanjutan
	Pengembangan ketersediaan pelayanan air minum/ bersih	Peningkatan ketersediaan dan perluasan pelayanan air minum/ bersih	Penguatan Peningkatan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih	Peningkatan pengelolaan pelayanan air minum/ bersih secara terpadu	Pemantapan pengelolaan pelayanan air minum/ bersih secara terpadu dan berkelanjutan
	Pemetaan potensi dampak bencana termasuk dampak perubahan iklim	Penyusunan rencana aksi mitigasi penanggulangan bencana serta pembangunan sarana prasarana untuk mitigasi dan pengurangan resiko bencana	Peningkatan upaya mitigasi penanggulangan bencana termasuk dampak perubahan iklim serta pembangunan sarana prasarana untuk mitigasi dan pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana	Peningkatan upaya mitigasi penanggulangan bencana termasuk dampak perubahan iklim serta pembinaan dan pelatihan tanggap bencana pada instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan	Peningkatan kesiapsiagaan mitigasi penanggulangan bencana termasuk dampak perubahan iklim pada semua stakeholder terkait dan masyarakat secara berkelanjutan
MISI 3: Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya	Fasilitasi pengembangan kelembagaan kebudayaan daerah	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kebudayaan daerah	Pemantapan kelembagaan kebudayaan daerah dan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Penguatan peran kelembagaan kebudayaan daerah dan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan

Misi	TEMA 2026 Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan	TEMA 2027 Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah	TEMA 2028 Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi	TEMA 2029 Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing	TEMA 2030 Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan
	Pembinaan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Peningkatan pembinaan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Peningkatan pembinaan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Penguatan pembinaan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Pemantapan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan
	Pembinaan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	Peningkatan pembinaan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	Peningkatan pembinaan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	Penguatan pembinaan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	Pemantapan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat
MISI 4: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial.	Penyediaan akses dan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan (PAUD, SD, SMP dan NF) serta peningkatan kualitas/ kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Perluasan penyediaan akses dan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan (PAUD, SD, SMP dan NF) serta peningkatan kualitas/ kompetensi guru dan tenaga kependidikan termasuk pemerataan distribusinya	Penguatan Penyediaan akses dan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan (PAUD, SD, SMP dan NF) serta penguatan kualitas/ kompetensi guru dan tenaga kependidikan termasuk pemerataan distribusinya	Pemerataan dan perluasan wajib belajar 13 tahun dengan layanan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas	Pemantapan wajib belajar 13 tahun dengan layanan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas
	Penyediaan akses, infrastruktur dan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan masyarakat, serta penanganan stunting dan gizi buruk	Perluasan penyediaan akses, infrastruktur dan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan peningkatan penanganan stunting dan gizi buruk	Peningkatan upaya pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup sehat dan bersih	Penguatan peningkatan upaya pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup sehat dan bersih	Pemantapan layanan kesehatan yang merata, berkeadilan dan berkualitas

Misi	TEMA 2026 **Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	TEMA 2027 **Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah**	TEMA 2028 **Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi**	TEMA 2029 **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing**	TEMA 2030 **Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan**
	Pemberdayaan dan pemerataan layanan bagi masyarakat miskin serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan masyarakat rentan	Peningkatan pemberdayaan dan pemerataan layanan bagi masyarakat miskin serta peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan masyarakat rentan	Penguatan pemberdayaan dan layanan bagi masyarakat miskin serta penguatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan masyarakat rentan	Peningkatan kemandirian ekonomi dan layanan bagi masyarakat miskin serta penguatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan masyarakat rentan	Pemantapan pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di daerah
	Pemenuhan hak perempuan dan anak serta kesetaraan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal	Peningkatan Pemenuhan hak perempuan dan anak serta kesetaraan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta peningkatan ketangguhan keluarga	Perluasan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta peningkatan ketangguhan keluarga	Pemantapan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender serta peningkatan ketangguhan keluarga
MISI 5: Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik berbasis TIK	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja berorientasi pada kepuasan masyarakat serta peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK	Perluasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja berorientasi pada kepuasan masyarakat serta perluasan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif serta pelayanan publik berkualitas yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja dan TIK
	Pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan kualitas lanjutan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan	Pemerataan Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan	Penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang kompeten dan profesional	Pemantapan aparatur pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional

Misi	TEMA 2026 **Perkuatan Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	TEMA 2027 **Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah**	TEMA 2028 **Penguatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi**	TEMA 2029 **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Rohul yang Maju dan Berdaya Saing**	TEMA 2030 **Rokan Hulu Berbudaya Melayu, Agamis, Maju dan Lestari Menuju Kabupaten Unggul dan Berkelanjutan**
	Pemetaan riset, inovasi dan teknologi yang berkembang di daerah dan berpotensi mendukung pembangunan daerah	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi Iptek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah	Pemanfaatan riset dan inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendukung percepatan pembangunan daerah	Perluasan pemanfaatan riset dan inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendukung percepatan pembangunan daerah	Penguatan kerjasama riset dan inovasi dengan stakeholders terkait dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Tabel III-4
Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan		
1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	
	Memfasilitasi pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan perikanan untuk menjadi nilai tambah ekonomi	
	Memfasilitasi pengembangan kegiatan perdagangan termasuk berorientasi ekspor	
	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk daya saing produk dan jasanya	
	Penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat	
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	
	Menata UPT Transmigrasi menjadi Desa Definitif	
	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	
	Meningkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif	
	Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten	
	Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya	
	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan intermoda	
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana	Memfasilitasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan	
	Meningkatkan ketersediaan layanan irigasi	
	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah	
	Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	
	Meningkatkan ketersediaan sanitasi aman bagi masyarakat	
	Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dan limbah	
	Fasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan limbah	

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)
	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih	
	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah	
	Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan.	
	Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	
	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan pemerataannya	
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
	Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan.	
	Dukungan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	
	Fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan	
	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan perpustakaan	
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan rujukan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD	
	Pemenuhan penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan	
	Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat	
	Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan dan gizi masyarakat	
	Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting	
	Memperkuat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.	
	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	
	Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kepemudaan dan olahraga	
	Meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan	
	Meningkatkan perlindungan sosial pekerja disabilitas	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	
	Pengembangan wilayah dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan	
	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui dukungan usaha produktif, pelatihan kerja, dan fasilitasi akses permodalan.	
	Peningkatan penanganan rehabilitasi sosial	
	Peningkatan cakupan dan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat rentan melalui fasilitasi dan sinergi lintas sektor.	
	Penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif bagi kelompok rentan melalui pemanfaatan data Regsosek yang tepat sasaran dan efisien	

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)
	Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial	
	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip	
	Mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, dan pemerataan akses teknologi informasi	
	Meningkatkan tata kelola pertanahan dan perbatasan	
	Meningkatkan tata kelola organisasi, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan	
	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah	
	Meningkatkan tata kelola integritas dan pengawasan	
	Meningkatkan profesionalitas ASN	
	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan investasi	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	
	Mengendalikan inflasi daerah	
	Meningkatkan PAD dari pajak daerah	
	Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	
	Meningkatkan keadilan dan ketaatan hukum di daerah	
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	

Tabel III-5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan				
1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	Identifikasi dan perencanaan kebutuhan pelatihan yang relevan, penyediaan mentorship dan coaching, serta peningkatan kerja sama antara dunia industri dan lembaga pendidikan
		1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	Memfasilitasi pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan perikanan untuk menjadi nilai tambah ekonomi	Mendorong hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, peningkatan produksi di sektor hulu (tangkap/budidaya), serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan
			Memfasilitasi pengembangan kegiatan perdagangan termasuk berorientasi ekspor	Peningkatan dan pengembangan kegiatan perdagangan termasuk pada pasar-pasar baru non tradisional, serta pemberian insentif bagi industri unggulan berbasis ekspor
		1.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk daya saing produk dan jasanya	Perluasan akses pasar dan pembiayaan/investasi, peningkatan pengembangan kewirausahaan, serta perkuatan kelembagaan koperasi dan penyatuan UMKM sejenis dalam wadah koperasi
			Penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat	Pengembangan ekosistem ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat
				Fasilitasi sertifikasi halal, penguatan kelembagaan dan SDM, pengembangan kebijakan yang mendukung ekonomi halal, penguatan kemitraan halal
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan dan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pengetahuan dan keterampilan, serta memanfaatkan potensi desa dan sumber daya lokal.
			Menata UPT Transmigrasi menjadi Desa Definitif	Penataan wilayah dan administrasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) agar memenuhi syarat menjadi desa definitif, serta memberikan pembinaan dan fasilitasi pembangunan kepada masyarakat transmigran
		1.1.4. Meningkatnya investasi daerah	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, penyederhanaan birokrasi perizinan, dan melakukan promosi investasi secara terpadu
		1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu	Meningkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk wisata, pemanfaatan teknologi digital, promosi terintegrasi, dan kolaborasi antar stakeholder pariwisata
	1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah	1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur	Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Peningkatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru yang strategis
		1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya	Peningkatan penyediaan program bantuan perumahan, kemudahan akses pembiayaan, serta pembangunan prasarana dasar
		1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan intermoda	Pengembangan sistem transportasi terpadu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan transportasi publik
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan	2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah	2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	Memfasilitasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Fasilitasi dan pemberian bantuan benih unggul, pupuk, alat pertanian modern, pelatihan petani dan nelayan, serta pengembangan irigasi dan fasilitas perikanan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lingkungan dan Tanggap Bencana			Meningkatkan ketersediaan layanan irigasi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengoptimalan pengelolaan air, serta penerapan teknologi irigasi yang efisien
		2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah	Pengembangan sistem logistik pangan yang efektif, peningkatan pengawasan kualitas dan keamanan pangan, serta perkuatan cadangan pangan daerah
	2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan	2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Melakukan edukasi lingkungan, penegakan hukum lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				Peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
			Meningkatkan ketersediaan sanitasi aman bagi masyarakat	Peningkatan dan pembangunan fasilitas sanitasi komunal dan individual, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan limbah domestik yang terpadu
			Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan limbah, serta pelibatan partisipasi masyarakat
			Fasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan limbah	Fasilitasi pemanfaatan limbah perkebunan menjadi energi alternatif, dan pemanfaatan potensi EBT, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah provinsi, dan pusat dalam mendukung kebijakan transisi energi daerah
		2.2.2. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih	Pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, melindungi sumber mata air, serta peningkatan kapasitas pengelolaan air minum

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				oleh Unit Pengelola Air Minum/Bersih
		2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Penyusunan peta rawan bencana, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, serta pelatihan dan simulasi bencana
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya	3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis	3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah	Peningkatan pelaksanaan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek budaya serta penyelenggaraan program edukasi budaya
			Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan.	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui fasilitasi ruang ekspresi budaya, pemberdayaan komunitas lokal, dan integrasi nilai-nilai budaya dalam kegiatan pendidikan, ekonomi kreatif, dan kehidupan sosial.
		3.1.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila	Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Mengintensifkan program pendidikan dan sosialisasi Bela Negara yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan memperkuat wawasan kebangsaan
			Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat	Mengadakan dialog antarumat beragama dan kegiatan yang mendorong toleransi, saling pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Pengintegrasian nilai-nilai sosial dan kemanusiaan universal ke dalam pengajaran agama untuk membangun etika sosial dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun kerjasama antarumat beragama dalam kegiatan kemasyarakatan yang berlandaskan pada tujuan bersama dan kepentingan kemanusiaan
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial	4.1. Meningkatnya kualitasSumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan	4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan pemerataannya	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta mendorong pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kualitas minimal sesuai standar nasional dan berkarakter baik
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Mendorong pemerataan layanan pendidikan dan distribusi guru yang merata, serta memperluas dukungan bagi peserta didik kurang mampu
			Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan	Melaksanakan pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan peningkatan kualifikasi bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
			Dukungan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	Memfasilitasi akses pendidikan tinggi berbasis STEAM melalui beasiswa daerah dan afirmasi bagi pelajar berprestasi serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga riset untuk mendukung penelitian dan penyerapan lulusan
			Fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan	Meningkatkan fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan kelembagaan, serta pemberian bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatkan aksesibilitas dan layanan perpustakaan	Pengembangan koleksi perpustakaan digital, pemanfaatan teknologi dan software yang memadai, serta peningkatan akses layanan informasi bagi seluruh pengguna, termasuk penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
		4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan rujukan	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan fasilitas serta tenaga kesehatan ditingkat dasar, peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem rujukan berjenjang, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia
			Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD	Peningkatan rasio tenaga medis dan kelengkapan fasilitas, serta peningkatan mutu pelayanan dan penerapan standar pelayanan yang efektif
			Pemenuhan penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan	Memperkuat layanan kesehatan dasar yang merata dan responsif di seluruh wilayah.
			Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat	Peningkatan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu
			Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
			Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting	Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, Peningkatan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas pada sasaran utama dan Penguatan kelembagaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan
			Memperkuat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat	Menguatkan upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan keluarga dalam pencegahan penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
			Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Memperkuat pemberdayaan dan pembinaan keluarga dalam rangka menuju keluarga yang sejahtera
			Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kepemudaan dan olahraga	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda serta prestasi olahraga
		4.1.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu	Meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan	Perluasan cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga mencakup pekerja informal dan rentan serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial
			Meningkatkan perlindungan sosial pekerja disabilitas	Penyediaan akses, fasilitas dan lingkungan kerja ramah disabilitas serta memfasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi pekerja disabilitas.
			Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran: Memastikan program bantuan sosial (pangan, kesehatan, pendidikan) menjangkau keluarga miskin dan rentan, serta dukungan usaha produktif, pelatihan kerja, dan fasilitasi akses permodalan bagi masyarakat miskin
			Pengembangan wilayah dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan	Pembangunan dan peningkatkan aksesibilitas infrastruktur (jalan, air bersih, listrik) dan layanan publik diwilayah kantong kemiskinan,

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui dukungan usaha produktif, pelatihan kerja, dan fasilitasi akses permodalan.	Pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan usaha ekonomi produktif, peningkatan keterampilan, perluasan akses permodalan, dan perlindungan sosial berkelanjutan.
			Peningkatan penanganan rehabilitasi sosial	Penanganan rehabilitasi sosial masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)
			Peningkatan cakupan dan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat rentan melalui fasilitasi dan sinergi lintas sektor.	Peningkatan pemahaman masyarakat rentan tentang pentingnya jaminan sosial dan cara mengaksesnya serta membangun kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga jaminan sosial, dan organisasi masyarakat untuk memperluas cakupan kepesertaan.
			Penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif bagi kelompok rentan melalui pemanfaatan data Regsosek yang tepat sasaran dan efisien	Mengoptimalkan pemanfaatan data Regsosek dalam penyaluran perlindungan sosial yang responsif, adaptif, dan tepat sasaran terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk dalam menghadapi bencana
			Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial	Mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf) dalam mendukung perlindungan sosial serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial syariah.
		4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi, peningkatan layanan pengaduan dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pendampingan bagi korban kekerasan dan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mempromosikan kesetaraan gender.
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip	Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (e-procurement) yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip melalui pelatihan dan sertifikasi. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pengelolaan data, sandi, dan arsip yang aman dan mudah diakses.
			Mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, dan pemerataan akses teknologi informasi	Penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data pemerintah, melaksanakan program literasi digital secara masif bagi ASN dan masyarakat serta memastikan pemerataan akses teknologi informasi ke seluruh wilayah
			Meningkatkan tata kelola pertanahan dan perbatasan	Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan penyelesaian sengketa pertanahan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi geospasial untuk pemetaan dan pengelolaan data pertanahan dan perbatasan.
			Meningkatkan tata kelola organisasi, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan	Penyederhanaan struktur organisasi yang efektif dan efisien, penerapan sistem manajemen kinerja berbasis indikator yang terukur dan akuntabel, penguatan sistem

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				perencanaan dan pengawasan internal serta eksternal secara berkelanjutan.
			Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah	Penerapan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi dan inventarisasi, penilaian, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara berkala serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
			Meningkatkan tata kelola integritas dan pengawasan	Penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melalui peningkatan kapasitas dan independensi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya.
			Meningkatkan profesionalitas ASN	Pengembangan sistem meritokrasi dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dan peningkatan program pengembangan kompetensi dan pelatihan berbasis kebutuhan.
			Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan riset untuk mendukung lahirnya inovasi daerah yang relevan dan mendorong terbentuknya ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat.
		5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi serta penyederhanaan prosedur pelayanan dan menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi (e-governance).

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan investasi	Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efektif dan pengembangan promosi investasi yang terarah dan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi investor. Serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi investor untuk mendorong masuknya investasi.
			Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana serta SDM yang melayani administrasi kependudukan.
		5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mengendalikan inflasi daerah	Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok secara berkala dan mengintensifkan kerja sama antar daerah untuk kelancaran distribusi komoditas pangan serta melaksanakan operasi pasar murah dan program pangan bersubsidi bagi masyarakat rentan.
			Meningkatkan PAD dari pajak daerah	Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala dan mengintensifkan penagihan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerapan sistem pembayaran pajak daerah berbasis teknologi
			Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	Penyederhanaan prosedur dan persyaratan dalam pengurusan pajak dan retribusi daerah dan peningkatan kompetensi SDM petugas pemungut pajak dan retribusi serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

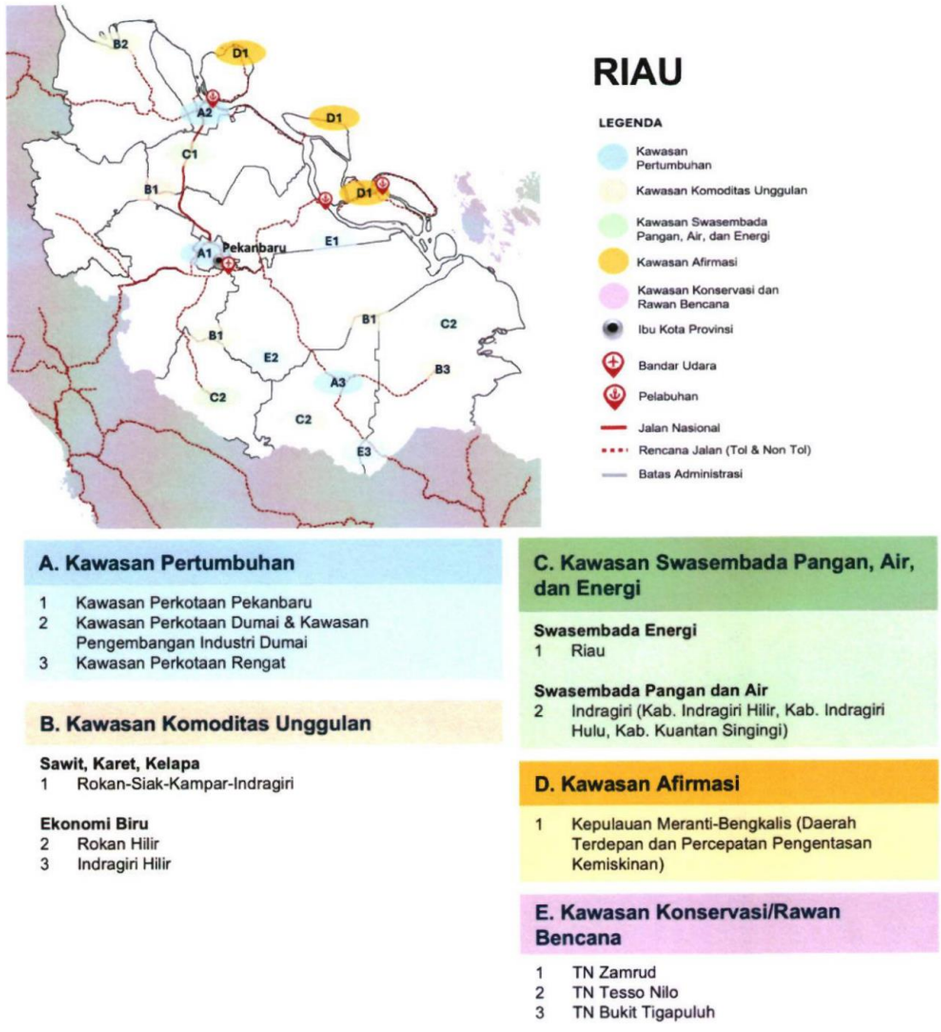
Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				mengenai hak dan kewajiban wajib pajak/retribusi
		5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	Meningkatkan keadilan dan ketaatan hukum di daerah	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi hukum dan penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum serta peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan keadilan
			Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan peningkatan patroli keamanan dan koordinasi antar instansi terkait (TNI/Polri/Satpol PP).

3.2.2 Arah Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Rokan Hulu tentunya perlu diselaraskan arah kebijakan pembangunan wilayah yang telah dituangkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di daerah yang dilaksanakan dapat sinergi dan terarah.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMN Tahun 2025-2029

Pada Lampiran IV Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau yang terbagi atas 5 kawasan sebagaimana gambar dibawah ini.



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV

Gambar III-2
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau pada RPJMN 2025 s.d 2029

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu wilayah Provinsi Riau berada pada arahan pengembangan ***Kawasan Komoditas Unggulan*** berupa sawit, karet, dan kelapa dan ***Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi*** dimana khusus Kabupaten Rokan masuk pada dukungan untuk pengembangan swasembada energi.

Selanjutnya Sasaran Pembangunan Provinsi Riau pada Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029 ini antara lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sasaran Pembangunan Provinsi Riau

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,2 (Rata-rata 2025–2029)	174,8	5,0	5,19 – 6,19	0,318 – 0,324	0,57	46,88	71,85	3,55 – 3,66
2029	5,9 (2029)	249,7	4,9	3,25 – 4,25	0,279 – 0,283	0,60	83,68	72,69	2,94 – 3,42

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV

Gambar III-3
Sasaran Pembangunan Provinsi Riau pada RPJMN 2025 s.d 2029

Adapun Penyelarasan Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Rokan Hulu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-6
Penyelarasan Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Rokan Hulu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
A.	**Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa**			
	Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa)	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. • Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya.	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi melalui peningkatan kapasitas sumber daya petani, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana prasarana produksi Perkebunan • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri sawit melalui pendampingan petani dalam rangka sertifikasi ISPO dan RSPO untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan • Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur mendukung produksi pertanian (sawit dan karet) meliputi: - Peningkatan ruas jalan poros 1 desa Rambah baru - Peningkatan ruas jalan poros 2 desa Rambah baru - Peningkatan ruas jalan Km 6 Rambah Samo – Pekan Lama - Peningkatan ruas jalan Rambah Utama – Karya Mulya - Peningkatan ruas jalan Rambah Utama – Pasir Maju - Peningkatan ruas jalan ujung batu pasir pesanggrahan – kantor Desa Pasir Makmur - Peningkatan ruas jalan Rambah Samo Barat – Sempurna Alam - Peningkatan ruas jalan Lingkar Rokan
		• Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa)	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. • Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya	

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
				- Peningkatan ruas jalan Lubuk Bendahara – Alahan – Tanjung Medan - Peningkatan ruas Jalan Kabun – Koto Ranah - Peningkatan ruas jalan Simpang Pir – Pendalian - Peniongkatan ruas jalan Menaming – Bendungan - Peningkatan ruas jalan Syech Ibrahin – Tanjung Purih - Peningkatan ruas jalan Bangun Purba Barat – Batas Sumut (Sosa) - Peningkatan ruas jalan Ulak Patian – RBS - Peningkatan ruas jalan Simpang Badak – Mahato Hulu - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Km. 11 Mahato – Km.24 Bandar Selamat - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Km.24 Bandar Selamat - Cindur. - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Dalu dalu – Pekan Tebih - Peningkatan ruas jalan dan jembatan simpang siabu – kota lama - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Kota Lama – Muara Dilam – Tripa - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Ujung Batu – Kotalama - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Kotalama – Bagan 7
		• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa)	• Pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi melalui penyediaan sarana prasarana produksi sawit

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
			pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. • Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. • Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan	
		• Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa)	• Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim pada komoditas sawit melalui tindakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan yang ramah lingkungan
		• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa	• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk perkebunan
B.	**Kawasan Pengembangan Swasembada Pangan, Air, dan Energi**			
	Riau: • Rokan Hilir • **Rokan Hulu** • Bengkalis • Kampar • Pelalawan	• Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Central Sumatera Basin	• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Dukungan dan Fasilitasi atas peningkatan cadangan dan produktivitas migas • Peningkatan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan atas dampak pengelolaan migas untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
	• Siak • Indragiri Hulu • Indragiri Hilir • Kep. Meranti	• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep.Meranti-Karimun-Batam-Bintan	• Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan	• Dukungan dan Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
		• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Dumai-Malaysia (Interkoneksi 500 kV Sumatera - Malaysia)		
		• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Rantauprapat		
		• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Peranap-Aurduri		
	Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)			
	• Kep. Meranti • **Rokan Hulu** • Kampar • Indragiri Hulu • Bengkalis • Indragiri Hilir	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	• Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat • Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin melalui: - Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan) - Meningkatkan keterjangkau-an pangan - Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui	• Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga dan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal serta Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan • Dukungan dan Fasilitasi atas Edukasi dan Promosi Gizi di Masyarakat melalui Pelaksanaan kampanye gizi seimbang, pengembangan Posyandu dan Puskesmas promotif-preventif serta Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan pentingnya konsumsi pangan bergizi.

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
	Khusus Provinsi Riau			
	• Provinsi Riau	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	• Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat • Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin melalui: - Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan) • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Peningkatan akses pangan bergizi	• Dukungan dan Fasilitasi atas Edukasi dan Promosi Gizi di Masyarakat melalui Pelaksanaan kampanye gizi seimbang, pengembangan Posyandu dan Puskesmas promotif-preventif serta Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan pentingnya konsumsi pangan bergizi.
		• Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun Pendidikan PraSekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), antara lain melalui: • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Revitalisasi pendidikan nonformal • o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	• Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) melalui Pendidikan gratis melalui pembiayaan operasional sekolah, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, Peningkatan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal, Dukungan penguatan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar • Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas) melalui Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) , Bantuan Siswa Miskin/BSM dan Siswa Daerah Terpecil (KAT) • Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas melalui Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan	• Peningkatan angka harapan lama sekolah (HLS) Melalui - Pelaksanaan Program wajib Belajar 13 Tahun Melalui penyediaan pendidikan gratis dijenjang dasar - Peningkatan Mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui pemenuhan sarana Prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP - Penguatan peran masyarakat dalam mendukung pendidikan berkualitas - Peningkatan layanan PAUD dan pendidikan dasar yang inklusif • Peningkatan Literasi dan Numerasi dengan cara - Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan - Pemerataan/ Distribusi Guru - Pemenuhan Sarana prasarana & Sumber Belajar - Pelaksanaan Assesmen nasional dan Tes kemampuan akademik (TKA) bagi peserta didik - Digitalisasi Pembelajaran

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
		• Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan Penurunan stunting - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Peningkatan akses pangan bergizi dan Pembudayaan perilaku hidup sehat dari usia dini dalam lingkungan keluarga dan dunia pendidikan • Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku pola pengasuhan, Peningkatan akses pangan bergizi, Penguatan tata kelola dan Pemantauan status gizi dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup	• Peningkatan Pendekatan Promotif dan Preventif Kesehatan melalui Desentralisasi program kesehatan, dan Penguatan kapasitas layanan primer. • Pembudayaan perilaku hidup sejak dini melalui Integrasi pendidikan kesehatan dalam kurikulum serta Pemberdayaan keluarga sebagai agen perubahan melalui posyandu, PKK, dan Program Parenting untuk membentuk lingkungan rumah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak. • Peningkatan Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku Pola Pengasuhan • Peningkatan Akses Pangan Bergizi • Pemantauan Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat berdasarkan siklus hidup
		• Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit menular lainnya - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan - Pengendalian faktor risiko PTM	• Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis melalui Mitigasi sumber dan resiko penyakit menular dan penyakit tropis • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat melalui Pengendalian potensi wabah dan KLB	• Mitigasi sumber dan Resiko penyakit melalui Perbaikan lingkungan pemukiman dengan Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), Pengendalian vektor penyakit dan Penguatan sistem surveilans kesehatan. • Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Kesehatan Wilayah • Penguatan Peran Serta Masyarakat di Tingkat Lokal dan Pengembangan Program Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat.
		• Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: - Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan	• Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja	• Peningkatan pemberdayaan dan pemerataan layanan bagi masyarakat miskin serta peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan masyarakat rentan.

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
		- Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional		
		• Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan • Penguatan tata kelola persampahan
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time - Perluasan penggunaan kendaraan listrik	• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan • Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan	• Fasilitasi dan dukungan terhadap peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan
		• Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:	• Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas melalui	• Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan,

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
		- Perluasan infrastruktur digital - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok	Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik	akuntabel dan berbasis kinerja berorientasi pada kepuasan masyarakat serta peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK • Penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang kompeten dan profesional
		• Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: • Penguatan tata kelola pemerintahan digital • Penguatan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan publik digital	• Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN melalui Peningkatan Kapasitas ASN (Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya); Peningkatan Implementasi Merit Sistem; Peningkatan Budaya Kerja dan Pelayanan Prima; • Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas melalui Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan; Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik; Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	
		• Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, antara lain melalui: - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	• Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis melalui - Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau - Peningkatan pelestarian budaya Melayu Riau - - Peningkatan Pengamalan Nilai Nilai Agama dan Budaya Melayu	• Penguatan peran kelembagaan kebudayaan daerah dan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan
		• Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui:	• Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Meningkatkan Pendapatan Daerah	• Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

No.	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2025-2029
	Lokasi	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**	**Arah Pembangunan Kewilayahan**
		- Pengembangan Industri Halal - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional - Penciptaan Ekosistem UMKM Halal - Penguatan Keuangan Syariah - Penguatan Dana Sosial Syariah		
		• Memperkuat reformasi hukum, terutama di Riau, antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana - Pencucian Uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan, Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	• Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN melalui Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja dan Penguatan implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	• Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja dan Penguatan implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di daerah

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dan analisis

3.2.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Riau pendekatan Wilayah Pengembangan (WP) maka Provinsi Riau terbagi atas Tiga Wilayah Pengembangan seperti pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel III-7
Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau

No.	WP Pilar Meranti	No.	WP Bernilai	No.	WP Gasing
1.	Kab. Kampar	1.	Kab. Bengkalis	1.	Kab. Indragiri Hulu
2.	Kab. Pelalawan	2.	**Kab. Rokan Hulu**	2.	Kab. Indragiri Hilir
3.	Kab. Siak	3.	Kab. Rokan Hilir	3.	Kab. Kuantan Singingi
4.	Kab. Kep. Meranti	4.	Kota Dumai		
5.	Kota Pekanbaru				

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Gambar III-4
Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau

Kabupaten Rokan Hulu termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai yang berbasis sumberdaya alam, minyak/gas bumi dan kawasan industri yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk Dumai dan sekitarnya, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk Pasir Pengaraian, Bagansiapiapi, dan Bengkalis serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk Ujung Batu, Kepenuhan Tengah, Tambusai Utara, Bagan batu, Ujung Tanjung, Duri, Sinaboi, dan Sei Pakning, pada wilayah Riau bagian utara. Adapun Penyelarasan Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Rokan Hulu

berdasarkan Wilayah Pengembangan Bernilai Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8
Penyelarasan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai Provinsi Riau

No.	RPJMD Prov. Riau	No.	RPJMD Kab. Rokan Hulu
	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan		**Kebijakan Pembangunan Kewilayahan**
1.	Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: • Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan produksi perkebunan: - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Dalu dalu-Mahato-Spg Menggala - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Suram-Simpang Bagan7-Sontang • Konektifitas lintas provinsi: - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Panipahan-Tlk Piyai-Bagansiapiapi (infrastruktur pesisir) - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi-Lubuk Gaung (infrastruktur pesisir) • Lanjutan pembangunan jalan tol Duri-Rantau Prapat (RPJMN) • Preservasi jalan Trans Bengkalis (RPJMN) • Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubukgaung) (RPJMN) • Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat • Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Bengkalis-Sei Pakning • Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat • Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah		Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: • Pembangunan infrastruktur jalan penghubung Kawasan produksi perkebunan: - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Km. 11 Mahato – Km.24 Bandar Selamat - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Km.24 Bandar Selamat - Cindur. - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Dalu dalu – Pekan Tebih - Peningkatan ruas jalan dan jembatan simpang siabu – kota lama - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Kota Lama – Muara Dilam – Tripa - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Ujung Batu – Kotalama - Peningkatan ruas jalan dan jembatan Kotalama – Bagan 7
2.	Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: • Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis • Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Pulau Rupat • Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai		Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: • Pemeliharaan intake SPAM IKK se-Kabupaten Rokan Hulu • Pembangunan, penyediaan dan pengelolaan unit produksi beserta Intake SPAM tambahan pada IKK Tambusai, Rambah Hilir, Pagaran Tapah dan Tambusai Utara
3.	Kebijakan untuk Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: • Pengelolaan dan perlindungan kawasan sekitar Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu • Pengelolaan dan perlindungan Cagar Alam Pulau Berkey dan Cagar Alam Pulau Serusa • Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Dumai		Kebijakan untuk Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: • Pembangunan TPST Ujung Batu dan TPST Kepenuhan • Sistem Pengendalian Banjir WS Rokan di Kabupaten Rokan Hulu • Dukungan penyelesaian masalah banjir

No.	RPJMD Prov. Riau	No.	RPJMD Kab. Rokan Hulu
	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan		**Kebijakan Pembangunan Kewilayahan**
	• Sistem Pengendalian banjir WS Rokan • Pembangunan TPST Regional • Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob		
4.	Kebijakan untuk Kegiatan pengembangan ekonomi di WP ini diarahkan untuk: • Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. • Pelaksanaan kegiatan eksplorasi potensi tambang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar. • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap. • Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat. • Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi. • Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: - Pengembangan Kawasan Bekanhulir (Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir) - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat - Pengembangan Kawasan Industri Bukit Bandar • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi. • Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan parwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir • Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan • Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa		Kebijakan untuk Kegiatan pengembangan ekonomi di WP ini diarahkan untuk : • Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sub sektor tanaman pangan melalui pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian • Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sub sektor perkebunan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO pertanian Peningkatan produktivitas • Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sub sektor perikanan tangkap melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap ramah lingkungan dan pengembangan konservasi perikanan. • Pengembangan industri hilir sawit • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan • Peningkatan produksi dan produktifitas produksi perikanan budidaya melalui input produksi yang berkualitas. • Pengembangan Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: - Pengembangan Kawasan Industri Kepenuhan - Pengembangan Kawasan Industri Ujung Batu • Pengembangan Kawasasn Strategis Pariwisata Religi dan Budaya serta Pariwisata lainnya di Rokan Hulu
5.	Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat: • Pengentasan kemiskinan; Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal melalui strategi pendekatan wilayah sebagai berikut: - Wilayah **Perdesaan** melalui:		Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat: • Pengentasan kemiskinan; Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal antara lain: - Penyediaan sumber mata pencaharian

No.	RPJMD Prov. Riau	No.	RPJMD Kab. Rokan Hulu
	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan		**Kebijakan Pembangunan Kewilayahan**
	o Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan o Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan o Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana o Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa o Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya - Wilayah **Perkotaan** melalui: o Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal o Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha o Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat o Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan - Wilayah **Pesisir dan Pulau-pulau Kecil** melalui: o Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut o Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha o Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan o Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil o Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir.		- Bantuan permodalan dan akses pemasaran produk/ hasil usaha masyarakat - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar - Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat
	• Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA		• Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah • Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah • Peningkatan angka Literasi Numerasi jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama
	• Penurunan prevalensi stunting		• Pendekatan terpadu intervensi gizi dan pemberdayaan masyarakat
	• Peningkatan desa berkembang menjadi maju atau mandiri		• Peningkatan desa berkembang menjadi maju dan desa maju menjadi mandiri

Sumber : RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan analisis

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pendekatan Spasial

Acuan pendekatan spasial yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum di dalam RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040.

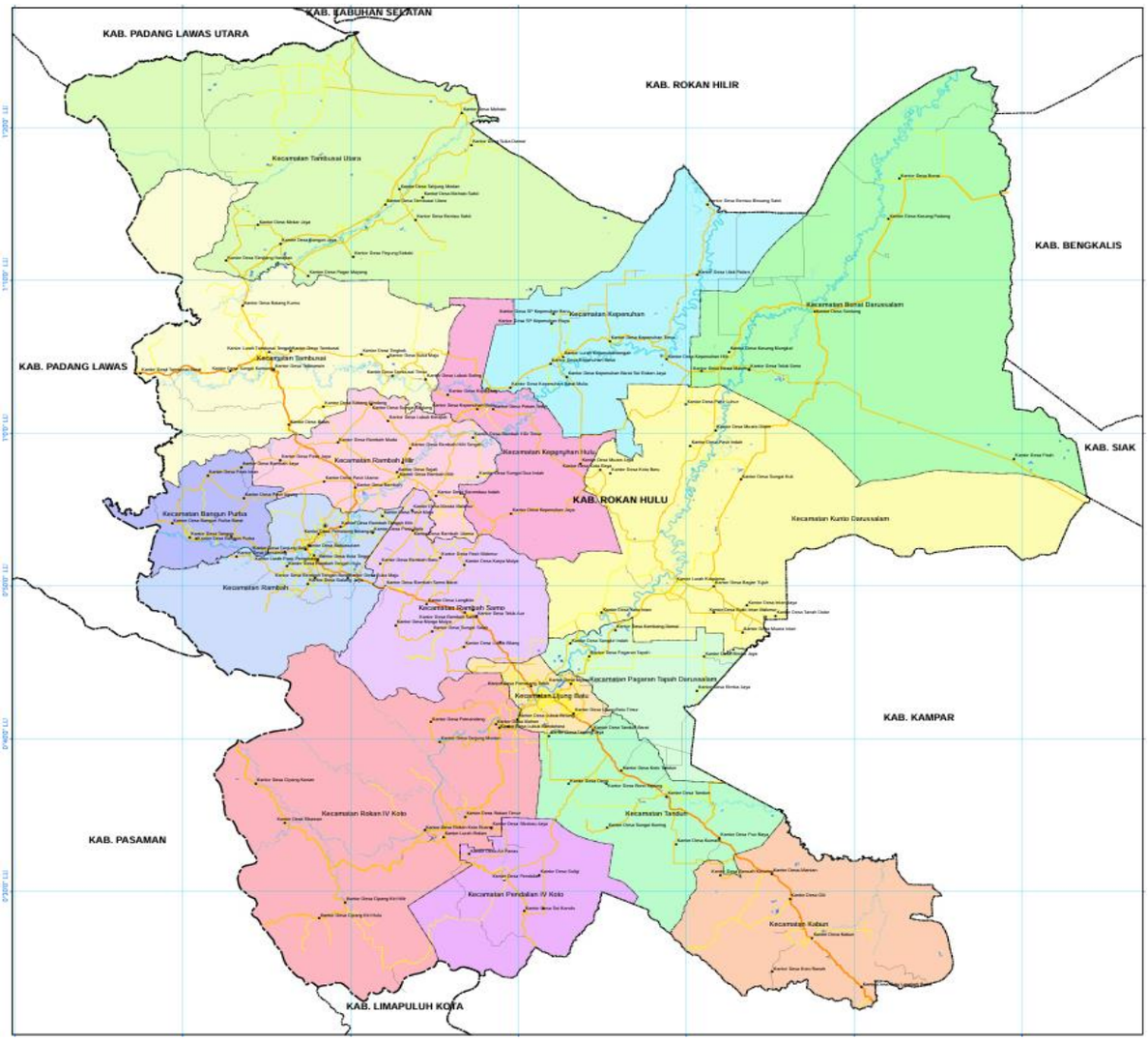
A. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Roka

n Hulu terdiri dari Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana. Sistem Perkotaan di Rokan Hulu terdiri dari PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

PKW yaitu PKW Pasir Pengaraian yang meliputi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Rambah Hilir. PKL yaitu PKL Ujung Batu yaitu Kecamatan Ujung Batu. Sedangkan PPK terdiri atas:

a) PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
a) PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
b) PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
c) PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
d) PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
e) PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
f) PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
g) PPK Kota Tengah di Kecamatan Kepenuhan;
h) PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
i) PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
j) PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
k) PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
l) PPK Dalu – Dalu di Kecamatan Tambusai; dan
m) PPK Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara.



Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu 2020 - 2040

Gambar III-5
Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

Sistem Jaringan Prasarana meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat dan transportasi udara. Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:

- Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai; dan
- Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu - Pasir Pengaraian - Kota Tengah – Kandis - Duri - Dumai.

Stasiun kereta api meliputi:

- Stasiun penumpang, yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto; Kecamatan Ujung Batu; Kecamatan Rambah; dan di Kecamatan Kepenuhan.
- Stasiun barang, berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Ujung Batu.

Sistem jaringan transportasi udara termasuk Bandar udara pengumpan Pasir Pengaraian di Kecamatan Rambah Samo. Sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Rambah;

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi: PLTA Sungai Rokan Kiri berada di Kecamatan Rokan IV Koto; dan PLTA Sungai Rokan Kanan berada di Kecamatan Rambah.
- Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBG) berada di Kecamatan Ujung Batu, dan Kecamatan Tambusai Utara;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi: PLTD Sungai Kuning berada di Kecamatan Rambah Samo;dan PLTD Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), berada di seluruh Kecamatan; dan
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di seluruh kecamatan.

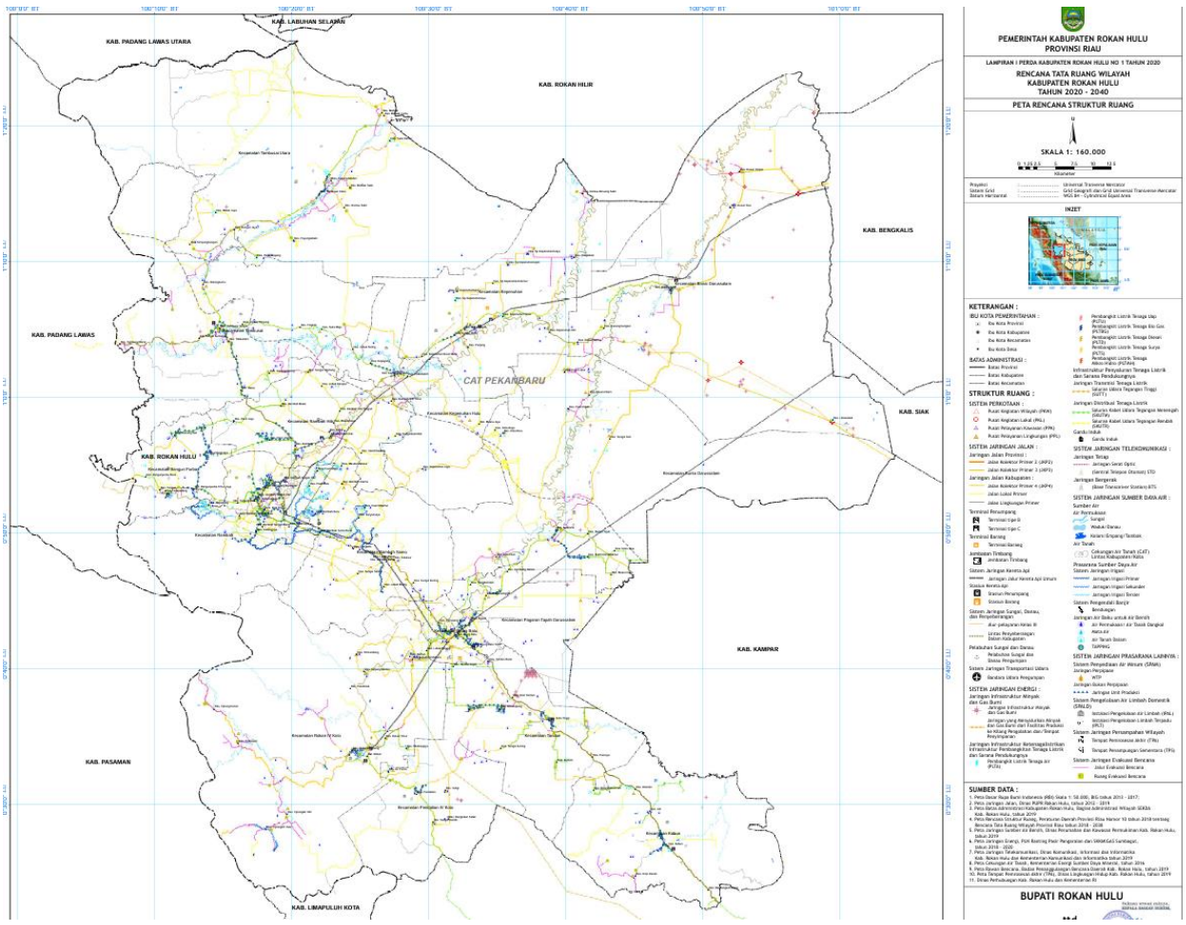
Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten meliputi:

- DAS Rokan, meliputi: Sub DAS Kumu; Sub DAS Lubuh; dan Sub DAS Rokan Kiri.

Sumber air tanah di Rokan Hulu terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten, yaitu CAT Pekanbaru. Sistem pengendalian banjir meliputi bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto. Jaringan air baku untuk air bersih meliputi Sungai Rokan, Batang Lubuh, Batang Sosah, dan Batang Kumu.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:

1. TPA Tanjung Belit berada di Kecamatan Rambah;
2. TPA Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
3. TPA Tambusai Utara berada di Kecamatan Tambusai Utara;
4. TPA Kepenuhan berada di Kecamatan Kepenuhan; dan
5. TPA Tandun berada di Kecamatan Tandun



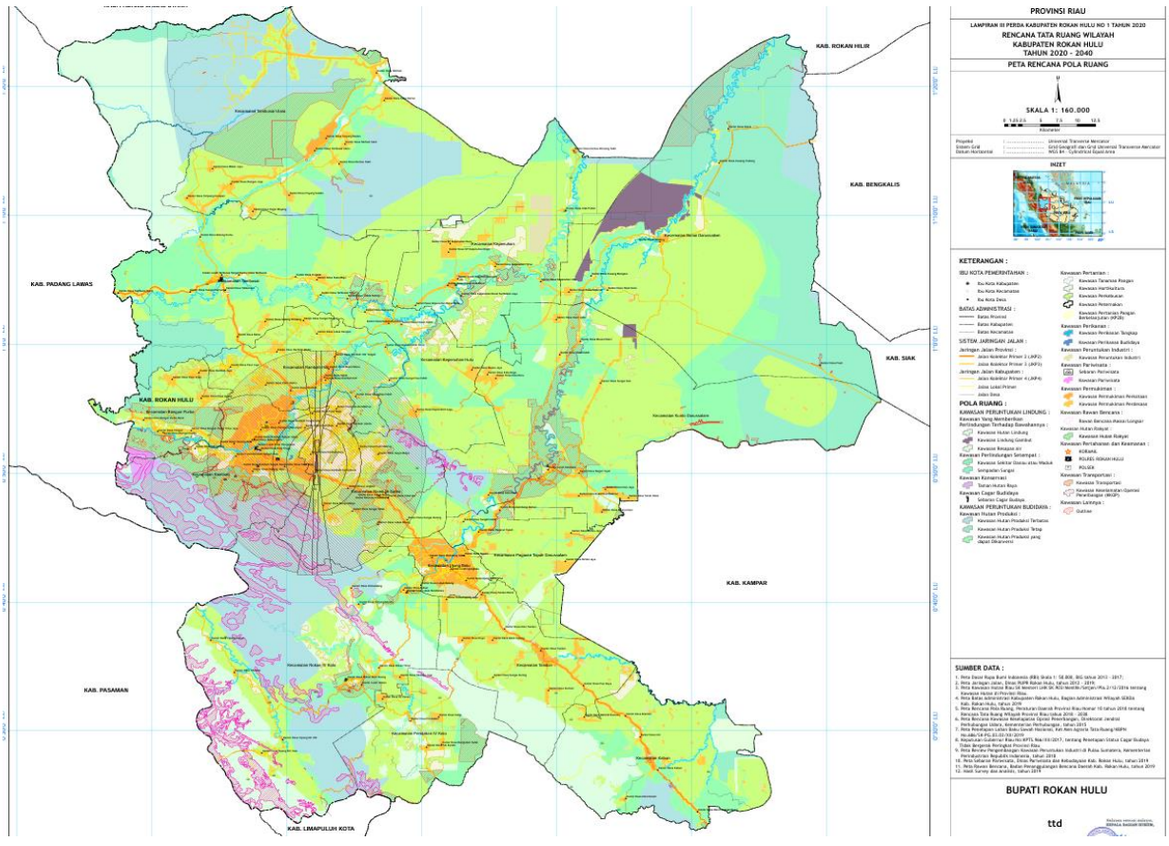
Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu 2020 - 2040

Gambar III-6
Peta Rencana Struktur Ruang

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

- Kawasan hutan lindung seluas 72.941 ha meliputi 10 kecamatan. Kawasan lindung gambut seluas 7.644 ha terdapat di Kecamatan Kepenuhan, Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam. Kawasan resapan air seluas 6.081 ha meliputi 14 kecamatan.
- Kawasan Konservasi berupa Taman Hutan Raya seluas 1.347 ha di Kecamatan Bangun Purba dan Rambah.
- Di antara situs cagar budaya terdapat Kubu Auwo Duri, Benteng Tujuh Lapih, dan Benteng Tuanku Tambusai di Kecamatan Tambusai. Makam Raja-Raja Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto.
- Kawasan peruntukan budidaya untuk hutan produksi terbatas seluas 118.526 ha di 13 kecamatan. Kawasan hutan produksi tetap seluas 80.189 ha meliputi 8 kecamatan, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 150.881 ha di seluruh kecamatan.
- Kawasan hutan rakyat seluas 658 ha di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir dan Rokan IV Koto.
- Kawasan tanaman pangan seluas 22.470 ha, kawasan hortikultura seluas 12.288 ha, kawasan perkebunan seluas 286.137 ha, kawasan peternakan seluas 489 ha, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 1.945 ha yang termasuk di dalam kawasan tanaman pangan.

- Kawasan perikanan tangkap seluas 4.835 ha meliputi 15 kecamatan, dan kawasan perikanan budaya seluas 34 ha di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Rambah, dan Rokan IV Koto.
- Kawasan pertambangan mineral radioaktif seluas 105 ha di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara.
- Kawasan pertambangan mineral logam seluas 84.947 ha di Kecamatan Bangun Purba, Kabun, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tandun, dan Ujung Batu.
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan seluas 625.582 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- Kawasan pertambangan batubara seluas 112.419 di Kecamatan Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai, Tambusai Utara dan Rambah.
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi seluas 350.781 ha di 15 kecamatan.
- Kawasan peruntukan industri seluas 3.578 ha di 11 kecamatan.
- Kawasan pariwisata seluas total 23 ha di 47 lokasi.
- Kawasan permukiman perkotaan seluas 15.668 ha, dan kawasan permukiman pedesaan seluas 26.647 ha.



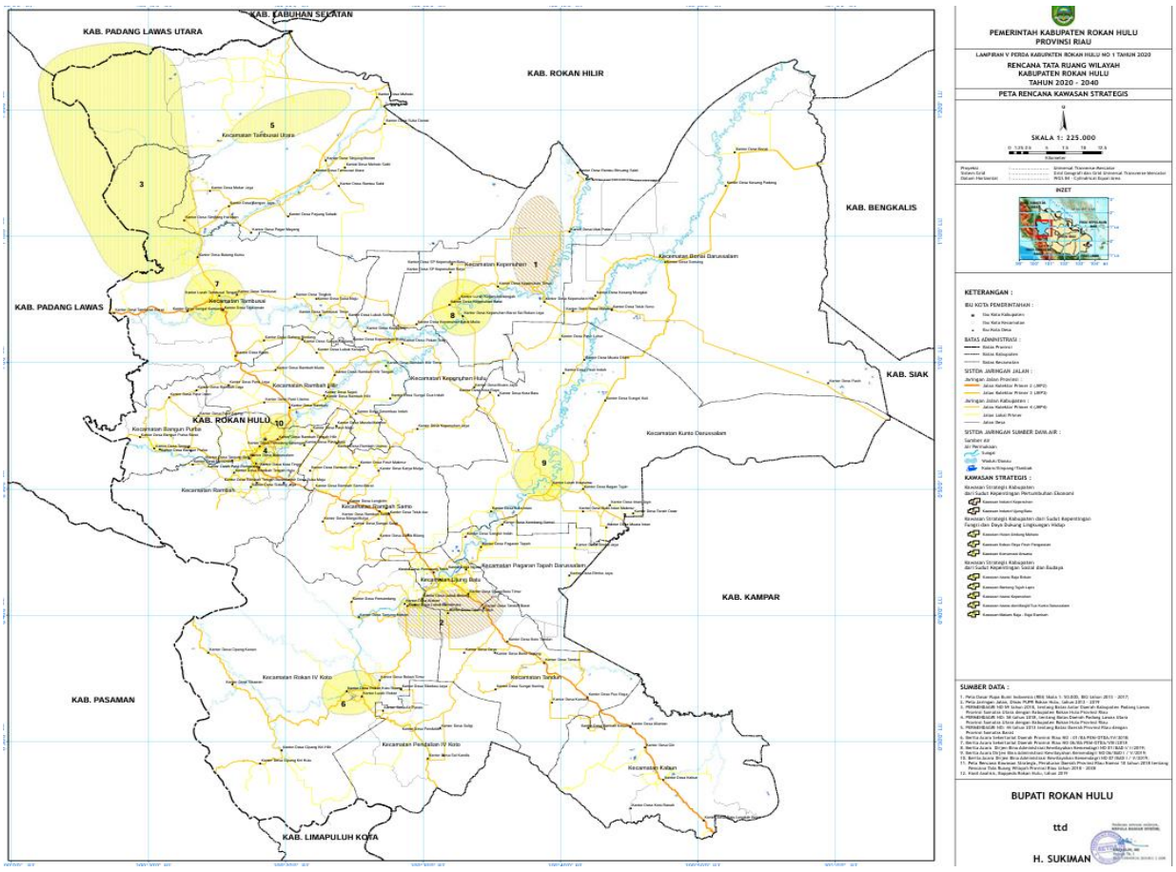
Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu 2020 - 2040

Gambar III-7
Peta Rencana Pola Ruang

C. Kawasan Strategis

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: kawasan industri Kepenuhan; dan kawasan industri Ujung Batu.

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi: kawasan Istana Raja Rokan; kawasan Benteng Tujuh Lapis; kawasan Makam Raja – Raja Rambah; kawasan Istana Kepenuhan; dan kawasan Istana dan Mesjid Tua Kunto Darussalam.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan kebun raya Pasir Pengaraian.



Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu 2020 - 2040

Gambar III-8
Peta Rencana Kawasan Strategis

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian program strategis yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah serta menjawab isu-isu utama pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan melalui proses cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi hingga outcome, serta dilengkapi dengan indikator yang sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas ini disusun secara terarah dan sistematis agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III-9
Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan.						
1. Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah			PDRB per Kapita (juta rupiah)(Juta Rupiah)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Rasio Gini(Rasio)		
		1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan (Orang)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah dokumen tenaga kerja (Dokumen)	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)		
			Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah (Kali)	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (%)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi (%)	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisiensi, merata dan terintegrasi	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik (%)	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (Dokumen)	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (%)	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Juta Rupiah)	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	
		1.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat		Persentase Desa Mandiri (%)		
				Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang di Kembangkan (%)	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) (%)	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pengawasan pemerintah desa			
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 Program Penataan Desa	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Orang)	2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan (%)	3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Koperasi)	2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah koperasi yang berkualitas (Koperasi)	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		1.1.4. Meningkatnya investasi daerah		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Investor)	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Izin)	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (Juta Rupiah)	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
	1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah			Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur(%)		
		1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan jalan (%)	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Meningkatnya Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil (%)	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA (*)	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh (Unit)	1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dam Utilias Umum) (%)	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	
		1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah		Rasio konektifitas (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kendaraan angkutan orang/barang yang laik jalan (%)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun (%)	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana	2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)(Indeks)		
				Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%)		
		2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah		PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan (%)	3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai) (Ton/Tahun)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Jumlah Produksi Jagung (Ton/Tahun)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Jumlah Produksi Padi (Ton/Tahun)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan	Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba) (Ekor)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit) (Ton/Tahun)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina (%)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh Pertanian	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina (%)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pengawasan izin usaha pertanian (%)	3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan dan perkebunan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan) (%)	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi (%)	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
			Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa Bebas Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedauatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
	2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan			Indeks resiko bencana (IRB)(Indeks)		
		2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (%)	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA (%)	3.28.04 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik (%)	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Baik	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.2.2.Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum (Sambungan Rumah (SR))	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana		Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman bencana (%)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan (%)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persentase)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
3. Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya	3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis			Persentase Pemajuan Budaya Daerah(%)		
		3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan (*)	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat (%)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi (%)	2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	
			Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		3.1.2.Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektifitas Pelaksanaan kebijakan Kesejateraan Rakyat (Nilai)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial	4.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)(Indeks)		
		4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan		Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui (Lembaga)	1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (Satuan Pendidikan)	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca (Skor)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	
			Meningkatnya mutu distribusi pendidikan dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				Indeks Pemerataan Guru (%)	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS (APS) (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%)		
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SD (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SMP (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI (APS) (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
			Terlestarikanya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan dan sastra (%)	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
		4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (Tahun)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Menciptakan penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19) (Angka)	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (%)	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				(Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan (%)	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga (%)	2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) (%)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Diikuti (%)	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		4.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)		
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))		
				Tingkat Kemiskinan (Persentase)		
			Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	2.07.05 Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif (%)	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	
				Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (%)	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM) (%)	1.06.06 Program Penanganan Bencana	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)		
				Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
				Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
		4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berpersfektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani (%)	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				100.000 penduduk perempuan) (Rasio)		
			Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
5. Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)		
				Indeks sistem merit (Indeks)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai)		
				Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
				Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	2.24.04 Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi (%)	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Indeks)	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Skor)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Efektifitas kerjasama daerah (Nilai)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
				Persentase layanan administrasi kepegawaian (%)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	
				Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Nilai)	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI (%)	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB (%)	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan,	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi perda (%)	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
				Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Implementasi tata kelola SPBE (Persentase)	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase penyelesaian tapal batas daerah (%)	5.06.02 Program Pengelolaan Perbatasan	
			Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Daerah	Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun (%)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersedian arsip (%)	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya tata kelola keuangan	Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase silpa terhadap APBD (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT (%)	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatanya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				persentase pasangan berakte nikah (%)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan ...(16 Kecamatan)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan ...(16 Kecamatan)	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	7.01.02 Program Penyelenggaraan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Urusan Pemerintahan Kecamatan ...(16 Kecamatan)		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan ... (16 Kecamatan)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan ...(16 Kecamatan)	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu (Dokumen)	2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Izin)	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Tingkat Inflasi (%)		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (%)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah		Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (%)		
				Persentase Pencapaian Aksi HAM (%)		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaran tibumtranmas (%)	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	

Selanjutnya Program Prioritas Pembangunan Daerah diselaraskan dengan janji politis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025-2029. Tahap ini krusial dalam perumusan RPJMD karena menghasilkan rencana pembangunan konkret dalam bentuk program prioritas. Perumusan program prioritas mencerminkan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dan berhubungan langsung dengan janji kampanye Bupati. Janji-janji tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan, program, atau kegiatan sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika janji bersifat mikro pada level output, maka menjadi kegiatan; jika lebih makro pada level outcome, maka menjadi program prioritas; dan jika berskala lebih luas, diterjemahkan ke dalam strategi. Selanjutnya penuangan janji politik tersebut dalam program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III- 10
Integrasi Janji Politis Dengan Nomenklatur Program

MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
MISI 1	Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	Penyediaan Alat Berat pada setiap kecamatan	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan, 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Job Fair / Bursa Kerja	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pengembangan Destinasi Wisata Daerah dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
MISI 3	Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya Lokal		2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	
			2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	
MISI 2	Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Damkar di Ibukota kecamatan (1 Damkar 1 Kecamatan)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	2.11.04 Program Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup

MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
			Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Fasilitasi penyaluran dan pengawasan Pupuk murah untuk petani	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Air Bersih dan Peningkatan Irigasi	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
MISI 3	Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya Lokal	Bantuan keagamaan untuk Imam Masjid Paripurna, surau suluk dan rumah ibadah	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Rokan Hulu	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Bantuan beasiswa mahasiswa prasejahtera dan berprestasi		Sekretariat Daerah
		Bantuan untuk lembaga adat	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
MISI 4	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Penyelesaian Pembangunan RSUD Kab. Rokan Hulu serta Pemenuhan Alkes RSUD dan Puskesmas	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Bantuan Seragam Sekolah Siswa Baru SD dan SMP	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
MISI 5	Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum	Digitalisasi Pelayanan Publik	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daera
			2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			7.01.02 Program Penyelenggaraan	Kecamatan

MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
			Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Prioritas pembangunan daerah juga difokuskan pada:

1. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial berupa pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan membangun dan memperbaiki jalan serta jembatan strategis untuk mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan tambang serta sumberdaya alam lainnya termasuk orang, barang dan jasa lainnya. Disamping itu pengembangan sarana air bersih dan sanitasi guna memenuhi akses dan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Disampingi itu peningkatan kualitas dan jangkauan listrik serta akses internet untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan kemudahan layanan publik.
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan berupa fasilitasi dan dukungan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan industri kelapa sawit dan pertambangan termasuk hilirisasinya guna meningkatkan nilai tambah dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Disamping itu juga mendukung dan memberikan kemudahan serta fasilitasi pengembangan energi terbarukan sesuai potensi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan mendukung pengembangkan pendidikan vokasional yang fokus pada keahlian teknis sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Penguatan Layanan Kesehatan dasar yang sesuai kewenangan daerah, terutama pada lanjutan pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu diarahkan untuk memperkuat fungsi rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan rujukan utama di daerah dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, pemenuhan tenaga kesehatan spesialis dan modernisasi alat kesehatan. Pembangunan ini juga menyasar pada penguatan mutu layanan pada puskesmas dan klinik di daerah terpencil, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pelatihan tenaga medis dan penyediaan alat kesehatan yang mumpuni.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM berupa dukungan dan fasilitasi dalam akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk petani dan peternak lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
5. Pengembangan Pariwisata terutama Wisata Religi dan Budaya sesuai dengan potensi daerah baik sarana dan prasarananya termasuk dukungan promosi dan fasilitas pendukung lainnya.
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat berupa digitalisasi layanan publik dimana pengembangan sistem layanan publik berbasis digital ini diperuntukkan guna memudahkan akses masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi dan perizinan serta kepentingan publik lainnya. Penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel yang melibatkan pengawasan berbasis masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan pembangunan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui musyawarah desa dan forum aspirasi masyarakat dan bentuk kegiatan lainnya.

Selanjutnya, program prioritas tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar tercipta sinergi, konsistensi, dan kesinambungan dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung pencapaian target nasional dan provinsi, serta mampu mengintegrasikan kebutuhan dan potensi daerah ke dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, perencanaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel III-11
Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Rokan Hulu

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	**RIAU MANTAP** - Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Permukiman - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	**RIAU SEHAT** - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit - Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau - Pencegahan dan Antisipasi Dini Penyebaran Wabah & Penyakit Menular - Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata - Penguatan dan Dukungan Dokter Spesialis serta Fasilitasi Puskesmas Mandiri - Gerakan Hidup Sehat melalui Pola Makan Bergizi dan Gemar Olahraga - Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk)	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	**RIAU SEHAT** - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
		- Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata - Penguatan Kerjasama Kesehatan Lingkup Regional dan Global	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	**RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA** - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	**RIAU MANTAP** - Peningkatan Penyediaan Air Bersih	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	**RIAU BERDAYA SAING** - Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan - Penguatan dan Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Riau	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	**RIAU MANTAP** - Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih	- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penanggulangan Bencana - Program Penanganan Bencana

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	**RIAU BERDAYA SAING** - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	**RIAU BERDAYA SAING** - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	**RIAU BERDAYA SAING** - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah;

Program perangkat daerah merupakan instrumen yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran RPJMD. Indikasi program mencakup program-program pembangunan tahun 2025–2029. Sementara itu, program tahun 2030 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menjadi pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030–2034.

Selanjutnya, program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di setiap urusan pemerintah bidang wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu , APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah dan unsur pemerintahan umum serta termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Adapun kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Periode 2025 s.d 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					563.112.662.838,000		564.908.434.814,390		562.491.723.675,000		571.035.190.045,000		583.069.092.272,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					407.980.570.488,000		414.208.075.859,390		420.753.175.175,000		427.454.165.045,000		434.536.066.451,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	407.980.570.488,000	100	414.208.075.859,390	100	420.753.175.175,000	100	427.454.165.045,000	100	434.536.066.451,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					154.420.464.350,000		149.981.521.955,000		141.012.099.600,000		142.846.783.000,000		147.790.547.721,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD (%)	54,93	56,34	56,70	154.420.464.350,000	57,05	149.981.521.955,000	57,41	141.012.099.600,000	57,76	142.846.783.000,000	58,11	147.790.547.721,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP (%)	48,83	54,87	56,38		57,89		59,40		60,91		62,42		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SD (%)	52,46	54,70	56,83		58,96		61,08		63,21		65,34		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SMP (%)	34,28	36,04	36,48		36,93		37,37		37,81		38,25		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD (%)	63,96	68,17	69,22		70,28		71,33		72,38		73,43		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP (%)	63,10	67,48	68,58		69,67		70,77		71,86		72,96		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD (%)	52,46	58,97	60,60		62,23		63,85		65,48		67,08		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%)	58,92	64,14	65,44		66,75		68,05		69,35		70,66		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS (APS) (%)	0	87,78	90,22		92,67		95,11		97,56		100		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%)	64,61	65,51	66,41		67,31		68,20		69,10		70		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI (APS) (%)	91,47	92,89	94,31		95,74		97,16		98,58		100		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18	153,74	100	100		100		100		100		100		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)													Pemuda dan Olah Raga
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (Satuan Pendidikan)	100	100	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					126.628.000,000		128.543.200,000		130.565.500,000		132.635.900,000		134.824.000,000	
Meningkatnya mutu distribusi pendidikan dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (%)	20	30	40	126.628.000,000	45	128.543.200,000	55	130.565.500,000	60	132.635.900,000	75	134.824.000,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	24,97	30	35		40		45		50		55		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					125.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui (Lembaga)	13	17	20	125.000.000,000	22	125.000.000,000	26	125.000.000,000	30	125.000.000,000	33	125.000.000,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					350.000.000,000		355.293.800,000		360.883.400,000		366.606.100,000		372.654.100,000	
Terlestarikanya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan dan sastra (%)	0	10	15	350.000.000,000	18	355.293.800,000	20	360.883.400,000	23	366.606.100,000	25	372.654.100,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					361.700.523.666,000		310.730.073.291,000		250.910.665.883,000		253.994.630.048,000		259.984.198.127,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					191.487.095.770,000		194.383.191.902,000		197.442.303.230,000		200.450.493.693,000		203.867.046.012,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	191.487.095.770,000	100	194.383.191.902,000	100	197.442.303.230,000	100	200.450.493.693,000	100	203.867.046.012,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					168.813.346.576,000		115.220.043.404,000		52.322.103.388,000		52.404.530.539,000		54.959.658.583,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	2,23	2,23	168.813.346.576,000	2,23	115.220.043.404,000	2,23	52.322.103.388,000	2,23	52.404.530.539,000	2,23	54.959.658.583,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	63,4	63,4	70		80		90		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	17,4	17,4	17,4		21,74		21,74		21,74		21,74		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	79,19	81,25	83,32		85,38		87,45		89,51		91,58		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	83,3	70	75		80		85		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	57,63	60,00	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	18,18	0	0		0		36,36		0		0		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Puskesmas dengan ketersediaan obat	90	90	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)													
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	80,69	75	7.779		81		83		83		85		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	85,70	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1,48	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					188.390.600,000		192.255.170,000		195.279.800,000		174.782.235,000		177.818.992,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	3,43	3,46	3,50	188.390.600,000	3,50	192.255.170,000	3,52	195.279.800,000	3,56	174.782.235,000	3,58	177.818.992,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	87	91	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					763.470.400,000		479.583.115,000		488.821.565,000		495.336.981,000		502.442.640,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (%)	25	100	100	763.470.400,000	100	479.583.115,000	100	488.821.565,000	100	495.336.981,000	100	502.442.640,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					448.220.320,000		454.999.700,000		462.157.900,000		469.486.600,000		477.231.900,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	448.220.320,000	100	454.999.700,000	100	462.157.900,000	100	469.486.600,000	100	477.231.900,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					177.361.951.850,000		179.952.415.350,000		175.002.181.150,000		184.775.026.608,000		197.930.771.168,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.670.324.350,000		20.667.324.350,000		20.907.084.350,000		21.271.079.550,000		21.202.514.654,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	71,90	72,25	72,60	20.670.324.350,000	72,95	20.667.324.350,000	73,30	20.907.084.350,000	73,65	21.271.079.550,000	74,00	21.202.514.654,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11.050.000.000,000		11.200.000.000,000		9.900.000.000,000		11.650.000.000,000		14.150.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi (%)	24,44	24,44	24,44	11.050.000.000,000	24,44	11.200.000.000,000	24,44	9.900.000.000,000	24,44	11.650.000.000,000	24,44	14.150.000.000,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13.453.000.000,000		13.769.167.000,000		13.917.970.300,000		14.162.461.400,000		14.420.850.300,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum (Sambungan Rumah (SR))	16.595	16.695	16.795	13.453.000.000,000	16.895	13.769.167.000,000	16.995	13.917.970.300,000	17.095	14.162.461.400,000	17.195	14.420.850.300,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.612.627.500,000		10.167.933.800,000		10.014.151.800,000		10.225.281.500,000		10.448.412.700,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1,39	1,89	2,39	9.612.627.500,000	2,89	10.167.933.800,000	3,39	10.014.151.800,000	3,89	10.225.281.500,000	4,39	10.448.412.700,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					19.200.000.000,000		19.700.000.000,000		19.750.000.000,000		20.250.000.000,000		21.750.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	2.450.000.000,000	100	2.450.000.000,000	100	2.500.000.000,000	100	2.500.000.000,000	100	3.500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Persentase Drainase Lingkungan	35,62	38,88	42,13	16.750.000.000,000	45,38	17.250.000.000,000	48,64	17.250.000.000,000	51,89	17.750.000.000,000	55,14	18.250.000.000,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dalam Kondisi Baik (%)													
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					12.600.000.000,000		12.842.090.200,000		8.394.912.500,000		11.446.660.238,000		13.522.022.500,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	86,52	88,51	90,55	12.600.000.000,000	92,63	12.842.090.200,000	94,76	8.394.912.500,000	96,94	11.446.660.238,000	99,17	13.522.022.500,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					800.000.000,000		812.100.000,000		824.876.200,000		837.956.700,000		851.780.800,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	100	800.000.000,000	100	812.100.000,000	100	824.876.200,000	100	837.956.700,000	100	851.780.800,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					84.926.000.000,000		85.693.800.000,000		86.143.186.000,000		89.681.587.220,000		96.285.190.214,000	
Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan jalan (%)	24,02	24,84	25,34	84.926.000.000,000	25,84	85.693.800.000,000	26,34	86.143.186.000,000	26,84	89.681.587.220,000	27,34	96.285.190.214,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.300.000.000,000		1.300.000.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil (%)	34,79	35,88	47,29	1.250.000.000,000	53,54	1.250.000.000,000	59,79	1.250.000.000,000	66,04	1.300.000.000,000	72,29	1.300.000.000,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.800.000.000,000		3.850.000.000,000		3.900.000.000,000		3.950.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA (*)	Ada	Ada	Ada	3.800.000.000,000	Ada	3.850.000.000,000	Ada	3.900.000.000,000	Ada	3.950.000.000,000	Ada	4.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)	5	4,5	4		3,5		3		2,5		2		1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					43.558.307.347,000		43.970.482.348,000		44.933.621.576,000		45.419.700.873,000		53.105.927.579,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.279.590.095,000		22.616.573.748,000		22.972.384.576,000		23.336.670.073,000		23.721.663.041,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	22.279.590.095,000	100	22.616.573.748,000	100	22.972.384.576,000	100	23.336.670.073,000	100	23.721.663.041,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					735.000.000,000		746.117.000,000		757.855.100,000		769.872.800,000		782.573.700,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	735.000.000,000	100	746.117.000,000	100	757.855.100,000	100	769.872.800,000	100	782.573.700,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.432.447.400,000		1.454.112.600,000		1.476.989.100,000		1.500.410.500,000		2.025.163.300,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Kawasan)	10	1	2	1.432.447.400,000	2	1.454.112.600,000	2	1.476.989.100,000	2	1.500.410.500,000	2	2.025.163.300,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					720.000.000,000		730.890.000,000		742.388.600,000		754.161.100,000		1.366.602.800,000	
Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh (Unit)	24	33	35	720.000.000,000	35	730.890.000,000	35	742.388.600,000	35	754.161.100,000	35	1.366.602.800,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					18.391.269.852,000		18.422.789.000,000		18.984.004.200,000		19.058.586.400,000		25.209.924.738,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase lokasi perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang ditangani (%)	71,03	71,72	72,41	18.391.269.852,000	73,10	18.422.789.000,000	73,79	18.984.004.200,000	74,48	19.058.586.400,000	75,17	25.209.924.738,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					33.991.935.098,000		34.607.581.304,320		30.152.038.378,490		30.709.463.142,240		31.298.574.306,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.879.221.443,000		26.270.650.304,320		26.125.621.227,490		26.460.987.242,240		26.986.608.806,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	22.575.378.150,000	100	22.916.835.661,870	100	22.557.059.302,320	100	23.000.389.422,650	100	23.468.920.329,540	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.303.843.293,000	100	3.353.814.642,450	100	3.568.561.925,170	100	3.460.597.819,590	100	3.517.688.476,460	1.05.3.28.2.11.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.372.791.500,000		1.426.902.000,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaran tibumtranmas (%)	100	100	100	1.372.791.500,000	100	1.426.902.000,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.674.152.605,000		3.729.724.000,000		3.626.417.151,000		3.848.475.900,000		3.911.965.500,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	3.674.152.605,000	100	3.729.724.000,000	100	3.626.417.151,000	100	3.848.475.900,000	100	3.911.965.500,000	1.05.3.28.2.11.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.3.28.2.11.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.3.28.2.11.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.065.769.550,000		3.180.305.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	53,19	57,78	60,00	3.065.769.550,000	62,22	3.180.305.000,000	64,44	400.000.000,000	66,67	400.000.000,000	68,89	400.000.000,000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persentase)	84,62	84,62	86,36		86,96		87,50		88,00		88,46		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					11.257.294.141,000		11.427.561.047,020		9.607.342.965,860		9.791.406.756,060		10.985.933.603,070	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.275.259.382,000		6.370.174.047,020		5.870.391.565,860		5.972.996.056,060		6.381.433.003,070	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana	100	100	100	6.275.259.382,000	100	6.370.174.047,020	100	5.870.391.565,860	100	5.972.996.056,060	100	6.381.433.003,070	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah (%)													
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.208.543.073,000		1.226.822.000,000		746.122.700,000		765.883.100,000		1.036.766.800,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif (%)	75	78	81	1.208.543.073,000	84	1.226.822.000,000	87	746.122.700,000	90	765.883.100,000	92	1.036.766.800,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	0	5	5		7		9		10		11		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.154.640.257,000		1.172.104.000,000		890.543.900,000		909.423.000,000		1.079.375.300,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	100	100	100	1.154.640.257,000	100	1.172.104.000,000	100	890.543.900,000	100	909.423.000,000	100	1.079.375.300,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	97,49	97,50	97,60		97,70		97,80		97,90		98		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.329.944.877,000		1.350.060.000,000		1.071.299.600,000		1.093.045.000,000		1.266.026.500,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang	0	12	14	1.329.944.877,000	16	1.350.060.000,000	18	1.071.299.600,000	20	1.093.045.000,000	22	1.266.026.500,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	tergraduasi dari kemiskinan (%)													
	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (%)	76	78	81		84		87		90		92		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	10	12		14		16		18		20		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.288.906.552,000		1.308.401.000,000		1.028.985.200,000		1.050.059.600,000		1.222.332.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM) (%)	100	100	100	1.288.906.552,000	100	1.308.401.000,000	100	1.028.985.200,000	100	1.050.059.600,000	100	1.222.332.000,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.681.814.610,000		3.839.014.000,000		3.197.919.300,000		3.219.432.600,000		3.242.209.900,000	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,000		100.000.000,000		0,000		0,000		0,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah dokumen tenaga kerja (Dokumen)	0	0	1	100.000.000,000	1	100.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Persentase pelaksanaan program ketenagakerjaan sesuai dengan RTK Mikro (%)	0	0	30		40		50		60		70		2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.266.967.890,000		1.336.887.000,000		1.287.919.300,000		1.309.432.600,000		1.332.209.900,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan (Orang)	10	40	80	1.266.967.890,000	80	1.336.887.000,000	80	1.287.919.300,000	80	1.309.432.600,000	80	1.332.209.900,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					521.817.290,000		529.709.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	0	0	16	521.817.290,000	18	529.709.000,000	20	400.000.000,000	22	400.000.000,000	24	400.000.000,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.793.029.430,000		1.872.418.000,000		1.510.000.000,000		1.510.000.000,000		1.510.000.000,000	
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	38	35	35	1.793.029.430,000	35	1.872.418.000,000	36	1.510.000.000,000	36	1.510.000.000,000	37	1.510.000.000,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.096.210.299,000		2.127.913.000,000		2.161.390.000,000		2.195.664.300,000		2.231.887.000,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					667.120.400,000		677.210.000,000		687.864.100,000		698.771.900,000		710.299.800,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	11,45	12,5	13	667.120.400,000	13,5	677.210.000,000	14	687.864.100,000	14,5	698.771.900,000	15	710.299.800,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	0	45,70	46,04		46,38		46,72		47,06		47,40		1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					323.696.589,000		328.592.000,000		333.761.500,000		339.054.100,000		344.647.600,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	0:0	19.58:19.28	18.07:17.77	323.696.589,000	17.55:17.25	328.592.000,000	16.03:15.73	333.761.500,000	15.52:15.22	339.054.100,000	14:137	344.647.600,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					87.575.585,000		88.900.000,000		90.298.600,000		91.730.500,000		93.243.800,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berpersfektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	0	30	40	87.575.585,000	50	88.900.000,000	60	90.298.600,000	70	91.730.500,000	80	93.243.800,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					553.030.100,000		561.394.000,000		570.226.000,000		579.268.400,000		588.824.800,000	
Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	55	58	553.030.100,000	61	561.394.000,000	64	570.226.000,000	67	579.268.400,000	70	588.824.800,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					464.787.625,000		471.817.000,000		479.239.800,000		486.839.400,000		494.871.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani (%)	100	100	100	464.787.625,000	100	471.817.000,000	100	479.239.800,000	100	486.839.400,000	100	494.871.000,000	1.06.2.08.0.00.07.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.176.821.200,000		7.280.110.825,680		7.388.563.164,800		7.497.789.109,330		7.598.792.348,260	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.245.321.200,000		5.324.657.825,680		5.408.426.964,800		5.494.191.309,330		5.584.830.848,260	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.245.321.200,000	100	5.324.657.825,680	100	5.408.426.964,800	100	5.494.191.309,330	100	5.584.830.848,260	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					95.000.000,000		108.000.000,000		118.250.000,000		128.500.000,000		90.650.000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedauatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	20	20	22	95.000.000,000	24	108.000.000,000	26	118.250.000,000	28	128.500.000,000	30	90.650.000,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.311.000.000,000		1.333.242.000,000		1.352.172.000,000		1.371.980.800,000		1.392.915.600,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	90,98	91,67	92,33	1.311.000.000,000	93,00	1.333.242.000,000	93,67	1.352.172.000,000	94,33	1.371.980.800,000	95,00	1.392.915.600,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					450.500.000,000		438.077.000,000		432.382.400,000		424.558.900,000		450.541.800,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (%)	0,69	0	0	450.500.000,000	0	438.077.000,000	0	432.382.400,000	0	424.558.900,000	0	450.541.800,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					75.000.000,000		76.134.000,000		77.331.800,000		78.558.100,000		79.854.100,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	75.000.000,000	100	76.134.000,000	100	77.331.800,000	100	78.558.100,000	100	79.854.100,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					667.668.191,000		677.765.000,000		688.427.800,000		699.344.600,000		710.881.900,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					317.668.191,000		322.472.000,000		327.545.200,000		332.739.300,000		338.228.600,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan (%)	95	96	97	317.668.191,000	98	322.472.000,000	99	327.545.200,000	100	332.739.300,000	100	338.228.600,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					350.000.000,000		355.293.000,000		360.882.600,000		366.605.300,000		372.653.300,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	100	350.000.000,000	100	355.293.000,000	100	360.882.600,000	100	366.605.300,000	100	372.653.300,000	1.04.1.03.2.10.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					23.694.954.754,000		22.531.232.704,000		17.885.700.850,000		18.248.611.919,000		19.632.152.078,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.674.997.907,000		6.775.958.704,000		5.367.560.150,000		5.558.700.619,000		5.820.045.078,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	97	97,5	98	6.674.997.907,000	98,5	6.775.958.704,000	99	5.367.560.150,000	99,5	5.558.700.619,000	100	5.820.045.078,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					725.949.562,000		736.929.000,000		368.522.600,000		560.392.300,000		662.936.700,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (%)	100	100	100	725.949.562,000	100	736.929.000,000	100	368.522.600,000	100	560.392.300,000	100	662.936.700,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.591.560.862,000		1.616.212.000,000		991.638.700,000		917.671.100,000		1.245.183.200,000	
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik (%)	75	75	75	1.591.560.862,000	75	1.616.212.000,000	75	991.638.700,000	75	917.671.100,000	75	1.245.183.200,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Baik (%)	75	75	75		75		75		75		75		2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.818.668.514,000		4.893.820.000,000		2.738.170.900,000		2.657.411.800,000		2.957.270.700,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	4.818.668.514,000	100	4.893.820.000,000	100	2.738.170.900,000	100	2.657.411.800,000	100	2.957.270.700,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN					171.550.625,000		174.145.000,000		176.884.700,000		179.689.700,000		132.654.100,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100	100	100	171.550.625,000	100	174.145.000,000	100	176.884.700,000	100	179.689.700,000	100	132.654.100,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					81.438.919,000		82.670.000,000		83.970.600,000		85.302.200,000		86.709.500,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	81.438.919,000	100	82.670.000,000	100	83.970.600,000	100	85.302.200,000	100	86.709.500,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					185.972.456,000		188.785.000,000		91.755.000,000		94.795.800,000		98.009.400,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemberian penghargaan lingkungan hidup (*)	Ada	Ada	Ada	185.972.456,000	Ada	188.785.000,000	Ada	91.755.000,000	Ada	94.795.800,000	Ada	98.009.400,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					133.020.395,000		135.032.000,000		117.156.400,000		119.331.400,000		121.630.000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti (%)	100	100	100	133.020.395,000	100	135.032.000,000	100	117.156.400,000	100	119.331.400,000	100	121.630.000,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.161.795.514,000		7.777.681.000,000		7.800.041.800,000		7.925.317.000,000		8.357.713.400,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani (%)	18,83	22,60	22,40	9.161.795.514,000	22,20	7.777.681.000,000	22,10	7.800.041.800,000	22,30	7.925.317.000,000	22,90	8.357.713.400,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.851.300.000,000		11.989.300.000,000		12.122.300.000,000		12.206.300.000,000		12.292.300.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.223.300.000,000		11.343.300.000,000		11.453.300.000,000		11.513.300.000,000		11.573.300.000,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.223.300.000,000	100	11.343.300.000,000	100	11.453.300.000,000	100	11.513.300.000,000	100	11.573.300.000,000	2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					500.000.000,000		501.000.000,000		502.000.000,000		503.000.000,000		504.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	30	30	30	500.000.000,000	31	501.000.000,000	32	502.000.000,000	33	503.000.000,000	34	504.000.000,000	2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	54,85	57,36	60,00		62,43		64,35		67,48		70,00		2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatanya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97,77	97,80	98,00	60.000.000,000	98,20	60.000.000,000	98,40	60.000.000,000	98,60	60.000.000,000	98,80	60.000.000,000	2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	persentase pasangan berakte nikah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					58.000.000,000		75.000.000,000		97.000.000,000		120.000.000,000		145.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	17,85	21,42	25,00	58.000.000,000	28,57	75.000.000,000	32,14	97.000.000,000	35,71	120.000.000,000	39,28	145.000.000,000	2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu (Dokumen)	1	1	1	10.000.000,000	1	10.000.000,000	1	10.000.000,000	1	10.000.000,000	1	10.000.000,000	2.12.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					15.909.139.025,000		16.149.765.914,680		14.403.838.908,130		15.360.808.300,790		15.938.874.461,610	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.228.917.956,000		7.338.256.914,680		7.083.704.608,130		7.402.746.900,790		7.523.267.936,610	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.228.917.956,000	100	7.338.256.914,680	100	7.083.704.608,130	100	7.402.746.900,790	100	7.523.267.936,610	2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.166.346.485,000		1.183.987.000,000		1.202.613.800,000		1.221.684.300,000		1.241.838.800,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	1.166.346.485,000	100	1.183.987.000,000	100	1.202.613.800,000	100	1.221.684.300,000	100	1.241.838.800,000	2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					396.929.829,000		402.933.000,000		409.272.100,000		415.762.100,000		422.621.100,000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	396.929.829,000	100	402.933.000,000	100	409.272.100,000	100	415.762.100,000	100	422.621.100,000	2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.108.214.840,000		5.185.477.000,000		3.831.693.624,000		4.220.579.100,000		4.612.399.725,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	18,28	5.108.214.840,000	36,56	5.185.477.000,000	54,84	3.831.693.624,000	73,12	4.220.579.100,000	100	4.612.399.725,000	2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.008.729.915,000		2.039.112.000,000		1.876.554.776,000		2.100.035.900,000		2.138.746.900,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) (%)	100	100	100	2.008.729.915,000	100	2.039.112.000,000	100	1.876.554.776,000	100	2.100.035.900,000	100	2.138.746.900,000	2.13.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11.488.447.101,000		12.056.079.594,000		10.245.749.472,000		10.439.936.912,000		11.645.162.804,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.641.550.209,000		5.812.610.256,000		5.882.169.605,000		6.027.103.314,000		6.203.980.135,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.641.550.209,000	100	5.812.610.256,000	100	5.882.169.605,000	100	6.027.103.314,000	100	6.203.980.135,000	2.14.2.08.0.00.12.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.015.281.022,000		1.018.115.000,000		860.878.001,000		1.001.788.377,000		893.457.722,000	
Menciptakan penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19) (Angka)	16,1	13,4	11,6	1.015.281.022,000	10,3	1.018.115.000,000	9,4	860.878.001,000	8,8	1.001.788.377,000	8,5	893.457.722,000	2.14.2.08.0.00.12.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.656.615.870,000		2.967.604.338,000		2.000.126.993,000		1.895.483.425,000		2.214.383.069,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) (%)	62,63	63,86	65,09	2.656.615.870,000	66,32	2.967.604.338,000	67,54	2.000.126.993,000	68,77	1.895.483.425,000	70,00	2.214.383.069,000	2.14.2.08.0.00.12.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.175.000.000,000		2.257.750.000,000		1.502.574.873,000		1.515.561.796,000		2.333.341.878,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga (%)	45	50	60	2.175.000.000,000	65	2.257.750.000,000	70	1.502.574.873,000	75	1.515.561.796,000	80	2.333.341.878,000	2.14.2.08.0.00.12.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					40.075.015.148,000		41.802.168.612,030		39.069.939.159,570		40.355.996.419,430		41.186.736.448,970	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.573.015.148,000		16.823.685.612,030		17.088.360.959,570		17.359.340.319,430		17.645.723.248,970	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	94,55	100	100	16.573.015.148,000	100	16.823.685.612,030	100	17.088.360.959,570	100	17.359.340.319,430	100	17.645.723.248,970	2.15.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					21.937.000.000,000		23.389.803.000,000		20.367.904.600,000		21.357.393.600,000		21.874.707.200,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	6,67	10,67	19,56	21.937.000.000,000	28,45	23.389.803.000,000	37,34	20.367.904.600,000	46,22	21.357.393.600,000	60,00	21.874.707.200,000	2.15.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan angkutan orang/barang	0	37,10	38,30		39,50		40,70		41,90		43,10		2.15.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang laik jalan (%)													
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.565.000.000,000		1.588.680.000,000		1.613.673.600,000		1.639.262.500,000		1.666.306.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun (%)	0	0	20,00	1.565.000.000,000	40,00	1.588.680.000,000	60,00	1.613.673.600,000	80,00	1.639.262.500,000	100,00	1.666.306.000,000	2.15.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.855.049.555,000		13.049.483.392,000		11.290.836.592,000		11.464.970.134,000		11.687.106.332,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.504.183.419,000		5.587.435.392,000		5.675.338.627,000		5.098.676.262,000		5.285.112.698,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.504.183.419,000	100	5.587.435.392,000	100	5.675.338.627,000	100	5.098.676.262,000	100	5.285.112.698,000	2.16.2.20.2.21.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.747.748.000,000		4.819.558.000,000		3.895.380.800,000		3.639.668.772,000		3.630.386.434,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	70	75	4.747.748.000,000	80	4.819.558.000,000	85	3.895.380.800,000	90	3.639.668.772,000	95	3.630.386.434,000	2.16.2.20.2.21.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.603.118.136,000		2.642.490.000,000		1.720.117.165,000		2.726.625.100,000		2.771.607.200,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Implementasi tata kelola SPBE (Persentase)	0	50	60	2.603.118.136,000	70	2.642.490.000,000	80	1.720.117.165,000	90	2.726.625.100,000	100	2.771.607.200,000	2.16.2.20.2.21.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					9.551.820.554,000		9.696.292.222,000		8.550.328.492,000		8.746.808.709,000		8.954.457.539,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG					5.863.240.434,000		5.951.923.222,000		5.610.560.692,000		5.860.944.109,000		5.994.383.239,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.863.240.434,000	100	5.951.923.222,000	100	5.610.560.692,000	100	5.860.944.109,000	100	5.994.383.239,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					113.333.110,000		115.047.000,000		108.857.000,000		109.710.100,000		110.668.500,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Koperasi)	0	0	41,26	113.333.110,000	42,98	115.047.000,000	44,70	108.857.000,000	46,42	109.710.100,000	48,14	110.668.500,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					62.436.241,000		63.380.000,000		64.377.100,000		65.398.000,000		66.476.900,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	0	0	66,69	62.436.241,000	67,18	63.380.000,000	67,37	64.377.100,000	67,56	65.398.000,000	67,75	66.476.900,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					228.932.882,000		232.395.000,000		180.511.000,000		180.794.300,000		180.750.300,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Orang)	0	0	8,60	228.932.882,000	9,17	232.395.000,000	9,74	180.511.000,000	10,32	180.794.300,000	10,89	180.750.300,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.060.602.000,000		2.091.770.000,000		1.456.678.400,000		1.456.370.600,000		1.455.528.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah koperasi yang berkualitas (Koperasi)	0	0	30	2.060.602.000,000	32	2.091.770.000,000	34	1.456.678.400,000	36	1.456.370.600,000	38	1.455.528.000,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,					1.123.275.887,000		1.141.777.000,000		1.049.344.300,000		993.591.600,000		1.066.650.600,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	0	0	0,08	1.123.275.887,000	0,11	1.141.777.000,000	0,13	1.049.344.300,000	0,16	993.591.600,000	0,19	1.066.650.600,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000,000		100.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang di Kembangkan (%)	0	0	0,16	100.000.000,000	0,17	100.000.000,000	0,19	80.000.000,000	0,20	80.000.000,000	0,21	80.000.000,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					11.617.820.744,700		11.945.657.930,550		11.725.666.504,590		12.325.909.402,370		12.297.981.506,700	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.352.080.896,700		9.696.405.930,550		9.441.028.804,590		10.005.132.902,370		9.835.826.908,700	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.352.080.896,700	100	9.696.405.930,550	100	9.441.028.804,590	100	10.005.132.902,370	100	9.835.826.908,700	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					420.000.000,000		150.000.000,000		200.000.000,000		270.000.000,000		420.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	420.000.000,000	100	150.000.000,000	100	200.000.000,000	100	270.000.000,000	100	420.000.000,000	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					581.558.520,000		815.951.000,000		781.147.500,000		726.706.200,000		696.149.200,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Investor)	0	1	1	581.558.520,000	1	815.951.000,000	1	781.147.500,000	1	726.706.200,000	1	696.149.200,000	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					654.900.312,000		664.805.000,000		675.263.900,000		685.881.900,000		697.288.598,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Izin)	80	83	85	654.900.312,000	87	664.805.000,000	91	675.263.900,000	93	685.881.900,000	97	697.288.598,000	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					572.981.016,000		581.647.000,000		590.797.600,000		600.166.200,000		610.067.300,000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	70	80	85	572.981.016,000	90	581.647.000,000	93	590.797.600,000	97	600.166.200,000	100	610.067.300,000	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (Juta Rupiah)	5.619.731	2.500.000	2.600.000		2.700.000		2.800.000		2.900.000		3.000.000		2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					36.300.000,000		36.849.000,000		37.428.700,000		38.022.200,000		38.649.500,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	100	100	36.300.000,000	100	36.849.000,000	100	37.428.700,000	100	38.022.200,000	100	38.649.500,000	2.18.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					17.200.000.000,000		17.460.152.000,000		17.734.840.400,000		18.016.071.400,000		18.313.288.600,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.250.000.000,000		1.268.906.000,000		1.288.868.800,000		1.309.307.100,000		1.330.907.200,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,04	0,04	0,05	1.250.000.000,000	0,05	1.268.906.000,000	0,05	1.288.868.800,000	0,05	1.309.307.100,000	0,06	1.330.907.200,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1,15	1,25		1,50		1,75		2		2,2		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					14.175.000.000,000		14.389.399.000,000		14.615.777.400,000		14.847.547.700,000		15.092.492.700,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Diikuti (%)	80	100	100	14.175.000.000,000	100	14.389.399.000,000	100	14.615.777.400,000	100	14.847.547.700,000	100	15.092.492.700,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.775.000.000,000		1.801.847.000,000		1.830.194.200,000		1.859.216.600,000		1.889.888.700,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan (%)	90	90	93	1.775.000.000,000	94	1.801.847.000,000	95,11	1.830.194.200,000	98,58	1.859.216.600,000	99	1.889.888.700,000	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					254.552.000,000		258.500.000,000		226.512.135,000		266.730.500,000		271.130.800,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					254.552.000,000		258.500.000,000		226.512.135,000		266.730.500,000		271.130.800,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,36	2,40	2,50	254.552.000,000	2,75	258.500.000,000	2,95	226.512.135,000	3,00	266.730.500,000	3,25	271.130.800,000	2.16.2.20.2.21.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					45.000.000,000		45.680.000,000		46.398.700,000		47.134.500,000		47.912.100,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					45.000.000,000		45.680.000,000		46.398.700,000		47.134.500,000		47.912.100,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Indeks)	43,25	44,00	45,00	45.000.000,000	46,25	45.680.000,000	46,50	46.398.700,000	47,00	47.134.500,000	47,50	47.912.100,000	2.16.2.20.2.21.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.306.847.793,000		5.116.030.152,000		5.473.417.180,000		5.278.921.100,000		5.683.748.965,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.614.783.950,000		2.654.333.000,000		2.696.091.800,000		2.738.845.200,000		2.784.028.900,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat (%)	1,8	2,43	3,65	2.614.783.950,000	4,87	2.654.333.000,000	6,08	2.696.091.800,000	7,30	2.738.845.200,000	8,52	2.784.028.900,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.814.117.184,000		1.859.782.153,000		1.870.532.500,000		1.918.996.300,000		1.960.495.480,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat	Persentase Group Kesenian Tradisional yang	46	2,17	3,25	1.814.117.184,000	4,34	1.859.782.153,000	5,42	1.870.532.500,000	6,51	1.918.996.300,000	7,59	1.960.495.480,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dalam pengembangan kesenian tradisional	dikembangkan (%)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					98.819.604,000		100.314.999,000		101.893.200,000		103.509.000,000		105.216.598,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan (*)	0	0	1	98.819.604,000	1	100.314.999,000	1	101.893.200,000	1	103.509.000,000	1	105.216.598,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					494.127.055,000		501.600.000,000		509.491.300,000		517.570.600,000		526.109.100,000	
Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	5,25	26,67	33,33	494.127.055,000	40,00	501.600.000,000	46,67	509.491.300,000	53,33	517.570.600,000	60,00	526.109.100,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	2,11	2,95		3,38		3,80		4,22		4,64		2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					285.000.000,000		0,000		295.408.380,000		0,000		307.898.887,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi (%)	0	0	2,26	285.000.000,000	0	0,000	2,26	295.408.380,000	0	0,000	2,26	307.898.887,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.252.348.333,000		4.316.665.592,760		4.384.576.692,000		4.529.105.315,420		4.527.586.159,740	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.702.695.024,000		3.758.699.092,760		3.817.832.092,000		3.878.373.515,420		3.942.356.359,740	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.702.695.024,000	100	3.758.699.092,760	100	3.817.832.092,000	100	3.878.373.515,420	100	3.942.356.359,740	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					545.653.309,000		553.906.000,000		562.620.200,000		626.542.000,000		580.970.900,000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai	Nilai tingkat kegemaran membaca (Skor)	65,40	66	67	545.653.309,000	70	553.906.000,000	73	562.620.200,000	75	626.542.000,000	77	580.970.900,000	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
standar nasional perpustakaan														
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					4.000.000,000		4.060.500,000		4.124.400,000		24.189.800,000		4.258.900,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	20	40	4.000.000,000	60	4.060.500,000	70	4.124.400,000	90	24.189.800,000	100	4.258.900,000	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					106.040.670,000		107.644.400,000		109.337.900,000		136.071.800,000		112.904.200,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					83.040.670,000		84.296.600,000		85.622.800,000		86.980.600,000		88.415.500,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersedian arsip (%)	72,50	72,60	72,90	83.040.670,000	73	84.296.600,000	73,10	85.622.800,000	73,20	86.980.600,000	73,50	88.415.500,000	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					17.000.000,000		17.257.100,000		17.528.600,000		42.806.600,000		18.100.400,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	30	35	40	17.000.000,000	45	17.257.100,000	50	17.528.600,000	55	42.806.600,000	60	18.100.400,000	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					6.000.000,000		6.090.700,000		6.186.500,000		6.284.600,000		6.388.300,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	30	35	40	6.000.000,000	45	6.090.700,000	50	6.186.500,000	55	6.284.600,000	60	6.388.300,000	2.23.2.24.1.01.18.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.706.519.900,000		3.767.842.200,000		3.733.199.700,000		3.901.923.300,000		3.988.985.000,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					484.600.000,000		491.929.600,000		499.668.800,000		507.592.300,000		515.966.200,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.005,989	2.021,610	2.042,840	484.600.000,000	2.063,220	491.929.600,000	2.083,830	499.668.800,000	2.104,630	507.592.300,000	2.125,640	515.966.200,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.606.919.900,000		2.646.350.000,000		2.587.983.200,000		2.730.608.000,000		2.775.655.800,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	7.350,030	8.453,310	8.880,160	2.606.919.900,000	8.968,080	2.646.350.000,000	9.018,480	2.587.983.200,000	9.148,980	2.730.608.000,000	9.240,380	2.775.655.800,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA					115.000.000,000		122.000.000,000		130.000.000,000		140.000.000,000		165.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	50	50	50	115.000.000,000	50	122.000.000,000	50	130.000.000,000	50	140.000.000,000	50	165.000.000,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000,000		507.562.600,000		515.547.700,000		523.723.000,000		532.363.000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,60	49,00	49,50	500.000.000,000	51,00	507.562.600,000	51,50	515.547.700,000	52,00	523.723.000,000	53,00	532.363.000,000	2.09.3.25.0.00.08.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.715.047.423,000		11.897.088.683,000		12.088.021.337,000		12.240.406.076,000		12.438.670.167,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.979.305.190,000		6.069.743.483,000		6.165.234.537,000		6.262.999.987,000		6.366.322.818,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.979.305.190,000	100	6.069.743.483,000	100	6.165.234.537,000	100	6.262.999.987,000	100	6.366.322.818,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.263.480.863,000		4.327.966.900,000		4.396.055.800,000		4.465.766.189,000		4.539.439.449,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	12,47	7,22	5	4.263.480.863,000	6	4.327.966.900,000	7	4.396.055.800,000	8	4.465.766.189,000	9	4.539.439.449,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					714.736.370,000		721.412.200,000		736.731.000,000		961.704.500,000		973.900.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	20	40	714.736.370,000	50	721.412.200,000	70	736.731.000,000	80	961.704.500,000	100	973.900.000,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK					285.000.000,000		295.000.000,000		302.000.000,000		0,000		0,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	0	0	20	285.000.000,000	30	295.000.000,000	40	302.000.000,000	0	0,000	0	0,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					472.525.000,000		482.966.100,000		488.000.000,000		549.935.400,000		559.007.900,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	0	11,76	472.525.000,000	14,12	482.966.100,000	17,65	488.000.000,000	20,00	549.935.400,000	23,53	559.007.900,000	2.22.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					45.460.818.545,000		46.248.249.449,890		41.579.674.223,900		43.530.901.788,280		44.430.516.777,680	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.854.266.673,000		24.286.452.469,890		23.703.268.023,900		25.058.194.188,280		25.461.868.177,680	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	14.353.619.303,000	100	14.642.105.739,000	100	13.907.193.492,000	100	15.106.778.017,000	100	15.346.280.116,000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.500.647.370,000	100	9.644.346.730,890	100	9.796.074.531,900	100	9.951.416.171,280	100	10.115.588.061,680	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.354.862.010,000		5.765.715.000,000		5.724.679.000,000		5.662.319.000,000		5.828.133.900,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan	Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit) (Ton/Tahun)	6.556,67	6.556,67	6.556,67	3.239.304.000,000	6.556,67	3.661.804.000,000	6.556,67	3.629.679.000,000	6.556,67	3.887.947.000,000	6.556,67	4.046.629.000,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
	Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba) (Ekor)	1,296	1,145	1,145		1,145		1,144		1,145		1,145		3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	17.501,73	17.851,76	18.208,80	2.115.558.010,000	18.572,98	2.103.911.000,000	18.944,44	2.095.000.000,000	19.323,32	1.774.372.000,000	19.709,79	1.781.504.900,000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	634,74	635,74	667,53		700,90		735,95		772,75		811,38		3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	846,76	880	920		960		1.000		1.050		1.100		3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					12.989.627.906,000		12.803.308.980,000		8.826.527.200,000		9.451.989.300,000		9.747.028.800,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan (%)	50	65	70	9.310.343.219,000	75	9.131.807.500,000	80	7.021.527.200,000	85	8.026.989.300,000	90	8.147.028.800,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	0	0	87	3.679.284.687,000	87	3.671.501.480,000	87	1.805.000.000,000	87	1.425.000.000,000	87	1.600.000.000,000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					514.602.754,000		522.688.700,000		531.226.400,000		539.967.500,000		549.205.500,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100	514.602.754,000	100	522.688.700,000	100	531.226.400,000	100	539.967.500,000	100	549.205.500,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	0	5		5		5		5		5		3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					746.977.812,000		855.250.900,000		763.986.300,000		772.929.700,000		782.381.500,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	300.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan dan perkebunan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan) (%)	100	100	100	546.977.812,000	100	555.250.900,000	100	563.986.300,000	100	572.929.700,000	100	582.381.500,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					472.311.000,000		479.454.800,000		486.997.700,000		494.720.300,000		502.881.900,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pengawasan izin usaha pertanian (%)	50	50	55	472.311.000,000	60	479.454.800,000	65	486.997.700,000	70	494.720.300,000	75	502.881.900,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.528.170.390,000		1.535.378.600,000		1.542.989.600,000		1.550.781.800,000		1.559.017.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang diTingkatkan (%)	100	100	100	1.051.600.000,000	100	1.051.600.000,000	100	1.051.600.000,000	100	1.051.600.000,000	100	1.051.600.000,000	3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina (%)	17,08	20	20		20		20		20		20		3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh Pertanian	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina (%)	1	1	1	476.570.390,000	1	483.778.600,000	1	491.389.600,000	1	499.181.800,000	1	507.417.000,000	3.27.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					440.686.772,000		447.352.300,000		454.390.200,000		461.595.700,000		469.210.800,000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					440.686.772,000		447.352.300,000		454.390.200,000		461.595.700,000		469.210.800,000	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA (%)	100	100	100	440.686.772,000	100	447.352.300,000	100	454.390.200,000	100	461.595.700,000	100	469.210.800,000	2.11.3.28.0.00.09.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.282.273.694,000		8.407.544.899,000		7.039.815.000,000		7.675.235.500,000		8.818.353.700,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN					128.787.625,000		130.735.600,000		132.792.400,000		134.898.200,000		137.123.700,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi (%)	0,37	7,89	8,88	128.787.625,000	9,86	130.735.600,000	10,85	132.792.400,000	11,83	134.898.200,000	12,82	137.123.700,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					5.924.230.750,000		6.013.836.000,000		4.608.447.500,000		5.205.312.400,000		6.307.683.500,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisiensi, merata dan terintegrasi	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik (%)	57	60,83	64,67	5.924.230.750,000	68,50	6.013.836.000,000	72,33	4.608.447.500,000	76,17	5.205.312.400,000	80,00	6.307.683.500,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					180.302.675,000		183.029.800,000		185.909.300,000		188.857.400,000		191.973.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (%)	6,9	6,7	6,6	180.302.675,000	6,6	183.029.800,000	6,5	185.909.300,000	6,4	188.857.400,000	6,3	191.973.000,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					231.817.725,000		235.324.000,000		239.026.200,000		242.816.600,000		246.822.400,000	
Meningkatya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Juta Rupiah)	6.502,67	6.822,41	7.142,14	231.817.725,000	7.461,88	235.324.000,000	7.781,62	239.026.200,000	8.101,35	242.816.600,000	8.421,09	246.822.400,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.424.906.283,000		1.446.458.299,000		1.469.214.400,000		1.492.512.500,000		1.517.135.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	25,78	28,98	32,06	1.424.906.283,000	34,73	1.446.458.299,000	37,40	1.469.214.400,000	40,07	1.492.512.500,000	43,08	1.517.135.000,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					392.228.636,000		398.161.200,000		404.425.200,000		410.838.400,000		417.616.100,000	
Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah (Kali)	3	3	4	392.228.636,000	4	398.161.200,000	6	404.425.200,000	6	410.838.400,000	6	417.616.100,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					9.687.861.168,000		9.834.393.723,000		9.989.113.017,000		10.147.517.380,000		10.315.026.067,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.721.353.491,000		5.807.891.723,000		5.899.264.817,000		5.992.814.280,000		6.091.781.367,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.721.353.491,000	100	5.807.891.723,000	100	5.899.264.817,000	100	5.992.814.280,000	100	6.091.781.367,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.681.053.500,000		3.736.730.200,000		3.795.517.600,000		3.855.705.200,000		3.919.314.100,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (%)	1	1	1	3.681.053.500,000	1	3.736.730.200,000	1	3.795.517.600,000	1	3.855.705.200,000	1	3.919.314.100,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					154.545.150,000		156.882.700,000		159.350.800,000		161.877.700,000		164.548.300,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	154.545.150,000	100	156.882.700,000	100	159.350.800,000	100	161.877.700,000	100	164.548.300,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					130.909.027,000		132.889.100,000		134.979.800,000		137.120.200,000		139.382.300,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah dokumen informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini (Dokumen)	1	1	1	130.909.027,000	1	132.889.100,000	1	134.979.800,000	1	137.120.200,000	1	139.382.300,000	3.31.3.30.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					50.000.000,000		50.756.300,000		51.554.800,000		52.372.300,000		53.236.300,000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					50.000.000,000		50.756.300,000		51.554.800,000		52.372.300,000		53.236.300,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan (%)	0	0	33,3	50.000.000,000	0	50.756.300,000	33,3	51.554.800,000	0	52.372.300,000	33,4	53.236.300,000	2.17.2.07.3.32.15.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					64.343.720.543,000		65.316.933.247,160		66.344.519.144,120		67.396.579.961,240		68.508.444.246,260	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.022.210.964,000		47.733.432.147,160		48.484.389.044,120		49.253.232.161,240		50.065.779.446,260	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar (%)	85	86	87	47.022.210.964,000	88	47.733.432.147,160	89	48.484.389.044,120	90	49.253.232.161,240	91	50.065.779.446,260	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	75,20	76	77		78		79		80,1		81		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik (%)	80	82	84		86		88		89		90		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	43,26	43,28	43,30		43,32		43,35		43,40		45		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan (Indeks)	96,17	96,2	96,25		96,3		96,33		96,5		96,6		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	90	91	92		93		94		95		96		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.438.056.594,000		14.656.435.300,000		14.887.014.800,000		15.123.086.200,000		15.372.576.900,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran (%)	85,56	86,49	87,42	12.996.261.794,000	88,36	13.208.261.794,000	89,3	13.398.999.500,000	90,25	13.488.122.400,000	91,2	13.737.613.100,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Skor)	2,77	2,78	2,80	721.794.800,000	2,83	728.173.506,000	2,85	697.721.900,000	2,87	844.670.400,000	2,90	844.670.400,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan	90	90,01	90,02		90,03		90,04		90,05		90,06		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kerja Sama yang Optimal (%)													
	Persentase Capaian SPM (%)	92,03	92,1	92,3		92,7		93,2		93,5		95,5		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87,88	88	88,2	720.000.000,000	88,3	720.000.000,000	88,4	790.293.400,000	88,5	790.293.400,000	88,6	790.293.400,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.883.452.985,000		2.927.065.800,000		2.973.115.300,000		3.020.261.600,000		3.070.087.900,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi penyediaan data harga bahan pokok penting (%)	93	93,2	93,5	814.914.377,000	93,8	856.477.989,000	94	857.527.489,000	94,2	884.673.789,000	94,5	893.527.489,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD (%)	93	93,2	93,5		94		94,2		94,5		95		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Pembangunan	Persentase kegiatan dengan penyerapan anggarannya >= 90% (%)	90	90,01	90,02	2.068.538.608,000	90,03	2.070.587.811,000	90,04	2.115.587.811,000	90,05	2.135.587.811,000	90,06	2.176.560.411,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	Level 2	Level 3	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					69.080.935.733,000		70.201.426.003,000		71.384.517.750,000		72.595.788.267,000		73.875.912.306,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.501.125.003,000		35.403.631.513,000		35.678.123.790,000		36.097.013.807,000		36.551.084.051,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	94,75	95,00	95,00	34.501.125.003,000	95,50	35.403.631.513,000	96,00	35.678.123.790,000	96,50	36.097.013.807,000	97,00	36.551.084.051,000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					34.579.810.730,000		34.797.794.490,000		35.706.393.960,000		36.498.774.460,000		37.324.828.255,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	85,33	87,00	88,67	34.579.810.730,000	90,34	34.797.794.490,000	92,01	35.706.393.960,000	93,68	36.498.774.460,000	95,35	37.324.828.255,000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi perda (%)	80,00	81,67	83,33		85,00		86,67		88,33		90,00		4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					13.116.132.800,000		13.314.299.835,000		12.393.225.523,680		12.853.042.786,800		13.080.726.597,780	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.349.645.001,000		10.506.185.635,000		9.780.718.523,680		10.143.015.637,200		10.322.135.577,420	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	10.349.645.001,000	100	10.506.185.635,000	100	9.780.718.523,680	100	10.143.015.637,200	100	10.322.135.577,420	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.228.202.182,000		1.246.779.000,000		1.160.038.000,000		1.203.626.571,360		1.224.790.883,400	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.036.829.600,000	100	1.052.505.000,000	100	978.676.000,000	100	1.014.688.045,640	100	1.031.110.339,140	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Daerah	Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun (%)	100	100	100	191.372.582,000	100	194.274.000,000	100	181.362.000,000	100	188.938.525,720	100	193.680.544,260	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.538.285.617,000		1.561.335.200,000		1.452.469.000,000		1.506.400.578,240		1.533.800.136,960	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	495.521.717,000	100	503.042.600,000	100	468.645.000,000	100	487.029.386,800	100	497.020.745,340	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	285.824.200,000	100	289.923.000,000	100	269.375.000,000	100	279.505.447,760	100	284.029.382,280	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	756.939.700,000	100	768.369.600,000	100	714.449.000,000	100	739.865.743,680	100	752.750.009,340	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN					302.021.286.757,510		302.604.549.765,670		310.443.878.245,420		316.398.469.341,770		321.634.699.576,520	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					70.581.331.651,000		71.348.279.177,000		70.308.671.661,000		72.207.320.627,000		73.138.982.889,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	21.019.037.920,000	100	21.336.955.446,000	100	19.736.634.930,000	100	21.072.309.596,000	100	21.452.520.128,000	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	49.562.293.731,000	100	50.011.323.731,000	100	50.572.036.731,000	100	51.135.011.031,000	100	51.686.462.761,000	5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					227.942.799.157,510		227.706.219.388,670		236.593.304.884,420		240.584.066.314,770		244.845.203.187,520	
Meningkatnya tata kelola keuangan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	34,15	49,27	40	227.942.799.157,510	40	227.706.219.388,670	40	236.593.304.884,420	40	240.584.066.314,770	40	244.845.203.187,520	5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40,28	48,22	50		52		54		56		58		5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	87,87	80	85		90		95		95		95		5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase silpa terhadap APBD (%)	0,48	1,64	2		2		2		2		2		5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.052.828.032,000		1.068.752.300,000		1.085.566.200,000		1.102.780.600,000		1.120.973.500,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6,88	5	5	1.052.828.032,000	5	1.068.752.300,000	5	1.085.566.200,000	5	1.102.780.600,000	5	1.120.973.500,000	5.02.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.444.327.917,000		2.481.298.900,000		2.456.335.500,000		2.504.301.800,000		2.529.540.000,000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	9,03	11,94	12,23	2.280.298.957,000	12,53	2.299.851.145,000	12,83	2.272.849.658,000	13,14	2.320.149.658,000	13,46	2.343.351.154,000	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	113.333.110,000	100	114.466.441,000	100	115.611.106,000	100	115.611.106,000	100	116.767.217,000	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan	70	75	80	50.695.850,000	100	66.981.314,000	100	67.874.736,000	100	68.541.036,000	100	69.421.629,000	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Berbasis Digital (Persentase)													
5.03 - KEPEGAWAIAN					18.205.302.410,000		18.832.683.508,000		16.744.992.640,000		17.050.940.008,000		18.077.133.238,500	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.000.302.410,000		7.106.183.508,000		7.217.980.140,000		7.332.439.558,000		7.453.405.302,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.000.302.410,000	100	7.106.183.508,000	100	7.217.980.140,000	100	7.332.439.558,000	100	7.453.405.302,000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					11.205.000.000,000		11.726.500.000,000		9.527.012.500,000		9.718.500.450,000		10.623.727.936,500	
Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	25	11.205.000.000,000	25	11.726.500.000,000	25	9.527.012.500,000	25	9.718.500.450,000	25	10.623.727.936,500	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	0	0	80		80		80		80		80		5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	0	0	25		25		25		25		25		5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase layanan administrasi kepegawaian (%)	0	0	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.782.681.822,000		1.809.645.300,000		1.538.115.200,000		1.567.263.200,000		1.898.068.100,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.782.681.822,000		1.809.645.300,000		1.538.115.200,000		1.567.263.200,000		1.898.068.100,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	0	0	25	1.782.681.822,000	25	1.809.645.300,000	25	1.538.115.200,000	25	1.567.263.200,000	25	1.898.068.100,000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi	0	0	25		25		25		25		25		5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kompetensi (Persentase)													Pendidikan dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.716.410.000,000		1.742.371.100,000		1.621.120.000,000		1.682.065.653,200		1.711.642.775,220	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.716.410.000,000		1.742.371.100,000		1.621.120.000,000		1.682.065.653,200		1.711.642.775,220	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	945.000.000,000	100	1.069.500.000,000	100	929.740.000,000	100	999.077.653,200	100	1.074.754.775,220	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100	100	100	771.410.000,000	100	672.871.100,000	100	691.380.000,000	100	682.988.000,000	100	636.888.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					412.120.397,000		418.353.800,000		424.935.500,000		431.673.900,000		438.795.400,000	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					412.120.397,000		418.353.800,000		424.935.500,000		431.673.900,000		438.795.400,000	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase penyelesaian tapal batas daerah (%)	90	1	1	412.120.397,000	1	418.353.800,000	1	424.935.500,000	1	431.673.900,000	1	438.795.400,000	4.01.5.06.2.10.22.0000 - Sekretariat Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					16.437.340.511,000		16.787.471.402,470		15.051.576.984,100		15.321.972.771,880		17.207.739.048,830	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.248.210.511,000		13.550.105.102,470		12.013.279.484,100		12.484.579.484,880		13.812.188.848,830	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	99,98	100	100	13.248.210.511,000	100	13.550.105.102,470	100	12.013.279.484,100	100	12.484.579.484,880	100	13.812.188.848,830	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.760.000.000,000		2.801.745.600,000		2.595.823.500,000		2.387.902.787,000		2.938.644.300,000	
Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT (%)	0	70	100	2.760.000.000,000	100	2.801.745.600,000	100	2.595.823.500,000	100	2.387.902.787,000	100	2.938.644.300,000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	70	70		80		85		90		95		6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					429.130.000,000		435.620.700,000		442.474.000,000		449.490.500,000		456.905.900,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB (%)	0	64,5	64,4	429.130.000,000	66,7	435.620.700,000	77,8	442.474.000,000	88,9	449.490.500,000	100	456.905.900,000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI (%)	0	27,6	47,6		66,7		76,2		85,7		100		6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					48.873.938.286,000		49.643.417.098,350		50.455.886.860,390		51.287.508.345,790		52.162.542.028,310	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.955.022.934,000		43.597.778.664,450		44.228.007.310,390		44.936.896.708,290		45.620.577.828,310	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.921.127.205,000	100	4.005.206.696,280	100	4.047.977.598,230	100	4.136.634.222,680	100	4.203.115.238,030	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.597.300.182,000	100	3.651.710.130,810	100	3.709.159.947,120	100	3.767.978.097,700	100	3.830.139.711,340	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran,	100	100	100	2.907.792.660,000	100	2.951.773.657,360	100	2.998.211.859,820	100	3.045.756.122,980	100	3.096.002.995,570	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)													
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.602.384.123,000	100	3.661.257.280,700	100	3.723.419.664,020	100	3.787.062.625,100	100	3.854.323.311,110	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.860.005.178,000	100	3.918.388.597,000	100	3.980.033.880,000	100	4.043.147.424,000	100	4.109.848.600,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.490.093.958,000	100	4.521.901.359,070	100	4.553.054.259,730	100	4.603.732.174,980	100	4.619.001.603,760	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana	100	100	100	2.442.219.192,000	100	2.479.158.289,240	100	2.518.161.162,740	100	2.558.093.002,990	100	2.600.294.731,560	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah (%)													
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.066.753.343,000	100	2.098.013.437,000	100	2.131.020.024,000	100	2.164.812.758,000	100	2.200.526.409,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.303.544.392,000	100	2.338.386.002,680	100	2.375.174.203,690	100	2.412.838.622,580	100	2.452.644.040,330	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.361.573.499,000	100	2.397.292.812,000	100	2.435.007.753,000	100	2.473.620.985,000	100	2.514.429.150,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.696.288.170,000	100	1.721.944.898,060	100	1.749.035.059,800	100	1.776.770.452,440	100	1.806.082.437,690	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya dukungan perencanaan,	Persentase dukungan Perencanaan,	100	100	100	2.818.500.259,000	100	2.861.130.689,340	100	2.906.142.869,010	100	2.952.227.144,510	100	3.000.931.037,790	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)													
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.260.396.786,000	100	1.279.460.561,930	100	1.299.589.425,290	100	1.320.197.716,000	100	1.341.977.465,840	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.204.705.342,000	100	2.238.051.990,520	100	2.273.261.706,280	100	2.309.310.043,710	100	2.347.407.515,350	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.780.858.129,000	100	1.807.793.996,110	100	1.836.234.762,010	100	1.865.352.927,390	100	1.896.126.287,790	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran,	100	100	100	1.641.480.516,000	100	1.666.308.266,350	100	1.692.523.135,650	100	1.719.362.388,230	100	1.747.727.293,150	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					423.839.570,000		430.450.100,000		437.419.000,000		444.549.000,000		444.073.000,000	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	60	100	100	44.286.870,000	100	44.956.700,000	100	45.664.000,000	100	46.388.100,000	100	39.153.400,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	81,50	93,25	93,60	44.719.000,000	93,95	45.395.400,000	94,30	46.109.600,000	94,65	46.840.800,000	95,00	47.613.500,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	83,03	93,25	93,60	40.487.000,000	93,95	41.099.400,000	94,30	41.746.000,000	94,65	42.408.000,000	95,00	43.107.600,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	98,10	93,25	93,60	25.909.000,000	93,95	26.300.900,000	94,30	26.714.700,000	94,65	27.138.300,000	95,00	27.586.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	85,91	93,25	93,60	24.022.000,000	93,9	24.385.300,000	94,30	24.768.900,000	94,65	25.161.700,000	95,00	25.576.800,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	97,13	93,25	93,60	52.100.000,000	93,95	53.190.500,000	94,30	54.342.000,000	94,65	55.520.900,000	95,00	56.766.800,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kabun	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	85,00	93,25	93,60	10.818.000,000	93,95	10.981.600,000	94,30	11.154.400,000	94,65	11.331.300,000	95,00	11.518.200,000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tandun	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	86,36	93,25	93,60	20.000.000,000	93,95	20.200.000,000	94,30	20.400.000,000	94,65	20.600.000,000	95,00	20.800.000,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Samo	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	88,00	93,25	93,60	13.992.000,000	93,95	14.203.600,000	94,30	14.427.100,000	94,65	14.655.900,000	95,00	14.897.700,000	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	85,70	93,25	93,60	12.157.900,000	93,95	12.341.800,000	94,30	12.536.000,000	94,65	12.734.800,000	95,00	12.944.900,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bangun Purba	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	79,81	93,25	93,60	54.697.000,000	93,95	55.524.300,000	94,30	56.397.800,000	94,65	57.292.100,000	95,00	58.237.300,000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai Utara	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	80,14	93,25	93,60	22.788.000,000	93,95	23.132.700,000	94,30	23.496.600,000	94,65	23.869.200,000	95,00	24.263.000,000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bonai Darussalam	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	76,95	93,25	93,60	15.744.000,000	93,95	15.982.100,000	94,30	16.233.500,000	94,65	16.490.900,000	95,00	16.763.000,000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	85,10	93,25	93,60	19.857.000,000	93,95	20.157.300,000	94,30	20.474.400,000	94,65	20.799.100,000	95,00	21.142.200,000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan Hulu	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	84,50	93,25	93,60	10.816.000,000	93,95	10.979.600,000	94,30	11.152.300,000	94,65	11.329.100,000	95,00	11.516.000,000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pendalian IV Koto	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	83,08	93,25	93,60	11.445.800,000	93,95	11.618.900,000	94,30	11.801.700,000	94,65	11.988.800,000	95,00	12.186.600,000	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.084.851.514,000		3.178.989.000,000		3.304.399.800,000		3.381.315.100,000		3.523.098.400,000	
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	50	100	100	458.143.514,000	100	454.441.200,000	100	484.370.100,000	100	482.183.100,000	100	501.770.300,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	603.662.000,000	100	612.792.500,000	100	622.433.100,000	100	632.303.400,000	100	642.734.700,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	333.562.000,000	100	338.607.200,000	100	343.934.300,000	100	349.388.300,000	100	355.152.300,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan Rokan IV Koto														
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	601.906.000,000	100	613.883.800,000	100	626.530.700,000	100	639.478.900,000	100	653.163.100,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	331.263.000,000	100	336.273.400,000	100	341.563.800,000	100	346.980.200,000	100	352.704.500,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ujung Batu	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	382.476.000,000	100	446.921.200,000	100	506.839.800,000	100	549.402.500,000	100	632.673.900,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kabun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	21.636.000,000	100	21.963.200,000	100	22.308.700,000	100	22.662.500,000	100	23.036.400,000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tandun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	53.000.000,000	100	50.378.200,000	100	47.912.700,000	100	45.517.500,000	100	43.294.300,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah Samo	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	50.958.000,000	100	51.728.700,000	100	52.542.500,000	100	53.375.700,000	100	54.256.300,000	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	40.933.000,000	100	41.552.100,000	100	42.205.800,000	100	42.875.100,000	100	43.582.400,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bangun Purba	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	18.282.000,000	100	18.558.500,000	100	18.850.500,000	100	19.149.400,000	100	19.465.300,000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai Utara	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	34.181.000,000	100	34.698.000,000	100	35.243.900,000	100	35.802.800,000	100	36.393.500,000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonai Darussalam	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	16.869.000,000	100	17.124.100,000	100	17.393.500,000	100	17.669.300,000	100	17.960.800,000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	64.445.000,000	100	65.419.700,000	100	66.448.900,000	100	67.502.600,000	100	68.616.200,000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	29.858.000,000	100	30.309.600,000	100	30.786.400,000	100	31.274.600,000	100	31.790.500,000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	100	100	100	43.677.000,000	100	44.337.600,000	100	45.035.100,000	100	45.749.200,000	100	46.503.900,000	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.895.128.260,000		1.918.167.200,000		1.952.940.000,000		1.988.493.700,000		2.021.683.100,000	
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rambah	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	130.074.260,000	100	130.508.800,000	100	131.135.200,000	100	131.848.000,000	100	132.771.900,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tambusai	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	268.862.000,000	100	272.928.600,000	100	277.222.400,000	100	281.618.500,000	100	286.264.500,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	88.590.000,000	100	89.929.900,000	100	91.344.700,000	100	92.793.200,000	100	94.324.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kepenuhan	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	105.000.000,000	100	106.890.700,000	100	108.887.000,000	100	110.930.800,000	100	113.090.800,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	120.000.000,000	100	121.815.000,000	100	123.731.400,000	100	125.693.500,000	100	127.767.100,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Ujung Batu	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	107.200.000,000	100	100.938.900,000	100	104.886.700,000	100	108.928.600,000	100	108.928.600,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya Keamanan dan	Persentase penanganan pelanggaran	0	100	100	108.181.000,000	100	109.817.300,000	100	111.545.000,000	100	113.313.800,000	100	115.183.200,000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kabun	ketentraman dan ketertiban umum (%)													
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tandun	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rambah Samo	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	101.512.500,000	100	103.109.500,000	100	104.744.600,000	100	106.472.600,000	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	100.000.000,000	100	101.512.500,000	100	103.109.500,000	100	104.744.600,000	100	106.472.600,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Bangun Purba	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	118.654.000,000	100	120.448.700,000	100	122.343.600,000	100	124.283.700,000	100	126.334.100,000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tambusai Utara	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	108.181.000,000	100	109.817.300,000	100	111.545.000,000	100	113.313.800,000	100	115.183.200,000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Bonai Darussalam	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	112.466.000,000	100	114.167.100,000	100	115.963.200,000	100	117.802.100,000	100	119.745.500,000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	114.134.000,000	100	115.860.300,000	100	117.683.000,000	100	119.549.200,000	100	121.521.400,000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	105.605.000,000	100	107.202.300,000	100	108.888.800,000	100	110.615.500,000	100	112.440.400,000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	108.181.000,000	100	109.817.300,000	100	111.545.000,000	100	113.313.800,000	100	115.183.200,000	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN					247.024.508,000		251.126.900,000		255.447.700,000		259.589.537,500		264.525.100,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	0	100	100	10.395.508,000	100	10.825.000,000	100	11.278.500,000	100	11.465.737,500	100	12.233.500,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	0	100	100	25.942.000,000	100	26.334.400,000	100	26.748.700,000	100	27.172.900,000	100	27.621.200,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rokan IV Koto	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	15.745.000,000	100	15.983.100,000	100	16.234.600,000	100	16.492.000,000	100	16.764.100,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kepenuhan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	12.410.000,000	100	12.597.700,000	100	12.795.900,000	100	12.998.800,000	100	13.213.200,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kunto Darussalam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	0	100	100	28.940.000,000	100	29.377.700,000	100	29.839.900,000	100	30.313.100,000	100	30.813.200,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ujung Batu	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	0	100	100	15.836.000,000	100	16.075.500,000	100	16.328.400,000	100	16.587.300,000	100	16.860.900,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabun	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	10.818.000,000	100	10.981.600,000	100	11.154.400,000	100	11.331.300,000	100	11.518.200,000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tandun	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	7.000.000,000	100	7.200.000,000	100	7.400.000,000	100	7.600.000,000	100	7.800.000,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah Samo	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	22.350.000,000	100	22.688.000,000	100	23.044.900,000	100	23.410.300,000	100	23.796.500,000	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	9.292.000,000	100	9.432.500,000	100	9.580.900,000	100	9.732.800,000	100	9.893.400,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Umum Kecamatan Rambah Hilir														
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bangun Purba	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	11.307.000,000	100	11.478.000,000	100	11.658.600,000	100	11.843.500,000	100	12.038.900,000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai Utara	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	16.119.000,000	100	16.362.800,000	100	16.620.200,000	100	16.883.800,000	100	17.162.300,000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bonai Darussalam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	11.246.000,000	100	11.416.100,000	100	11.595.700,000	100	11.779.600,000	100	11.973.900,000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	23.352.000,000	100	23.705.200,000	100	24.078.100,000	100	24.459.900,000	100	24.863.400,000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kepenuhan Hulu	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	10.818.000,000	100	10.981.600,000	100	11.154.400,000	100	11.331.300,000	100	11.518.200,000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pendalian IV Koto	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	15.454.000,000	100	15.687.700,000	100	15.934.500,000	100	16.187.200,000	100	16.454.200,000	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					268.071.500,000		266.905.233,900		277.673.050,000		276.664.300,000		288.584.600,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	0	100	100	30.000.000,000	100	25.137.233,900	100	32.003.150,000	100	27.000.000,000	100	34.700.000,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Rambah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	0	100	100	20.606.000,000	100	20.917.700,000	100	21.246.800,000	100	21.583.700,000	100	21.939.800,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tambusai
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rokan IV Koto	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	22.493.000,000	100	22.833.200,000	100	23.192.400,000	100	23.560.200,000	100	23.948.900,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Rokan IV Koto
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	12.000.000,000	100	12.181.500,000	100	12.373.100,000	100	12.569.300,000	100	12.776.700,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Kepenuhan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan Kepenuhan														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kunto Darussalam	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	42.906.000,000	100	43.555.000,000	100	44.240.200,000	100	44.941.700,000	100	45.683.100,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kunto Darussalam
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Ujung Batu	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	14.720.000,000	100	15.093.900,000	100	15.488.700,000	100	15.892.900,000	100	16.320.100,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Ujung Batu
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kabun	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	5.409.000,000	100	5.490.800,000	100	5.577.200,000	100	5.665.600,000	100	5.759.100,000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Kabun
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tandun	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.020.000,000	100	5.040.000,000	100	5.060.000,000	100	5.080.000,000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Tandun
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Samo	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	13.890.000,000	100	14.100.100,000	100	14.321.900,000	100	14.549.000,000	100	14.789.000,000	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Rambah Samo
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bangun Purba	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	6.077.500,000	100	6.169.400,000	100	6.266.500,000	100	6.365.900,000	100	6.470.900,000	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Bangun Purba
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Hilir	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	9.063.000,000	100	9.200.100,000	100	9.344.800,000	100	9.493.000,000	100	9.649.600,000	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Rambah Hilir
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	19.991.000,000	100	20.293.400,000	100	20.612.700,000	100	20.939.600,000	100	21.285.000,000	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Tambusai Utara
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bonai Darussalam	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	5.623.000,000	100	5.708.000,000	100	5.797.800,000	100	5.889.700,000	100	5.986.900,000	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Bonai Darussalam
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	34.021.000,000	100	34.535.600,000	100	35.078.900,000	100	35.635.200,000	100	36.223.100,000	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan Hulu	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	10.818.000,000	100	10.981.600,000	100	11.154.400,000	100	11.331.300,000	100	11.518.200,000	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Kepenuhan Hulu
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pendalian IV Koto	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu (%)	100	100	100	15.454.000,000	100	15.687.700,000	100	15.934.500,000	100	16.187.200,000	100	16.454.200,000	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Pendalian IV Koto

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10.212.746.432,000		10.367.216.470,000		8.529.686.757,000		8.694.138.884,000		12.873.769.805,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.375.089.700,000		3.426.138.670,000		3.479.409.757,000		3.532.061.784,000		3.593.546.405,000	
Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.375.089.700,000	100	3.426.138.670,000	100	3.479.409.757,000	100	3.532.061.784,000	100	3.593.546.405,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					970.000.000,000		984.671.500,000		750.162.700,000		766.022.800,000		2.782.784.500,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	970.000.000,000	100	984.671.500,000	100	750.162.700,000	100	766.022.800,000	100	2.782.784.500,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.410.000.000,000		3.461.577.000,000		2.516.035.600,000		2.571.791.300,000		3.630.716.400,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	3.410.000.000,000	100	3.461.577.000,000	100	2.516.035.600,000	100	2.571.791.300,000	100	3.630.716.400,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					150.789.582,000		153.070.300,000		155.478.400,000		157.943.900,000		160.549.600,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	25	100	100	150.789.582,000	100	153.070.300,000	100	155.478.400,000	100	157.943.900,000	100	160.549.600,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Aktif (Persentase)													
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					182.211.000,000		184.967.000,000		187.877.000,000		190.856.300,000		194.004.900,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	182.211.000,000	100	184.967.000,000	100	187.877.000,000	100	190.856.300,000	100	194.004.900,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.124.656.150,000		2.156.792.000,000		1.440.723.300,000		1.475.462.800,000		2.512.168.000,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	2.124.656.150,000	100	2.156.792.000,000	100	1.440.723.300,000	100	1.475.462.800,000	100	2.512.168.000,000	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.994.359.348.111,210		1.957.737.598.578,970		1.869.671.539.761,050		1.910.050.419.657,600		1.974.733.082.132,450	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang direferensi dari dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 periode I, indikator kinerja utama daerah (indikator tujuan daerah yang merupakan turunan dari misi) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah) yang akan disepakati kembali setelah pembahasan dengan Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel IV-2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.34-3.63	3.83-4.24	3.85-4.28	3.87-4.32	3.89-4.37	3.91-4.42	
2.	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	101.77-107.79	109.06-115.36	116.35-122.93	123.64-130.50	130.93-138.07	138.22-145.64	
3.	Rasio Gini	Rasio	0.266-0.269	0.259-0.266	0.253-0.263	0.247-0.260	0.241-0.258	0.236-0.255	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.95 -3.20	2.86 -3.11	2.78-3.03	2.69-2.94	2.60-2.85	2.51-2.76	
5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	26.44-27.61	26.78-27.80	27.12-27.80	27.46-28.19	27.80-28.38	27.99-28.57	
6.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	16,07	16,32	16,57	16,82	17,07	17,57	
7.	Nilai PDRB ADHB	Milyar Rupiah	60.416,54	64.186,36	67.956,18	71.726,00	75.495,82	79.265,64	
8.	Persentase Desa Mandiri	%	49,64	51,98	54,32	56,65	58,99	61,33	
9.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Milyar Rupiah	6.088,00	6.305,33	6.522,66	6.739,99	6.957,32	7.174,65	
10.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.33	0.33-0.35	0.35-0.37	0.37-0.39	
11.	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur	%	48,25	49,59	50,93	52,27	53,61	54,92	
12.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	3,48	3,51	3,53	3,55	3,58	3,60	
13.	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,41	82,92	83,44	83,95	84,47	84,98	
14.	Rasio konektifitas	Rasio	41,83	43,47	45,10	46,73	48,37	50,00	
15.	Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB	%	0,594	0,597	0,600	0,602	0,605	0,608	
16.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	61,00	63,12	65,24	67,36	69,48	71,60	
17.	PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Milyar Rupiah	16.392,99	16.810,20	17.227,42	17.644,64	18.061,85	18.479,07	
18.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,19	7,70	7,21	6,71	6,22	5,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
19.	Indeks resiko bencana (IRB)	Indeks	154,87	154,53	154,20	153,87	153,53	153,20	
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,32	69,59	68,86	70,12	70,39	70,66	
21.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	91,14	91,64	92,14	92,64	93,14	93,64	
22.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	29,57	29,97	30,37	30,77	31,25	32,81	
23.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	14,37	17,03	19,69	22,34	25	31,25	
24.	Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
25.	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	%	30	30	30	40	50	60	
26.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina	%	77,13	79,56	82,00	84,43	86,86	89,29	
27.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	
28.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Indeks	73.57-73.99	74.00-74.42	74.44-74.85	74.87-75.28	75.30-75.91	75.93-76.34	
29.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.90-13.04	13.02-13.16	13.15-13.29	13.27-13.41	13.39-13.53	13.51-13.65	
30.	Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun	Tahun	8.82-8.93	9.05-9.16	9.28-9.39	9.51-9.62	9.74-9.85	9.97-10.08	
31.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.71-75.22	74.21-75.67	74.71-76.12	75.21-76.56	75.71-77.01	76.21-77.46	
32.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	20,38	19,36	18,34	17,32	16,30	15,28	
33.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	9.20-9.51	8.92-9.25	8.65-8.98	8.39-8.73	8.13-8.48	7.87-8.25	
34.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	%	36,6	40,03	43,47	46,9	50,33	53,76	
35.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	3,36	4,25	5,13	6,02	6,91	7,8	
36.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,495	0,490	0,485	0,480	0,470	0,450	
37.	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
38.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,20	75,30	75,40	75,50	75,60	75,70	
39.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	1,8	1,9	2	2,1	2,2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
40.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
41.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	81,359	82,151	82,551	82,739	82,950	83,229	
42.	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	74	74,78	75,55	76,33	77,1	77,88	
43.	Indeks Sistem Merit	Indeks	263	267	270	274	275	280	
44.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,00	51,88	53,75	55,63	57,50	59,38	
45.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24	
46.	Tingkat Inflasi	%	2.5 -3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	2.5-3.0	
47.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.10-0.11	0.12-0.13	0.13-0.14	0.13-0.15	0.14-0.17	0.15-0.18	
48.	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
49.	Persentase Pencapaian Aksi HAM	%	75,5	76,13	76,75	77,38	78	78,63	

Tabel IV-3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 s.d 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	90,75	93,95	94,45	94,95	95,45	95,95	96,45	
2	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	78	79,14	80,92	82,70	84,48	86,26	88,04	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,49	2,40	2,46	2,51	2,57	2,62	2,67	
4	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	0	58,56	60,06	61,60	63,17	64,78	66,43	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	97,21	98	98	98	98	98	98	
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	5	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah Kematian Balita	Orang	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD	%	63,96	68,17	69,22	70,28	71,33	72,38	73,43	
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP	%	63,10	67,48	68,58	69,67	70,77	71,86	72,96	
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	52,46	58,97	60,60	62,23	63,85	65,48	67,08	
7	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	58,92	64,14	65,44	66,75	68,05	69,35	70,66	
8	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD	%	54,93	56,34	56,70	57,05	57,41	57,76	58,11	
9	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP	%	48,83	54,87	56,38	57,89	59,40	60,91	62,42	
10	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SD	%	52,46	54,70	56,83	58,96	61,08	63,21	65,34	
11	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SMP	%	34,28	36,04	36,48	36,93	37,37	37,81	38,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
12	Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	5,68	5,98	6,21	6,46	6,61	7,36	8,11	
13	Persentase Penanganan Konflik SARA	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,60	65,70	65,80	65,90	66,00	66,10	66,20	
15	Indeks Kabupaten/ Kota Zakat	Indeks	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	32,99	47,99	54,99	58,74	62,50	66,25	70,00	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	22,41	22.70-23.34	23.51-24.15	24.32-24.96	25.13-25.77	25.94-26.58	26.75-27.39	
2	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	%	5,10	5,17	5,22	5,27	5,31	5,36	5,41	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,89	82,41	82,92	83,44	83,95	84,47	84,98	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,13	68,5	69,1	69,7	70,3	70,9	71,5	
5	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0	2,27	2,95	3,64	4,32	5,00	5,57	
6	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,79	1,85	1,91	1,98	2,08	2,19	2,31	
7	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%		0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	
8	Jumlah IKM Bersertifkat Halal	IKM	26	31	36	41	46	51	56	
9	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi / Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	43,61	45	45,40	45,80	46,19	46,59	46,99	
10	Rasio Kewirausahaan	Persentase	7,22	12,58	12,73	12,88	13,03	13,18	13,29	
11	Angka Ketergantungan	%	47,03	50	49,5	49	48,5	48	47,5	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)		90	90,375	90,75	91,125	91,5	91,75	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,88	88	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,42	3,47	3,51	3,56	3,61	3,65	3,70	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Nilai Akip Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Indeks	73,35	75	78	80	82	84	85	
2	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui	Lembaga	13	17	20	22	26	30	33	
3	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	24,97	30	35	40	45	50	55	
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI (APS)	%	91,47	92,89	94,31	95,74	97,16	98,58	100	
5	Persentase pengembangan dan sastra	%	0	10	15	18	20	23	25	
6	Indeks Pemerataan Guru	%	20	30	40	45	55	60	75	
7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	153,74	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS (APS)	%	0	87,78	90,22	92,67	95,11	97,56	100	
9	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	
10	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS)	%	64,61	65,51	66,41	67,31	68,20	69,10	70	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Nilai Akip Dinas Kesehatan	Indeks	73,81	73,82	73,83	73,84	73,85	73,86	73,87	
2	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	3,43	3,46	3,50	3,50	3,52	3,56	3,58	
3	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	25	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	63,4	63,4	70	80	90	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	87	91	100	100	100	100	100	
7	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	17,4	17,4	17,4	21,74	21,74	21,74	21,74	
10	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	79,19	81,25	83,32	85,38	87,45	89,51	91,58	
11	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	83,3	70	75	80	85	90	90	
12	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	57,63	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
13	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	18,18	0	0	0	36,36	0	0	
14	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	90	90	95	95	95	95	95	
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	80,69	75	7.779	81	83	83	85	
16	Cakupan penemuan kasus TB	%	85,70	90	90	90	90	90	90	
17	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	1,48	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	8,4	
18	Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks	71,90	72,25	72,60	72,95	73,30	73,65	74,00	
2	Tingkat Kemantapan jalan	%	24,02	24,84	25,34	25,84	26,34	26,84	27,34	
3	Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum	Sambungan Rumah (SR)	16.595	16.695	16.795	16.895	16.995	17.095	17.195	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,39	1,89	2,39	2,89	3,39	3,89	4,39	
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
6	Persentase luas layanan irigasi	%	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	
7	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	35,62	38,88	42,13	45,38	48,64	51,89	55,14	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	%	34,79	35,88	47,29	53,54	59,79	66,04	72,29	
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	86,52	88,51	90,55	92,63	94,76	96,94	99,17	
10	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
11	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	%	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Nilai Akip Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	69,65	69,95	70,25	70,55	70,85	71,15	71,45	
2	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kawasan	10	1	2	2	2	2	2	
3	Persentase lokasi perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang ditangani	%	71,03	71,72	72,41	73,10	73,79	74,48	75,17	
4	pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh	Unit	24	33	35	35	35	35	35	
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Nilai Akip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	68	69	69,50	69,70	70	70,50	71	
2	Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Indeks	74,50	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	79,50	
3	Persentase Penyelenggaran tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase	84,62	84,62	86,36	86,96	87,50	88,00	88,46	
5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	53,19	57,78	60,00	62,22	64,44	66,67	68,89	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Nilai Akip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	72,45	72,48	72,48	72,49	72,49	72,50	72,50	
2	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	%	76	78	81	84	87	90	92	
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0	12	14	16	18	20	22	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0	10	12	14	16	18	20	
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	97,49	97,50	97,60	97,70	97,80	97,90	98	
8	Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	0	5	5	7	9	10	11	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	38	35	35	35	36	36	37	
2	Persentase pelaksanaan program ketenagakerjaan sesuai dengan RTK Mikro	%	0	0	30	40	50	60	70	
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Orang	10	40	80	80	80	80	80	
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	0	0	16	18	20	22	24	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berpersfektif gender dan hak anak sesuai standar	%	0	30	40	50	60	70	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0:0	19.58:19.28	18.07:17.77	17.55:17.25	16.03:15.73	15.52:15.22	14:137	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,45	12,5	13	13,5	14	14,5	15	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	0	55	58	61	64	67	70	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	0	45,70	46,04	46,38	46,72	47,06	47,40	
6	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Nilai Akip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks	76,50	76,00	76,50	77,00	77,25	77,50	78,00	
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	0,69	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,98	91,67	92,33	93,00	93,67	94,33	95,00	
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	20	20	22	24	26	28	30	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Nilai Akip Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	71,9	72	72,1	72,2	72,3	72,4	72,5	
2	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Persentase RTH	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani	%	18,83	22,60	22,40	22,20	22,10	22,30	22,90	
5	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Nilai Akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	70,70	70,75	70,80	70,85	70,90	80,00	80,05	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	54,85	57,36	60,00	62,43	64,35	67,48	70,00	
3	Jumlah Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97,77	97,80	98,00	98,20	98,40	98,60	98,80	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	30	30	31	32	33	34	
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Nilai Akip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks	73,75	74,05	74,35	74,60	74,85	75,15	75,45	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	0	18,28	36,56	54,84	73,12	100	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD)	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Nilai Akip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks	67,00	69,00	70,00	70,55	71,00	71,50	72,00	
2	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	%	45	50	60	65	70	75	80	
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19)	Angka	16,1	13,4	11,6	10,3	9,4	8,8	8,5	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	%	62,63	63,86	65,09	66,32	67,54	68,77	70,00	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Nilai Akip Dinas Perhubungan	Indeks	70,30	70,50	70,70	70,90	71,10	71,30	71,50	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	6,67	10,67	19,56	28,45	37,34	46,22	60,00	
3	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	%	0	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
4	Persentase kendaraan angkutan orang/barang yang laik jalan	%	0	37,10	38,30	39,50	40,70	41,90	43,10	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Nilai Akip Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks	70,90	71,25	71,50	72,00	72,50	73,00	73,25	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	0	70	75	80	85	90	95	
3	Implementasi tata kelola SPBE	Persentase	0	50	60	70	80	90	100	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Nilai Akip Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Indeks	69,70	70,00	70,30	70,60	70,90	71,20	71,50	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	0	0	66,69	67,18	67,37	67,56	67,75	
3	Persentase UMKM yang di Kembangkan	%	0	0	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	0	0	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi	0	0	41,26	42,98	44,70	46,42	48,14	
6	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Orang	0	0	8,60	9,17	9,74	10,32	10,89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	0	0	30	32	34	36	38	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Nilai Akip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	75,10	75,15	75,50	76,00	76,25	76,50	76,75	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	70	80	85	90	93	97	100	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Investor	0	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	5.619.731	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Izin	80	83	85	87	91	93	97	
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1	1,15	1,25	1,50	1,75	2	2,2	
3	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	%	90	90	93	94	95,11	98,58	99	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,36	2,40	2,50	2,75	2,95	3,00	3,25	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Indeks	43,25	44,00	45,00	46,25	46,50	47,00	47,50	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	%	0	0	2,26	0	2,26	0	2,26	
2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	5,25	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00	
3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat	%	1,8	2,43	3,65	4,87	6,08	7,30	8,52	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	46	2,17	3,25	4,34	5,42	6,51	7,59	
5	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan	*	0	0	1	1	1	1	1	
6	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	0	2,11	2,95	3,38	3,80	4,22	4,64	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Arsip	Indeks	69,95	69,98	70	70,20	70,25	70,30	70,50	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	0	20	40	60	70	90	100	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca	Skor	65,40	66	67	70	73	75	77	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	30	35	40	45	50	55	60	
2	Tingkat ketersedian arsip	%	72,50	72,60	72,90	73	73,10	73,20	73,50	
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	30	35	40	45	50	55	60	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.005,989	2.021,610	2.042,840	2.063,220	2.083,830	2.104,630	2.125,640	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.350,030	8.453,310	8.880,160	8.968,080	9.018,480	9.148,980	9.240,380	
3	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	50	50	50	50	50	50	50	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Nilai Akip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Indeks	72,45	72,48	72,48	72,49	72,49	72,50	72,50	
2	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	0	0	11,76	14,12	17,65	20,00	23,53	
3	persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	0	20	30	40	0	0	
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	12,47	7,22	5	6	7	8	9	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Nilai Akip Dinas Peternakan dan Perkebunan	Indeks	71,25	71,25	71,35	71,45	71,55	71,65	71,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Nilai Akip Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks	71,90	71,95	72,00	72,50	73,00	74,00	75,00	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	0	0	87	87	87	87	87	
5	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit)	Ton/Tahun	6.556,67	6.556,67	6.556,67	6.556,67	6.556,67	6.556,67	6.556,67	
7	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	%	50	65	70	75	80	85	90	
8	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina	%	1	1	1	1	1	1	1	
9	Persentase pengawasan izin usaha pertanian	%	50	50	55	60	65	70	75	
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	0	0	5	5	5	5	5	
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang diTingkatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	%	17,08	20	20	20	20	20	20	
13	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba)	Ekor	1,296	1,145	1,145	1,145	1,144	1,145	1,145	
BB	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**									
1	Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA	%	100	100	100	100	100	100	100	
BC	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25,78	28,98	32,06	34,73	37,40	40,07	43,08	
2	Nilai Ekspor Barang	Juta Rupiah	6.502,67	6.822,41	7.142,14	7.461,88	7.781,62	8.101,35	8.421,09	
3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	6,9	6,7	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali	3	3	4	4	6	6	6	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	%	0,37	7,89	8,88	9,86	10,85	11,83	12,82	
6	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	%	57	60,83	64,67	68,50	72,33	76,17	80,00	
BD	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Nilai Akip Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	71,80	71,90	72,00	72,15	72,25	72,35	72,45	
2	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	%	1	1	1	1	1	1	1	
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Nilai Akip Pemerintah Daerah	Indeks	64,07	65	66,5	68	70,01	70,1	71	
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	
3	Persentase Capaian SPM	%	92,03	92,1	92,3	92,7	93,2	93,5	95,5	
4	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	%	80	82	84	86	88	89	90	
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,26	43,28	43,30	43,32	43,35	43,40	45	
6	Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Skor	2,77	2,79	2,80	2,83	2,85	2,87	2,89	
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Nilai Akip Sekretariat DPRD	Indeks	70,80	71,00	71,20	71,40	71,60	71,80	72,00	
2	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	85,33	87,00	88,67	90,34	92,01	93,68	95,35	
3	Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi perda	%	80,00	81,67	83,33	85,00	86,67	88,33	90,00	
BG	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	24,37	24,87	25,37	25,87	26,37	26,87	27,37	
2	Nilai Akip Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks	75,40	78,50	81,60	84,70	87,80	90,90	94,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BH	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Nilai Akip Badan Pendapatan Daerah	Indeks	71,05	71,50	71,80	72,00	72,50	72,80	73,00	
2	Nilai Akip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks	66	68	70	71	72	73	74	
3	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	34,15	49,27	40	40	40	40	40	
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9,03	11,94	12,23	12,53	12,83	13,14	13,46	
6	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	70	75	80	100	100	100	100	
7	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40,28	48,22	50	52	54	56	58	
8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	87,87	80	85	90	95	95	95	
9	Persentase silpa terhadap APBD	%	0,48	1,64	2	2	2	2	2	
10	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	6,88	5	5	5	5	5	5	
BI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Nilai Akip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks	72,45	74	75	76	77	78	79	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	0	25	25	25	25	25	
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	0	0	80	80	80	80	80	
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	0	0	25	25	25	25	25	
5	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	0	0	100	100	100	100	100	
BJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	0	0	25	25	25	25	25	
2	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	0	0	25	25	25	25	25	
BK	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BL	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Nilai Akip INSPEKTORAT	Indeks	79	80	81	82	84	85	88	
2	Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB	%	0	64,5	64,4	66,7	77,8	88,9	100	
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT	%	0	70	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	0	70	70	80	85	90	95	
5	Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI	%	0	27,6	47,6	66,7	76,2	85,7	100	
BM	**7.01 - KECAMATAN**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Kunto Darussalam	Indeks	85,91	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Rambah	Indeks	80,20	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bangun Purba	Indeks	79,81	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Kepenuhan Hulu	Indeks	84,50	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Rambah Hilir	Indeks	85,70	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bonai Darussalam	Indeks	76,95	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Indeks	85,10	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Rambah Samo	Indeks	88	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Tambusai	Indeks	81,50	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Tandun	Indeks	86,36	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Kabun	Indeks	85,00	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Rokan IV Koto	Indeks	83,03	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Pendalian IV Koto	Indeks	83,08	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Kepenuhan	Indeks	98,10	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Ujung Batu	Indeks	97,13	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Tambusai Utara	Indeks	80,14	93,25	93,60	93,95	94,30	94,65	95,00	
17	Nilai Akip Kecamatan Bangun Purba	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
18	Nilai Akip Kecamatan Pendalian IV Koto	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
19	Nilai Akip Kecamatan Kepenuhan Hulu	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
20	Nilai Akip Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
21	Nilai Akip Kecamatan Bonai Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
22	Nilai Akip Kecamatan Tambusai Utara	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
23	Nilai Akip Kecamatan Rambah Hilir	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
24	Nilai Akip Kecamatan Rambah Samo	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
25	Nilai Akip Kecamatan Tandun	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
26	Nilai Akip Kecamatan Kabun	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
27	Nilai Akip Kecamatan Ujung Batu	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
28	Nilai Akip Kecamatan Kunto Darussalam	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
29	Nilai Akip Kecamatan Kepenuhan	Indeks	67	67,2	67,7	67,95	68,75	69,65	69,95	
30	Nilai Akip Kecamatan Rokan IV Koto	Indeks	67	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
31	Nilai Akip Kecamatan Rambah	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
32	Nilai Akip Kecamatan Tambusai	Indeks	67,00	67,20	67,70	67,95	68,75	69,65	69,95	
BN	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Nilai Akip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks	70,14	71	72	73	74	75	76	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	25	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 ditentukan oleh komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi Perangkat Daerah dalam mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk ***Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan***.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu menuntut pentingnya keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi antara para pelaku pembangunan didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu yang akan ditetapkan nantinya ini harus didukung oleh penjabaran yang jelas mengenai manajemen risiko dan sumber pendanaan yang terukur untuk melaksanakan rencana pembangunan. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan kaidah pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan menjadi bagian dari rencana yang komprehensif dan terintegrasi.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan nantinya, akan menjadi pedoman dalam beberapa hal, antara lain:

1. Acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tahunan yang berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Acuan dalam pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tahunan serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Roka Hulu.
3. Acuan dalam pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai Visi dan Misi daerah.

4. Acuan dalam penjaminan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara fungsi pemerintahan daerah.
5. Menjadi pedoman bagi penentu kebijakan pembangunan dan memastikan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Acuan dalam pelaksanaan dan penerapan Sistem Insentif. Sistem insentif diterapkan dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan program, baik dalam bentuk regulasi, dukungan finansial, atau kebijakan khusus.
7. Dalam perjalanan pelaksanaannya, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan, dan terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dokumen RPJMD perlu diselaraskan dengan dokumen perencanan daerah lainnya. Proses sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD penting dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian alokasi anggaran dan rencana prioritas baik yang sudah tercapai atau belum.
9. Kerangka pengendalian yang didalamnya terdapat tata cara evaluasi dan pemantauan yang terintegrasi diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
10. Pelaksanaan komunikasi publik dalam penyusunan, evaluasi, maupun pelaksanaan RPJMD baik penggunaan media sosial, forum diskusi, atau musyawarah masyarakat untuk mensosialisasikan program-program dalam RPJMD guna meningkatkan partisipasi publik dan sebagai mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan.

5.2 Kaidah Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tidak akan tercapai tanpa dukungan pembiayaan/ dana. Sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud dapat berupa dana dari APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Rokan Hulu. Selain sumber yang dimaksud, dimungkinkan pula mendapatkan pembiayaan pembangunan menggunakan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sumber pembiayaan baru lainnya tentu sangat bergantung pada pelbagai upaya untuk mencari sumber pemasukan dari berbagai aktivitas ekonomi yang ada sesuai potensi daerah. Dengan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak baik dari sisi nilai tambah, serapan tenaga kerja, maupun pajak. Optimalisasi sumber pembiayaan baru ini juga sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan para pemangku kepentingan, termasuk elemen masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, adanya

kesepemahaman, partisipasi, dan kolaborasi yang sinergis diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pembiayaan pembangunan yang ada dalam dokumen perencanaan daerah bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sumber pembiayaan baru yang dapat dilakukan antara lain adalah pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), partisipasi swasta dalam proyek strategis daerah, dan pengembangan sumber pendapatan daerah melalui inovasi layanan publik dan pengembangan sektor-sektor unggulan.

5.3 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Pelaksanaan dan implementasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tentu akan menghadapi hambatan yang pada akhirnya mengganggu ketercapaian RPJMD. Oleh karena itu, penting untuk kemudian menjamin keberlangsungan dan tercapainya keberhasilan rencana pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun *framework* manajemen risiko sehingga dapat mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Manajemen risiko merupakan suatu upaya sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko yang akan datang. Manajemen risiko ini perlu dibangun atas dasar rasionalitas sehingga memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi pelaksana RPJMD. Manajemen risiko merupakan suatu proses rangkaian non-linier, yaitu dapat memberikan umpan balik (feedback) di setiap tahapannya. Hal ini dilakukan karena beragam ketidakpastian di masa depan yang membutuhkan upaya-upaya adaptasi (dan penyesuaian) di setiap tahapan.

Secara umum, dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara penentuan strategi penanganan, yaitu menerima risiko, mentransfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Tentu pilihan yang diambil bisa merupakan gabungan strategi, selain bergantung pada jenis risiko yang dihadapi/ akan dihadapi. Manajemen risiko dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Dari sekian banyak indikator makro pembangunan daerah permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu masih menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu masih terbilang cukup tinggi walaupun sudah berada di angka satu digit, dimana pada tahun 2024 berada pada angka 9,62 persen. Tingkat kemiskinan ini dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang masih cukup tinggi.

Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan membuat pendapatan mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Selain itu, kualitas pendidikan yang belum merata, terbatasnya lapangan kerja formal, serta masih adanya kasus stunting dan gizi buruk menjadi faktor risiko yang dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, internet, dan akses jalan yang belum optimal juga membatasi peluang ekonomi masyarakat.

Dalam periode RPJMD ini, pemerintah daerah menerapkan manajemen risiko sebagai upaya dalam rangka pendekatan pengentasan kemiskinan dengan memperkuat penciptaan ekonomi lokal, memutakhirkan data kemiskinan, menekan risiko sosial seperti stunting, serta meningkatkan respons cepat saat bencana atau guncangan ekonomi terjadi. Peningkatan keterampilan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan bantuan sosial tepat sasaran menjadi bagian dari upaya mitigasi dan respons. Pemulihan ekonomi keluarga miskin dilakukan melalui pemberian modal usaha, pendampingan, dan rehabilitasi infrastruktur desa terdampak. Melalui manajemen risiko ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan langkah preventif, mitigatif, dan responsif untuk mengendalikan potensi peningkatan kemiskinan.

Pendekatan manajemen risiko ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan secara bertahap, serta meningkatkan kualitas hidup warga Rokan Hulu secara berkelanjutan. Namun dilain pihak, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dan membutuhkan dukungan sumber daya dari berbagai pihak termasuk pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat agar target pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2030 pada penurunan angka kemiskinan menjadi 7,87 - 8,25 persen tercapai.

5.4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini memastikan bahwa rencana yang telah disusun baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diimplementasikan sesuai jalur, mencapai sasaran, dan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

Pengendalian (atau monitoring) adalah fungsi manajerial yang berfokus pada pengawasan dan tindakan korektif secara berkala selama pelaksanaan rencana berlangsung. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan, program, dan proyek berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan.

Aspek-aspek utama dalam pengendalian meliputi antara lain Pemantauan Kemajuan Fisik dan Keuangan, Identifikasi Dini Permasalahan dan Tindakan Korektif dalam rangka mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi penyimpangan agar tujuan tetap dapat tercapai.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memainkan peran penting, memastikan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola yang baik.

Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis dan objektif terhadap hasil (output), dampak (impact), dan keberhasilan (outcome) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan pada titik waktu tertentu seperti akhir tahun anggaran (evaluasi tahunan), tengah periode RPJMD (evaluasi tengah periode), atau akhir periode RPJMD (evaluasi akhir periode).

Tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai Relevansi apakah tujuan dan desain program masih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk menilai efisiensi apakah sumber daya (dana, waktu, sumber daya manusia) digunakan secara optimal untuk mencapai hasil. Selanjutnya untuk menilai efektivitas yakni sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Disamping itu juga untuk menilai keberlanjutan (sustainability) apakah hasil program atau proyek dapat memberikan manfaat jangka panjang setelah intervensi selesai. Dan terakhir adalah untuk menilai dampak apakah terjadi perubahan positif atau negatif yang dihasilkan oleh suatu program/proyek terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Hasil evaluasi menjadi umpan balik (feedback) yang sangat berharga. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya (seperti RPJMD dan RKPD) atau untuk melakukan penyesuaian kebijakan dalam periode berjalan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan dua proses yang saling melengkapi, dimana pengendalian bersifat forward-looking dan fokus pada proses dan tindakan korektif segera, sedangkan evaluasi bersifat backward-looking dan fokus pada penilaian hasil, dampak, dan pembelajaran.

Melalui sinergi kedua proses ini, akuntabilitas pemerintah daerah diharapkan dapat ditingkatkan, kualitas perencanaan masa depan diperbaiki, dan efektivitas penggunaan anggaran publik dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

5.5 Kesimpulan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 diarahkan

sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara simultan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah.

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 yang disusun ini merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. RPJMD ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencara Strategis Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Rokan Hulu setelah proses penyusunannya dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008